PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

I. **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024**

II. **PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024**

III. **LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

IV. **LAMPIRAN II : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

V. **LAMPIRAN III : RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
    2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
    3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
    4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
    5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
    6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
    7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
9. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
13. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
16. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
20. Sekretariat Daerah Provinsi Bali
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
24. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
27. Badan Penghubung Provinsi Bali
28. Inspektorat Provinsi Bali
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI

XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH

XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN

XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM YANG DIRENCANAKAN

XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN

XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-4199 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan umum APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tetang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerag tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan Tertentu Lokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 46);
23. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 16 Oktober 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI BALI,

Ketua,

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.

Wakil Ketua,

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.

Wakil Ketua,

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI

Wakil Ketua,

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Pj. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota Se- Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se- Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2024
I.	**TUJUAN EVALUASI**	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan: A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. kepentingan umum; C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	
II.	**KEBIJAKAN UMUM**	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314, dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun	

Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern (APIP) daerah	B.31.900/4977/PADFE/BPKAD	1 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.00.900/35782/Setda	5 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	B.00.100.3.7/36880/SETDA B.08.900/19177/KEU/SETWAN	12 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

4.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	B.00.100.3.7/36881/SETDA B.08.900/19177/KEU/SETWAN	12 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.00.100.3.2/37330/SETDA	14 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	B.00.900.1.1/40147/Setda B.08.900/20577/KEU/DPRD	30 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi	B.00.900.1.1/41170/Setda	3 September 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan

	jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk: 1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; 2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan 3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. **A. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD** Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.	

	Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,	

	kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya. Selanjutnya, Penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1)	

	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.l.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Bali berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 202l tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan butir C.2.a.2).b)	

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. e. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. f. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum	

	Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan Belanja Daerah a. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana maksud butir C.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan *stunting* dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran	

	pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

	f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

III.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**	
	A. Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp6.354.200.071.179,00 bertambah Rp515.620.792.421,00 menjadi Rp6.869.820.863.600,00 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut: Tabel 2 Pendapatan Daerah	

Uraian	Perubahan APBD TA 2023			APBD TA 2024			Target Perubahan APBD TA 2024	Selisih Target APBD TA 2024 dan Target Perubahan APBD TA 2024	Selisih Target APBD TA 2024 dan Target Perubahan APBD TA 2024	Target Perubahan APBD TA 2024 dan Realisasi Semester I APBD TA 2024
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=9:5	11=8:6
PENDAPATAN DAERAH	7.248.953.175.947,00	6.768.699.641.073,02	93,37	6.354.200.071.179,00	4.070.975.352.511,22	64,07	6.869.820.863.600,00	515.620.792.421,00	8,11	59,26
Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153,00	4.623.648.871.938,02	91,71	4.074.449.341.179,00	2.881.810.613.278,22	70,73	4.590.033.889.600,00	515.584.548.421,00	12,65	62,78
Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	4.048.571.031.769,00	125,00	3.239.223.722.629,00	2.262.168.203.049,00	69,84	3.685.688.320.803,00	446.464.598.174,00	13,78	61,38
Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	15.295.499.618,00	28,63	59.213.399.000,00	11.433.058.734,00	19,31	318.677.924.680,00	259.464.525.680,00	438,19	3,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57	143.435.645.800,00	197.369.947.623,03	137,60	197.369.947.623,00	53.934.301.823,00	37,60	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	940.941.381.702,00	401.662.321.228,70	42,69	632.576.573.750,00	410.839.403.872,19	64,95	388.297.696.494,00	244.278.877.256,00	38,62	105,81
Pendapatan Transfer	2.152.312.055.794,00	2.139.850.791.635,00	99,42	2.274.042.730.000,00	1.189.164.939.233,00	52,29	2.274.042.730.000,00	0,00	0,00	52,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.152.312.055.794,00	2.139.850.791.635,00	99,42	2.274.042.730.000,00	1.189.164.939.233,00	52,29	2.274.042.730.000,00	0,00	0,00	52,29
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	5.708.000.000,00	0,00	0,00	5.744.244.000,00	36.244.000,00	0,63	0,00
Pendapatan Hibah	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	5.708.000.000,00	0,00	0,00	5.744.244.000,00	36.244.000,00	0,63	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 3

Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA 2024 dan Target Perubahan APBD TA 2024	Target Perubahan APBD TA 2024 dan Realisasi Semester I APBD TA 2024
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan Daerah	7.248.953.175.947,00	6.768.699.641.073,02	93,37	6.354.200.071.179,00	4.070.975.552.511,22	64,07	6.869.820.863.600,00	515.620.792.421,00	8,11	59,26
Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153,00	4.623.648.871.938,02	91,71	4.074.449.341.179,00	2.881.810.613.278,22	70,73	4.590.033.889.600,00	515.584.548.421,00	12,65	62,78
Pajak Daerah	3.238.968.237.629,00	4.048.571.031.769,00	125,00	3.239.223.722.629,00	2.262.168.203.049,00	69,84	3.685.688.320.803,00	446.464.598.174,00	13,78	61,38
Retribusi Daerah	53.416.681.500,00	15.295.499.618,00	28,63	59.213.399.000,00	11.433.058.734,00	19,31	318.677.924.680,00	259.464.525.680,00	438,19	3,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	808.120.019.322,00	158.120.019.322,32	19,57	143.435.648.800,00	197.369.947.623,03	137,60	197.369.947.623,00	53.934.301.823,00	37,60	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	940.941.381.702,00	401.662.321.228,70	42,69	632.576.573.750,00	410.839.403.872,19	64,95	388.297.696.494,00	(244.278.877.256,00)	(38,62)	105,81

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp4.074.449.341.179,00 bertambah Rp515.584.548.421,00 menjadi Rp4.590.033.889.600,00 atau 66,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.074.449.341.179,00 atau 64,12% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.354.200.071.179,00, mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun

		Anggaran 2024 Rp3.494.115.418.572,00 atau 62,43% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.596.479.850.692,00 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.041.446.320.153,00 atau 69,55% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.248.953.175.947,00, Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 Rp2.881.810.613.278,22 atau 70,73% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.074.449.341.179,00; b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp4.623.648.871.938,02 atau 91,71% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00; dan c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp3.850.887.413.337,35 atau 110,21% dari total realisasi PAD dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.494.115.418.572,00.	

		Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut: a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp3.239.223.722.629,00 bertambah Rp446.464.598.174,00 menjadi Rp3.685.688.320.803,00 atau 53,65% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp1.495.975.827.460,00 bertambah Rp74.013.165.840,00 menjadi Rp1.569.988.993.300,00; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp974.148.848.420,00 bertambah Rp256.086.265.980,00 menjadi Rp1.230.235.114.400,00;	Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) semula Rp414.313.697.546,00 bertambah Rp113.412.378.154,00 menjadi Rp527.726.075.700,00; d) Pajak Air Permukaan semula Rp1.150.485.000,00 bertambah Rp2.952.788.200,00 menjadi Rp4.103.273.200,00; dan e) Pajak Rokok Rp353.634.864.203,00. 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp59.213.399.000,00 bertambah Rp259.464.525.680,00 menjadi Rp318.677.924.680,00 atau 4,64% dari total pendapatan daerahdalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: a) Retribusi Jasa Umum semula Rp120.000.000,00 bertambah Rp293.979.071.750,00 menjadi Rp294.099.071.750,00; b) Retribusi Jasa Usaha semula Rp55.093.399.000,00 berkurang Rp34.514.546.070,00 menjadi Rp20.578.852.930,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.000.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan	Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertum buhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menetapkan PBBKB untuk Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen), serta PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).s) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:	

		a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan paling lama 4 Januari 2024; dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lama 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024; sebagaimana maksud butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan: a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;	Penganggaran jenis pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		b. kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan d. pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir 1)a) harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target PKB dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok juga pada butir a.1).e) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target	Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a. 1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

		Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian daerah provinsi untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

	Kesehatan Masyarakat, dan butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran target pendapatan pajak rokok sebagaimana tercantum pada butir 1)e) harus menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024, Rp353.634.864.203,00. b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp143.435.645.800,00 bertambah Rp53.934.301.823,00 menjadi Rp197.369.947.623,00; atau 2,87% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah	Penganggaran target pendapatan pajak rokok sebagaimana tercantum pada butir 1)e) telah sesuai dengan alokasi pajak rokok yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024, Rp353.634.864.203,00.

		Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: 1) PT. BPD Bali Rp195.334.517.043,00 atau 30,29% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp644.912.000.000,00; 2) PT. Puri Raharja semula Rp618.255.179,00 atau 7,08% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp8.736.000.000,00; dan 3) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp232.975.188,00 atau 20,26% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1990 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp1.150.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, terhadap BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)* dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.417.175.401,00 atau 1,00% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp142.000.000.000,00.	Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

		Selain itu, terhadap BUMD yang belum memberikan bagian laba dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu: 1) Perusahaan Daerah Provinsi Bali dari Tahun Anggaran 1974 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp5.282.769.658,00; dan 2) PT. Jasamarga Bali Tol dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp100.000.000.000,00; agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;	Pemerintah Provinsi Bali saat ini masih fokus melakukan pengembangan usaha atau diversifikasi terhadap Perumda Provinsi Bali serta melakukan upaya peningkatan kinerja PT. Jasamarga Bali Tol, yang masih difokuskan pada percepatan pengembalian Break Even Poin (BEP) selama 37 Tahun, sehingga sampai dengan saat ini semua pemegang saham belum mendapatkan bagian laba atas penyertaan modal tersebut

	2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp632.576.573.750,00 berkurang Rp244.278.877.256,00 menjadi Rp388.297.696.494,00; atau 5,65% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	

		Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 Rp410.839.403.872,19 atau 64,95% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp632.576.573.750,00; 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp401.662.321.228,70 atau 42,69% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp940.941.381.702,00; dan 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp385.967.099.179,88 atau 100,64% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp383.496.351.484,00. Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

		2) Hasil Kerja Sama Daerah semula Rp253.045.440.000,00 berkurang Rp250.192.170.000,00 menjadi Rp2.853.270.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Jasa Giro semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp166.252.865,00 menjadi Rp10.166.252.865,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 4) Pendapatan Bunga semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp3.516.679.227,00 menjadi Rp3.517.679.227,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal	

	31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp8.999.000.000,00 menjadi Rp9.000.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula Rp1.000.000,00 bertambah Rp164.010.677,00 menjadi Rp165.010.677,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

		7) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp50.500.050.000,00 atau 0,74% dari total pendapatan daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp200.000,00 bertambah Rp15.540.725,00 menjadi Rp15.740.725,00 atau 0,0002% dari total pendapatan daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 9) Pendapatan dari Pengembalian Rp600.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	10) Pendapatan BLUD semula Rp310.778.483.750,00 berkurang Rp249.688.790.750,00 menjadi Rp61.089.693.000,00 atau 0,89% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 11) Pungutan bagi Wisatawan Asing semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp250.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12	Pungutan bagi Wisatawan Asing semula termasuk dalam jenis pendapatan hasil kerjasama daerah dan berdasarkan surat Kemendagri Nomor: 900.1.15.5/7571/Keuda, kode rekening pungutan bagi wisatawan asing diatur dalam kode rekenening tersendiri dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan Rp250.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp2.274.042.730.000,00 atau 33,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.274.042.730.000,00 atau 33,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan, sebagai berikut: a. Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2.257.170.570.000,00 atau 32,86% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp163.280.624.000,00 lebih besar Rp89.834.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Rp163.190.790.000,00;	

	2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.366.655.991.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp108.245.814.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp618.988.141.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. b. Insentif Fiskal Rp16.872.160.000,00 atau 0,2% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Insentif Fiskal Rp16.872.160.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, untuk pendapatan Insentif Fiskal disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan	Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Dana Transfer telah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

		Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain Itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sebagaimana maksud butir C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp5.708.000.000,00 bertambah Rp36.244.000,00 menjadi Rp5.744.244.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	

		Target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula Rp5.708.000.000,00 bertambah Rp36.244.000,00 menjadi Rp5.744.244.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi diprioritaskan untuk:	Pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) telah diprioritaskan untuk mendanai biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ

a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ;
b. kebutuhan tim pembina samsat tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ; dan
c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1. Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp6.917.008.137.900,00 bertambah Rp879.198.070.004,00 menjadi Rp7.796.206.207.904,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Perubahan APBD TA 2023			APBD TA 2024			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA 2024 dan Target Perubahan APBD TA 2024	Target Perubahan APBD TA 2024 dan Realisasi Semester I APBD TA 2024
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA DAERAH	7.932.885.363.158,00	6.613.668.457.677,48	83,37	6.917.008.137.900,00	3.823.928.013.024,20	55,28	7.796.206.207.904,00	879.198.070.004,00	12,71	49,05
Belanja Operasi	4.474.749.277.170,00	3.984.414.502.113,58	89,04	4.665.641.178.703,00	2.572.299.563.409,17	55,13	4.788.630.667.629,00	282.989.488.926,00	6,06	49,85
Belanja Pegawai	2.002.393.764.820,00	1.810.329.332.994,00	90,41	2.212.204.860.369,00	1.230.604.397.124,00	55,63	2.218.186.448.815,00	5.981.588.446,00	0,27	55,48
Belanja Barang dan Jasa	1.393.304.098.830,00	1.234.785.037.713,58	88,62	1.580.936.881.396,00	934.980.180.861,17	42,39	1.671.647.749.418,00	90.729.198.022,00	7,40	39,38
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	2.525.000.000,00	0,00	0,00	2.525.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.068.846.415.720,00	899.081.861.849,00	84,12	920.745.066.936,00	606.884.885.424,00	61,32	1.186.023.472.396,00	196.278.405.460,00	19,85	51,17
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	0,00	0,00	100,00
Belanja Modal	1.409.820.879.741,00	920.004.818.152,90	65,27	763.764.271.348,00	218.785.414.668,03	28,65	796.881.810.890,00	32.797.539.182,00	4,29	27,47
Belanja Modal Tanah	177.379.673.569,00	154.313.167.813,00	87,01	2.460.000.000,00	0,00	0,00	4.160.000.000,00	700.000.000,00	20,23	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.939.739.226,00	140.279.580.622,90	67,46	191.583.448.092,00	29.800.997.899,00	19,69	192.898.799.128,00	0,00	0,00	16,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.997.200.664,00	561.017.284.271,00	80,85	448.619.598.909,00	142.884.303.887,03	31,76	443.597.230.954,00	0,00	0,00	32,14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.674.962.322,00	232.482.964.088,00	84,94	106.802.788.517,00	34.493.253.978,00	32,29	109.944.044.467,00	0,00	0,00	31,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	85.769.277.740,00	31.080.821.358,00	36,88	82.901.434.000,00	11.910.229.242,00	22,81	88.101.734.001,00	0,00	0,00	21,61
Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00	893.500.000,00	99,30	889.000.000,00	24.650.000,00	2,79	890.000.000,00	0,00	0,00	2,90
Belanja Tidak Terduga	15.828.486.983,00	9.819.788.187,00	60,14	92.208.727.068,00	2.489.434.041,00	4,77	92.208.727.068,00	0,00	0,00	4,77
Belanja Tidak Terduga	15.828.486.983,00	9.819.788.187,00	60,14	92.208.727.068,00	2.489.434.041,00	4,77	92.208.727.068,00	0,00	0,00	4,77
Belanja Transfer	2.032.467.788.244,00	1.729.239.339.224,00	85,08	1.634.406.960.761,00	930.332.830.808,00	56,89	2.188.818.002.887,00	554.411.041.886,00	33,84	42,50
Belanja Bagi Hasil	1.810.092.982.734,00	1.444.364.532.968,00	79,80	1.279.176.638.480,00	648.764.335.808,00	50,72	1.821.886.080.364,00	542.709.441.884,00	42,43	35,61
Belanja Bantuan Keuangan	222.374.805.510,00	284.874.806.256,00	128,10	355.230.322.281,00	281.568.495.000,00	79,26	366.931.922.523,00	12.701.600.000,00	3,56	76,74

Tabel 5

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Jumlah APBD TA 2024 (Rp)	Jumlah Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.387.339.935.224	2.586.089.451.650	605.269.841.267	635.647.081.726	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491	3.221.702.533.376	229.093.056.948
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.406.018.883.560	1.519.095.347.148	428.727.883.186	431.998.880.205	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.746.466.546	1.951.092.197.353	116.345.730.807
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	607.676.034.860	641.651.325.312	54.256.276.544	61.978.902.144	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404	703.629.827.456	41.717.516.052
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.136.443.414	310.900.169.528	111.708.668.837	130.715.712.537	0,00	0,00	0,00	0,00	369.845.109.251	441.215.882.065	71.368.772.814
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10.967.081.776	9.804.854.596	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967.081.776	9.804.854.596	(1.162.227.180)
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	78.781.439.194	76.682.178.012	3.990.446.100	4.387.078.600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.741.885.294	81.009.283.612	1.267.398.318
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	28.790.392.620	28.353.880.254	6.606.269.600	6.996.958.300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396.622.220	34.952.518.554	(444.103.666)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	855.908.896.374	1.022.748.700.796	118.573.147.320	126.621.633.370	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694	1.149.370.334.166	174.886.290.472
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	33.603.807.372	34.089.264.819	673.428.800	1.266.373.800	0,00	0,00	0,00	0,00	34.277.236.172	35.355.638.619	1.078.402.747
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.922.636.860	1.923.688.260	19.052.000	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.690.860	1.941.688.260	(2.600)
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8.474.729.550	8.312.773.610	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474.729.550	8.312.773.610	(161.955.940)

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Jumlah APBD TA 2024 (Rp)	Jumlah Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10.795.544.000	10.795.318.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000	10.795.318.000	(226.000)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6.067.331.501	12.469.329.001	243.782.950	229.968.880	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311.114.451	12.699.297.881	6.388.183.400
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	911.061.940	911.061.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940	911.061.940	0,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.325.277.820	20.668.230.824	814.874.400	814.894.600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140.152.220	21.482.828.424	342.673.204
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	332.121.540	332.121.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540	332.121.540	0,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	35.814.953.245	39.811.505.597	1.775.721.300	1.708.963.600	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545	41.520.469.197	3.929.814.612
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	53.324.467.484	55.174.150.438	114.713.903.270	119.331.507.070	0,00	0,00	0,00	0,00	168.038.370.754	174.505.487.508	6.467.086.754
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	25.615.211.130	25.490.528.961	133.808.900	760.700.390	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749.020.030	26.251.229.311	502.209.281
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	17.337.483.860	17.467.233.543	1.076.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338.529.860	17.467.233.543	128.703.683
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	61.736.664.400	65.936.664.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400	65.936.664.400	4.200.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	441.297.200	416.841.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200	416.841.540	(24.455.660)
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	469.557.380	421.931.780	44.500.000	44.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	514.057.380	466.431.780	(47.625.600)
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	577.565.398.692	727.338.676.183	55.000.000	2.347.205.100	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692	729.685.881.283	152.065.482.591
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	527.473.360	527.473.360	100.000.000	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	627.473.360	627.473.360	0,00

Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Jumlah APBD TA 2024 (Rp)	Jumlah Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)			
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	642.907.040	661.907.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.907.040	661.907.040	18.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan	177.254.870.655	181.058.666.654	7.675.132.960	8.126.744.860	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.615	189.195.422.514	4.265.426.899
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	20.047.622.922	21.296.138.315	1.722.490.800	1.786.108.800	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761.114.722	23.086.237.115	1.325.122.388
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	14.767.698.297	15.666.202.664	347.957.700	565.852.200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.655.997	16.234.155.864	1.118.499.867
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	68.754.444.219	67.762.808.091	2.565.670.200	2.565.670.200	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320.114.419	70.328.478.291	(991.636.128)
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	41.591.262.690	43.531.961.025	2.973.119.060	3.035.557.060	0,00	0,00	0,00	0,00	44.564.382.750	46.570.568.085	2.006.185.345
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	190.499.500	190.499.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500	190.499.500	0
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19.279.469.080	19.957.550.566	44.223.000	167.852.400	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323.692.080	20.125.404.266	801.712.186
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.598.957.140	2.624.532.380	10.672.100	10.672.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.660.240	2.635.204.480	25.545.240
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24.854.500	24.854.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854.500	24.854.500	0
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	379.710.219.911	407.621.828.726	9.905.070.336	14.005.051.336	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.290.147	421.626.879.962	32.011.589.815
Sekretariat Daerah	171.052.457.280	199.709.744.553	4.039.272.036	12.169.039.036	0,00	0,00	0,00	0,00	175.092.729.316	211.878.772.589	36.786.044.273
Sekretariat DPRD	208.656.863.621	207.912.084.173	3.565.798.200	1.836.032.200	0,00	0,00	0,00	0,00	214.522.660.821	209.748.106.373	(4.774.554.458)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	422.744.695.776	327.068.193.654	9.583.242.197	9.909.256.798	62.772.177.065	52.205.727.065	1.625.406.960.761	2.185.818.003.657	2.140.507.075.803	2.575.001.180.177	427.494.104.375
Perencanaan	21.871.777.384	22.045.268.991	2.859.507.496	2.623.716.496	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731.284.882	24.679.085.489	(52.199.392)
Keuangan	202.521.728.920	204.216.640.529	8.135.579.499	4.567.928.500	62.772.177.065	52.205.727.065	1.625.406.960.761	2.185.818.003.657	1.905.836.446.245	2.449.810.296.764	543.982.852.518
Kepegawaian	183.559.991.712	75.056.683.765	760.727.000	1.468.267.000	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320.728.712	76.555.050.765	(107.765.677.947)
Pendidikan dan Pelatihan	1.089.606.560	1.195.592.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560	1.195.592.955	105.986.395
Penelitian dan Pengembangan	15.200.450.456	15.838.505.913	520.005.200	513.915.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.455.656	16.242.420.913	521.965.257
Pengelolaan Penghubung	5.401.140.744	5.692.421.491	317.412.000	725.309.800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.552.744	9.418.731.291	700.177.547

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut: a. SPM Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula Rp378.277.443.286 berkurang Rp15.870.662.656,00 menjadi Rp362.406.780.630 atau 18,57% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.951.092.197.353,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah semula Rp358.740.432.766,00 berkurang Rp15.510.657.936,00 menjadi Rp343.229.774.830,00; dan 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus semula Rp19.537.010.520,00 berkurang Rp360.004.720,00 menjadi Rp19.177.005.800,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	

	yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula Rp2.922.924.300,00 bertambah Rp50.918.700,00 menjadi Rp2.973.843.000,00 atau 0,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp703.629.827.456,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Rp567.961.100,00; dan 2) Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Rp2.405.881.900,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp57.927.759.504,00 bertambah Rp15.498.534.477,00 menjadi Rp73.426.293.981,00 atau 16,64% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp441.213.882.065,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota semula Rp45.571.470.144,00 bertambah Rp11.631.468.953,00 menjadi Rp57.202.939.097,00; dan 2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota semula Rp12.356.289.360,00 bertambah Rp3.867.065.524,00 menjadi Rp16.223.354.884,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp792.663.040,00 berkurang Rp12.227.380,00 menjadi Rp780.435.660,00 atau 7,96% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp9.804.854.396,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi Rp293.040.400,00; dan 2) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi semula Rp499.622.640,00 berkurang Rp12.227.380,00 menjadi Rp487.395.260,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula Rp18.887.486.279,00 atau 23,32% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp81.009.253.612,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar kegiatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp18.887.486.279,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Trantibumlinmas, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.6) dan Tabel E.l2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula Rp5.093.972.100,00 bertambah Rp48.000.000,00 menjadi Rp5.141.972.100,00 atau 14,71% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp34.952.518.554,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Rp2.318.564.200,00; 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rp1.402.760.000,00; 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Rp1.024.031.800,00; 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti semula Rp84.199.400,00 bertambah Rp48.000.000,00 menjadi Rp132.199.400,00; dan 5) Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi Rp264.416.700,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Sosial, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah: a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: 1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%; 2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%; 3) rasio gini 0,374-0,377; dan 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%. b. peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02; dan 2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang	

		diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi: a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp57.930.634.289,00 bertambah Rp16.022.753.202,00 menjadi Rp73.953.387.491,00 atau 0,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yaitu: 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan	

	2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;	

	5) Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk itu Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas	

	pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yaitu terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp952.256.082.555,00 bertambah Rp41.661.493.766,00 menjadi Rp993.917.576.321,00 atau 12,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu: 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;	

		2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN3 akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, sebagai berikut: 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;	

	4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp564.056.959.776,00 bertambah Rp151.918.286.674,00 menjadi Rp715.975.246.450,00 atau 9,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan	

		Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu: 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN4 akan dilakukan melalui 4 (empat) PP, sebagai berikut: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	

	2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024**.** e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp239.507.573.926,00 bertambah Rp389.142.702.782,00 menjadi Rp628.650.276.708,00 atau 8,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur	

		dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Memperkuat Infrastuktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu: 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN5, akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan	

	5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp25.028.696.760,00 bertambah Rp6.869.994.940,00 menjadi Rp31.898.691.700,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yaitu: 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN6 akan dilakukan melalui 3 (tiga) PP, sebagai berikut:	

	1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp379.540.643.732,00 berkurang Rp94.196.890.903,00 menjadi Rp285.343.752.829,00 atau 3,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan	

		berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yaitu: 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut:	

		1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.	

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	73.953.387.491,00	0,95
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	0,00	0,00
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	993.917.576.321,00	12,75
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	715.975.246.450,00	9,18
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	628.650.276.708,00	8,06
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	31.898.691.700,00	0,41
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	285.343.752.829,00	3,66
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	16.034.554.298.763,00	44,66
	Total Belanja Daerah	35.903.461.096.917,00	

		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran untuk sinkronasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Bali pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023, meliputi: a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 6,5% s.d 6,9%; b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Bali sebesar 2,50% s.d 3,00%; dan c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Bali sebesar 2,10% s.d. 2,83%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,65 s.d 82,57. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Tabel. 6 dimaksud tidak sesuai dengan rekap Prioritas Nasional yang tercantum dalam SIPD RI. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyelaraskan tabel Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut dengan rekap Prioritas Nasional yang tercantum dalam SIPD RI. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tersebut guna	Tabel sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut akan diselaraskan dan disesuaikan kembali dengan rekap prioritas Nasional yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

	mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: a. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.	

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD 2024 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	159.892.717.334,00	2,05
2.	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2.720.658.689.209,00	34,90
3.	Tenaga Kerja dan Kesehatan Sosial	79.817.885.633,00	1,02
4.	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	729.695.084.783,00	9,36
5.	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	92.261.521.632,00	1,18
6.	Infrastruktur	676.872.515.874,00	8,68
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	3.337.007.793.439,00	42,80
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.796.206.207.904,00	100,00
	Total Belanja Daerah	7.796.206.207.904,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2024 dimaksud tidak sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 Perubahan KUA-Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2024 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

Tabel sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 tersebut akan diselaraskan dan disesuaikan kembali dengan tabel prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI.

	5. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran Pengendalian Inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi Rp125.190.393.528,00 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain dianggarkan pada: a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp339.310.920,00; b. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp2.943.525.640,00; c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp3.222.893.880,00; d. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp6.410.759.820,00; e. Penyediaan Makanan (Anak Terlantar) Rp349.452.600,00;	

	f. Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan Lansia) Rp82.514.600,00; g. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Rp2.476.946.220,00; h. Pemeliharaan Berkala Jalan Rp34.792.762.547,00; dan i. Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 24.236.563.540,00; agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.1.m.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan: Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula Rp1.928.891.303.434,00 atau 27,89% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.917.008.137.900,00 bertambah Rp120.836.276.047,00 menjadi Rp2.049.727.579.481,00 atau 26,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.796.206.207.904,00, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi

Tabel 8

Alokasi Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024 (Rp)	%	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	%
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	1.834.746.466.546,00	95,12	1.951.092.197.353,00	95,19
	1) Belanja Operasi:	1.406.018.583.360,00		1.519.093.347.148,00	
	a) belanja pegawai;	1.050.389.690.000,00		1.146.289.783.066,00	
	b) belanja barang dan jasa;	264.048.143.360,00		280.472.814.082,00	
	c) belanja hibah;	91.580.750.000,00		92.330.750.000,00	
	d) belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	428.727.883.186,00		431.998.850.205,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	23.242.630.688,00	1,20	23.557.630.688,00	1,15
	1) Belanja Operasi:	23.187.630.688,00		23.187.630.688,00	
	a) belanja barang dan jasa;	23.187.630.688,00		23.187.630.688,00	
	b) belanja hibah;	0,00		0,00	
	c) belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	100.000.000,00		370.000.000,00	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	0,03	627.473.360,00	0,03
	1) Belanja Operasi:	527.473.360,00		527.473.360,00	
	a) belanja barang dan jasa;	527.473.360,00		527.473.360,00	
	b) belanja hibah;	0,00		0,00	
	c) belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	100.000.000,00		100.000.000,00	
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	61.736.664.400,00	3,20	65.936.664.400,00	3,22
	1) Belanja Operasi:	61.736.664.400,00		65.936.664.400,00	
	a) belanja barang dan jasa;	8.586.664.400,00		12.586.664.400,00	

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2024 (Rp)	%	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	%
	b) belanja hibah;	53.150.000.000,00		53.350.000.000,00	
	c) belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00	
	a. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	8.538.068.440,00	0,44	8.513.613.680,00	0,42
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00	
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00	
	2) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketarampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	336.350.000,00		336.350.000,00	
	3) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00		8.009.040.280,00	
	4) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	192.678.160,00		168.223.400,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.928.891.303.434,00		2.049.727.579.481,00	
3.	Total Belanja Daerah	6.917.008.137.900,00		7.796.206.207.904,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,89%		26,29%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari

	total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk Program pada Urusan Bidang Pendidikan semula Rp1.834.746.466.546,00 bertambah Rp116.345.730.807,00 menjadi Rp1.951.092.197.353,00 atau 95,19% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam: 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp74.981.000,00 atau 0,004% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;	

	2) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp764.289.447.758,00 bertambah Rp18.712.372.011,00 menjadi Rp783.001.819.769,00 atau 38,20% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi semula Rp1.070.204.418.888,00 bertambah Rp97.633.358.796,00 menjadi Rp1.167.837.777.684,00 atau 56,98% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. b. Alokasi Anggaran Kesehatan Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp804.440.067.042,00 bertambah Rp35.920.521.050,00 menjadi Rp840.360.588.092,00 atau 12,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada: 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan semula Rp108.216.000,00 bertambah Rp205.290.000,00 menjadi Rp313.506.000,00;	

	2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp72.734.054.136,00 bertambah Rp30.178.400,00 menjadi Rp72.764.232.536,00; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula Rp554.703.400,00 berkurang Rp193.000.000,00 menjadi Rp361.703.400,00; dan 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi semula Rp588.365.607.868,00 bertambah Rp41.675.047.652,00 menjadi Rp630.040.655.520,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*: a) peningkatan skrining anemia remaja putri; b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;	

	c) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*); d) konsumsi TTD ibu hamil; e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*); j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita; 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: a) Tuberkulosis (TBC); b) *Human lmmunodeficiency Virus* (HIV); c) Malaria; d) Penyakit menular lainnya; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a) Diabetes Melitus; b) Hipertensi; c) Penyakit tidak menular lainnya;	

	5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu; c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2	

	(dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; b) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu; c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*); d) tenaga kesehatan di Labkesda; e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; f) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp8.363.189.530atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran	

		2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, butir C.1.m.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rp294.669.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp72.150.000,00; b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp77.280.000,00; dan c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp75.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp158.740.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp116.800.000,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing Sub Kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus	

		memformulasikan kembali uraian belanja pada Sub Kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan dalam dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir C.1.m.2).a) yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp514.231.800,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp412.500.000,00; 2) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.073.624.460,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang antara lain diuraikan ke	Anggaran belanja penunjang seperti belanja perjalanan dinas, makanan dan minuman, dan honorarium narasumber yang dialokasikan pada masing-masing sub kegiatan dimaksud telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil dalam mendukung capaian kinerja sub kegiatan guna Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bali.

		dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp950.884.416,00; 3) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp492.722.460,00 pada SKPD UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp372.150.016,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada Sub Kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Anggaran belanja seperti belanja bahan lainnya dan pada Jasa Tenaga Administrasi yang dialokasikan pada masing-masing sub kegiatan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil dalam mendukung capaian kinerja sub kegiatan dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bali.

c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 8 dan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	7.796.206.207.904,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	1.821.886.080.384,00
	b. belanja bantuan keuangan	366.931.922.273,00
2.	Jumlah (a+b)	2.188.818.002.657,00
3.	Selisih (1-2)	5.607.388.205.247,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.242.955.282.098,80

Tabel 10
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja Modal		796.551.810.550,00
	1) Tanah	4.160.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	182.898.799.128,00	
	3) Bangunan dan Gedung	443.597.230.954,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.944.044.467,00	
	5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	
	6) Aset lainnya	850.000.000,00	
	b. Belanja pemeliharaan	50.768.097.422,00	50.768.097.422,00
2.	a. Belanja Hibah	193.731.360.572,00	
	b. Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	c. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		1.041.051.268.544,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		13,35%

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana diamanatkan maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali semula Rp36.023.268.248,00 bertambah Rp999.395.542,00 menjadi Rp37.022.663.790,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp8.309.260.492,00 berkurang Rp526.788.021,00 menjadi Rp7.782.472.471,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp27.714.007.756,00 bertambah Rp1.526.183.563,00 menjadi Rp29.240.191.319,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:	Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	(a) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp250.232.480,00; dan (b) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah semula Rp450.060.460,00 berkurang Rp25.000.580,00 menjadi Rp425.059.880,00; belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) serta tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat sebagaimana maksud butir butir E.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) serta tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir E.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sangat mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

		Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi	

		Bali perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis *output* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang	

	dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain; dengan berpedoman pada butir E.2.c.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp185.410.335.272,00 berkurang Rp107.659.691.552,00 menjadi Rp77.750.643.720,00 atau 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan	

		Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional semula Rp364.764.280,00 berkurang Rp26.279.605,00 menjadi Rp338.484.675,00; dan 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota semula Rp467.042.440,00 bertambah Rp132.266.000,00 menjadi Rp599.308.440,00; belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk	Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 5. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran untuk TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar/Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Rp3.824.188.300,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi melalui:	

		1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;	

		5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan Pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat.	

		7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang sandang dan pangan, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya. 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.	

		Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp3.439.183.060,00 bertambah Rp385.005.240,00 menjadi Rp3.824.188.300,00 pada SKPD Sekretariat Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp312.876.576,00 berkurang Rp22.509.376,00 menjadi Rp290.367.200,00; 2) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp109.000.000,00 bertambah Rp137.925.000,00 menjadi Rp246.925.000,00; 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp838.514.000,00 bertambah Rp30.768.000,00 menjadi Rp869.282.000,00; dan 4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp219.000.000,00 bertambah Rp9.000.000,00 menjadi Rp228.000.000,00;	Sub Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dianggarkan pada RKA SKPD Dinas PMD Dukcapil, bukan pada RKA SKPD Sekretariat Daerah.

	diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada Sub Kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada Sub Kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Hal ini telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6694 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran untuk Pelaksanaan FORKOPIMDA dianggarkan Rp987.354.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan	Proporsi alokasi anggaran belanja penunjang seperti belanja perjalanan dinas, makanan dan minuman, Jasa Tenaga Administrasi telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil guna mendukung pencapaian target kinerja program/kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, yang telah direncanakan.

	APBD Tahun Anggaran 2024 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp553.056.560,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor	Penyediaan alokasi anggaran hibah kepada FKUB sebesar Rp553.056.560,00 telah mengalami peningkatan sebesar Rp203.056.560,00 dari anggaran Induk APBD TA. 2024 sebesar Rp350.000.000,00 dan telah melalui koordinasi antara SKPD leading dengan FKUB. Pada tahun-tahun mendatang akan terus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.

	903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial Rp123.323.240,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta pengelolaan perhutanan sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memuliakan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan, berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.434.674.318.311,00 atau 66,91% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di	

	luar Belanja Modal Tanah Rp2.144.037.559.968,00, telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, dan sebagaimana maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang antara lain tercantum pada:	

	1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Rp320.543.320,00; 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp574.032.600,00; 3) Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat semula Rp465.367.664.716,00 bertambah Rp148.475.090.480,00 menjadi Rp613.842.755.196,00; dan 4) Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat semula Rp462.349.340,00 bertambah Rp24.000.000,00 menjadi Rp486.349.340,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.aa.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. g. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp2.062.329.560,00 bertambah Rp1.038.602.085,00 menjadi Rp3.100.931.645,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. h. Alokasi Anggaran untuk Memajukan Kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:	

	1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi semula Rp30.349.017.340,00 bertambah Rp675.545.240,00 menjadi Rp31.024.562.580,00; 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp264.199.220,00; 3) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi semula Rp9.720.994.420,00 bertambah Rp199.846.000,00 menjadi Rp9.920.840.420,00; dan 4) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Rp4.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. i. Alokasi Anggaran BLUD Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Pendapatan BLUD semula Rp310.778.483.750,00 berkurang Rp249.688.790.750,00 menjadi Rp61.089.693.000,00; 2) Belanja Pegawai BLUD semula Rp104.589.220.700,00 bertambah Rp8.399.300.000,00 menjadi Rp112.988.520.700,00; 3) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp186.167.595.906,00 bertambah Rp44.650.856.757,00 menjadi Rp230.818.452.663,00; 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp16.114.635.544,00 bertambah Rp9.783.083.800,00 menjadi Rp25.897.719.344,00;	

	5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula Rp2.592.031.600,00 bertambah Rp1.521.000.000,00 menjadi Rp4.113.031.600,00; 6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula Rp1.290.000.000,00 bertambah Rp2.784.000.000,00 menjadi Rp4.074.000.000,00; dan 7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula Rp25.000.000,00 bertambah Rp2.532.000.000,00 menjadi Rp2.557.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. j. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyediaan anggaran Dana BOS, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula Rp131.941.590.000,00 bertambah Rp7.018.363.742,00 menjadi Rp138.959.953.742,00; 2) Belanja Hibah Dana BOS Rp91.580.750.000,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula Rp79.164.954.000,00 bertambah Rp1.246.601.324,00 menjadi Rp80.411.555.324,00; dan 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula Rp52.776.636.000,00 berkurang Rp331.899.999,00 menjadi Rp52.444.736.001,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan	Belanja BLUD telah dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. k. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah semula Rp782.357.460,00 bertambah Rp566.155.000,00 menjadi Rp1.348.512.460,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp120.000.000,00; dan b) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp446.155.000,00. 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan semula Rp287.207.600,00 bertambah Rp233.626.000,00 menjadi Rp520.833.600,00 pada Dinas Penelitian dan Pengembangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp167.650.000,00 bertambah Rp220.126.000,00 menjadi Rp387.776.000,00; 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa semula Rp64.976.000,00 bertambah Rp4.674.622.600,00 menjadi Rp4.739.598.600,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp4.674.622.600,00; 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp6.498.630.520,00 bertambah Rp3.233.791.000,00 menjadi Rp9.732.421.520,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub	telah dianggarkan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

	rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp649.585.500,00; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah semula Rp11.958.441.820,00 bertambah Rp6.307.984.600,00 menjadi Rp18.266.426.420,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula Rp750.000.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp2.250.000.000,00; b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp883.300.000,00 bertambah Rp1.175.000.000,00 menjadi Rp2.058.300.000,00; c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp205.003.800,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp605.003.800,00; dan d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp750.000.000,00 bertambah Rp810.155.000,00 menjadi Rp 1.560.155.000,00. 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp4.637.475.362,00 bertambah Rp3.336.434.251,00 menjadi Rp7.973.909.613,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp436.900.000,00; dan b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* semula Rp46.500.000,00 bertambah Rp245.500.000,00 menjadi Rp292.000.000,00.	

	7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula Rp6.541.022.570,00 bertambah Rp1.052.488.395,00 menjadi Rp7.593.510.965,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp125.000.000,00 bertambah Rp240.000.000,00 menjadi Rp365.000.000,00; dan b. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp329.585.014,00 bertambah Rp440.000.000,00 menjadi Rp769.585.014,00. 8) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat semula Rp7.674.489.920,00 bertambah Rp422.148.000,00 menjadi Rp8.096.637.920,00 pada Sekretariat Dewan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp3.766.200.000,00 berkurang Rp2.056.935.000,00 menjadi Rp1.709.265.000,00; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada Sub Kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu Sub Kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif. Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih cermat dalam memformulasikan uraian belanja pada sub kegiatan dimaksud guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.
	1. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja Sub Kegiatan. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:	

	1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Rp650.619.600,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp648.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp514.231.800,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp412.500.000,00; 3) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Rp939.685.130,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp417.168.768,00; dan b) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp95.700.000,00. 4) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.073.624.460,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp950.884.416,00; 5) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Rp650.619.600,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp648.000.000,00;	

	6) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp2.000.000.000,00; dan 7) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp492.722.460,00 pada SKPD UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp372.150.016,00; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing Sub Kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada Sub Kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 8. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp4.465.641.178.703,00 bertambah Rp292.989.488.926,00 menjadi Rp4.758.630.667.629,00 atau 61,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif. Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih cermat dalam memformulasikan uraian belanja pada sub kegiatan dimaksud guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan

	manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja: a. Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp2.212.204.560.369,00 bertambah Rp5.981.885.446,00 menjadi Rp2.218.186.445.815,00 atau 28,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Penyediaan anggaran alokasi Belanja Pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp1.947.390.810.210,00 atau 24,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	

	sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp1.063.260.922.580,00 berkurang Rp118.774.836.202,00 menjadi Rp944.486.086.378,00 atau 12,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian:

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp64.509.334.554,00 berkurang Rp2.872.526.032,00 menjadi Rp61.636.808.522,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	692.450.233.717,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62.871.994.493,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.969.349.395,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.987.167.963,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.442.767.054,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	735.539.504.590,00
2	Jumlah Belanja		1.563.261.017.212,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		62.530.440.688,48
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		61.636.808.522,00
	Selisih		(893.632.166,48)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran

Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp62.530.440.688,48 atau terdapat selisih kurang Rp893.632.166,48.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp187.810.203,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	182.876.400,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00
	d.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	226.593.684,00
	e.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Belanja		4.695.255.084,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		187.810.203,36
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD		187.810.203,00
	Selisih		0,36

Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp187.810.203,36 atau terdapat selisih kurang Rp0,36. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula Rp9.075.394,00 berkurang Rp5.288.194,00 menjadi Rp3.787.200,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:	Besaran alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat selisih kurang Rp 0,36 karena adanya angka pembulatan ke bawah.

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.400.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.960.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.320.000,00
2	Jumlah Belanja		94.680.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		3.787.200,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		3.787.200,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD

	serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, diuraikan sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.760.195.912,00 berkurang Rp244.145.161,00 menjadi Rp1.516.050.751,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp5.477.902.477,00 berkurang Rp1.113.563.318,00 menjadi Rp4.364.339.159,00;	

		belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp692.450.233.717,00 yaitu Rp1.661.880.560,92 atau terdapat selisih kurang Rp145.829.809,92; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp692.450.233.717,00 yaitu Rp2.077.350.701,15 atau terdapat selisih lebih Rp2.286.988.457,85. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:	Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

	(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp3.598.560,00; dan (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp10.795.680,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagai berikut: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula Rp155.520,00 berkurang Rp77.760,00 menjadi Rp77.760,00; dan	

	(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula Rp466.560,00 berkurang Rp233.280,00 menjadi Rp233.280,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka Pemeliharaan kesehatan berupa Belanja *Medical Check Up* semula Rp125.200.000,00 bertambah Rp132.367.500,00 menjadi Rp257.567.500,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, kepada: (1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai	

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp9.280.103.221,00 berkurang Rp3.864.087.006,00 menjadi Rp5.416.016.215,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta	

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp58.289.304.663,00, yang diperuntukkan bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN APBD TA 2024			
	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	2.400.000,00	7.200.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	51	2.250.000,00	114.750.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	55	124.950.000.000,00	124.950.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			1.749.300.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan APBD 2024				1.749.300.000,00
Selisih				-

		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan besaran alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp226.593.684,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024				
No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	55	3.000.000,00	9.900.000.000,00
2	Jumlah Pagu			9.900.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan APBD 2024			9.900.000.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024				
No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	55	3.000.000,00	2.475.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Rancangan APBD 2024			2.475.000.000,00
	Selisih			0,00

		Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD yang tercantum pada: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp25.236.000.000,00; dan (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula Rp14.688.000.000,00 bertambah Rp192.000.000,00 menjadi Rp14.880.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan	

anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Belanja Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut::

Tabel. 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2024			
No.	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN APBD TA 2024		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	144.000.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	216.000.000,00
	Dana Operasional		360.000.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada Rancangan APBD 2024		360.000.000,00
	Selisih		0,00

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp6.111.674.012,00 bertambah Rp773.376.822,00 menjadi Rp6.885.050.834,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarannya	

	disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.590.033.889.600,00 yaitu Rp6.885.050.834,00. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 6) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp649.096.418.557,00 bertambah Rp86.443.086.033,00 menjadi Rp735.539.504.590,00 atau 9,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp476.063.746.810,00 bertambah Rp68.703.625.805,00 menjadi Rp544.767.372.615,00; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp50.588.752.741,00 bertambah Rp5.619.176.562,00 menjadi Rp56.207.929.303,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp28.508.727,00 bertambah Rp4.385.943,00 menjadi Rp32.894.670,00; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula Rp122.415.410.279,00 bertambah Rp12.115.897.723,00 menjadi Rp134.531.308.002,00;	

		dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, terkait kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal: a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023; dan b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN; sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp330.249.683.115,00 bertambah Rp27.010.234.093,00 menjadi Rp357.259.917.208,00 atau	

		4,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp80.276.303.603,00; b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula Rp195.870.512,00 bertambah Rp30.362.488,00 menjadi Rp226.233.000,00; c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp240.232.542.000,00 bertambah Rp26.533.156.605,00 menjadi Rp266.765.698.605,00; d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp3.325.687.000,00 bertambah Rp704.250.000,00 menjadi Rp4.029.937.000,00; e) Belanja Honorarium semula Rp4.617.730.000,00 berkurang Rp289.035.000,00 menjadi Rp4.328.695.000,00; dan f) Belanja Jasa Pengelolaan BMD semula Rp1.597.200.000,00 bertambah Rp31.500.000,00 menjadi Rp1.628.700.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada: a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui	

		DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian objek Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dalam beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah telah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dalam beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

	b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. c) Butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.vii).(vi) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan BMD sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.260.916.551.398,00 bertambah Rp90.729.198.020,00 menjadi Rp1.351.645.749.418,00 atau 17,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah	

		yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Belanja Barang semula Rp164.619.757.721,00 bertambah Rp15.759.889.630,00 menjadi Rp180.379.647.351,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp162.997.856.971,00 bertambah Rp15.380.593.030,00 menjadi Rp178.378.450.001,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp4.756.588.000,00 bertambah Rp799.890.000,00 menjadi Rp5.556.478.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp799.890.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan	

	TPA/TPST Regional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp1.093.097.803,00 bertambah Rp143.696.050,00 menjadi Rp1.236.793.853,00; (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp25.119.041.584,00 bertambah Rp1.190.662.800,00 menjadi Rp26.309.704.384,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp523.930.800,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah; (c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp272.008.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	

	Dinas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan (d) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Sekretariat Daerah. (4) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran semula Rp155.224.585,00 bertambah Rp59.592.900,00 menjadi Rp214.817.485,00; (5) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas semula Rp453.762.500,00 bertambah Rp15.178.800,00 menjadi Rp468.941.300,00; (6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp2.906.899.999,00 bertambah Rp601.727.700,00 menjadi Rp3.508.627.699,00, (7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp614.367.800,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah; (8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp350.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp450.000.000,00; (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp5.232.254.378,00 bertambah Rp402.738.500,00 menjadi Rp5.634.992.878,00,	

	yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp426.525.400,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula Rp2.339.587.110,00 bertambah Rp1.432.081.800,00 menjadi Rp3.771.668.910,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp443.688.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp401.250.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

	Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp376.257.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp2.074.313.320,00 bertambah Rp1.765.937.900,00 menjadi Rp3.840.251.220,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp765.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Badan Pendapatan Daerah; dan (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp425.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Badan Pendapatan Daerah. (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp381.871.200,00 bertambah Rp171.708.000,00 menjadi Rp553.579.200,00; (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula Rp4.959.867.134,00 bertambah Rp248.042.200,00 menjadi Rp5.207.909.334,00;	

		(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp1.725.802.900,00 bertambah Rp107.013.800,00 menjadi Rp1.832.816.700,00; (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp1.686.663.512,00 bertambah Rp7.284.300,00 menjadi Rp1.693.947.812,00; (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula Rp1.235.200.000,00 bertambah Rp1.521.204.800,00 menjadi Rp2.756.404.800,00; (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp18.155.664.940,00 bertambah Rp2.245.862.600,00 menjadi Rp20.401.527.540,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.391.360.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sekretariat Daerah; (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan	

	(c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp960.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah. (18) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp6.140.140.700,00 berkurang Rp49.333.300,00 menjadi Rp6.090.807.400,00; (19) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp1.209.880.216,00 bertambah Rp5.157.900,00 menjadi Rp1.215.038.116,00; (20) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp7.374.354.400,00 bertambah Rp10.295.400,00 menjadi Rp7.384.649.800,00; (21) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya semula Rp872.335.550,00 bertambah Rp400.204.080,00 menjadi Rp1.272.539.630,00; (22) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp27.780.590.000,00 bertambah Rp3.299.490.000,00 menjadi Rp31.080.080.000,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.109.040.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta	

	Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp778.500.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp554.520.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (23) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp6.659.070.876,00 bertambah Rp862.070.000,00 menjadi Rp7.521.140.876,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah;	

		(24) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp1.217.835.000,00 bertambah Rp121.260.000,00 menjadi Rp1.339.095.000,00; (25) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp1.332.722.600,00; (26) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp4.384.670.000,00 bertambah Rp448.380.000,00 menjadi Rp4.833.050.000,00; (27) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD semula Rp2.253.562.500,00 bertambah Rp89.447.500,00 menjadi Rp2.343.010.000,00; (28) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp408.180.000,00; (29) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp598.464.100,00 bertambah Rp121.628.000,00 menjadi Rp720.092.100,00; (30) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp733.457.900,00; (31) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Rp577.760.000,00; (32) Belanja Pakaian Adat Daerah semula Rp237.996.300,00 bertambah Rp57.013.900,00 menjadi Rp295.010.200,00; (33) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula Rp257.575.200,00 bertambah Rp36.612.000,00 menjadi Rp294.187.200,00; dan (34) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp1.625.452.500,00 bertambah Rp56.869.600,00 menjadi Rp1.682.322.100,00	

	b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp1.621.900.750,00 bertambah Rp379.296.600,00 menjadi Rp2.001.197.350,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* semula Rp204.250.000,00 bertambah Rp209.000.000,00 menjadi Rp413.250.000,00; (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum semula Rp171.635.000,00 bertambah Rp13.446.000,00 menjadi Rp185.081.000,00; dan (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp932.400.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah	Penyediaan anggaran pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif

		dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan yang tercantum pada: (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp14.985.549.464,00 berkurang Rp802.754.000,00 menjadi Rp14.182.795.464,00; dan (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp10.322.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam perubahan RKPD sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan	Penyediaan anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif

		sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp13.887.075.000,00 bertambah Rp3.957.425.000,00 menjadi Rp17.844.500.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp2.391.075.000,00 bertambah Rp3.807.425.000,00 menjadi Rp6.198.500.000,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.205.750.000,00 pada Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	

	pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.069.540.000,00 pada Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp608.970.000,00 pada Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula Rp3.342.800.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp3.492.800.000,00; dan (3) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp8.153.200.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang	Penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat telah disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif

		ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan: a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam perubahan RKPD; b) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain;	

	c) data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2) Belanja Jasa Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp563.089.622.997,00 berkurang Rp3.907.976.109,00 menjadi Rp559.181.646.888,00 atau 7,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor semula Rp469.777.842.379,00 berkurang Rp17.291.799.975,00 menjadi Rp452.486.042.404,00 atau 5,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp7.489.750.000,00 bertambah Rp2.183.050.000,00 menjadi Rp9.672.800.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali	

		tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.142.900.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp847.470.000,00 bertambah Rp79.700.000,00 menjadi Rp927.170.000,00; (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara semula Rp725.200.000,00 bertambah Rp1.060.000.000,00 menjadi Rp1.785.200.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara semula Rp689.000.000,00 bertambah Rp1.060.000.000,00 menjadi Rp1.749.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum pada Sekretariat Daerah; (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp23.218.830.688,00 berkurang Rp22.509.376,00 menjadi Rp23.196.321.312,00; (5) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp641.500.000,00 berkurang Rp27.200.000,00 menjadi Rp614.300.000,00; (6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp486.000.000,00; (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp31.250.195.968,00 berkurang Rp6.828.528.320,00 menjadi Rp24.421.667.648,00;	

		(8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp48.334.711.776,00 berkurang Rp10.699.442.816,00 menjadi Rp37.635.268.960,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp889.081.704,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp12.640.851.328,00 berkurang Rp98.000.000,00 menjadi Rp12.542.851.328,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula Rp2.115.819.408,00 berkurang Rp56.000.000,00 menjadi Rp2.059.819.408,00; (12) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp2.428.800.000,00; (13) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp5.559.000.000,00 berkurang Rp50.500.000,00 menjadi Rp5.508.500.000,00; (14) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp166.396.281.296,00 berkurang Rp4.431.119.320,00 menjadi Rp161.965.161.976,00; (15) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp8.318.438.208,00; (16) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp12.456.032.400,00 berkurang Rp1.029.182.400,00 menjadi Rp11.426.850.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Ahli semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

		Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.560.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (17) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp26.913.959.939,00 bertambah Rp1.712.468.522,00 menjadi Rp28.626.428.461,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.269.416.204,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Kesehatan; (18) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp27.615.793.527,00 bertambah Rp216.342.176,00 menjadi Rp27.832.135.703,00; (19) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp11.394.488.704,00 berkurang Rp82.846.718,00 menjadi Rp11.311.641.986,00; (20) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp451.932.832,00; (21) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula Rp1.689.300.000,00 berkurang Rp80.300.000,00 menjadi Rp1.609.000.000,00; (22) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula Rp5.403.000.000,00 berkurang Rp912.000.000,00 menjadi Rp4.491.000.000,00; (23) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp2.506.737.057,00;	

		(24) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp4.469.886.646,00 bertambah Rp765.222.000,00 menjadi Rp5.235.108.646,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; (25) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi semula Rp926.206.825,00 berkurang Rp178.035.000,00 menjadi Rp748.171.825,00; (26) Belanja Jasa Pengolahan Sampah semula Rp640.550.000,00 bertambah Rp22.440.000,00 menjadi Rp662.990.000,00; (27) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula Rp6.719.150.000,00 berkurang Rp154.100.000,00 menjadi Rp6.565.050.000,00; (28) Belanja Tagihan Telepon semula Rp1.980.872.550,00 berkurang Rp10.272.808,00 menjadi Rp1.970.599.742,00; (29) Belanja Tagihan Air semula Rp2.046.000.133,00 bertambah Rp209.917.327,00 menjadi Rp2.255.917.460,00; (30) Belanja Tagihan Listrik semula Rp29.407.026.805,00 bertambah Rp1.729.418,00 menjadi Rp29.408.756.223,00;	

		(31) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula Rp1.744.934.750,00 berkurang Rp1.016.000,00 menjadi Rp1.743.918.750,00; (32) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp13.647.973.224,00 bertambah Rp641.486.000,00 menjadi Rp14.289.459.224,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Kawat/Faksimili/*Internet*/TV Berlangganan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp800.000.000 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (33) Belanja Paket/Pengiriman semula Rp1.126.725.000,00 berkurang Rp264.800.000,00 menjadi Rp861.925.000,00; (34) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula Rp2.399.949.228,00 bertambah Rp115.506.340,00 menjadi Rp2.515.455.568,00; dan (35) Belanja Pengolahan Air Limbah semula Rp2.849.680.000,00 berkurang Rp73.000.000,00 menjadi Rp2.776.680.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu	Penyediaan anggaran Jasa pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif

		pelaksanaan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja Sub Kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan. Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp53.653.901.040,00 berkurang Rp1.809.149.134,00 menjadi Rp51.844.751.906,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp26.481.716.100,00, dianggarkan dalam	

		Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	

		Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vil) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, iuran bantuan PBPU/BP dan	

	iuran bantuan PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, iuran bantuan PBPU/BP dan iuran bantuan PBPU mandiri dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vi) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: a) Belanja Sewa Tanah semula Rp10.100.000,00 bertambah Rp49.600.000,00 menjadi Rp59.700.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Lapangan Lainnya semula Rp3.100.000,00 bertambah Rp49.600.000,00 menjadi Rp52.700.000,00; b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp13.512.545.378,00 bertambah Rp14.762.096.000,00 menjadi Rp28.274.641.378,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Sewa *Excavator* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	

	dianggarkan Rp2.826.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa *Excavator* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.819.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (2) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.231.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.226.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (3) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp329.585.014,00 bertambah Rp440.000.000,00 menjadi Rp769.585.014,00; (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp642.938.300,00 bertambah Rp428.703.000,00 menjadi Rp1.071.641.300,00; (5) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp6.682.320.500,00 bertambah Rp2.895.883.000,00 menjadi Rp9.578.203.500,00; (6) Belanja Sewa Mebel semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;	

		(7) Belanja Sewa Alat Pendingin semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp106.000.000,00 menjadi Rp306.000.000,00; (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp1.888.276.564,00 bertambah Rp3.409.000.000,00 menjadi Rp5.297.276.564,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Peralatan *Studio Audio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp3.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat Daerah; (9) Belanja Sewa System/Power Supply semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00; (10) Belanja Sewa Komputer Jaringan semula Rp386.250.000,00 berkurang Rp371.250.000,00 menjadi Rp15.000.000,00; (11) Belanja Sewa Personal Computer Rp819.500.000,00; dan (12) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.300.000.000,00 bertambah Rp2.330.000.000,00 menjadi Rp3.630.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat Daerah.	

		c) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp11.051.525.000,00 bertambah Rp106.645.000,00 menjadi Rp11.158.170.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp835.000.000,00; (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp5.864.300.000,00 bertambah Rp23.000.000,00 menjadi Rp5.887.300.000,00; (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp1.248.740.000,00 bertambah Rp56.980.000,00 menjadi Rp1.305.720.000,00; (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp206.000.000,00 berkurang Rp11.000.000,00 menjadi Rp195.000.000,00; (5) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan semula Rp655.650.000,00 berkurang Rp22.800.000,00 menjadi Rp632.850.000,00; dan (6) Belanja Sewa Hotel semula Rp2.194.835.000,00 bertambah Rp48.465.000,00 menjadi Rp2.243.300.000,00. d) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula Rp547.700.000,00 berkurang Rp78.500.000,00 menjadi Rp469.200.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja	

	Sewa Alat Peraga Kesenian semula Rp345.700.000,00 berkurang Rp60.000.000,00 menjadi Rp285.700.000,00; dan e) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp50.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise* Rp50.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan BMD. Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas	Penyediaan anggaran sewa pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan dan telah mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi BMD yang dimiliki serta aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp2.075.770.700,00 bertambah Rp40.000.000,00 menjadi Rp2.115.770.700,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp1.015.867.825,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp1.115.867.825,00; (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp400.000.000,00; (3) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp204.902.875,00; dan (4) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan semula Rp150.000.000,00 bertambah Rp40.000.000,00 menjadi Rp190.000.000,00. b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp6.653.004.500,00 bertambah Rp250.016.000,00 menjadi Rp6.903.020.500,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

		Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp150.016.000,00 menjadi Rp250.016.000,00; (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp1.853.280.000,00; (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula Rp3.525.974.500,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp3.625.974.500,00; (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp100.000.000,00; dan (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp1.073.750.000,00. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan *(availability payment)* untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) dan butir	

	C.3.a.2).c).(2).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 5) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp5.757.234.000,00 bertambah Rp63.116.000,00 menjadi Rp5.820.350.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp3.779.351.000,00 bertambah Rp1.332.021.000,00 menjadi Rp5.111.372.000,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp493.125.000,00 pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. b) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp243.350.000,00 berkurang Rp68.880.000,00 menjadi Rp174.470.000,00; dan	

		c) Belanja Diklat Kepemimpinan semula Rp1.734.533.000,00 berkurang Rp1.200.025.000,00 menjadi Rp534.508.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp15.727.529.608,00 berkurang Rp153.928.328,00 menjadi Rp15.573.601.280,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat	Penyediaan anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada masing-masing belanja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing sub kegiatan dan telah mempertimbangkan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, manfaat yang akan diperoleh dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran

		Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/workshop/kursus/lokakarya/sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6) Belanja Pemeliharaan semula Rp41.940.614.474,00 bertambah Rp8.827.482.948,00 menjadi Rp50.768.097.422,00 atau 0,65% dari total belanja daerah	

		dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp20.969.616.767,00 bertambah Rp3.813.511.724,00 menjadi Rp24.783.128.491,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp1.475.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp10.478.050.000,00 bertambah Rp173.200.000,00 menjadi Rp10.651.250.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp875.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp975.000.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula Rp900.987.000,00 berkurang Rp18.580.000,00 menjadi Rp882.407.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel semula Rp395.492.000,00 bertambah Rp74.248.000,00 menjadi Rp469.740.000,00;	

	(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp1.384.135.000,00 bertambah Rp364.780.000,00 menjadi Rp1.748.915.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula Rp554.490.000,00 bertambah Rp84.000.000,00 menjadi Rp638.490.000,00; (8) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp158.600.000,00; (9) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus Rp618.000.000,00; (10) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula Rp1.344.330.000,00 bertambah Rp3.004.570.000,00 menjadi Rp4.348.900.000,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.592.230.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	

	Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (b) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp404.420.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer semula Rp804.390.000,00 bertambah Rp61.350.000,00 menjadi Rp865.740.000,00; (12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan semula Rp451.175.000,00 berkurang Rp29.516.600,00 menjadi Rp421.658.400,00; (13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya semula Rp271.615.632,00 bertambah Rp4.460.324,00 menjadi Rp276.075.956,00; dan (14) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp683.004.461,00. b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp14.368.303.507,00 bertambah Rp4.987.221.224,00 menjadi Rp19.355.524.731,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

		Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp8.562.321.194,00 bertambah Rp2.704.835.427,00 menjadi Rp11.267.156.621,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp681.000.550,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp660.000.000,00 bertambah Rp506.767.704,00 menjadi Rp1.166.767.704,00; (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp217.214.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp467.214.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan semula Rp1.123.077.850,00 berkurang Rp59,00 menjadi Rp1.123.077.791,00; (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula	

	Rp2.254.512.579,00 berkurang Rp62.394.968,00 menjadi Rp2.192.117.611,00; dan (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I semula Rp408.500.000,00 bertambah Rp1.683.013.120,00 menjadi Rp2.091.513.120,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.683.013.120,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Sekretariat Daerah. c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp6.312.657.200,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp6.332.657.200,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp4.200.000.000,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya semula Rp752.400.000,00 bertambah Rp66.500.000,00 menjadi Rp818.900.000,00.	

		d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula Rp225.000.000,00 bertambah Rp11.750.000,00 menjadi Rp236.750.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp11.750.000,00 menjadi Rp211.750.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:	

	a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 7) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp150.447.453.300,00 bertambah Rp10.562.540.700,00 menjadi Rp161.009.994.000,00 atau 2,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	Belanja Pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset/barang yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp134.304.663.300,00 bertambah Rp17.758.212.200,00 menjadi Rp152.062.875.500,00 atau 1,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp130.286.807.300,00 bertambah Rp17.831.247.200,00 menjadi Rp148.118.054.500,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp3.352.320.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.102.556.000,00 bertambah Rp965.552.000,00 menjadi Rp2.068.108.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp830.880.000,00 bertambah Rp1.169.760.000,00 menjadi	

	Rp2.000.640.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.608.960.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp1.897.382.000,00 berkurang Rp11.260.000,00 menjadi Rp1.886.122.000,00; dan (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula Rp1.980.274.000,00 berkurang Rp61.775.000,00 menjadi Rp1.918.499.000,00. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp16.142.790.000,00 berkurang Rp7.195.671.500,00 menjadi Rp8.947.118.500,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp16.142.790.000,00 berkurang Rp7.195.671.500,00 menjadi Rp8.947.118.500,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan	

	Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp607.320.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp405.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp391.950.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali **tidak ada** menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

		dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii.	

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah semula Rp11.115.459.500,00 bertambah Rp3.895.086.000,00 menjadi Rp15.010.545.500,00 atau 7,08% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp211.878.773.589,00; dan b) Sekretariat DPRD semula Rp74.275.664.000,00 bertambah Rp4.376.470.000,00 menjadi Rp78.652.134.000,00 atau 37,50% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp209.748.106.373,00; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan	

		dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	Alokasi belanja perjalanan dinas sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	kepada Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Belanja Subsidi Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp2.525.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek: 1) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp2.500.000.000,00; dan 2) Belanja Subsidi kepada Koperasi Rp25.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana maksud butir C.3.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp989.995.066.936,00 bertambah Rp196.278.405.460,00 menjadi Rp1.186.273.472.396,00 atau 15,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada: 1) Belanja Hibah semula Rp989.745.066.936,00 bertambah Rp196.278.405.460,00 menjadi Rp1.186.023.472.396,00 atau 15,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:	

	a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp157.398.155.732,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp157.398.155.732,00; b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp718.809.021.204,00 bertambah Rp195.656.540.260,00 menjadi Rp914.465.561.464,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp519.603.045.892,00 bertambah Rp149.450.000.000,00 menjadi Rp669.053.045.892,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp519.603.045.892,00 bertambah Rp149.450.000.000,00 menjadi Rp669.053.045.892,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp307.380.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp407.380.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan	

		Lembaga Terkait pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp307.380.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp407.380.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp307.380.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp407.380.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinas Kesehatan. (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp200.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang	

		kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp198.955.975.312,00 bertambah Rp45.906.540.260,00 menjadi Rp244.862.515.572,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp196.216.155.000,00 bertambah Rp45.100.000.000,00 menjadi Rp241.316.155.000,00, yang antara lain tercantum pada: i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp36.755.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,	

		Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp845.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan	

		Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; iv. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; v. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;	

		vi. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan vii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp2.739.820.312,00	

		bertambah Rp806.540.260,00 menjadi Rp3.546.360.572,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp391.995.100,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp250.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp350.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp350.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	

	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2) Belanja Bantuan Sosial Rp250.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp250.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir C.3.a.5) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud,	

		penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial dialihkan untuk mendanai kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan	

		perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.5) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD,	

		belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang belum direalisasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penambahan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berpedoman pada program, kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp21.957.140.000,00 bertambah Rp621.865.200,00 menjadi Rp22.579.005.200,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,	Penambahan alokasi belanja hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah melalui proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, serta hasil pembahasan bersama DPRD. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota	Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibih yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakit Wali Kota Tahun 2024

	dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. 9. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp753.187.821.368,00 bertambah Rp43.363.989.182,00 menjadi Rp796.551.810.550,00 atau 10,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:	

	a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal pelaksanaan pengadaan BMD terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Modal Tanah semula Rp3.460.000.000,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp4.160.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Persil semula Rp3.460.000.000,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp4.160.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp3.460.000.000,00; dan 2) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan	

	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp150.769.998.092,00 bertambah Rp32.128.801.036,00 menjadi Rp182.898.799.128,00 atau 2,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp1.036.089.000,00 bertambah Rp29.926.000,00 menjadi Rp1.066.015.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp363.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Compacting Equipment* Rp249.000.000,00; b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp673.089.000,00 bertambah Rp29.926.000,00 menjadi Rp703.015.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal *Electric Generating Set* Rp407.000.000,00; (2) Belanja Modal Pompa semula Rp126.089.000,00 bertambah Rp29.926.000,00 menjadi Rp156.015.000,00; dan (3) Belanja Modal Peralatan Selam Rp140.000.000,00. 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp6.950.491.100,00 bertambah Rp185.471.600,00 menjadi Rp7.135.962.700,00	

	atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp6.950.491.100,00 bertambah Rp185.471.600,00 menjadi Rp7.135.962.700,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp4.922.361.600,00 berkurang Rp247.739.000,00 menjadi Rp4.674.622.600,00; b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp28.129.500,00 bertambah Rp433.210.600,00 menjadi Rp461.340.100,00; dan c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp2.000.000.000,00. 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp14.416.027.038,00 bertambah Rp11.197.452.312,00 menjadi Rp25.613.479.350,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp1.869.858.450,00 bertambah Rp717.146.500,00 menjadi Rp2.587.004.950,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor semula Rp196.410.000,00 berkurang Rp26.274.000,00 menjadi Rp170.136.000,00; dan	

	(2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp1.673.448.450,00 bertambah Rp743.420.500,00 menjadi Rp2.416.868.950,00. b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp12.010.303.588,00 bertambah Rp10.184.968.412,00 menjadi Rp22.195.272.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel semula Rp8.034.296.088,00 bertambah Rp6.990.154.612,00 menjadi Rp15.024.450.700,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Mebel semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp648.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Modal Mebel semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp648.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (c) Belanja Modal Mebel semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp432.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.	

	(2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp1.555.136.600,00 bertambah Rp912.793.300,00 menjadi Rp2.467.929.900,00; (3) Belanja Modal Alat Dapur semula Rp61.001.100,00 bertambah Rp301.000.000,00 menjadi Rp362.001.100,00; dan (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula Rp2.300.481.600,00 bertambah Rp1.894.534.300,00 menjadi Rp4.195.015.900,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp240.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp535.865.000,00 bertambah Rp295.337.400,00 menjadi Rp831.202.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat semula Rp253.765.000,00 bertambah Rp54.345.800,00 menjadi Rp308.110.800,00; (2) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat semula Rp97.600.000,00 bertambah Rp107.340.000,00 menjadi Rp204.940.000,00; dan (3) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat semula Rp127.000.000,00 bertambah Rp82.000.000,00 menjadi Rp209.000.000,00.	

	4) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp3.909.542.700,00 berkurang Rp178.510.900,00 menjadi Rp3.731.031.800,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat *Studio* semula Rp2.436.431.300,00 berkurang Rp479.149.500,00 menjadi Rp1.957.281.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* semula Rp393.185.800,00 bertambah Rp27.050.300,00 menjadi Rp420.236.100,00; (2) Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* semula Rp1.323.245.500,00 berkurang Rp616.199.800,00 menjadi Rp707.045.700,00; dan (3) Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya semula Rp720.000.000,00 bertambah Rp110.000.000,00 menjadi Rp830.000.000,00. b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp1.459.500.000,00 bertambah Rp184.250.000,00 menjadi Rp1.643.750.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Radio* VHF semula Rp574.000.000,00 bertambah Rp184.250.000,00 menjadi Rp758.250.000,00; dan (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp870.000.000,00. 5) Belanja Modal Komputer semula Rp8.975.785.652,00 bertambah Rp7.505.984.600,00 menjadi Rp16.481.770.252,00 atau 0,21% dari total belanja daerah	

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp5.825.718.300,00 bertambah Rp5.540.713.900,00 menjadi Rp11.366.432.200,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp5.825.718.300,00 bertambah Rp5.540.713.900,00 menjadi Rp11.366.432.200,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.520.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (2) Belanja Modal *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.080.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (3) Belanja Modal *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan	

	(4) Belanja Modal *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp310.860.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp3.150.067.352,00 bertambah Rp1.965.270.700,00 menjadi Rp5.115.338.052,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp1.775.732.800,00 bertambah Rp1.333.361.700,00 menjadi Rp3.109.094.500,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp559.440.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (b) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp295.500.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.	

	(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp1.205.286.000,00 bertambah Rp568.320.000,00 menjadi Rp1.773.606.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan Jaringan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp610.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi semula Rp1.201.424.000,00 bertambah Rp25.000.000,00 menjadi Rp1.226.424.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp1.163.924.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perawatan Sumur Rp1.163.924.000,00; 7) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.682.526.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Rp1.682.526.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp1.682.526.000,00;	

	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp448.868.398.959,00 berkurang Rp5.271.168.005,00 menjadi Rp443.597.230.954,00 atau 5,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp439.552.729.439,00 berkurang Rp7.201.754.005,00 menjadi Rp432.350.975.434,00 atau 5,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp438.998.287.439,00 berkurang Rp7.201.754.005,00 menjadi Rp431.796.533.434,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp43.941.664.451,00 berkurang Rp93.144.789,00 menjadi Rp43.848.519.662,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.741.912.400,00 bertambah Rp870.956.200,00 menjadi Rp2.612.868.600,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan	

	Rp1.033.949.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan. (2) Belanja Modal Bangunan Gudang semula Rp1.164.299.000,00 bertambah Rp416.000.000,00 menjadi Rp1.580.299.000,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula Rp2.400.086.000,00 bertambah Rp30.787.000,00 menjadi Rp2.430.873.000,00; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp272.748.128.066,00 berkurang Rp8.610.299.016,00 menjadi Rp264.137.829.050,00, yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

		Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.181.296.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.099.908.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp843.159.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp843.159.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	

	dianggarkan Rp561.662.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp3.700.000.000,00 berkurang Rp572.956.200,00 menjadi Rp3.127.043.800,00; (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Museum Rp370.000.000,00; dan (7) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp114.205.631.170,00 bertambah Rp1.014.000.000,00 menjadi Rp115.219.631.170,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.972.546.396,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp554.442.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Asrama Rp554.442.000,00; 2) Belanja Modal Monumen semula Rp6.708.637.920,00 bertambah Rp179.381.000,00 menjadi Rp6.888.018.920,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Mod al Candi/Tugu Peringatan/Prasasti semula Rp6.708.637.920,00 bertambah Rp179.381.000,00 menjadi Rp6.888.018.920,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	a) Belanja Modal Bangunan Peninggalan semula Rp6.708.637.920,00 berkurang Rp200.000.000,00 menjadi Rp6.508.637.920,00; dan b) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya Rp200.000.000,00. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp96.302.788.317,00 bertambah Rp13.641.256.150,00 menjadi Rp109.944.044.467,00 atau 1,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp66.624.383.317,00 bertambah Rp10.200.000.000,00 menjadi Rp76.824.383.317,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan semula Rp66.624.383.317,00 bertambah Rp10.200.000.000,00 menjadi Rp76.824.383.317,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp65.184.383.317,00 bertambah Rp10.200.000.000,00 menjadi Rp75.384.383.317,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Modal Jalan Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp8.496.988.964,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi pada Dinas Pekerjaan	

	Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; (2) Belanja Modal Jalan Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp7.820.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (3) Belanja Modal Jalan Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. b) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp1.440.000.000,00. 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp12.113.600.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.455.780.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp11.455.780.000,00; dan b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp547.820.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja	

	Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp547.820.000,00. 3) Belanja Modal Instalasi semula Rp1.225.000.000,00 bertambah Rp647.256.150,00 menjadi Rp1.872.256.150,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.200.000.000,00; dan b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp420.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp420.000.000,00. 4) Belanja Modal Jaringan semula Rp15.049.805.000,00 bertambah Rp10.000.000,00 menjadi Rp15.059.805.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp15.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp15.000.000.000,00;	

	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp52.901.636.000,00 bertambah Rp2.200.100.001,00 menjadi Rp55.101.736.001,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp100.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp100.000.000,00, Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Rp100.000.000,00; f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp885.000.000,00 berkurang Rp35.000.000,00 menjadi Rp850.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp885.000.000,00 berkurang Rp35.000.000,00 menjadi Rp850.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp850.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp800.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

	Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dengan sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pengadaan BMD maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp12.583.146.000,00 bertambah Rp34.041.400,00 menjadi Rp12.617.187.400,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp12.582.070.000,00 bertambah Rp35.117.400,00 menjadi Rp12.617.187.400,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	Penganggaran belanja modal telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 serta memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

	1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp815.480.000,00 bertambah Rp35.117.400,00 menjadi Rp850.597.400,00; 2) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Rp453.000.000,00; 3) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp2.280.500.000,00; 4) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp4.425.000.000,00; 5) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Rp3.026.570.000,00; 6) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Rp88.800.000,00; 7) Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa Rp609.520.000,00; 8) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi Rp230.000.000,00; dan 9) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Rp653.200.000,00. b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp6.184.176.758,00 bertambah Rp596.244.000,00 menjadi Rp6.780.420.758,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp38.540.508,00 bertambah Rp456.744.000,00 menjadi Rp495.284.508,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp334.844.000,00; dan b) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika semula Rp19.200.000,00 bertambah Rp121.900.000,00 menjadi Rp141.100.000,00.	

	2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp5.550.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp5.550.000.000,00; 3) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup semula Rp595.636.250,00 bertambah Rp139.500.000,00 menjadi Rp735.136.250,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara semula Rp412.920.000,00 bertambah Rp139.500.000,00 menjadi Rp552.420.000,00; dan b) Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran Rp155.400.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp62.772.177.068,00 berkurang Rp10.566.450.000,00 menjadi	Pengadaan Alat Kedokteran Alat Laboratorium sudah mempertimbangkan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetap memperhatikan aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran.

	Rp52.205.727.068,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat kententuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 11. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp1.635.406.960.761,00 bertambah Rp553.411.041.896,00 menjadi Rp2.188.818.002.657,00 atau 28,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada: a. Belanja Bagi Hasil Penyediaan anggaran Belanja Bagi Hasil semula Rp1.279.176.638.488,00 bertambah Rp542.709.441.896,00 menjadi Rp1.821.886.080.384,00 atau 23,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, masih terdapat selisih lebih Rp362.814.553.541,90 dari yang seharusnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp1.459.071.526.842,10, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil PKB Rp1.569.988.993.300,00 x 30% = Rp470.996.697.990,00; 2) Belanja Bagi Hasil BBNKB Rp1.230.235.114.400,00 x 30% = Rp369.070.534.320,00;	Penyediaan anggaran belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 serta kemungkinan adanya kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	3) Belanja Bagi Hasil PBBKB Rp527.726.075.700,00 x 70% = Rp369.408.252.990,00; 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp4.103.273.200,00 x 50% = Rp2.051.636.600,00; dan 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp353.634.864.203,00 x 70% = Rp247.544.404.942,10. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024 dan memiliki kewajiban atas penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya, untuk menganggarkan kembali kewajiban tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.3.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Penyediaan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sebesar RpRp1.821.886.080.384,00 merupakam alokasi belanja bagi hasil pajak karena penambahan target pajak daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp179.894.888.355,00 serta kewajiban bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2023 berdasarkan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp362.814.553.542,00

	b. Belanja Bantuan Keuangan Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan semula Rp356.230.322.273,00 bertambah Rp10.701.600.000,00 menjadi Rp366.931.922.273,00 atau 4,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp279.909.122.273,00; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp76.321.200.000,00 bertambah Rp10.701.600.000,00 menjadi Rp87.022.800.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang–undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal Pemerintah Daerah, Provinsi Bali menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyediaan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa semula Rp76.321.200.000,00 bertambah Rp10.701.600.000,00 menjadi Rp87.022.800.000,00 merupakan kewajiban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

		Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran kegiatan, Sub Kegiatan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, pemenuhan alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD	

Inspektorat, pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp562.808.066.721,00 bertambah Rp363.577.277.583,00 menjadi Rp926.385.344.304,00, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18

Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi Semester I	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	811.725.080.073,00	142.021.132.218,00	17,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	640.554.747.273,00	142.021.132.218,00	22,17
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	395.788.065.929,00	342.216.746.305,00	86,46	248.917.013.352,00	142.021.132.218,00	57,06

Uraian	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Selisih Target APBD TA 2024 dan Target Perubahan APBD TA. 2024	Target Perubahan APBD TA 2024 dan Realisasi Semester I APBD TA 2024
	(Rp)	(Rp)	%	%
1	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.182.302.357.656,00	370.577.277.583,00	45,65	12,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.480.190.582,00	(469.074.556.691,00)	(73,23)	82,82
Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	839.651.834.274,00	839.651.834.274,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	255.917.013.352,00	7.000.000.000,00	2,81	55,49

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: 1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. 3. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan semula Rp811.725.080.073,00 bertambah Rp370.577.277.583,00 menjadi Rp1.182.302.357.656,00 atau 15,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan tersebut antara lain terdiri dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp640.554.747.273,00 berkurang Rp469.074.556.691,00 menjadi Rp171.480.190.582,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 19 sebagai berikut:	

Tabel.19
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2022	2.050.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,10%	6.741.065.092.324,98	30,42%
APBD TA 2023	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88%	7.932.886.363.138,00	13,61%
APBD TA 2024	640.554.747.273,00	142.021.132.218,00	22,17%	6.917.008.137.900,00	9,26%
Rancangan Perubahan APBD TA 2024	171.480.190.582,00	0,00	0,00%	7.796.206.207.904,00	2,20%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp640.554.747.273,00 atau 9,26% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.917.008.137.900,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00 atau 13,61% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.050.341.671.769,00 atau 30,42% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp6.741.065.092.324,98.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 per tanggal 8 Desember 2O23 Rp330.133.723.425,00 atau

	100,00olo dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp330.133.723.425,00; 1) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I Rp142.021.132.218,00 atau 22,17% dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp640.554.747.273,00; 2) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp408.963.390.625,37 atau 37,88% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00; dan 3) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp1.293.798.304.068,62 atau 63,10% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.050.341.671.769,00. Berdasarkan data tren realisasi SiLPA tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pencairan Dana Cadangan Rp171.170.332.800,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Alokasi SiLPA sebesar Rp171.480.190.582,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

		Selanjutnya, Dana Cadangan tersebut penggunaannya diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk pencairan dana cadangan, dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan yang menjadi penerimaan Pembiayaan Perubahan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan dimaksud belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Selanjutnya, penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pencairan dana cadangan akan digunakan guna mendanai pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menggunakan pencairan dana cadangan dimaksud sesuai dengan tahapan dan jadwal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengalokasian Pencairan Dana Cadangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mempedomani Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

	4. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp248.917.013.352,00 bertambah Rp7.000.000.000,00 menjadi Rp255.917.013.352,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp248.917.013.352,00 atau 3,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang telah disepakati dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.

IV	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS**	
	Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 20 sebagai berikut: Tabel. 20 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS No. | Keterangan | Perubahan RKPD 2024 | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | PKUA-PPPAS | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | Perubahan APBD 2024 | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) 1. | Jumlah Program | 172 | 7.776.455.626.067 | 172 | 7.776.455.626.067 | 172 | 7.796.206.207.904 2. | Jumlah Kegiatan | 431 | | 431 | | 431 | 3. | Jumlah Sub Kegiatan | 1127 | | 1127 | | 1127 | Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara lain yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp9.160.000,00 dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA dan perubahan PPAS serta tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita;	

	Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran yang rasional dan memadai guna pencapaian *output* program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta mengalokasikan anggaran secara rasional dan memadai dalam rangka pencapaian *output* program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	

	Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan harus dialihkan untuk mendanai kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan, dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

	Dalam hal terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
V	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD**	
	Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: 1. Jumlah anggaran dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 belum dianggarkan, sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp7.796.206.207.904,00; dan 2. Jumlah program belum tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024, sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 170 program.	

	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024; dan 2. Jumlah program, kegiatan, dan Sub Kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.	
VI.	**REKOMENDASI**	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI)

	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan anggaran untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; dengan berpedoman pada butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Provinsi Bali pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 6,5% s.d 6,9%, menurunnya kemiskinan wilayah Bali sebesar 2,50% s.d 3,00%, menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Bali sebesar 2,10% s.d. 2,83%. Selain itu, serta harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,65 s.d 82,57.	

	Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

	F. Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan program, kegiatan, Sub Kegiatan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, Sub Kegiatan dimaksud tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus dialihkan untuk mendanai kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, pemenuhan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan	

	Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan, dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat penurunan prognosis target pendapatan Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, Perubahan RKPD, dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Pemerintah Daerah Provinsi BaIi menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:	

	1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan egawai Negeri Sipil (PNS) 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran Tpp dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan pemberian Tpp kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan. J. Penyediaan anggaran kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. K. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal	

	di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap rnelalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/ sub kegiatan (roadmap) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoing terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*); 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Telah diterbitkan : 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Telah dikeluarkan: 1. Instruksi Gubernur Bali Nomor 11/Dishub/2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengurangan Emisi Karbon Melalui Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan Setiap Hari Jumat Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

	N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; Keperluan Mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau masyarakat. O. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk: 1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam	

	bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau Belanja Hibah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. 3. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 4. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, butir C.1.m.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022. 5. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan butir E.2.ap.72).d)	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah mengalokasikan anggaran untuk FKUB, FORKOPIMDA, penurunan prevalensi *stunting*, Program Perhutanan Sosial, pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kegiatan kegiatan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 6. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota melalui: a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/ pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada posyandu ditingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil),	

	melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pemerintah Daerah provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; sebagaimana maksud butir G.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	7. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023, hal dukungan anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024. 8. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengambil langkahlangkah sebagai berikut: a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi melalui kegiatan/ sub kegiatan antara lain: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; 5) Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti; 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota; dan	Sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu pada sub kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun 2024, telah dilaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi kelembagaan Posyandu dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu pada anggaran Induk. Dan berdasarkan mekanisme alokasi anggaran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD tahun 2024 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu tidak ada penambahan dan pengurangan anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Kelembagaan

	8) Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah provinsi; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan; c. menyusun program dan kegiatan pada RKPD Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/Sub Kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrern melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).	

	e. menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. sebagaimana maksud butir C.1.m.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 9. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka memenuhi kewajiban atas penyelenggaraan program JKN, sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Nomor 13667/IV.1/0824 tanggal 12 Agustus 2024 Hal Piutang Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Per 31 Juli 2024. 10. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir E.2.w.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 11. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI. 12. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyediakan	

	alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir E.2.ag Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 13. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada BAZNAS Provinsi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis mempakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 72 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas	

	nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079. Q. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan: 1. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran; dan 2. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht)* dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kode rekening berkenaan, dengan berpedoman pada butir D.1.f.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. R. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023.	Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibhh yang disepakati bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakit Wali Kota Tahun 2024

	S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah; 6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON. T. Dalam rangka melaksanakan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menyediakan alokasi anggaran untuk pelatihan daerah, akomodasi berupa transportasi dari/ke provinsi asal ke/dari Provinsi Jawa Tengah untuk atlet dan *official*, dan penghargaan/bonus untuk atlet dan pelatih berprestasi setara dengan atlet dan pelatih berprestasi non disabilitas pada ajang PON Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan *National Paralympic Committee lndonesia (NPCI)* di masing-masing Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4604/SJ tanggal 20 September 2024 tentang Dukungan	

	Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Jawa Tengah. U. Dalam hal terdapat kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali terkait pembayaran akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen provinsi yang mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen provinsi yang telah mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/6712/SJ tanggal 12 Desember 2023 tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan *Official* Peserta Daerah untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024. V. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran bagi gubernur dan wakil gubernur, yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa pada belanja pegawai berkenaan dan dasar perhitungan pembayaran kompensasi diberikan sejak diterbitkannya surat keputusan pemberhentian kepala daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan official kontingen provinsi yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Provinsi.

	W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 16 Oktober 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

KETUA,

DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.

WAKIL KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.

WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI

WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat dan mendesak, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp7.165.925.151.252,00 (tujuh triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp885.673.592.904,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.051.598.744.156,00 (delapan triliun lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah
   1. semula Rp6.354.200.071.179,00
   2. bertambah Rp521.816.122.421,00

   jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp6.876.016.193.600,00
b. belanja daerah
   1. semula Rp6.917.008.137.900,00
   2. bertambah Rp878.673.592.904,00

   jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp7.795.681.730.804,00
c. pembiayaan daerah
   1. penerimaan pembiayaan
      a) semula Rp811.725.080.073,00
      b) bertambah Rp363.857.470.483,00

      jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.175.582.550.556,00

2. pengeluaran pembiayaan
   a) semula Rp248.917.013.352,00
   b) bertambah Rp7.000.000.000,00
   jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp255.917.013.352,00
3. jumlah pembiayaan netto
   a) semula Rp562.808.066.721,00
   b) bertambah Rp356.857.470.483,00
   setelah perubahan Rp919.665.537.204,00

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah
   1. semula Rp4.074.449.341.179,00
   2. bertambah Rp515.584.548.421,00
   jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp4.590.033.889.600,00
b. pendapatan transfer
   1. semula Rp2.274.042.730.000,00
   2. bertambah Rp6.195.330.000,00
   jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.280.238.060.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
   1. semula Rp5.708.000.000,00
   2. bertambah Rp36.244.000,00
   jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp5.744.244.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah
   1. semula Rp3.239.223.722.629,00
   2. bertambah Rp446.464.598.174,00
   jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp3.685.688.320.803,00
b. retribusi daerah
   1. semula Rp59.213.399.000,00
   2. bertambah Rp259.464.525.680,00
   jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp318.677.924.680,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   1. semula Rp143.435.645.800,00
   2. bertambah Rp53.934.301.823,00
   jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp197.369.947.623,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
   1. semula Rp632.576.573.750,00
   2. berkurang Rp244.278.877.256,00
   jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp388.297.696.494,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:
a. semula Rp2.274.042.730.000,00
b. bertambah Rp6.195.330.000,00
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.280.238.060.000,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah yaitu:
a. semula Rp5.708.000.000,00
b. bertambah Rp36.244.000,00
   jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp5.744.244.000,00

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. belanja operasi
   1. semula Rp4.465.641.178.703,00
   2. bertambah Rp290.122.599.626,00
   jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp4.755.763.778.329,00
b. belanja modal
   1. semula Rp753.187.821.368,00
   2. bertambah Rp45.706.401.382,00
   jumlah belanja modal setelah perubahan Rp798.894.222.750,00

c. belanja tidak terduga
   1. semula Rp62.772.177.068,00
   2. berkurang Rp10.566.450.000,00
   jumlah belanja tidak terduga
   setelah perubahan Rp52.205.727.068,00
d. belanja transfer
   1. semula Rp1.635.406.960.761,00
   2. bertambah Rp553.411.041.896,00
   jumlah belanja transfer
   setelah perubahan Rp2.188.818.002.657,00

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai
   1. semula Rp2.212.204.560.369,00
   2. bertambah Rp5.981.885.446,00
   jumlah belanja pegawai
   setelah perubahan Rp2.218.186.445.815,00
b. belanja barang dan jasa
   1. semula Rp1.260.916.551.398,00
   2. bertambah Rp87.912.308.720,00
   jumlah belanja barang dan jasa
   setelah perubahan Rp1.348.828.860.118.00
c. belanja subsidi
   1. semula Rp2.525.000.000,00
   2. bertambah/berkurang Rp0,00
   jumlah belanja subsidi
   setelah perubahan Rp2.525.000.000,00
d. belanja hibah
   1. semula Rp989.745.066.936,00
   2. bertambah Rp196.228.405.460,00
   jumlah belanja hibah
   setelah perubahan Rp1.185.973.472.396,00
e. belanja bantuan sosial
   1. semula Rp250.000.000,00
   2. bertambah/berkurang Rp0,00
   jumlah belanja bantuan sosial
   setelah perubahan Rp250.000.000,00

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah
   1. semula Rp3.460.000.000,00
   2. bertambah Rp950.000.000,00

   jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp4.410.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin
   1. semula Rp150.769.998.092,00
   2. bertambah Rp34.263.600.236,00

   jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp185.033.598.328,00
c. belanja modal gedung dan bangunan
   1. semula Rp448.868.398.959,00
   2. berkurang Rp5.002.168.005,00

   jumlah modal belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp443.866.230.954,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
   1. semula Rp96.302.788.317,00
   2. bertambah Rp13.329.869.150,00

   jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp109.632.657.467,00
e. belanja modal aset tetap lainnya
   1. semula Rp52.901.636.000,00
   2. bertambah Rp2.200.100.001,00

   jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp55.101.736.001,00
f. belanja modal aset lainnya
   1. semula Rp885.000.000,00
   2. berkurang Rp35.000.000,00

   jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp850.000.000,00

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula Rp62.772.177.068,00
b. berkurang Rp10.566.450.000,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp52.205.727.068,00

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil
   1. semula Rp1.279.176.638.488,00
   2. bertambah Rp542.709.441.896,00

   jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.821.886.080.384,00
b. belanja bantuan keuangan
   1. semula Rp521.974.803.508,00
   2. bertambah Rp400.000.000,00

   jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp522.374.803.508,00

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan
   1. semula Rp811.725.080.073,00
   2. bertambah Rp363.857.470.483,00

   jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.175.582.550.556,00
b. pengeluaran pembiayaan
   1. semula Rp248.917.013.352,00
   2. bertambah Rp7.000.000.000,00

   jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp255.917.013.352,00

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
   1. semula Rp640.554.747.273,00
   2. berkurang Rp469.074.556.691,00

   jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp171.480.190.582,00
b. pencairan dana cadangan
   1. semula Rp171.170.332.800,00
   2. bertambah/berkurang Rp0,00

   jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp171.170.332.800,00

c. penerimaan pinjaman daerah

1. semula		Rp0,00
2. bertambah	Rp832.932.027.174,00	
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp832.932.027.174,00

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah

1. semula		Rp0,00
2. bertambah	Rp7.000.000.000,00	
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp7.000.000.000,00

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula	Rp248.917.013.352,00	
2. bertambah/berkurang	Rp0,00	
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp248.917.013.352,00

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Defisit

a. semula	Rp562.808.066.721,00	
b. bertambah	Rp356.857.470.483,00	
defisit setelah perubahan		Rp919.665.537.204,00

(2) Pembiayaan Netto

a. semula	Rp562.808.066.721,00	
b. bertambah	Rp356.857.470.483,00	
pembiayaan netto setelah perubahan		Rp919.665.537.204,00

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Semesta Berencana yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;

b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Semesta Berencana yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Semesta Berencana Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2024;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;

m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024;
n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2024;
o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024; dan
p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 5-265/2024

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.074.449.341.179,00**	**4.590.033.889.600,00**	**515.584.548.421,00**
4.1.01	Pajak Daerah	3.239.223.722.629,00	3.685.688.320.803,00	446.464.598.174,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.213.399.000,00	318.677.924.680,00	259.464.525.680,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.435.645.800,00	197.369.947.623,00	53.934.301.823,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.576.573.750,00	388.297.696.494,00	-244.278.877.256,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.274.042.730.000,00**	**2.280.238.060.000,00**	**6.195.330.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000,00	2.280.238.060.000,00	6.195.330.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.708.000.000,00**	**5.744.244.000,00**	**36.244.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.744.244.000,00	36.244.000,00
	Jumlah Pendapatan	**6.354.200.071.179,00**	**6.876.016.193.600,00**	**521.816.122.421,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.465.641.178.703,00**	**4.755.763.778.329,00**	**290.122.599.626,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.204.560.369,00	2.218.186.445.815,00	5.981.885.446,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.916.551.398,00	1.348.828.860.118,00	87.912.308.720,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	989.745.066.936,00	1.185.973.472.396,00	196.228.405.460,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**753.187.821.368,00**	**798.894.222.750,00**	**45.706.401.382,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000,00	4.410.000.000,00	950.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.769.998.092,00	185.033.598.328,00	34.263.600.236,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.868.398.959,00	443.866.230.954,00	-5.002.168.005,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.302.788.317,00	109.632.657.467,00	13.329.869.150,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.901.636.000,00	55.101.736.001,00	2.200.100.001,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.000.000,00	850.000.000,00	-35.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**62.772.177.068,00**	**52.205.727.068,00**	**-10.566.450.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	-10.566.450.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.635.406.960.761,00**	**2.188.818.002.657,00**	**553.411.041.896,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00	1.821.886.080.384,00	542.709.441.896,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	366.931.922.273,00	10.701.600.000,00
	Jumlah Belanja	**6.917.008.137.900,00**	**7.795.681.730.804,00**	**878.673.592.904,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-562.808.066.721,00**	**-919.665.537.204,00**	**-356.857.470.483,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**811.725.080.073,00**	**1.175.582.550.556,00**	**363.857.470.483,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00	171.480.190.582,00	-469.074.556.691,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	171.170.332.800,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	832.932.027.174,00	832.932.027.174,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**248.917.013.352,00**	**255.917.013.352,00**	**7.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	248.917.013.352,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**248.917.013.352,00**	**255.917.013.352,00**	**7.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**562.808.066.721,00**	**919.665.537.204,00**	**356.857.470.483,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	77.792.697.266,00	78.693.433.084,00	3.990.446.100,00	4.357.078.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.783.143.366,00	83.050.511.684,00	1.267.368.318,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	24.104.013.369,00	24.458.374.172,00	2.168.774.000,00	2.535.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272.787.369,00	26.993.598.172,00	720.810.803,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	30.047.623.932,00	31.410.628.318,00	1.733.490.800,00	1.798.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781.114.732,00	33.208.808.918,00	1.427.694.186,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	235.664.000,00	35.814.953.245,00	40.811.505.557,00	1.775.721.300,00	1.708.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00	42.520.489.157,00	4.929.814.612,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0,00	0,00	7.870.104.552,00	11.515.081.342,00	59.856.900,00	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929.961.452,00	11.527.841.342,00	3.597.879.890,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	643.907.040,00	661.907.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.907.040,00	661.907.040,00	18.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	208.656.862.631,00	205.197.934.473,00	5.865.798.200,00	2.105.022.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00	207.302.956.673,00	-7.219.704.158,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	208.656.862.631,00	205.197.934.473,00	5.865.798.200,00	2.105.022.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00	207.302.956.673,00	-7.219.704.158,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	77.792.697.266,00	78.693.433.084,00	3.990.446.100,00	4.357.078.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.783.143.366,00	83.050.511.684,00	1.267.368.318,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0,00	0,00	4.635.016.314,00	4.574.401.914,00	1.423.655.600,00	1.423.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.671.914,00	5.998.057.514,00	-60.614.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	33.819.191.672,00	34.304.649.119,00	673.428.500,00	1.266.373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492.620.172,00	35.571.022.919,00	1.078.402.747,00
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	31.826.097.831,00	32.314.475.878,00	89.050.800,00	70.772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915.148.631,00	32.385.248.678,00	470.100.047,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	03		KEPEGAWAIAN	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	184.649.598.272,00	76.282.256.720,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410.335.272,00	77.750.643.720,00	-107.659.691.552,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	6.359.832.000,00	25.552.305.000,00	600.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00	26.892.305.000,00	19.932.473.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0,00	0,00	27.429.877.464,00	31.486.145.021,00	1.626.100.000,00	9.307.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00	40.793.745.021,00	11.737.767.557,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0008	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	4.652.908.728,00	11.054.906.228,00	164.487.100,00	150.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817.395.828,00	11.205.579.228,00	6.388.183.400,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	3.095.901.080,00	3.095.901.080,00	554.442.000,00	554.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.343.080,00	3.650.343.080,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	26.000.000,00	28.184.000,00	21.878.456.220,00	22.757.083.246,00	54.896.100,00	178.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933.352.320,00	22.935.609.746,00	1.002.257.426,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	0,00	550.946.120,00	593.796.720,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.946.120,00	600.796.720,00	49.850.600,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	0,00	630.274.170,00	543.682.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.274.170,00	543.682.510,00	-86.591.660,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	54.235.322.064,00	56.337.923.758,00	114.758.403.270,00	119.375.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.993.725.334,00	175.713.730.828,00	6.720.005.494,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	469.557.380,00	421.931.780,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.057.380,00	466.431.780,00	-47.625.600,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	25.615.211.130,00	25.490.528.961,00	133.808.900,00	760.700.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749.020.030,00	26.251.229.311,00	502.209.281,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	8.432.190.260,00	8.432.190.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432.190.260,00	8.432.190.260,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	577.565.398.692,00	732.523.676.183,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00	734.870.881.283,00	157.250.482.591,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0,00	0,00	4.325.129.700,00	4.091.164.904,00	0,00	2.233.652.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.129.700,00	6.324.817.804,00	1.999.688.104,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0006	UPTD Pertanian Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0,00	0,00	36.821.236.942,00	37.124.032.118,00	2.421.053.500,00	4.421.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.242.290.442,00	41.545.085.618,00	2.302.795.176,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	306.301.673,00	306.301.673,00	79.295.850,00	79.295.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.597.523,00	385.597.523,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	03		KEPEGAWAIAN	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	184.649.598.272,00	76.282.256.720,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410.335.272,00	77.750.643.720,00	-107.659.691.552,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	176.092.382.932,00	47.931.896.385,00	85.200.000,00	52.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.177.582.932,00	47.984.746.385,00	-128.192.836.547,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.000.000,00	28.184.000,00	21.878.456.220,00	22.757.083.246,00	54.896.100,00	178.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933.352.320,00	22.935.609.746,00	1.002.257.426,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0,00	0,00	1.011.437.780,00	1.011.437.780,00	10.673.100,00	10.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.110.880,00	1.022.110.880,00	0,00
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	33.819.191.672,00	34.304.649.119,00	673.428.500,00	1.266.373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492.620.172,00	35.571.022.919,00	1.078.402.747,00
3	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	54.235.322.064,00	56.337.923.758,00	114.758.403.270,00	119.375.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.993.725.334,00	175.713.730.828,00	6.720.005.494,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	43.837.855.120,00	46.453.368.874,00	114.713.903.270,00	118.623.035.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.551.758.390,00	165.076.404.444,00	6.524.646.054,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	04		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0,00	0,00	2.132.832.912,00	2.164.632.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.832.912,00	2.164.632.912,00	31.800.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0,00	0,00	1.740.393.980,00	1.718.996.065,00	33.170.300,00	31.298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.564.280,00	1.750.294.265,00	-23.270.015,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	34.171.632.060,00	35.148.657.290,00	1.851.636.188,00	1.873.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00	37.022.649.590,00	999.381.342,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	34.171.632.060,00	35.148.657.290,00	1.851.636.188,00	1.873.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00	37.022.649.590,00	999.381.342,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	34.171.632.060,00	35.148.657.290,00	1.851.636.188,00	1.873.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00	37.022.649.590,00	999.381.342,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	577.565.398.692,00	732.523.676.183,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00	734.870.881.283,00	157.250.482.591,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	83.358.616.868,00	89.438.202.758,00	5.000.000,00	63.552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.363.616.868,00	89.501.754.958,00	6.138.138.090,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	21.871.777.384,00	22.045.367.591,00	2.859.507.498,00	2.633.716.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00	24.679.084.089,00	-52.200.793,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	21.871.777.384,00	22.045.367.591,00	2.859.507.498,00	2.633.716.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00	24.679.084.089,00	-52.200.793,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	54.235.322.064,00	56.337.923.758,00	114.758.403.270,00	119.375.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.993.725.334,00	175.713.730.828,00	6.720.005.494,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0002	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	0,00	0,00	2.817.693.424,00	2.109.403.424,00	0,00	708.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.693.424,00	2.817.674.924,00	-18.500,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0,00	0,00	2.469.330.011,00	2.468.970.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.330.011,00	2.468.970.011,00	-360.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0014	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	1.077.101.940,00	1.061.810.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.101.940,00	1.071.810.800,00	-15.291.140,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	218.200.788.810,00	243.750.966.758,00	109.749.395.537,00	120.831.427.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.950.184.347,00	364.582.394.095,00	36.632.209.748,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0,00	0,00	3.399.046.117,00	3.465.541.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.046.117,00	3.465.541.117,00	66.495.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0010	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0,00	0,00	2.436.005.715,00	2.451.809.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.005.715,00	2.451.809.915,00	15.804.200,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	198.510.828.700,00	198.929.132.659,00	328.050.200,00	358.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00	199.287.182.859,00	448.303.959,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	198.510.828.700,00	198.929.132.659,00	328.050.200,00	358.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00	199.287.182.859,00	448.303.959,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	198.510.828.700,00	198.929.132.659,00	328.050.200,00	358.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00	199.287.182.859,00	448.303.959,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
2	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00	-226.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	553.221.700,00	40.800.000,00	88.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.462.800,00	40.800.000,00	-600.662.800,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	0,00	2.545.651.820,00	2.124.158.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.651.820,00	2.124.158.120,00	-421.493.700,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	30.047.623.932,00	31.410.628.318,00	1.733.490.800,00	1.798.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781.114.732,00	33.208.808.918,00	1.427.694.186,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0,00	0,00	2.730.105.469,00	2.710.222.096,00	75.684.800,00	130.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.790.269,00	2.840.406.896,00	34.616.627,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0015	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	2.709.705.328,00	2.737.716.300,00	2.527.233.000,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.938.328,00	5.264.949.300,00	28.010.972,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	24		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	21.568.461.300,00	22.166.414.304,00	814.874.400,00	804.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383.335.700,00	22.970.688.904,00	587.353.204,00
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	911.061.940,00	911.061.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940,00	911.061.940,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	816.484.000,00	868.766.130,00	58.296.198.080,00	58.581.023.720,00	28.437.300,00	28.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324.635.380,00	58.609.461.020,00	284.825.640,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	235.664.000,00	35.814.953.245,00	40.811.505.557,00	1.775.721.300,00	1.708.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00	42.520.489.157,00	4.929.814.612,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0,00	0,00	1.860.365.831,00	1.832.854.226,00	66.969.700,00	54.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.335.531,00	1.886.976.726,00	-40.358.805,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0,00	0,00	436.740.470,00	471.740.470,00	427.489.350,00	492.957.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.229.820,00	964.697.820,00	100.468.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	38.600.429.260,00	40.135.038.605,00	1.383.383.300,00	1.383.383.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.983.812.560,00	41.518.421.905,00	1.534.609.345,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	235.664.000,00	35.814.953.245,00	40.811.505.557,00	1.775.721.300,00	1.708.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00	42.520.489.157,00	4.929.814.612,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0,00	0,00	2.305.329.132,00	2.250.305.922,00	200.088.300,00	200.088.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.417.432,00	2.450.394.222,00	-55.023.210,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	03		-	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	184.649.598.272,00	76.282.256.720,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410.335.272,00	77.750.643.720,00	-107.659.691.552,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	577.565.398.692,00	732.523.676.183,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00	734.870.881.283,00	157.250.482.591,00
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0,00	0,00	478.805.256.196,00	627.727.912.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.805.256.196,00	627.727.912.593,00	148.922.656.397,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	39.764.586.260,00	51.439.304.140,00	388.707.100,00	382.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.153.293.360,00	51.821.942.140,00	11.668.648.780,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.000.000,00	28.184.000,00	21.878.456.220,00	22.757.083.246,00	54.896.100,00	178.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933.352.320,00	22.935.609.746,00	1.002.257.426,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000,00	28.184.000,00	1.587.549.360,00	1.788.094.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.549.360,00	1.788.094.600,00	200.545.240,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0,00	0,00	400.282.040,00	768.795.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.282.040,00	768.795.040,00	368.513.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	03		KEPEGAWAIAN	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	184.649.598.272,00	76.282.256.720,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410.335.272,00	77.750.643.720,00	-107.659.691.552,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	1.107.776.780,00	1.602.462.380,00	75.537.000,00	75.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.313.780,00	1.677.999.380,00	494.685.600,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	8.925.823.704,00	7.763.596.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.823.704,00	7.763.596.324,00	-1.162.227.380,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	15.300.450.456,00	15.828.505.913,00	520.005.200,00	513.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.455.656,00	16.342.420.913,00	521.965.257,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	152.000.000,00	13.512.120.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	13.512.120.993,00	13.360.120.993,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	280.853.433.176,00	293.602.935.256,00	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.872.270.176,00	293.621.772.256,00	12.749.502.080,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	577.565.398.692,00	732.523.676.183,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00	734.870.881.283,00	157.250.482.591,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0,00	0,00	5.507.853.308,00	5.507.853.308,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557.853.308,00	5.557.853.308,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	3.289.911.772.629,00	3.745.462.261.953,00	138.055.297.457,00	138.753.890.715,00	3.567.067.599,00	2.869.416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.622.365.056,00	141.623.307.315,00	942.259,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0,00	0,00	2.625.062.160,00	2.528.938.740,00	20.974.900,00	20.974.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.037.060,00	2.549.913.640,00	-96.123.420,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0,00	0,00	5.387.969.583,00	5.518.630.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.969.583,00	5.518.630.723,00	130.661.140,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0,00	0,00	194.352.159.596,00	202.223.184.112,00	36.732.070.000,00	38.982.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.084.229.596,00	241.205.254.112,00	10.121.024.516,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.418.415.000,00	3.061.100.000,00	577.565.398.692,00	732.523.676.183,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.620.398.692,00	734.870.881.283,00	157.250.482.591,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0,00	0,00	5.568.542.620,00	5.758.542.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568.542.620,00	5.758.542.620,00	190.000.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	59.301.250.742,00	61.412.348.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301.250.742,00	61.412.348.647,00	2.111.097.905,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0004	UPTD Benih/Bibit Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.607.272.000,00	24.133.358.000,00	184.649.598.272,00	76.282.256.720,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.410.335.272,00	77.750.643.720,00	-107.659.691.552,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	1.089.606.560,00	1.195.592.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00	1.195.592.955,00	105.986.395,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	21.568.461.300,00	22.166.414.304,00	814.874.400,00	804.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383.335.700,00	22.970.688.904,00	587.353.204,00
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	332.121.540,00	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00	332.121.540,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.600.000,00	9.360.000,00	30.712.991.480,00	30.277.268.514,00	6.625.321.600,00	6.616.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338.313.080,00	36.894.206.814,00	-444.106.266,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.600.000,00	9.360.000,00	24.953.345.700,00	24.541.028.094,00	3.536.819.600,00	3.529.488.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.490.165.300,00	28.070.516.394,00	-419.648.906,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0,00	0,00	2.330.383.092,00	2.537.823.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.383.092,00	2.537.823.092,00	207.440.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0,00	0,00	3.748.577.920,00	6.660.233.040,00	231.475.800,00	246.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.053.720,00	6.906.560.040,00	2.926.506.320,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0,00	0,00	59.851.524.148,00	83.814.332.946,00	753.253.436,00	4.293.883.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.604.777.584,00	88.108.216.382,00	27.503.438.798,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0,00	0,00	2.331.983.100,00	2.358.173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.983.100,00	2.358.173.100,00	26.190.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.600.000,00	9.360.000,00	30.712.991.480,00	30.277.268.514,00	6.625.321.600,00	6.616.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338.313.080,00	36.894.206.814,00	-444.106.266,00
2	06	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	995.407.560,00	996.457.560,00	19.052.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.459.560,00	1.014.457.560,00	-2.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0,00	0,00	4.202.204.160,00	4.214.688.360,00	1.203.187.200,00	7.962.857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.391.360,00	12.177.545.560,00	6.772.154.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	21.568.461.300,00	22.166.414.304,00	814.874.400,00	804.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383.335.700,00	22.970.688.904,00	587.353.204,00
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	20.325.277.820,00	20.923.230.824,00	814.874.400,00	804.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140.152.220,00	21.727.505.424,00	587.353.204,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	33.819.191.672,00	34.304.649.119,00	673.428.500,00	1.266.373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492.620.172,00	35.571.022.919,00	1.078.402.747,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0,00	0,00	761.657.776,00	761.657.776,00	568.320.000,00	1.176.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.977.776,00	1.938.421.776,00	608.444.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		-	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0006	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0,00	0,00	467.630.260,00	467.630.260,00	176.827.910,00	176.827.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.458.170,00	644.458.170,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	0,00	3.146.983.901,00	3.287.941.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.983.901,00	3.287.941.561,00	140.957.660,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	7.219.125.880,00	7.170.216.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.125.880,00	7.170.216.360,00	-48.909.520,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	7.857.188.740,00	7.931.150.020,00	116.000.000,00	783.014.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973.188.740,00	8.714.164.320,00	740.975.580,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0,00	0,00	5.456.296.906,00	5.961.155.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.296.906,00	5.961.155.766,00	504.858.860,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	0,00	5.803.377.106,00	5.803.377.106,00	1.178.535.444,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.912.550,00	6.981.912.550,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	54.235.322.064,00	56.337.923.758,00	114.758.403.270,00	119.375.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.993.725.334,00	175.713.730.828,00	6.720.005.494,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0001	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	0,00	0,00	6.668.918.940,00	6.936.378.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668.918.940,00	6.936.378.140,00	267.459.200,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0007	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0,00	0,00	5.100.606.414,00	5.344.249.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.606.414,00	5.344.249.994,00	243.643.580,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		-	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	642.125.700,00	535.206.800,00	878.088.800,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.214.500,00	565.206.800,00	-955.007.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
2	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	0,00	1.255.603.670,00	1.142.557.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.603.670,00	1.142.557.250,00	-113.046.420,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.406.400.000,00	2.365.100.000,00	1.467.755.247.760,00	1.585.630.011.548,00	428.727.883.186,00	431.998.850.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.483.130.946,00	2.017.628.861.753,00	121.145.730.807,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0,00	0,00	2.223.412.600,00	2.223.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.412.600,00	2.223.399.600,00	-13.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.600.000,00	9.360.000,00	30.712.991.480,00	30.277.268.514,00	6.625.321.600,00	6.616.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338.313.080,00	36.894.206.814,00	-444.106.266,00
2	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	927.231.300,00	927.230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.231.300,00	927.230.700,00	-600,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	0,00	54.235.322.064,00	56.337.923.758,00	114.758.403.270,00	119.375.807.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.993.725.334,00	175.713.730.828,00	6.720.005.494,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	441.297.200,00	416.841.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00	416.841.540,00	-24.455.660,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.406.400.000,00	2.365.100.000,00	1.467.755.247.760,00	1.585.630.011.548,00	428.727.883.186,00	431.998.850.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.483.130.946,00	2.017.628.861.753,00	121.145.730.807,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	61.736.664.400,00	66.536.664.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400,00	66.536.664.400,00	4.800.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	30.047.623.932,00	31.410.628.318,00	1.733.490.800,00	1.798.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781.114.732,00	33.208.808.918,00	1.427.694.186,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	24.642.088.172,00	25.837.850.501,00	792.008.600,00	807.932.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.434.096.772,00	26.645.783.401,00	1.211.686.629,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.640.200.000,00	44.361.432.000,00	277.857.811.118,00	309.965.470.852,00	111.708.665.837,00	130.652.325.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.566.476.955,00	440.617.796.389,00	51.051.319.434,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00	10.765.383.160,00	14.450.448.684,00	300.000.000,00	482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065.383.160,00	14.932.448.684,00	3.867.065.524,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		-	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	02		KEUANGAN	5.587.288.102.629,00	6.054.940.356.172,00	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00	543.912.241.516,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.297.376.330.000,00	2.309.478.094.219,00	30.326.076.533,00	30.026.251.114,00	1.004.069.900,00	1.144.069.900,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.729.509.284.262,00	2.272.194.050.739,00	542.684.766.477,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	816.484.000,00	868.766.130,00	77.229.173.769,00	77.260.581.701,00	2.565.670.300,00	2.565.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.794.844.069,00	79.826.252.001,00	31.407.932,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	2.894.180.800,00	2.735.633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.180.800,00	2.735.633.200,00	-158.547.600,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0002	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	26.000.000,00	28.184.000,00	21.878.456.220,00	22.757.083.246,00	54.896.100,00	178.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933.352.320,00	22.935.609.746,00	1.002.257.426,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	18.728.522.960,00	19.363.754.146,00	44.223.000,00	160.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772.745.960,00	19.524.607.546,00	751.861.586,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	15.300.450.456,00	15.828.505.913,00	520.005.200,00	513.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.455.656,00	16.342.420.913,00	521.965.257,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	15.148.450.456,00	2.316.384.920,00	520.005.200,00	513.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.455.656,00	2.830.299.920,00	-12.838.155.736,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.406.400.000,00	2.365.100.000,00	1.467.755.247.760,00	1.585.630.011.548,00	428.727.883.186,00	431.998.850.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.483.130.946,00	2.017.628.861.753,00	121.145.730.807,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.406.400.000,00	2.365.100.000,00	1.402.956.695.500,00	1.516.031.472.288,00	428.727.883.186,00	431.998.850.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.684.578.686,00	1.948.030.322.493,00	116.345.743.807,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	77.792.697.266,00	78.693.433.084,00	3.990.446.100,00	4.357.078.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.783.143.366,00	83.050.511.684,00	1.267.368.318,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	49.053.667.583,00	49.660.656.998,00	398.016.500,00	398.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451.684.083,00	50.058.855.998,00	607.171.915,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.406.400.000,00	2.365.100.000,00	1.467.755.247.760,00	1.585.630.011.548,00	428.727.883.186,00	431.998.850.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.483.130.946,00	2.017.628.861.753,00	121.145.730.807,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0,00	0,00	838.475.260,00	838.475.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.475.260,00	838.475.260,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	30.047.623.932,00	31.410.628.318,00	1.733.490.800,00	1.798.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781.114.732,00	33.208.808.918,00	1.427.694.186,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0,00	0,00	323.434.940,00	323.434.940,00	93.865.900,00	88.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.300.840,00	411.566.340,00	-5.734.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	235.664.000,00	35.814.953.245,00	40.811.505.557,00	1.775.721.300,00	1.708.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00	42.520.489.157,00	4.929.814.612,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	213.600.000,00	235.664.000,00	23.122.683.930,00	24.607.533.577,00	1.362.096.700,00	1.359.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.484.780.630,00	25.967.120.577,00	1.482.339.947,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.595.955.374.629,00	6.079.133.714.172,00	432.744.695.776,00	326.996.581.254,00	9.583.242.197,00	9.909.256.798,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	2.140.507.075.802,00	2.577.929.567.777,00	437.422.491.975,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	60.000.000,00	8.401.140.744,00	8.693.421.491,00	317.413.000,00	725.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00	9.418.731.291,00	700.177.547,00
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	60.000.000,00	60.000.000,00	8.401.140.744,00	8.693.421.491,00	317.413.000,00	725.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00	9.418.731.291,00	700.177.547,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	0,00	527.473.360,00	527.473.360,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.473.360,00	627.473.360,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.600.000,00	9.360.000,00	30.712.991.480,00	30.277.268.514,00	6.625.321.600,00	6.616.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338.313.080,00	36.894.206.814,00	-444.106.266,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0,00	0,00	3.837.006.920,00	3.812.552.160,00	3.069.450.000,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.456.920,00	6.882.002.160,00	-24.454.760,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0,00	0,00	5.766.956.020,00	6.770.928.810,00	836.307.200,00	836.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603.263.220,00	7.607.045.110,00	1.003.781.890,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	305.970.451.750,00	336.770.003.750,00	2.387.339.935.224,00	2.567.011.838.650,00	605.269.541.267,00	635.585.694.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.609.476.491,00	3.202.597.533.436,00	209.988.056.945,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	272.914.251.750,00	290.034.111.750,00	607.676.034.860,00	641.701.325.312,00	54.236.276.544,00	61.978.502.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912.311.404,00	703.679.827.456,00	41.767.516.052,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	0,00	71.874.000.000,00	83.127.310.000,00	12.551.000.000,00	16.297.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.425.000.000,00	99.425.000.000,00	15.000.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	25.615.211.130,00	25.490.528.961,00	133.808.900,00	760.700.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749.020.030,00	26.251.229.311,00	502.209.281,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	17.183.020.870,00	17.058.338.701,00	133.808.900,00	760.700.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.829.770,00	17.819.039.051,00	502.209.281,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	213.600.000,00	235.664.000,00	35.814.953.245,00	40.811.505.557,00	1.775.721.300,00	1.708.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.674.545,00	42.520.489.157,00	4.929.814.612,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0,00	0,00	656.469.800,00	605.730.490,00	86.709.700,00	82.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.179.500,00	688.156.290,00	-55.023.210,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	33.819.191.672,00	34.304.649.119,00	673.428.500,00	1.266.373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492.620.172,00	35.571.022.919,00	1.078.402.747,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0,00	0,00	1.016.051.765,00	1.013.131.165,00	16.057.700,00	18.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.109.465,00	1.031.968.165,00	-141.300,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	250.000.000.000,00	250.005.275.200,00	14.767.698.297,00	15.668.303.664,00	347.957.700,00	565.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.655.997,00	16.234.155.864,00	1.118.499.867,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	250.000.000.000,00	250.005.275.200,00	14.767.698.297,00	15.668.303.664,00	347.957.700,00	565.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.655.997,00	16.234.155.864,00	1.118.499.867,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.463.600.000,00	2.512.201.225,00	30.047.623.932,00	31.410.628.318,00	1.733.490.800,00	1.798.180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781.114.732,00	33.208.808.918,00	1.427.694.186,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	0,00	1.248.906.160,00	1.282.890.400,00	722.615.400,00	722.615.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.521.560,00	2.005.505.800,00	33.984.240,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	0,00	1.083.089.191,00	1.236.230.381,00	49.316.100,00	49.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.405.291,00	1.285.546.481,00	153.141.190,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	379.710.319.911,00	415.032.679.026,00	9.905.070.236,00	16.409.098.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.615.390.147,00	431.441.777.662,00	41.826.387.515,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	143.638.145.800,00	197.575.485.123,00	172.224.837.680,00	211.024.124.953,00	4.139.272.036,00	14.404.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.364.109.716,00	225.428.201.389,00	49.064.091.673,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	0,00	2.166.935.950,00	2.183.141.650,00	857.817.100,00	828.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.753.050,00	3.011.723.150,00	-13.029.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0,00	0,00	960.672.700,00	960.267.700,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.672.700,00	1.340.267.700,00	-405.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.119.215.000,00	7.906.124.000,00	855.908.896.374,00	1.030.113.700.796,00	118.575.147.320,00	126.611.313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.484.043.694,00	1.156.725.014.166,00	182.240.970.472,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.600.000,00	5.040.000,00	17.337.453.860,00	17.467.233.543,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338.529.860,00	17.467.233.543,00	128.703.683,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	5.040.000,00	17.337.453.860,00	17.467.233.543,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338.529.860,00	17.467.233.543,00	128.703.683,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	302.516.884.000,00	254.630.866.555,00	177.254.870.658,00	182.531.188.654,00	7.675.133.960,00	8.146.816.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.930.004.618,00	190.678.005.314,00	5.748.000.696,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.210.800.000,00	1.216.440.000,00	47.658.595.191,00	56.001.310.036,00	3.216.902.010,00	3.268.555.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.497.201,00	59.269.865.946,00	8.394.368.745,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0,00	0,00	725.508.960,00	728.508.960,00	605.418.500,00	605.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.927.460,00	1.333.927.460,00	3.000.000,00
3	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.483.600.000,00	4.604.320.000,00	33.819.191.672,00	34.304.649.119,00	673.428.500,00	1.266.373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.492.620.172,00	35.571.022.919,00	1.078.402.747,00
3	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	190.499.500,00	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00	190.499.500,00	0,00
			TOTAL	**6.354.200.071.179,00**	**6.876.016.193.600,00**	**4.465.641.178.703,00**	**4.755.763.778.329,00**	**753.187.821.368,00**	**798.894.222.750,00**	**62.772.177.068,00**	**52.205.727.068,00**	**1.635.406.960.761,00**	**2.188.818.002.657,00**	**6.917.008.137.900,00**	**7.795.681.730.804,00**	**878.673.592.904,00**

PJ. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN III

RINCIAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
4	PENDAPATAN DAERAH	6.354.200.071.179,00	6.876.016.193.600,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.074.449.341.179,00	4.590.033.889.600,00	
4.1.01	Pajak Daerah	3.239.223.722.629,00	3.685.688.320.803,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	59.213.399.000,00	318.677.924.680,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.435.645.800,00	197.369.947.623,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.576.573.750,00	388.297.696.494,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.274.042.730.000,00	2.280.238.060.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000,00	2.280.238.060.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	5.744.244.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	5.744.244.000,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.632.400,00	101.992.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.126.000,00	148.042.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.389.690.000,00	1.146.289.783.066,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.942.500,00	102.942.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.048.600,00	154.048.600,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.025.000,00	88.145.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik			

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.675.000,00	68.155.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.809.800,00	157.809.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.860.000,00	785.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	10.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250,00	31.526.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.094.000,00	625.094.000,00	

Kegiatan	: 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.981.150,00	1.198.981.150,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	29.926.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.624.527.920,00	8.551.163.640,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.685.000,00	786.585.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.214.550,00	1.338.214.550,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	990.726.258,00	1.088.726.268,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.189.500,00	398.289.500,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun			
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.628.635.719,00	139.128.635.719,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.202.629.000,00	1.202.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.568.662.000,00	3.568.662.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.026.000,00	584.026.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.566.000,00	346.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: -			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.165.000.000,00	8.660.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.490.000,00	392.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.114.836.090,00	5.114.836.090,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.029.484.310,00	1.029.484.310,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.939.700,00	1.315.979.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	750.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.660.703.700,00	40.393.577.660,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.550.000,00	70.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: -			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.679.200,00	259.679.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000,00	3.460.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	779.000.000,00	779.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.790.430.000,00	77.452.184.633,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.134.610.000,00	23.134.610.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.874.258.000,00	46.471.310.780,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.916.172.000,00	30.980.873.853,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.400,00	29.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.919.500,00	59.769.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.693.944.000,00	1.693.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.631.562.525,00	11.536.562.525,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.999.800,00	124.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.342.700,00	8.966.525.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	450.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.200.000,00	3.323.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.330.300.000,00	7.330.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	595.525.552,00	595.525.552,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.965.009.411,00	1.965.009.411,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium			
Indikator Keluaran	: 0			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.252.000,00	205.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	380.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.370.000.000,00	3.370.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.208.800,00	5.954.559.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.487.400,00	618.136.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.832.100,00	1.201.841.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.848.917.220,00	32.226.076.940,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.550.000,00	70.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.278.200,00	498.278.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.049.480.000,00	53.291.595.299,00	
5.1.05	Belanja Hibah	67.515.740.000,00	67.515.740.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.229.688.000,00	31.974.957.179,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.819.792.000,00	21.316.638.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	55.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			

Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	72.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.640.518.078,00	8.207.219.062,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.253.548.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.079.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.998.600,00	124.998.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: -			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	276.984.000,00	276.984.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.099.900,00	23.099.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.912.640.000,00	12.912.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.375.400,00	15.375.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.012.889.909,00	1.032.889.909,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	320.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.005.200,00	738.005.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.396.219.400,00	3.396.219.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.599.600,00	244.599.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.980.300,00	1.050.980.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.619.417.920,00	5.081.413.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.294.900,00	383.294.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.353.200,00	225.353.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.101.680.000,00	8.216.173.810,00	
5.1.05	Belanja Hibah	930.400.000,00	930.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.061.008.000,00	1.965.287.365,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.040.672.000,00	147.224.028,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.547.600,00	15.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.559.300,00	16.559.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.918.900,00	14.918.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.303.048.800,00	1.303.048.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.645.300,00	534.645.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.653.600,00	464.412.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.080.000.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik			
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.981.800,00	34.981.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.200,00	39.999.200,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen			
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.216.000,00	40.216.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.500,00	2.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.860.300,00	47.138.300,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.642.800,00	753.642.800,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.340.000,00	103.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	10.120.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK			
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.430.000,00	101.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.075.000,00	57.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.059.000,00	44.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.720.000,00	535.720.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.370.000,00	83.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.139.000,00	47.804.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.059.000,00	42.099.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.382.000,00	351.382.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen			
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.618.800,00	8.618.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.600,00	6.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.330.000,00	27.330.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.549.960,00	527.549.960,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.810.000,00	90.810.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal			
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.519.900,00	69.519.900,00	
Kegiatan	: 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.049.300,00	32.049.300,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
Indikator Hasil	: Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan			
Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali			
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.049.700,00	76.049.700,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.188.000,00	195.038.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.954.700,00	18.954.700,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	225.179.064.000,00	244.507.072.995,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.482.800,00	13.482.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.145.400,00	73.145.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.837.000,00	18.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.130.100,00	560.823.900,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	480.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.174.642.840,00	14.043.106.225,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.800.000,00	430.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.320.200,00	92.697.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	31.900.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.042.400,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	567.961.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.881.900,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.405.881.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.669.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	294.669.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.740.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	158.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.459.900,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	56.459.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.339.700,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.031.339.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	972.335.136,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	1.022.335.136,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.494.321.600,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.494.321.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.790.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	143.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.045.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.045.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.299.400,00	21.299.400,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan, SDM, Alat Kesehatan , Sarana, Prasarana dan Jumlah Faskes yang melakukan penginputan INM dan IKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.901.900,00	14.901.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.409.800,00	60.409.800,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.460.000,00	12.460.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.043.400,00	303.043.400,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial			

Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.518.000,00	73.518.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.212.000,00	76.212.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri			
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.216.000,00	313.506.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana penunjang administrasi umum			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.024.000,00	5.163.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.497.600,00	31.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.846.500,00	170.620.500,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.900.000,00	363.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.243.510.620,00	1.170.146.340,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	39.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	92.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.021.800,00	4.785.128.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.978.200,00	214.872.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.340.800,00	408.340.800,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.000.000,00	589.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.956.651.820,00	1.535.158.120,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	108.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.820.000,00	151.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.494.260.700,00	2.494.260.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.562.855.606,00	2.562.855.606,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.535.444,00	1.178.535.444,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional			
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.581.000,00	7.581.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.974.900,00	11.974.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.142.900,00	137.142.900,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.061.456.560,00	1.914.245.640,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	39.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.468.900,00	57.468.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.815.900,00	164.315.900,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.199.000,00	15.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.299.500,00	17.299.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.698.400,00	176.285.900,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.318.800.000,00	5.318.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.033.359.596,00	33.154.384.112,00	

Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	64.000.000.000,00	64.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000.000,00	99.750.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.475.000.000,00	6.750.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	1.000.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.732.070.000,00	8.732.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.203.180.040,00	11.505.975.216,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.032.800.000,00	8.032.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.471.146.500,00	16.471.146.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.021.900,00	1.671.021.900,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	492.031.600,00	1.253.031.600,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	72.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Persentase Pasien yang dilayani tuntas
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	38.451.800.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	29.052.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	44.675.510.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.821.500.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.315.690.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.126.000.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	1.557.000.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.627.100,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.627.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.088.800,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	455.021.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.895.300,00	319.895.300,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	48.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	434.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.670.940,00	2.408.200.820,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.291.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	82.811.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.360.600,00	1.086.010.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.000.000,00	146.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	10.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.311.500,00	215.311.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.157.200,00	3.839.032.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	35.117.400,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.421.700,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	471.467.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.241.100,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	88.875.100,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD Balai Peralatan dan Pengujian			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan			
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.971.200,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.971.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.526.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.526.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.236.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.236.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.760.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	18.320.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.320.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	12.978.200,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.850.300,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	53.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	

Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.799.680,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	285.799.680,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.010.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.010.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.472.560,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	311.074.645,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi			
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.317.240,00	885.317.240,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Air Minum			
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.429.877.464,00	31.486.145.021,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.100.000,00	4.530.600.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	900.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.290.000.000,00	3.877.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Air Limbah			
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah			

Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.755.723.160,00	14.440.788.684,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	482.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.572.700,00	414.345.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.395.580,00	305.940.820,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.871.550.000,00	27.223.753.992,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.171.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.171.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	65.491.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.491.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	85.009.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.009.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	464.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.820.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	178.138.300,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.535.600,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	562.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	318.342.692,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.342.692,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.554.187.220,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.414.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	205.846.420,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.846.420,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.399.335.704,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.411.563.084,00	0,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai			
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	547.820.000,00	547.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.901.700,00	22.901.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.177.300,00	289.177.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.994.300,00	13.994.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.060.000,00	3.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.829.400,00	346.829.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.879.040,00	264.424.280,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.964.125.000,00	10.964.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.222.893.880,00	3.222.893.880,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	510.000,00	510.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.965.020,00	733.510.260,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	491.655.000,00	491.655.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.483.580,00	1.359.184.976,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.100,00	81.217.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak			

Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.074.300,00	28.074.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.831.900,00	62.831.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	

Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Indikator Hasil	: Persentase cakupan pelayanan air minum layak
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	248.681.272,00	248.681.272,00	

Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.643.100,00	149.822.100,00	
5.1.05	Belanja Hibah	148.051.139.040,00	173.727.679.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	950.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.700.550.320,00	13.700.550.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.651.700,00	83.651.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.053.200,00	41.053.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.000.000,00	650.000.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap			
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.539.980,00	339.312.600,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	20.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.500.005.236,00	13.508.618.236,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.718.060,00	367.690.680,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.200.000.000,00	12.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.973.794.300,00	23.873.563.540,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.000.000,00	363.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.165.000,00	36.165.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.756.597.547,00	34.756.597.547,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.877.780.534,00	11.877.780.534,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.559.982,00	1.398.775.982,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.840.000.000,00	2.620.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.304.498.000,00	1.304.498.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.326.300,00	27.326.300,00	

Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat			
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.184.660,00	562.184.660,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.207.300,00	238.979.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.860.300,00	251.860.300,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah publikasi informasi penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.655.200,00	26.655.200,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.673.480,00	419.429.480,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.860.000,00	248.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.535.000,00	105.535.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.381.980,00	176.381.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.449.960,00	148.222.580,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	245.816.100,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi			
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.217.800,00	272.217.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.822.600,00	20.822.600,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.622.640,00	487.395.260,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh			

Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.823.028.400,00	3.673.028.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.092.300,00	940.092.300,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU			
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
Indikator Keluaran	: Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	129.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.824.964,00	2.198.824.964,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.215.000,00	42.215.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.077.661.000,00	20.093.512.590,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.272.600,00	244.272.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.980.600,00	44.650.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.075.800,00	56.075.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.758.500,00	308.941.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.847.200,00	24.847.200,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.993.000,00	54.993.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.258.000,00	39.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.390.000,00	59.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.232.100,00	935.232.100,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.888.394.244,00	2.188.802.244,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti			
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.833.240,00	77.833.240,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.809.400,00	149.722.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.899.600,00	29.899.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.115.740,00	100.115.740,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.245.911.560,00	4.589.024.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.712.420,00	242.712.420,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.761.500,00	24.761.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.878.840,00	1.508.912.475,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.964.280,00	251.964.280,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.060.200,00	137.060.200,00	

Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.090.700,00	57.090.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.728.200,00	98.728.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.714.782.000,00	13.215.871.363,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	71.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.677.300,00	125.677.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	82.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.220.700,00	11.220.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.500.000,00	319.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.736.100,00	4.736.100,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897.688.000,00	897.688.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	178.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.422.320.540,00	1.275.591.980,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	51.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.521.316.772,00	3.521.316.772,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	658.300.000,00	904.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.871.785,00	9.871.785,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.910.000,00	67.910.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.943.300,00	201.943.300,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.362.100,00	487.362.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.287.200,00	164.287.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.918.800,00	292.918.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.148.400,00	138.148.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.597.400,00	90.597.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.557.700,00	25.557.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	612.786.000,00	733.236.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.175.500,00	616.175.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.779.000,00	706.779.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.641.100,00	377.641.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.059.000,00	53.059.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.770.200,00	258.770.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.312.200,00	60.312.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.774.000,00	115.774.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0001 UPTD Pengendalian Bencana Daerah			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.740.400,00	16.740.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.800,00	14.998.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.245.600,00	22.245.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	42.750.000,00	

Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.655.600,00	553.655.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.053.820,00	1.247.439.420,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.476.654,00	680.476.654,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.666.000,00	199.666.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.665.900,00	243.665.900,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.220.000,00	787.220.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	870.000.000,00	870.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.832.200,00	11.832.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.602.500,00	3.602.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.895.000,00	14.895.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	17.751.273.000,00	17.283.627.794,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.952.000,00	31.952.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.528.200,00	7.528.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.075.600,00	49.744.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.049.200,00	96.049.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.648.600,00	5.648.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.921.000,00	136.921.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	187.327.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.772.020,00	471.772.020,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.511.380,00	1.133.511.380,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.479.744.000,00	3.479.744.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.221.011.400,00	1.221.011.400,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS			
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.800,00	3.486.800,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.523.800,00	55.523.800,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
Indikator Hasil	: Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			

Kegiatan	: 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.100,00	1.177.100,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya			
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.624.600,00	28.624.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.939.600,00	39.939.600,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.452.600,00	349.452.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.941.200,00	236.941.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.848.000,00	37.848.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.890.000,00	53.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.800,00	24.500.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.970.600,00	44.970.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.890.100,00	122.890.100,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	9.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.200.000,00	122.200.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan			
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.536.600,00	7.536.600,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.391.800,00	5.391.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.641.100,00	5.641.100,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang tertangani			
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah korban bencana yang terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.936.700,00	257.936.700,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar			
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.258.400,00	267.258.400,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0001 UPTD Pelayanan Sosial			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.837.600,00	9.837.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.954.300,00	159.954.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.428.000,00	17.428.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	201.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.554.520,00	320.554.520,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.564.880,00	249.110.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.868.300,00	25.868.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.069.450.000,00	3.069.450.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.400.820,00	1.272.400.820,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya			
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.891.500,00	71.891.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	89.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.406.700,00	74.406.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	12.470.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.000.000,00	565.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.580.300,00	149.580.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.276.000,00	3.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.110.400,00	6.110.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.090.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.026.000,00	12.026.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.057.700,00	18.837.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.753.369,00	216.753.369,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.795.128,00	80.795.128,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.015.288,00	36.015.288,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.434.980,00	283.604.980,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.350.000,00	336.350.000,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0002 UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.400,00	5.000.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.898.800,00	7.898.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.803.500,00	2.803.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.839.896,00	102.839.896,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.182.140,00	127.182.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.793.040,00	269.793.040,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3			
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku			
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.180.000,00	203.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	568.320.000,00	1.176.764.000,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)			
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	28.299.312.000,00	28.818.180.267,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.994.200,00	14.994.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.968.200,00	34.968.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.762.800,00	5.762.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	64.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.795.100,00	27.795.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.600,00	8.637.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	5.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.220.000,00	158.220.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.288.000,00	65.010.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	396.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.571.323,00	626.571.323,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.495.928,00	658.915.228,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.728.560,00	170.728.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.799.920,00	1.058.890.400,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.997.600,00	44.997.600,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.117.200,00	133.117.200,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.313.800,00	36.313.800,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan			
Kegiatan	: 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.566.400,00	5.566.400,00	
Kegiatan	: 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	25.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan UMK			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos			
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.300.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG			
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.834.200,00	10.834.200,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.500,00	14.991.500,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.100,00	19.980.100,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Keluarga			
Kegiatan	: 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan			

Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.203.500,00	9.203.500,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah			
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.400,00	9.996.400,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)			
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	10.830.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.619.600,00	650.619.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.146.000,00	91.145.400,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	9.630.000,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0002 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan operasional perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.052.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.176.000,00	15.176.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.244.880,00	161.294.880,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.962.940,00	38.962.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.643.840,00	348.643.840,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan			
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.500.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.150.000,00	243.150.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan			

Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.900,00	4.499.900,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	69.020.000,00	

Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi
Kegiatan	: 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.694.020,00	498.784.500,00	

Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Indikator Hasil	: Angka Kecukupan Energi (AKE)
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerawanan pangan
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.888.060,00	162.888.060,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.410.759.820,00	6.410.759.820,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi			
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.783.980,00	97.783.980,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.500,00	4.180.500,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.967.200,00	14.967.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.884.800,00	32.884.800,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.230.000,00	139.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.988.120,00	117.988.120,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.117.290,00	178.117.290,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.364.280,00	80.364.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.340.000,00	39.340.000,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi			
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.769.620,00	385.405.340,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.761.860,00	150.079.720,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan			
Kegiatan	: 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan			
Sub Kegiatan	: 2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.500.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000.000,00	0,00	
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
Indikator Hasil	: Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi			
Kegiatan	: 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi			
Sub Kegiatan	: 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.003.500,00	26.777.500,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
Indikator Hasil	: Persentase data informasi pertanahan yang handal			
Kegiatan	: 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.540.500,00	268.540.500,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik			
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			

Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.224.800,00	114.224.800,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.546.380,00	206.546.380,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Indeks kualitas air laut Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas udara Indeks kualitas air			
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			
Indikator Keluaran	: Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.999.400,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.950.900,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	288.950.900,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
Kegiatan	: 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.556.000,00	99.556.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.114.700,00	14.114.700,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Indikator Hasil	: Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH			
Kegiatan	: 2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksaankan			
Sub Kegiatan	: 2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.267.800,00	19.267.800,00	

Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga
Kegiatan	: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3
Sub Kegiatan	: 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.346.020,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	225.346.020,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	

Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.710.800,00	34.710.800,00	

Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan
Kegiatan	: 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.404.300,00	22.404.300,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)			
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.500,00	7.995.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.999.900,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.644.500,00	20.644.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.295.850,00	79.295.850,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.699.466,00	215.699.466,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan			
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.962.307,00	59.962.307,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0007 UPTD Pengelolaan Sampah			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)			
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.721.000,00	7.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.435.800,00	14.435.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.013.100,00	4.013.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.487.100,00	70.373.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.737.840,00	323.737.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.080.000,00	119.080.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional			
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.132.670.988,00	10.534.668.488,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	65.300.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target			
Kegiatan	: 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.824.320,00	483.824.320,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target			
Kegiatan	: 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.237.620,00	427.237.620,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.429.020,00	267.974.260,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.194.773.000,00	10.225.809.044,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.726.820,00	130.726.820,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.763.400,00	7.763.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.480.400,00	14.756.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599.788.400,00	589.188.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000,00	75.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.767.000,00	7.767.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	7.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	14.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.816.000,00	363.816.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.340.000,00	207.340.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.086.000,00	200.086.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	182.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.691.280,00	509.691.280,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.323.389.260,00	1.323.389.260,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.660.000,00	89.660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa			
Kegiatan	: 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.543.320,00	320.543.320,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa cepat berkembang			
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.753.420,00	569.753.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.032.600,00	574.032.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.557.000,00	127.557.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif			
Kegiatan	: 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.081.660,00	696.626.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.871.360,00	489.871.360,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.119.220,00	617.664.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.187.783.060,00	2.572.788.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.251.400.000,00	1.506.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana			
Kegiatan	: 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.121.540,00	332.121.540,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.423.600,00	21.423.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.236.300,00	16.236.300,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.795.646.000,00	18.393.542.067,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.519.500,00	19.519.500,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.000,00	6.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.107.800,00	14.107.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.096.700,00	359.587.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.303.300,00	7.303.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.822.250,00	10.822.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.222.000,00	305.222.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	920.000.000,00	1.920.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	245.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.058.860,00	330.376.720,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.239.280,00	733.239.280,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.864.400,00	47.864.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.053.500,00	904.371.360,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Rasio konektivitas layanan angkutan darat			
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.431.440,00	341.431.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.140.400,00	109.140.400,00	

Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.957.700,00	26.957.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.651.400,00	26.651.400,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.10.0004 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.296.100,00	156.296.100,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.236.120,00	346.553.980,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

Indikator Hasil	: Persentase Aksesibilitas Pelayaran
Kegiatan	: 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kajian
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.047.840,00	271.047.840,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	

Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Indikator Hasil	: Persentase lintasan kereta api yang terbangun
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.437.140,00	272.437.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	

Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.812,00	3.850.812,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.546.700,00	7.546.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.088.300,00	76.088.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.600,00	719.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.136.000,00	34.136.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.000,00	666.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.034.940,00	41.034.940,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.780.740,00	195.780.740,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	18.480.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional			
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.282.000,00	566.282.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.172.340,00	1.381.149.130,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.000.000,00	124.000.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.400,00	964.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.026.300,00	8.026.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.696.900,00	12.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	9.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.988.000,00	2.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.022.000,00	45.022.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah kursi yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.160.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000,00	396.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	32.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.122.540,00	39.122.540,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.131.840,00	319.620.235,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	12.420.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita			
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.346.483.472,00	11.018.971.867,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.839.600,00	3.839.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.660.000,00	16.660.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.969.700,00	54.122.500,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.042.440,00	141.042.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	8.320.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.295.070,00	1.087.783.465,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.208.721,00	575.208.721,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Kinerja			
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.928.400,00	8.212.300,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.833.900,00	59.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.548.000,00	1.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.226.400,00	351.203.190,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.875.800,00	22.875.800,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	98.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM			
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.567.000,00	139.567.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)			
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.018.000,00	18.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.139.800,00	5.139.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.518.500,00	6.518.500,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.985.533.000,00	14.413.900.414,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.713.000,00	38.673.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	665.000.000,00	1.290.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.488.840,00	4.488.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.007.200,00	40.007.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.660.900,00	13.660.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.522.200,00	31.522.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.329.000,00	121.329.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.501.960,00	1.386.501.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.570.000,00	99.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.874.900,00	1.271.601.100,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.480.000,00	84.480.000,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase informasi yang disebarluaskan			
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.857.440,00	923.932.960,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.359.038.200,00	5.424.683.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.259.640,00	1.385.259.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.087.840,00	537.087.840,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.360.740,00	1.766.299.580,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.442.100,00	47.048.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.375.300,00	671.169.300,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Teknologi Informatika			
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.175.700,00	1.305.715.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.086.720,00	1.342.980.460,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.292.526.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.984.461.170,00	115.184.461.170,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	420.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.728.356.240,00	11.643.929.040,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.000.000,00	609.000.000,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0001 UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.668.918.940,00	6.936.378.140,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0002 UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.693.424,00	2.109.403.424,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	708.271.500,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			

Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.914.420,00	122.914.420,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.600,00	5.999.600,00	

Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.616.431.000,00	12.285.642.851,00	

Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.613.000,00	10.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.403.000,00	45.418.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	39.161.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.576.900,00	11.576.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.893.000,00	55.893.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.808.900,00	491.282.300,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	230.256.150,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.000.000,00	259.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.371.360,00	879.916.600,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.574.980,00	776.574.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.951.560,00	412.951.560,00	
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP			
Kegiatan	: 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.410.700,00	193.410.700,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.02.0003 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi berkualitas			
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	49.999.500,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.363.880,00	100.909.120,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			
Kegiatan	: 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.408.980,00	148.408.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	49.999.900,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Persentase pertumbuhan wirausaha			
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.685.230,00	939.685.130,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.500,00	49.999.500,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: Persentase UMKM Naik Kelas			
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.328.560,00	219.328.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.603.800,00	263.603.800,00	
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.800,00	665.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.900,00	2.725.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.190.060,00	158.190.060,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.007.140,00	94.007.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.571.080,00	79.571.080,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi			
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.359.361.000,00	12.432.519.443,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Diklat			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.599.100,00	12.599.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.132.600,00	54.132.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	72.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.014.600,00	15.014.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.048.000,00	214.048.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.076.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.076.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.000,00	2.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.007.080,00	1.319.007.080,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.440.700,00	549.440.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.140.000,00	39.140.000,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)			
Kegiatan	: 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Produk Hukum Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.968.560,00	480.968.560,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali			
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.448.560,00	260.993.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
Kegiatan	: 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.901.400,00	458.901.400,00	
Kegiatan	: 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.186.420,00	155.186.420,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Nilai Investasi			
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.725.000,00	297.725.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.590.560,00	299.590.560,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.834.000,00	545.834.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan			
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.084.280,00	106.084.280,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan			
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda yang berprestasi			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.521.100,00	91.521.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.258.400,00	163.558.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.941.900,00	587.641.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.660.200,00	280.660.200,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi			
Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.813.286.000,00	5.813.286.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.115.800,00	5.480.115.800,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.881.000,00	169.881.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	52.650.000.000,00	53.450.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Statistik			
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.743.840,00	150.743.540,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.656.480,00	164.656.480,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.896.880,00	101.441.520,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Indeks Evalaksan			
Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.399.300,00	17.567.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.137.340,00	163.637.340,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.166.900,00	33.541.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.758.000,00	78.564.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	28.000.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.095.840,00	128.621.840,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.447.020,00	224.611.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.938.000,00	4.938.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi Keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	21.025.047.000,00	21.132.451.930,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.667.900,00	579.667.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.000,00	2.651.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.323.200,00	30.323.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.550.000,00	111.550.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.496.000,00	5.496.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.475.328,00	705.465.328,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.589.700,00	906.589.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.215.000,00	24.215.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.828.480,00	1.406.918.960,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	58.552.200,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra			
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.815.020,00	550.815.020,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.798.202.320,00	28.473.747.560,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.692.175.380,00	8.692.175.380,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.819.040,00	1.228.665.040,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.210.000,00	466.210.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	17.128.600.000,00	22.213.600.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan			
Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.790.920,00	1.115.790.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.121.840,00	252.121.840,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi			
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.497.400,00	47.497.400,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola			
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.357.100,00	256.902.340,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.581.820,00	152.581.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.347.000,00	48.347.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.837.000,00	25.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.433.400,00	37.433.400,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Taman Budaya			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.320.700,00	56.320.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00	40.998.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.144.000,00	43.144.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.000.000,00	896.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.088.000,00	90.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.773.440,00	1.035.773.440,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	76.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000,00	19.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.828.480,00	1.415.828.480,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra			
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	570.000.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Museum Bali			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.292.200,00	70.292.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	81.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	44.039.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.768.500,00	5.768.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.714.000,00	30.348.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.402.500,00	12.402.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	233.652.900,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.850.000,00	206.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.528.500,00	66.852.024,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.684.000,00	1.419.226.880,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.990.000,00	91.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.950.000,00	39.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000.000,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali			
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.879.800,00	712.879.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.220.200,00	1.137.220.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.900.000,00	149.900.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0003 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.500,00	34.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.483.140,00	42.483.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.475.000,00	43.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.004.000,00	5.004.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.672.000,00	14.672.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: "Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.970.000,00	49.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.859.668,00	2.774.859.668,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.930.000,00	148.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.760.000,00	14.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Pengunjung Museum			
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah kunjungan masyarakat pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.061.300,00	600.061.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.106.100,00	1.125.106.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.832.600,00	274.832.600,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)			
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.660.200,00	19.660.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.564.600,00	6.564.600,00	

Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.853.583.000,00	9.019.788.917,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.007.200,00	9.007.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.345.800,00	34.345.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.110.000,00	29.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.872.000,00	545.872.000,00	

Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.940.500,00	305.940.500,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.597.240,00	401.337.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.436.760,00	1.528.436.760,00	
Program	: 2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
Indikator Hasil	: Indeks Membangun Desa Adat			
Kegiatan	: 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina			

Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.953.960,00	2.012.044.440,00	
5.1.05	Belanja Hibah	463.330.710.756,00	612.180.710.756,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Desa Adat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.226.420,00	455.226.420,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses			
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.152.000,00	222.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.349.340,00	486.349.340,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan			
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.746.420,00	471.366.420,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi			
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik			
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.682.140,00	67.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.682.140,00	37.682.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.682.040,00	64.682.040,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.682.140,00	67.682.140,00	

Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.682.140,00	62.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.364.280,00	125.364.280,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun			
Kegiatan	: 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.330.940,00	50.330.940,00	
Kegiatan	: 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.367.540,00	51.367.540,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			

Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan			
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penataan Arsip			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Dinamis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.192.440,00	338.192.440,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.757.500,00	40.757.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.957.100,00	282.957.100,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.110.224.000,00	20.987.785.114,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.542.400,00	10.542.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	636.724.000,00	652.648.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.767.300,00	169.767.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.477.400,00	18.477.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.120.000,00	142.972.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.284.600,00	155.284.600,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.536.000,00	141.162.905,00	

Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.220.480,00	851.363.680,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.579.652,00	619.175.562,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.730.000,00	528.730.000,00	
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.902.200,00	4.402.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.141.320,00	514.231.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah produksi perikanan tangkap			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.115.200,00	139.310.920,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	405.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	45.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.760.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil			
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.442.140,00	218.576.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.702.800,00	494.702.800,00	

Kegiatan	: 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Indikator Hasil	: Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan

Kegiatan	: 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	525.050.280,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.987.280,00	0,00	

Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.274.000,00	5.274.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.000,00	5.293.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.795.800,00	30.795.800,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.897.140,00	114.897.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.101.260,00	243.217.946,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	5.070.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.423.299.450,00	1.423.299.391,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.670.619,00	784.670.619,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.889.000,00	99.389.000,00	

Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.633.200,00	20.633.200,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.316.100,00	49.316.100,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.600.000,00	108.600.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.668.640,00	117.668.640,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.260.500,00	17.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.633.480,00	494.178.720,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.799.371,00	405.765.821,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.994.000,00	39.594.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.188.600,00	5.188.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.967.100,00	4.967.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.170.000,00	38.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.100,00	1.998.100,00	

Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.115.400,00	107.115.400,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.029.000,00	180.968.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.371.360,00	933.416.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
Indikator Hasil	: Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.190.000,00	116.190.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.500.000,00	615.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
Indikator Keluaran	: Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.801.600,00	19.801.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.865.900,00	88.131.400,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.552.000,00	107.552.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.682.140,00	97.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.899.200,00	55.899.200,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)			
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	138.001.420,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.001.420,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.708.603.257,00	11.359.957.024,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.484.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.484.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.649.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.529.600,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	565.852.200,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.957.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	67.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.942.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.942.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	217.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.295.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	134.462.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.462.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.311.916.440,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.603.560,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	588.992.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.492.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	0,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Kegiatan	: 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.885.100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.885.100,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: [deleted] Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Wisata Award			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.802.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.802.900,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pedoman Jalur Wisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	356.137.820,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.592.580,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.346.700,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.346.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.427.180,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	98.427.180,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.264.020,00	162.264.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.866.120,00	140.866.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.567.720,00	223.040.960,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	113.164.780,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.164.780,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	82.131.540,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.131.540,00	0,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan			
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.982.140,00	86.982.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			

Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.675.620,00	153.675.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.678.160,00	168.223.400,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.317.920,00	326.317.920,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.292.320,00	307.837.560,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	42.879.400.000,00	42.190.448.420,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.217.300,00	350.307.780,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	13.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.848.000,00	23.848.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.437.300,00	28.437.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.884.000,00	34.710.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	468.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.655.720,00	318.655.720,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.754.960,00	1.609.754.960,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.642.800,00	771.642.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.822.200,00	204.822.200,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian			
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.064.060,00	170.154.540,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	110.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.926.020,00	2.047.879.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	44.400.000,00	44.400.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah			

Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.980.400,00	408.525.640,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.535.000.000,00	3.810.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian			
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.324.220,00	1.047.869.460,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.755.000,00	25.755.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.158.900,00	173.704.140,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis			
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.968.560,00	1.422.286.420,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.882.140,00	47.882.140,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan			
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.928.560,00	129.246.420,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis			
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.988.820,00	268.534.060,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.285.350,00	275.148.450,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0012 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.000,00	1.227.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.548.200,00	6.548.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.360.000,00	239.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.776.000,00	191.776.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.541.420,00	195.541.420,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.278.520,00	607.914.240,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)			
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.631.980,00	492.722.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.575.880,00	568.756.840,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.331.800,00	378.877.040,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0013 UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.400,00	12.587.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.055.736,00	16.055.736,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	64.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.125.480,00	274.125.480,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.647.620,00	208.647.620,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.457.120,00	306.457.120,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Populasi Ternak			
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.390.545,00	2.365.748.205,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0014 UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.400,00	1.406.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.348.200,00	3.348.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.609.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.056.180,00	76.056.180,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.717.140,00	107.717.140,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.182.140,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura			
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.616.260,00	368.616.260,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.666.620,00	374.666.620,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0015 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.900,00	1.575.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.674.000,00	4.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.000,00	29.998.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.389.028,00	133.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.868.820,00	113.868.820,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.384.280,00	127.384.280,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.522.140,00	165.522.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.163.924.000,00	1.163.924.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.363.309.000,00	1.363.309.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan			
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Batang Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Umbi Jumlah Penyediaan Benih Perkebunan Bermutu Berbentuk Biji Jumlah Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bermutu Berbentuk Biji/Benih			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.701.640,00	685.701.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.591.320,00	709.591.320,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.102.060,00	430.102.060,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0014 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi			
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.398.140,00	275.398.140,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)			
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.899.600,00	35.899.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	35.243.812.000,00	36.743.021.345,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	41.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.294.100,00	16.294.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.940.900,00	45.940.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	92.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.680.900,00	14.680.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	61.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.336.000,00	178.336.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.043.300,00	35.043.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.978.300,00	264.978.300,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	207.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.908.080,00	375.908.080,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.063.600,00	1.048.063.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.925.000,00	362.925.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.405.000,00	1.118.405.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.317.820,00	567.317.820,00	
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
Indikator Hasil	: Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan			
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.334.720,00	184.334.720,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kelas kelompok			
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.362.000,00	52.362.000,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan			
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	70.961.240,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.961.240,00	0,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara			
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.058.300,00	3.058.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.685.900,00	6.627.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	9.600.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	34.189.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.610.340,00	38.434.340,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.569.640,00	149.569.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.788.520,00	685.788.520,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.600,00	2.975.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.832.700,00	12.832.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	35.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.580.200,00	3.580.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.318.500,00	36.318.500,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	17.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.143.340,00	40.143.340,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.247.120,00	485.247.120,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	120.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	569.100.000,00	569.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.980.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.748.500,00	12.748.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.728.100,00	2.728.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.720.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.398.720,00	118.398.720,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.369.940,00	256.369.940,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.827.910,00	176.827.910,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.200,00	2.989.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.299.400,00	10.299.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	65.468.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.600,00	2.383.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	30.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.085.940,00	40.085.940,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.895.000,00	175.895.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.053.050,00	85.053.050,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.489.350,00	427.489.350,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.534.280,00	84.534.280,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0005 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai			
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.400,00	2.410.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.202.600,00	11.202.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.474.600,00	2.474.600,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.736.440,00	595.249.440,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai			
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.878.000,00	126.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	15.580.000,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
Indikator Hasil	: Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan			
Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan			
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
Indikator Hasil	: Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
Kegiatan	: 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.499.500,00	174.499.500,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)			
Kegiatan	: 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.854.000,00	64.854.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.592.978.000,00	14.709.918.886,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.912.300,00	14.912.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.993.800,00	60.284.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.223.000,00	160.853.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	102.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.438.900,00	14.438.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.233.000,00	302.233.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	355.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.469.960,00	606.469.960,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.194.900,00	227.194.900,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.120.700,00	822.120.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.785.280,00	326.785.280,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
Kegiatan	: 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.387.120,00	322.387.120,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Pasar ber SNI			
Kegiatan	: 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pasar yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.426.100,00	111.426.100,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase stabilitas harga barang Pokok			
Kegiatan	: 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.213.800,00	49.213.800,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif			
Kegiatan	: 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.600,00	49.991.600,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			
Indikator Keluaran	: Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	456.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.711.340,00	42.711.340,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.874.080,00	146.873.880,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali			
Kegiatan	: 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.598.080,00	272.598.080,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			

Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)			
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.800,00	1.492.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.986.600,00	19.986.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.729.000,00	5.729.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.378.560,00	159.378.560,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.262.140,00	102.262.140,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.997.020,00	275.847.620,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			

Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.681.540,00	38.226.780,00	
5.1.05	Belanja Hibah	35.000.000,00	260.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.489.867.820,00	1.489.867.820,00	

Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Data Industri
Kegiatan	: 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Indikator Keluaran	: Persentase Data Industri yang terkumpul
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD Rumah Kreatif
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)
Kegiatan	: 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.764.600,00	22.764.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.673.100,00	10.673.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.372.140,00	49.372.140,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.667.140,00	101.667.140,00	
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh			
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.213.900,00	827.213.900,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Indikator Hasil	: Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD			
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target			
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	24.884.800,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Umum dan Protokol
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.056.020,00	579.910.920,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.300.120,00	672.788.515,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.118.900,00	365.607.295,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.399.360,00	689.399.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.794.620,00	1.413.994.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.544.170.576,00	5.829.170.576,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.576.965.520,00	8.791.666.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.664.380,00	540.664.380,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.354.000,00	2.311.354.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.567.861.984,00	16.097.861.984,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.966.123.000,00	5.220.510.390,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.696.544.050,00	6.749.032.445,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.221.926,00	6.569.456.177,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.500.000,00	803.700.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	455.948.436,00	455.948.436,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.805.000,00	144.805.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.111.674.012,00	6.885.050.834,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.852.441.820,00	17.466.496.420,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	619.930.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.556.220,00	795.556.220,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.089.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.500.000,00	159.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.114.100,00	656.794.100,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.663.540,00	2.019.518.190,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum			
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.774.200,00	15.774.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.035.300,00	106.035.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	836.307.200,00	836.116.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.500,00	14.999.500,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.463.000,00	99.463.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.261.420,00	403.261.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.478.520,00	844.478.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	49.990.000,00	
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			

Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum			
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.793.360,00	1.296.789.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.015.760,00	162.015.760,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.212.640,00	255.212.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.802.760,00	417.177.465,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan			
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.821.410.700,00	2.860.012.785,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.918.860,00	240.918.860,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	59.053.914.000,00	60.941.697.205,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	247.336.742,00	470.651.442,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.015.500,00	370.992.290,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.740.500,00	13.740.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.302.200,00	16.302.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.707.100,00	382.638.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.223.000,00	23.223.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.018.000,00	330.018.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tertata			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.172.140,00	915.172.140,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.560.000,00	71.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali			
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.600.120,00	403.600.120,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.760.200,00	186.760.200,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti			

Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.874.600,00	413.874.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.979.900,00	53.979.900,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.833.160,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.941.660,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	370.469.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.596.200,00	0,00	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual			
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Mental Spiritual			
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.573.030.940,00	6.545.519.335,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.636.780,00	382.636.780,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.833.134.520,00	3.805.622.915,00	
5.1.05	Belanja Hibah	26.185.000.000,00	36.985.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi			
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.355.700,00	4.355.700,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.059.760,00	17.059.760,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.746.650,00	123.746.650,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.868.600,00	749.944.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.988.000,00	294.158.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.583.340,00	769.583.340,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.060.000,00	90.060.000,00	

Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik			
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.682.140,00	187.682.140,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.543.340,00	104.903.340,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	15.727.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.491.240,00	151.786.940,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	15.727.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.885.100,00	19.885.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.672.140,00	94.132.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.189.700,00	15.727.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.868.540,00	125.788.540,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.379.400,00	31.455.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.072.160,00	1.628.798.360,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	803.187.200,00	803.187.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.957.000,00	56.957.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.196.000,00	217.116.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.250.000,00	473.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.870.000,00	114.870.000,00	
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti			
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.787.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	574.695.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.002.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	431.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.790.000,00	206.790.000,00	
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
Indikator Hasil	: Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik			
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.976.000,00	64.976.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	6.809.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.027.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.536.000,00	49.495.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.502.000,00	103.502.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	17.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.094.000,00	29.094.000,00	
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.964.000,00	39.964.000,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.161.000,00	42.161.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)			
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.401.640,00	552.215.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.668.140,00	154.268.140,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.013.782.000,00	10.608.584.427,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.744.940,00	136.744.940,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.951.640,00	135.951.640,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.600.400,00	169.600.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.215.800,00	1.022.689.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.358.543.300,00	1.425.027.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.240.000,00	135.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.108.000,00	1.062.108.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.734.350.920,00	4.734.325.920,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.780.798.200,00	1.651.022.200,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas			

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000,00	9.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.613.306.360,00	1.625.506.728,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.610.132.060,00	3.512.313.020,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.532.650,00	1.163.232.650,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	454.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.080.000,00	717.080.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	58.289.304.663,00	60.196.714.663,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.537.787.500,00	2.627.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.761.040,00	287.761.040,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.530.360,00	177.530.360,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.836.260.040,00	1.438.201.120,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)			
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.843.680,00	1.340.716.680,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.805.504.220,00	12.755.792.320,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.983.680,00	218.158.520,00	

Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.649.331.340,00	592.907.340,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.662.496.040,00	105.311.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.956.040,00	1.940.284.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.204.040,00	1.639.835.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.971.740,00	1.643.944.740,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.316.366.560,00	8.707.818.560,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.365.501.500,00	7.832.458.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.674.489.920,00	7.845.451.220,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.011.939.280,00	8.377.029.280,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.936.000,00	1.269.858.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.876.900,00	1.043.604.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.282.039.520,00	4.282.039.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.288.832.448,00	3.251.570.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.451.180,00	906.119.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.342.880,00	2.202.327.880,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.636.986.680,00	3.536.666.680,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.565.732.420,00	3.565.708.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.335.400,00	1.241.038.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.550.940.730,00	23.523.429.125,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.141.080,00	817.141.080,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.661.184.220,00	10.581.777.220,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.495.880,00	445.563.880,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.387.681.800,00	2.630.054.800,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.957.800,00	205.957.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.100,00	7.059.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.171.800,00	6.171.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.823.500,00	7.823.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.819.500,00	1.819.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.044.000,00	2.043.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.151.600,00	4.151.100,00	

Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.340.448.000,00	12.762.247.117,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.206.700,00	198.206.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.454.120,00	129.454.120,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.301.940,00	59.301.940,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.156.840,00	87.156.840,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.901.000,00	1.060.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.323.140,00	123.323.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.273.940,00	67.273.940,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.006.140,00	65.006.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.682.140,00	103.682.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.000.140,00	681.550.140,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan			

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.600.000,00	183.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.812.940,00	46.812.940,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.670.140,00	13.158.535,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.282.140,00	337.282.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.540.160,00	558.540.160,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.255.504,00	874.255.504,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.132.140,00	173.132.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.682.140,00	73.682.140,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.695.006.498,00	1.390.006.498,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku			
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.999.900,00	9.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.008.300,00	69.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.682.484.940,00	1.648.318.140,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.380.760,00	516.569.760,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.972.800,00	21.972.800,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.355.700,00	185.962.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.143.400,00	524.407.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.034.100,00	142.122.400,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data SIPD			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.339.240,00	67.611.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.025.880,00	157.977.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.603.540,00	100.283.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.626.460,00	269.850.460,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.149.160,00	230.947.555,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.987.560,00	257.211.560,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.433.420,00	255.433.420,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.432.240,00	96.112.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.393.680,00	199.753.680,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.906.540,00	297.898.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.334.800,00	71.334.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.548.800,00	259.548.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.359.600,00	73.359.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)			
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.005.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.005.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	18.529.654.581,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	19.447.248.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	423.884.680,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.884.680,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.358.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.358.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.122.069.900,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	982.069.900,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	569.761.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.761.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.486.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.486.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.250.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	346.292.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.138.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.040.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	285.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	738.703.480,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.703.480,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	130.516.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.516.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	823.013.560,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.013.560,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	22.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.000.000,00	0,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu			
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.336.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.336.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	241.803.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.253.700,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.752.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.487.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	749.547.160,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.738.160,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	418.318.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.071.200,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	202.814.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.814.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	176.576.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.576.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	205.387.300,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.387.300,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	193.928.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.928.700,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	601.259.296,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.462.296,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	424.829.340,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.550.340,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	98.399.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.481.200,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.506.377.057,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.506.377.057,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	366.931.922.273,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	52.205.727.068,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	1.821.886.080.384,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	149.555.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.801.200,00	0,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu			
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	113.211.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.211.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.876.100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.876.100,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	349.999.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.348.512.460,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.357.460,00	0,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.665.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.665.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.999.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.990.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	88.881.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.881.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	57.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	147.172.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.172.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.260.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	305.535.980,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.535.980,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	554.442.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	554.442.000,00	0,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD			

Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.415.996.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.996.700,00	0,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.867.600,00	18.867.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.045.100,00	19.045.100,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	130.819.254.219,00	129.502.421.382,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	84.324.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.727.000,00	7.727.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.624.100,00	147.624.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.570.000,00	2.580.155.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.800,00	2.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.374.000,00	892.274.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	431.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775.050.000,00	783.526.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	840.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.973.000,00	602.647.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.044.599,00	851.395.600,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.994.000,00	2.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.433.104,00	387.433.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.337.373,00	448.337.373,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.961.640,00	129.861.640,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.807.840,00	1.085.773.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.849.220,00	907.337.615,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	390.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.436.661,00	1.214.436.661,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.975.900,00	0,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.379.600,00	231.579.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.435.400,00	211.316.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	106.817.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.995.900,00	243.995.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	45.300.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.000,00	3.042.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.053.500,00	166.169.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.809.000,00	11.809.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.800,00	5.068.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.960.000,00	96.960.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.075.000,00	48.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.677.340,00	189.677.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	31.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.465.063,00	646.465.063,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	22.980.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.785.987.740,00	1.761.532.980,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.709.140,00	2.034.709.140,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.665.600,00	3.665.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.049.200,00	141.129.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.158.100,00	14.158.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	39.285.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	189.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.069.061,00	190.069.061,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.976.600,00	47.976.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.506.740,00	147.506.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	34.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.569.731,00	811.569.731,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.970.400,00	12.970.400,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.784.260,00	405.454.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.196.400,00	471.196.400,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.491.500,00	8.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.995.800,00	129.995.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.366.700,00	6.366.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	28.350.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	203.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.756.855,00	293.756.855,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.363.000,00	44.363.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.350.140,00	223.350.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	19.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.021.200,00	398.821.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.378.300,00	25.378.300,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.003.540,00	498.003.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.785.680,00	540.560.680,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	5.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.672.800,00	237.225.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.731.650,00	22.731.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.772.500,00	5.772.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	27.120.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.000.000,00	378.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.230.947,00	437.230.947,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.178.800,00	24.178.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.815.340,00	185.815.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.857.697,00	826.857.697,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.570.000,00	30.570.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.274.860,00	2.356.365.340,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.787.820,00	749.787.820,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.819.400,00	5.819.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.206.900,00	333.538.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.691.200,00	79.691.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.000,00	3.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.515.000,00	35.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.055.000,00	23.055.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.000.000,00	487.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.882.444,00	310.882.444,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.116.500,00	49.116.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.040.880,00	202.090.480,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	10.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.616.902,00	822.716.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.752.500,00	122.752.500,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.868.660.500,00	2.868.660.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.785.680,00	579.163.540,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.677.200,00	10.677.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.222.500,00	119.222.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	13.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.072.963,00	295.072.963,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.970.000,00	38.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.670.000,00	128.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.730.000,00	20.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.625.474,00	633.540.474,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.486.100,00	50.486.100,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.953.500,00	1.140.953.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.836.380,00	706.236.380,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.601.400,00	10.601.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.298.200,00	106.298.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.200,00	3.946.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.370.000,00	32.370.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.077.200,00	285.077.200,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.165.000,00	97.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	22.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.503.540,00	422.503.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.947.500,00	8.947.500,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.049.960,00	535.049.960,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.702.100,00	635.702.100,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung			

Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.697.000,00	2.697.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.276.900,00	108.276.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.300,00	7.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	1.999.500,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.620.000,00	59.540.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.924.000,00	136.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.141.131,00	697.141.131,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.693.600,00	18.693.600,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.023.040,00	479.913.040,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.103.540,00	490.933.540,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja			
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.062.800,00	2.062.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.994.500,00	108.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.499.300,00	5.499.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.647.500,00	2.647.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	41.760.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.878.412,00	236.878.412,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.645.800,00	52.645.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.213.740,00	114.213.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	17.040.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.692.840,00	353.692.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.246.800,00	11.246.800,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.685.680,00	510.685.680,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.773.540,00	512.773.540,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja (BKPSDM)			
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana			

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.900.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.350.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	231.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	231.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	83.775.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.980.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.672.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.240.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	168.534.554.612,00	41.079.950.985,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.918.000,00	180.094.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	15.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.440.900,00	158.440.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.191.000,00	99.191.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.695.000,00	8.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.729.600,00	3.729.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.070.000,00	407.192.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.200.000,00	52.850.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.600.000,00	253.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.514.020,00	933.514.020,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.807.600,00	812.207.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.889.200,00	64.889.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.700.000,00	154.170.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi			
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.386.500,00	10.386.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.617.200,00	288.721.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.556.420,00	101.533.210,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.398.420,00	142.398.420,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.396.240,00	82.396.240,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.205.140,00	125.205.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.113.140,00	180.913.140,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.943.674.540,00	1.477.649.540,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.967.280,00	406.455.675,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.873.780,00	136.362.175,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.131.180,00	129.591.180,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			

Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.360.280,00	339.810.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.990.280,00	141.990.280,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.694.700,00	27.674.700,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0001 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.815.200,00	11.815.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.166.000,00	40.166.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.537.000,00	25.537.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.774.980,00	263.774.980,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.218.000,00	78.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.890.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi			
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN			

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.912.600,00	1.196.598.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0002 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.359.832.000,00	25.552.305.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	755.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	460.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	125.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi			
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.764.280,00	338.484.675,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.042.440,00	599.308.440,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.799.840,00	257.799.840,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	9.189.133.077,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	189.782.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	152.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	826.105.916,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan			
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	408.149.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	520.833.600,00	

Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	595.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	967.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	84.522.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	74.273.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	142.988.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	133.229.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	227.939.300,00	
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.02.00 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.259.000,00	35.259.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.011.900,00	11.011.900,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.056.236.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.951.000,00	21.951.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.912.300,00	198.912.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.494.000,00	107.494.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.300,00	24.180.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.046.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.005.200,00	13.915.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.820.180,00	324.818.580,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.681.916,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.247.602.060,00	1.198.692.540,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan			
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.149.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.299.900,00	244.299.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.207.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.162.400,00	128.765.400,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.199.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.165.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.499.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.998.900,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.075.900,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.999.300,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung			

Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.857.200,00	4.857.200,00	

Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.841.784.000,00	2.822.072.547,00	

Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: -
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.600,00	9.999.600,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.800,00	49.996.800,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.317.600,00	7.317.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.580.000,00	76.580.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.243.000,00	504.139.800,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	280.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.690.136,00	920.690.136,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.877.176,00	1.069.874.376,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.530.000,00	128.530.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.170.000,00	221.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.498.472,00	108.493.472,00	
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung			
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung			
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.569.400,00	45.569.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.416.472,00	247.416.472,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.023.888,00	2.825.023.888,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)			
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.028.400,00	67.962.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.267.100,00	43.267.100,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	21.385.658.000,00	22.531.187.910,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi yang terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.700,00	49.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.418.700,00	114.418.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.177.100,00	216.917.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.644.000,00	25.644.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.114.400,00	44.114.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.948.000,00	950.494.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.766.400,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.421.216.188,00	1.409.792.300,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang yang terpenuhi			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	275.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.332.640,00	306.332.640,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.679.260,00	1.979.659.260,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.244.280,00	94.464.280,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.420.000,00	464.200.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.408.560,00	200.271.660,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	0,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.060.460,00	425.059.880,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.232.480,00	250.232.480,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	199.994.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.115.840,00	300.115.840,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.080.880,00	900.080.880,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.299.200,00	406.278.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.232.480,00	489.710.480,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.232.480,00	145.732.480,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.227.820,00	1.214.054.820,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: [deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan			
Kegiatan	: 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.191.320,00	545.006.420,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.842.840,00	1.597.607.840,00	
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.348.120,00	550.275.120,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.999.500,00	299.961.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	699.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.983.200,00	139.725.200,00	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.212.800,00	34.212.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.995.000,00	14.995.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.821.852.164,00	8.348.401.423,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.100,00	14.989.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.178.600,00	19.178.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.406.400,00	89.406.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.623.800,00	34.623.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.100,00	4.996.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.330.000,00	217.530.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase paket pengadaan selesai			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.643.800,00	125.643.800,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	6.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	128.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.343.584,00	907.343.584,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: persentase barang milik daerah terpelihara			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.165.000,00	836.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.640.000,00	25.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.000.000,00	143.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	14.490.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.921.620,00	741.921.620,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.578.883.500,00	3.578.883.500,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik			
Kegiatan	: 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.619.620,00	812.694.120,00	
5.1.05	Belanja Hibah	179.355.295.732,00	179.977.160.932,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Ormas yang terdata			
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.457.000,00	118.457.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah			
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.056.560,00	203.056.560,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial			
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			

Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.464.520,00	1.364.464.520,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.354.000,00	987.354.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	811.725.080.073,00	1.175.582.550.556,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00	171.480.190.582,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	171.170.332.800,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	832.932.027.174,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	248.917.013.352,00	255.917.013.352,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	248.917.013.352,00	

PJ. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)	81.50 Nilai											
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen											
1	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	86.632.400,00	101.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.632.400,00	101.992.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	182.126.000,00	148.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.126.000,00	148.042.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan											
3	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7684 Orang/ Bulan	1.050.389.690.000,00	1.146.289.783.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.389.690.000,00	1.146.289.783.066,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	102.942.500,00	102.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.942.500,00	102.942.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	154.048.600,00	154.048.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.048.600,00	154.048.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis											
6	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	43.025.000,00	88.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025.000,00	88.145.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	43.675.000,00	68.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.675.000,00	68.155.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen											
8	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	157.809.800,00	157.809.800,00	88.860.000,00	785.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.669.800,00	943.219.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	31.526.250,00	31.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526.250,00	31.526.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	625.094.000,00	625.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.094.000,00	625.094.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	100 Persen											
12	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen											
13	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.050.981.150,00	1.198.981.150,00	0,00	29.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.981.150,00	1.228.907.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.624.527.920,00	8.551.163.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624.527.920,00	8.551.163.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen											
15	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	692.685.000,00	786.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.685.000,00	786.585.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	663.214.550,00	1.338.214.550,00	990.726.258,00	1.088.726.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.940.808,00	2.426.940.818,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	382.189.500,00	398.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.189.500,00	398.289.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	100 Persen											
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 74.59 Nilai 60.23 Nilai											
18	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12 Unit	0,00	0,00	150.628.635.719,00	139.128.635.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.628.635.719,00	139.128.635.719,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	1.202.629.000,00	1.202.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.629.000,00	1.202.629.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
20	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	0,00	0,00	3.568.662.000,00	3.568.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.662.000,00	3.568.662.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
21	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	0,00	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	384.026.000,00	584.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.026.000,00	584.026.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
23	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA													
			Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	346.566.000,00	346.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.566.000,00	346.566.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
24	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah													
			[object Object]	[object Object]	0,00	0,00	3.165.000.000,00	8.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000.000,00	8.660.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
25	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	127 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	660.000,00	660.000,00	392.490.000,00	392.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.150.000,00	393.150.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
27	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	90 Unit	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
28	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6761 Peserta didik	5.114.836.090,00	5.114.836.090,00	1.029.484.310,00	1.029.484.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.320.400,00	6.144.320.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	910 Peserta Didik	1.267.939.700,00	2.065.979.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.939.700,00	2.065.979.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	43.660.703.700,00	40.393.577.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.660.703.700,00	40.393.577.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
31	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	70.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
32	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas													
			[object Object]	[object Object]	259.679.200,00	259.679.200,00	4.239.000.000,00	4.239.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.679.200,00	4.498.679.200,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	148 Satuan Pendidikan	97.925.040.000,00	100.586.794.633,00	74.790.430.000,00	77.452.184.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.715.470.000,00	178.038.979.266,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
34	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	89 Orang	29.999.400,00	29.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.400,00	29.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	62.919.500,00	59.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.919.500,00	59.769.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	0,00	0,00	1.693.944.000,00	1.693.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.944.000,00	1.693.944.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
37	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	21 Ruang	0,00	0,00	8.631.562.525,00	11.536.562.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631.562.525,00	11.536.562.525,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	124.999.800,00	124.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.999.800,00	124.999.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
39	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	89 Satuan Pendidikan	108.342.700,00	8.966.525.100,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.342.700,00	9.416.525.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen											
40	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	0,00	0,00	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa													
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	4 Ruang	3.323.200.000,00	3.323.200.000,00	7.330.300.000,00	7.330.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653.500.000,00	10.653.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	595.525.552,00	595.525.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.525.552,00	595.525.552,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	0,00	0,00	1.965.009.411,00	1.965.009.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.009.411,00	1.965.009.411,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
44	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium													
			0	1 0	0,00	0,00	205.252.000,00	205.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.252.000,00	205.252.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
45	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	380.000.000,00	380.000.000,00	3.370.000.000,00	3.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
46	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	58 Unit	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7909 Peserta didik	5.992.208.800,00	0,00	580.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.696.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
48	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7909 Peserta didik	0,00	5.954.559.500,00	0,00	618.136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.695.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
50	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	929.832.100,00	1.201.841.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.832.100,00	1.201.841.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
51	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	35.848.917.220,00	32.226.076.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848.917.220,00	32.226.076.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375 Orang	70.550.000,00	70.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.550.000,00	70.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	178 Satuan Pendidikan	402.278.200,00	498.278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.278.200,00	498.278.200,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	177 Satuan Pendidikan	119.565.220.000,00	120.807.335.299,00	52.049.480.000,00	53.291.595.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.614.700.000,00	174.098.930.598,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
55	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	173 Orang	31.835.000,00	55.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835.000,00	55.835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
56	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	31.250.000,00	72.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250.000,00	72.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik													
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
58	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0,00	0,00	8.640.518.078,00	8.207.219.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.518.078,00	8.207.219.062,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	0,00	0,00	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
60	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	0,00	6.253.548.300,00	0,00	3.079.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332.988.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	124.998.600,00	124.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.998.600,00	124.998.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah													
			[object Object]	[object Object]	0,00	0,00	276.984.000,00	276.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.984.000,00	276.984.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai										
63	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	23.099.900,00	23.099.900,00	12.912.640.000,00	12.912.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935.739.900,00	12.935.739.900,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
64	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	15.375.400,00	15.375.400,00	1.012.889.909,00	1.032.889.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.265.309,00	1.048.265.309,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah													
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
67	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah													
			0	1 0	0,00	0,00	738.005.200,00	738.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.005.200,00	738.005.200,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
68	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah													
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	3.396.219.400,00	3.396.219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.219.400,00	3.396.219.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
69	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 Unit	244.599.600,00	244.599.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.599.600,00	244.599.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus													
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.050.980.300,00	1.050.980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.980.300,00	1.050.980.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
72	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	148 Orang	5.619.417.920,00	5.081.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.417.920,00	5.081.413.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	403.294.900,00	383.294.900,00	225.353.200,00	225.353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.648.100,00	608.648.100,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14 Satuan Pendidikan	6.032.080.000,00	9.146.573.810,00	5.101.680.000,00	2.112.511.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133.760.000,00	11.259.085.203,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
75	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	84 Orang	15.547.600,00	15.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547.600,00	15.547.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	16.559.300,00	16.559.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.559.300,00	16.559.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	14.918.900,00	14.918.900,00	1.303.048.800,00	1.303.048.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.967.700,00	1.317.967.700,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
78	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	5 Ruang	0,00	0,00	336.645.300,00	534.645.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.645.300,00	534.645.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	72.653.600,00	464.412.500,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653.600,00	1.544.412.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik	100 Persen											
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.00 Persen											
80	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	34.981.800,00	34.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981.800,00	34.981.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
81	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	39.999.200,00	39.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999.200,00	39.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	71.5 Persen											
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang											
82	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	91.521.100,00	91.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.521.100,00	91.521.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi													
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	169.258.400,00	163.558.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.258.400,00	163.558.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi													
			Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	490.941.900,00	587.641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.941.900,00	587.641.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
85	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi													
			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	371.660.200,00	280.660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.660.200,00	280.660.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.00 Persen											
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4 Kejuaraan											
86	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	250 Orang	1.813.286.000,00	5.813.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.286.000,00	5.813.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	2 Dokumen	5.480.115.800,00	5.480.115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.115.800,00	5.480.115.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	250 Orang											
88	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi													
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	169.881.000,00	169.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.881.000,00	169.881.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi											
89	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	52.650.000.000,00	53.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650.000.000,00	53.450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	52.5 Persen											
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	50 Persen											
90	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai											
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen											
91	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
92	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	40.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.500,00	2.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	48.860.300,00	47.138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860.300,00	47.138.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen											
95	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.642.800,00	753.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.642.800,00	753.642.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen											
96	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103.340.000,00	103.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340.000,00	103.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
97	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
98	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	77.5 Persen											
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah											
99	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	750 Orang	101.430.000,00	101.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.430.000,00	101.430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.075.000,00	57.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
101	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	182 Orang	44.059.000,00	44.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.059.000,00	44.063.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	535.720.000,00	535.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.720.000,00	535.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah											
103	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	895 Orang	83.370.000,00	83.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.370.000,00	83.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	45.139.000,00	47.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.139.000,00	47.804.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
105	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	118 Orang	43.059.000,00	42.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.059.000,00	42.099.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	351.382.000,00	351.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.382.000,00	351.382.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai											
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen											
107	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.618.800,00	8.618.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.800,00	8.618.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
108	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.547.600,00	6.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.600,00	6.547.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
109	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	27.330.000,00	27.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330.000,00	27.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen											
110	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	527.549.960,00	527.549.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.549.960,00	527.549.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen											
111	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.810.000,00	90.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810.000,00	90.810.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60 Persen											
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum											
112	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	72 Orang	69.519.900,00	69.519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.519.900,00	69.519.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum											
113	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	32.049.300,00	32.049.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049.300,00	32.049.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.4 Nilai											
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.2 Persen											
114	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	76.049.700,00	76.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049.700,00	76.049.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen											
115	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.188.000,00	195.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.188.000,00	195.038.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
116	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	18.954.700,00	18.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.954.700,00	18.954.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan											
117	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1520 Orang/ Bulan	225.179.064.000,00	244.507.072.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.179.064.000,00	244.507.072.995,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.482.800,00	13.482.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482.800,00	13.482.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan											
119	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	73.145.400,00	73.145.400,00	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.982.400,00	91.982.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
120	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.163.130.100,00	560.823.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.130.100,00	560.823.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
122	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.174.642.840,00	14.043.106.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174.642.840,00	14.043.106.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporanse											
123	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	430.800.000,00	430.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.800.000,00	430.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
124	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57.320.200,00	92.697.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.320.200,00	92.697.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	31.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai											
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen											
126	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	517.042.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.042.400,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
127	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	0,00	567.961.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.961.100,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
128	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	2.405.881.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.881.900,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
129	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	0,00	2.405.881.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.881.900,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
130	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	0,00	294.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.669.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
131	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	294.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.669.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
132	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	158.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
133	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	158.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.740.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
134	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	56.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.459.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
135	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	56.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.459.900,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
136	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	16.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
137	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	16.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.003.674.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.674.836,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
139	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	0,00	2.053.674.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.674.836,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
140	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	26.494.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494.321.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
141	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	26.494.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.494.321.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
142	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	143.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.790.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
143	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	143.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.790.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
144	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	0,00	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
146	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.045.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
147	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	37.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.045.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
148	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional													
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
149	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional													
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan	120 puskesmas											
150	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	21.299.400,00	21.299.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299.400,00	21.299.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan, SDM, Alat Kesehatan , Sarana, Prasarana dan Jumlah Faskes yang melakukan penginputan INM dan IKP	337 Fasilitas Kesehatan											
151	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6 Unit	14.901.900,00	14.901.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901.900,00	14.901.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
152	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	192 Unit	60.409.800,00	60.409.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.409.800,00	60.409.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	75 persen											
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 dokumen											
153	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28500 Orang	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460.000,00	12.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen											
154	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
155	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	496.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.043.400,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
156	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	0,00	303.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.043.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial	85 persen											
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 persen											
157	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK													
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	40 Sarana	73.518.000,00	73.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.518.000,00	73.518.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100 persen											
158	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional													
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	76.212.000,00	76.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.212.000,00	76.212.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	66.67 persen											
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	1 kebijakan											
159	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	313.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.506.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
160	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	108.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.216.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana penunjang administrasi umum	100 Persen											
161	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.000,00	5.163.200,00	36.497.600,00	31.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.521.600,00	36.618.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
162	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.846.500,00	170.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.846.500,00	170.620.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor	1 Tahun											
163	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.900.000,00	363.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.900.000,00	363.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
164	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.243.510.620,00	1.170.146.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.510.620,00	1.170.146.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan											
165	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.175.000,00	39.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175.000,00	39.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
166	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	100 persen											
167	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.805.021.800,00	4.785.128.000,00	194.978.200,00	214.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persentase											
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
168	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	70 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket											
169	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	408.340.800,00	408.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.340.800,00	408.340.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor	1 Tahun											
170	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	589.000.000,00	589.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000.000,00	589.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
171	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan	1.956.651.820,00	1.535.158.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.651.820,00	1.535.158.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara	12 jenis											
172	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
173	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	151.820.000,00	151.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.820.000,00	151.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
174	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	100 persen											
175	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.057.116.306,00	5.057.116.306,00	1.178.535.444,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan											
176	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.581.000,00	7.581.000,00	11.974.900,00	11.974.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.555.900,00	19.555.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
177	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	137.142.900,00	137.142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.142.900,00	137.142.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan											
178	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.061.456.560,00	1.914.245.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.456.560,00	1.914.245.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan											
179	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	39.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
180	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	57.468.900,00	57.468.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.468.900,00	57.468.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
181	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.815.900,00	164.315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.815.900,00	164.315.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1219 kunjungan											
182	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.199.000,00	15.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199.000,00	15.199.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
183	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	17.299.500,00	17.299.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.299.500,00	26.299.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
184	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	156.698.400,00	176.285.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.698.400,00	176.285.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Bali Mandara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 Tahun											
185	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.318.800.000,00	5.318.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.800.000,00	5.318.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
186	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.033.359.596,00	33.154.384.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.033.359.596,00	33.154.384.112,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS	70000 pasien											
187	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	153.000.000.000,00	163.750.000.000,00	7.000.000.000,00	9.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	173.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan											
188	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	8.732.070.000,00	8.732.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732.070.000,00	8.732.070.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
189	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Rumah Sakit Jiwa													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	1 Tahun											
190	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
191	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.203.180.040,00	11.505.975.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203.180.040,00	11.505.975.216,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan	17000 Kunjungan											
192	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	23.503.946.500,00	24.503.946.500,00	996.053.500,00	2.996.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000.000,00	27.500.000.000,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	100 Persen											
193	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	77 Unit	0,00	0,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
		Rumah Sakit Mata Bali Mandara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	81,5 Nilai											
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pasien yang dilayani tuntas	99 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
194	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	83.127.310.000,00	0,00	11.872.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD
195	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	71.874.000.000,00	0,00	8.126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan											
196	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan											
197	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.627.100,00	0,00	444.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.715.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
198	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	43.627.100,00	0,00	455.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.648.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
199	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	319.895.300,00	319.895.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.895.300,00	319.895.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporantase											
200	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
201	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	434.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000.000,00	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan											
202	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	3.110.670.940,00	2.408.200.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.670.940,00	2.408.200.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporanase											
203	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
204	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	63.291.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.291.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
205	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	0,00	82.811.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.811.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
206	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	872.360.600,00	1.086.010.600,00	116.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.360.600,00	1.242.010.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	81,5 nilai											
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1 Laporan											
207	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	215.311.500,00	215.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.311.500,00	215.311.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
208	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	0,00	3.839.032.400,00	0,00	35.117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.149.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
209	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.874.157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.157.200,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	20 produk											
210	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	0,00	471.467.300,00	0,00	88.875.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.342.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
211	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	512.421.700,00	0,00	88.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.662.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	85 Nilai											
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun											
212	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	11.971.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
213	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.971.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
214	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	10.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
215	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.526.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
216	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
217	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
218	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
219	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	5.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
220	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
221	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
222	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
223	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
224	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
225	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %											
226	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	18.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
227	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	18.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
228	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	12.978.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
229	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	14.850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %											
230	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
231	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
232	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
233	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
234	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
235	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun											
236	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	0,00	285.799.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.799.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
237	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	285.799.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.799.680,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
238	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
239	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	0,00	18.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
240	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	311.074.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.074.645,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
241	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	332.472.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.472.560,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %											
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyeleng garaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	1 Tahun											
242	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	0,00	885.317.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.317.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
243	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	885.317.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.317.240,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Air Minum													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %											
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan	40 %											
244	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	27.429.877.464,00	31.486.145.021,00	1.626.100.000,00	9.307.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00	40.793.745.021,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengelolaan Air Limbah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100 %											
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik UPTD.PAL	1 SPALD											
245	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	10.765.383.160,00	14.450.448.684,00	300.000.000,00	482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065.383.160,00	14.932.448.684,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai											
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 Dokumen											
246	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	426.572.700,00	414.345.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.572.700,00	414.345.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
247	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	330.395.580,00	305.940.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.395.580,00	305.940.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %											
248	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	26.871.550.000,00	27.223.753.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871.550.000,00	27.223.753.992,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	7 Layanan											
249	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	24.171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.171.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
250	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.171.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
251	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.491.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
252	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	65.491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.491.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
253	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
254	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
255	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	85.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.009.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
256	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	85.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.009.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
257	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00	16.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
258	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
259	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
260	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
261	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	464.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.820.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
262	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	0,00	464.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %											
263	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	180.535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.535.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
264	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	178.138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.138.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4 Layanan											
265	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
266	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
267	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	562.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
268	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	562.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
269	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
270	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.342.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.342.692,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
272	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	318.342.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.342.692,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %											
273	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	1.566.414.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.414.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
274	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	0,00	1.554.187.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.187.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
275	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	205.846.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.846.420,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
276	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	0,00	205.846.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.846.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
277	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0,00	1.399.335.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.335.704,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
278	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.411.563.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.563.084,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.63 %											
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit											
279	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai													
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,26563 KM	0,00	0,00	547.820.000,00	547.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.820.000,00	547.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
280	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.17 KM	22.901.700,00	22.901.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901.700,00	22.901.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
281	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	289.177.300,00	289.177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.177.300,00	289.177.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
282	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	13.994.300,00	13.994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994.300,00	13.994.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
283	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai													
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	6 Dokumen	349.889.400,00	349.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.889.400,00	349.889.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 D.I											
284	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5.269 KM	288.879.040,00	264.424.280,00	10.964.125.000,00	10.964.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253.004.040,00	11.228.549.280,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
285	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 KM	3.222.893.880,00	3.222.893.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.893.880,00	3.222.893.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
286	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	758.475.020,00	734.020.260,00	491.655.000,00	491.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.130.020,00	1.225.675.260,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %											
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM											
287	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen	1.465.483.580,00	1.359.184.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.483.580,00	1.359.184.976,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
288	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	10 Liter/Detik	50.009.100,00	81.217.100,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050.009.100,00	15.081.217.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	90.90 %											
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200 SR											
289	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat													
			Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	150 Rumah Tangga	28.074.300,00	28.074.300,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.074.300,00	1.028.074.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
290	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	62.831.900,00	62.831.900,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.831.900,00	262.831.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	95.00 %											
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM											
291	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi													
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	230 SR	248.681.272,00	248.681.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.681.272,00	248.681.272,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75.00 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	19 Kawasan											
292	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	5 Kawasan	148.170.782.140,00	173.877.501.400,00	13.700.550.320,00	14.650.550.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.871.332.460,00	188.528.051.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
293	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	683.651.700,00	683.651.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.651.700,00	683.651.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
294	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	5 Dokumen	41.053.200,00	41.053.200,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.053.200,00	691.053.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	78.67 %											
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km											
295	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	351.539.980,00	339.312.600,00	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.539.980,00	1.889.312.600,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
296	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
297	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.20 KM	4.890.000,00	20.250.000,00	4.500.005.236,00	13.508.618.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.895.236,00	13.528.868.236,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
298	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2,15 KM	360.718.060,00	367.690.680,00	12.200.000.000,00	12.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560.718.060,00	12.567.690.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
299	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan													
			Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
300	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	800.61 KM	23.973.794.300,00	23.873.563.540,00	363.000.000,00	363.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336.794.300,00	24.236.563.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
301	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2.04 KM	36.165.000,00	36.165.000,00	34.756.597.547,00	34.756.597.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.792.762.547,00	34.792.762.547,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
302	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	9.59 KM	0,00	0,00	0,00	11.877.780.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877.780.534,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
303	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	9.59 KM	0,00	0,00	11.877.780.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877.780.534,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
304	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen	1.357.559.982,00	1.398.775.982,00	1.840.000.000,00	2.620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.559.982,00	4.018.775.982,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
305	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1.304.498.000,00	1.304.498.000,00	27.326.300,00	27.326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.824.300,00	1.331.824.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	22.77 %											
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	6 Kegiatan											
306	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	190 Orang	562.184.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.184.660,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
307	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	174 Orang	0,00	562.184.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.184.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan											
308	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	13 Paket Pekerjaan	0,00	238.979.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.979.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
309	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	251.207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.207.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
310	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	16 Lembaga	251.860.300,00	251.860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.860.300,00	251.860.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93.62 %											
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda											
311	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang													
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	26.655.200,00	26.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655.200,00	26.655.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Kegiatan											
312	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	419.673.480,00	419.429.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.673.480,00	419.429.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali	1 Dokumen											
313	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang													
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	248.860.000,00	248.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.860.000,00	248.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
314	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	105.535.000,00	105.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.535.000,00	105.535.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen											
315	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat													
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	176.381.980,00	176.381.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.381.980,00	176.381.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
316	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK													
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	410.449.960,00	148.222.580,00	0,00	245.816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.449.960,00	394.038.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100 %											
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket											
317	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus													
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	272.217.800,00	272.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.217.800,00	272.217.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
318	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	20.822.600,00	20.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822.600,00	20.822.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket											
319	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi													
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	499.622.640,00	487.395.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.622.640,00	487.395.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	5.94 %											
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	7.82 %											
320	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	72 Unit Rumah	0,00	3.673.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.028.400,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
321	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	95 Unit Rumah	4.823.028.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.028.400,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
322	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1.68 Ha	940.092.300,00	940.092.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.092.300,00	940.092.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	70 %											
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	2.50 %											
323	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	129.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
324	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman													
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	2.198.824.964,00	2.198.824.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.824.964,00	2.198.824.964,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
325	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	42.215.000,00	42.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.215.000,00	42.215.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	1.23 Ha											
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan											
326	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	0,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
327	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100 %											
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 Dokumen											
328	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	27.003.500,00	26.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003.500,00	26.777.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	30 %											
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen											
329	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	268.540.500,00	268.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.540.500,00	268.540.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.3 Nilai											
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen											
330	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
331	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen											
332	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	20.077.661.000,00	20.093.512.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077.661.000,00	20.093.512.590,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket											
333	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	244.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.272.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
334	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0,00	244.272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.272.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis											
335	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.980.600,00	44.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980.600,00	44.650.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
336	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	56.075.800,00	56.075.800,00	308.758.500,00	308.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.834.300,00	365.016.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
337	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
338	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.847.200,00	24.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847.200,00	24.847.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
339	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	54.993.000,00	54.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.993.000,00	54.993.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket											
340	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	39.258.000,00	39.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.258.000,00	39.258.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
341	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan											
342	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
343	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
344	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.390.000,00	59.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390.000,00	59.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
345	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	935.232.100,00	935.232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.232.100,00	935.232.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
346	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	1.888.394.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.394.244,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
347	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	43 Unit	0,00	2.188.802.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.802.244,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen											
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran											
348	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	77.833.240,00	77.833.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.833.240,00	77.833.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
349	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
350	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	149.809.400,00	149.722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.809.400,00	149.722.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
351	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	29.899.600,00	29.899.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899.600,00	29.899.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
352	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	100.115.740,00	100.115.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.115.740,00	100.115.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
353	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	190 Kasus	4.245.911.560,00	4.589.024.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.911.560,00	4.589.024.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
354	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	131 Orang	242.712.420,00	242.712.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.712.420,00	242.712.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	200 Kasus											
355	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	0,00	24.761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
356	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	24.761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
357	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	0,00	1.508.912.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.912.475,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
358	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.560.878.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.878.840,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
359	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	251.964.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.964.280,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
360	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	0,00	251.964.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.964.280,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang											
361	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	137.060.200,00	137.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060.200,00	137.060.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen											
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen											
362	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	57.090.700,00	57.090.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090.700,00	57.090.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
363	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	98.728.200,00	98.728.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.728.200,00	98.728.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
364	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	12.714.782.000,00	13.215.871.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714.782.000,00	13.215.871.363,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 Paket											
365	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
366	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	9.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
367	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.677.300,00	125.677.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.677.300,00	125.677.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
368	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
369	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.220.700,00	11.220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.700,00	11.220.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
370	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
371	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500.000,00	319.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
372	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.736.100,00	4.736.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.100,00	4.736.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
373	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	897.688.000,00	897.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.688.000,00	897.688.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
374	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
375	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	178.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
376	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.422.320.540,00	1.275.591.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.320.540,00	1.275.591.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
377	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
378	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
379	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.521.316.772,00	3.521.316.772,00	658.300.000,00	904.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.616.772,00	4.425.616.772,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
380	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.871.785,00	9.871.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871.785,00	9.871.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
381	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	78 Unit	67.910.000,00	67.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910.000,00	67.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen											
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/Kota											
382	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)													
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	360 Orang	201.943.300,00	201.943.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.943.300,00	201.943.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen											
383	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana													
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	487.362.100,00	487.362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.362.100,00	487.362.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
384	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana													
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	164.287.200,00	164.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.287.200,00	164.287.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
385	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	292.918.800,00	292.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.918.800,00	292.918.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
386	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi													
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	138.148.400,00	138.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.148.400,00	138.148.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
387	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70 Orang	90.597.400,00	90.597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.597.400,00	90.597.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
388	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana													
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	118 Unit	25.557.700,00	25.557.700,00	612.786.000,00	733.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.343.700,00	758.793.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota											
389	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	616.175.500,00	616.175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.175.500,00	616.175.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
390	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	706.779.000,00	706.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.779.000,00	706.779.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis											
391	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi													
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	377.641.100,00	377.641.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.641.100,00	377.641.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
392	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	53.059.000,00	53.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.059.000,00	53.059.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
393	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah													
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	258.770.200,00	258.770.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.770.200,00	258.770.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
394	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana													
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	60.312.200,00	60.312.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312.200,00	60.312.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
395	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	9 kabupaten /kota	115.774.000,00	115.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.774.000,00	115.774.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengendalian Bencana Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen											
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen											
396	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.740.400,00	16.740.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740.400,00	16.740.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
397	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.998.800,00	14.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.800,00	14.998.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
398	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	22.245.600,00	22.245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.245.600,00	22.245.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
399	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
400	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0,00	0,00	553.655.600,00	553.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.655.600,00	553.655.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen											
401	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
402	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.308.053.820,00	1.247.439.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.053.820,00	1.247.439.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun											
403	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	680.476.654,00	680.476.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.476.654,00	680.476.654,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
404	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
405	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96 Unit	199.666.000,00	199.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.666.000,00	199.666.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen											
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen											
406	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
407	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	243.665.900,00	243.665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.665.900,00	243.665.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	1 Jenis											
408	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan													
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	787.220.000,00	787.220.000,00	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.220.000,00	1.657.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Dokumen											
409	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.832.200,00	11.832.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832.200,00	11.832.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
410	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.602.500,00	3.602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.500,00	3.602.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
411	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.895.000,00	14.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.000,00	14.895.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan	1 Tahun											
412	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	17.751.273.000,00	17.283.627.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751.273.000,00	17.283.627.794,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang											
413	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	31.952.000,00	31.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952.000,00	31.952.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.528.200,00	7.528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.200,00	7.528.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
415	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	57.075.600,00	49.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.075.600,00	49.744.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
416	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.049.200,00	96.049.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.049.200,00	96.049.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
417	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.648.600,00	5.648.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.600,00	5.648.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
418	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
419	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	136.921.000,00	136.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.921.000,00	136.921.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun											
420	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	180.000.000,00	187.327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	187.327.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
421	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	471.772.020,00	471.772.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.772.020,00	471.772.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun											
422	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.133.511.380,00	1.133.511.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.511.380,00	1.133.511.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
423	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	3.479.744.000,00	3.479.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.744.000,00	3.479.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
424	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.221.011.400,00	1.221.011.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.011.400,00	1.221.011.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	13.88 Persen											
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen											
425	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	3.486.800,00	3.486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.800,00	3.486.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	51 Orang											
426	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	57 Orang	55.523.800,00	55.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.523.800,00	55.523.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 Persen											
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang											
427	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal													
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	1.177.100,00	1.177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.100,00	1.177.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	27.14 persen											
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	215 Orang											
428	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	28.624.600,00	28.624.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624.600,00	28.624.600,00	Insentif Fiskal
429	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
430	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	289.939.600,00	289.939.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.939.600,00	289.939.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	682 Orang											
431	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	622 Orang	0,00	349.452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.452.600,00	Insentif Fiskal
432	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	622 Orang	349.452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.452.600,00	0,00	Insentif Fiskal
433	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	236.941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
434	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	0,00	236.941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
435	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	0,00	37.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.848.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
436	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	37.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.848.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	424 Orang											
437	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	53.890.000,00	53.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.890.000,00	53.890.000,00	Insentif Fiskal
438	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	24.500.800,00	24.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.800,00	24.500.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
439	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	44.970.600,00	44.970.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.970.600,00	44.970.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
440	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang	122.890.100,00	122.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890.100,00	122.890.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	220 Orang											
441	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	380 Orang	0,00	9.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
442	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang	9.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
443	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal													
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	220 Orang	74.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
444	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal													
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	380 Orang	0,00	122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.16 persen											
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 Orang											
445	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	7.536.600,00	7.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.600,00	7.536.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	140 Keluarga											
446	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Keluarga	5.391.800,00	5.391.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391.800,00	5.391.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
447	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	5.641.100,00	5.641.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641.100,00	5.641.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen											
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	700 Orang											
448	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
449	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
450	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial													
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	650 Orang	257.936.700,00	257.936.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.936.700,00	257.936.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100 persen											
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP											
451	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	267.258.400,00	267.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.258.400,00	267.258.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100 Persen											
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG	30 Lembaga											
452	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyeleng garaan PUG Kewenangan Provinsi													
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	10.834.200,00	10.834.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834.200,00	10.834.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Lembaga											
453	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi													
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	14.991.500,00	14.991.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991.500,00	14.991.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai											
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	3 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
454	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	19.980.100,00	19.980.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980.100,00	19.980.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Laporan											
455	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	72.89 Nilai											
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga											
456	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	9.203.500,00	9.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203.500,00	9.203.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	28 Persen											
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	1 Dokumen											
457	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	9.996.400,00	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	9.996.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75.95 Nilai											
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga											
458	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000,00	10.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen											
459	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi													
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	650.619.600,00	650.619.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.619.600,00	650.619.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota													
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	91.146.000,00	91.145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.146.000,00	91.145.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.32 Nilai											
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Lembaga											
461	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	20 Orang	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Sosial													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun											
462	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.837.600,00	9.837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837.600,00	9.837.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
463	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.954.300,00	159.954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.954.300,00	159.954.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
464	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	17.428.000,00	17.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.428.000,00	17.428.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun											
465	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	201.100.000,00	201.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100.000,00	201.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
466	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	320.554.520,00	320.554.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.554.520,00	320.554.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun											
467	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	273.564.880,00	249.110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.564.880,00	249.110.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
468	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	25.868.300,00	0,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.318.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
469	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.868.300,00	0,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.318.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
470	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	1.272.400.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.400.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
471	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.272.400.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.400.820,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	27.14 persen											
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang											
472	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan													
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	71.891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.891.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
473	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	71.891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.891.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
474	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Insentif Fiskal
475	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	Insentif Fiskal
476	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	89.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
477	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang													
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	89.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
478	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
480	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	74.406.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.406.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
481	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	74.406.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.406.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
482	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
483	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
484	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
485	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	0,00	12.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang											
486	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00	0,00	Insentif Fiskal
487	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	0,00	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00	Insentif Fiskal
488	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90 Orang	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
489	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
490	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	90 Orang	0,00	149.580.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.580.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
491	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari													
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	90 Orang	149.580.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.580.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
492	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	90 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
493	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	90 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
494	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan													
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
495	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun											
496	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
497	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
498	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	19.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	15.176.000,00	15.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176.000,00	15.176.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun											
500	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun											
501	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	160.244.880,00	161.294.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.244.880,00	161.294.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
502	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.962.940,00	38.962.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.962.940,00	38.962.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
503	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	348.643.840,00	348.643.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.643.840,00	348.643.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai											
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokumen											
504	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun											
505	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
506	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	10 Layanan	243.150.000,00	243.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.150.000,00	243.150.000,00	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.34 Nilai											
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Dokumen											
507	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	4.499.900,00	4.499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.900,00	4.499.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
508	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	46 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.80 Nilai											
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
509	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00	3.276.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
510	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.110.400,00	6.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110.400,00	6.110.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
511	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
512	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
513	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
514	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
515	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.026.000,00	12.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.000,00	12.026.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
516	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	16.057.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
517	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	18.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
518	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
519	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.753.369,00	216.753.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.753.369,00	216.753.369,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
520	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.795.128,00	80.795.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.795.128,00	80.795.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
521	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	36.015.288,00	36.015.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015.288,00	36.015.288,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
522	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	285.434.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.434.980,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
523	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	0,00	283.604.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.604.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70 Persen											
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang											
524	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	336.350.000,00	336.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.350.000,00	336.350.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	86.80 Nilai											
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
525	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.400,00	5.000.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.400,00	5.000.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
526	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.898.800,00	7.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898.800,00	7.898.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
527	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
528	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.803.500,00	2.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.500,00	2.803.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
529	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
530	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
531	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.839.896,00	102.839.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.839.896,00	102.839.896,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
532	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	127.182.140,00	127.182.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.182.140,00	127.182.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
533	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
534	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	269.793.040,00	269.793.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.793.040,00	269.793.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100 Persen											
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	85 Perusahaan											
535	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	85 Perusahaan	203.180.000,00	203.180.000,00	568.320.000,00	1.176.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.500.000,00	1.379.944.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	86.80 Nilai											
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen											
536	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.299.312.000,00	28.818.180.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.299.312.000,00	28.818.180.267,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
537	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	14.994.200,00	14.994.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.200,00	14.994.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
538	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	34.968.200,00	34.968.200,00	5.762.800,00	5.762.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.731.000,00	40.731.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
539	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
540	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.795.100,00	27.795.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795.100,00	27.795.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
541	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.637.600,00	8.637.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.600,00	8.637.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
542	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
543	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	158.220.000,00	158.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.220.000,00	158.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
544	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	65.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
545	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	83.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.288.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen											
546	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
547	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
548	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	626.571.323,00	626.571.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.571.323,00	626.571.323,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen											
549	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	640.495.928,00	658.915.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.495.928,00	658.915.228,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
550	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.728.560,00	170.728.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.728.560,00	170.728.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
551	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	1.107.799.920,00	1.058.890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.799.920,00	1.058.890.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	30 Persen											
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	44 Orang											
552	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	44 Dokumen	44.997.600,00	44.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997.600,00	44.997.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	30 Persen											
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha	40 Orang											
553	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	133.117.200,00	133.117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.117.200,00	133.117.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	180 Orang											
554	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180 Orang	36.313.800,00	36.313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00	36.313.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	10.44 Persen											
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen											
555	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara	5.566.400,00	5.566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.400,00	5.566.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
556	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)													
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.775.000,00	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00	25.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
557	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)													
			Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen											
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	70 Perusahaan											
558	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	70 Perusahaan	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
559	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan													
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	35 Perusahaan	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen											
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen											
560	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	58.00 Persen											
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen											
561	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	70 MW											
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4 Persen											
562	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi													
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	174.499.500,00	174.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.499.500,00	174.499.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen											
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen											
563	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi													
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100 Persen											
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 Persen											
564	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	483.824.320,00	483.824.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.824.320,00	483.824.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen											
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	79 Persen											
565	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	427.237.620,00	427.237.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.237.620,00	427.237.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.75 Nilai											
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen											
566	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
567	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	292.429.020,00	267.974.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.429.020,00	267.974.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen											
568	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	10.194.773.000,00	10.225.809.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194.773.000,00	10.225.809.044,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
569	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.726.820,00	130.726.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.726.820,00	130.726.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan											
570	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.763.400,00	7.763.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763.400,00	7.763.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
571	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.480.400,00	14.756.400,00	599.788.400,00	589.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.268.800,00	603.945.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
572	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
573	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.767.000,00	7.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.000,00	7.767.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
574	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
575	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
576	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	363.816.000,00	363.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.816.000,00	363.816.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen											
577	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	207.340.000,00	207.340.000,00	200.086.000,00	200.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.426.000,00	407.426.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen											
578	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.400.000,00	182.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.400.000,00	182.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
579	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	509.691.280,00	509.691.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.691.280,00	509.691.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen											
580	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	1.323.389.260,00	1.323.389.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.389.260,00	1.323.389.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
581	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	89.660.000,00	89.660.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.660.000,00	104.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	27 Desa											
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	4.25 Persen											
582	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	320.543.320,00	320.543.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.543.320,00	320.543.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	84.90 Persen											
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	84.90 Persen											
583	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	569.753.420,00	569.753.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.753.420,00	569.753.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
584	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	574.032.600,00	574.032.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.032.600,00	574.032.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
585	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	127.557.000,00	127.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.557.000,00	127.557.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99.53 Persen											
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen											
586	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1000 Unit	721.081.660,00	696.626.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.081.660,00	696.626.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
587	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	489.871.360,00	489.871.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.871.360,00	489.871.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
588	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	642.119.220,00	617.664.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.119.220,00	617.664.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
589	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	3.439.183.060,00	4.079.188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.183.060,00	4.079.188.300,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	4 Sektor											
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351 Orang											
590	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	332.121.540,00	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00	332.121.540,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perhubungan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen											
591	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	21.423.600,00	21.423.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423.600,00	21.423.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
592	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16.236.300,00	16.236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236.300,00	16.236.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	2 Dokumen											
593	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	17.795.646.000,00	18.393.542.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795.646.000,00	18.393.542.067,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
594	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	19.519.500,00	19.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519.500,00	19.519.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
595	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.489.000,00	6.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.000,00	6.489.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
596	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.107.800,00	14.107.800,00	362.096.700,00	359.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.204.500,00	373.694.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
597	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
598	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.303.300,00	7.303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.300,00	7.303.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
599	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.822.250,00	10.822.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822.250,00	10.822.250,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
600	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	305.222.000,00	305.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.222.000,00	305.222.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	2 Dokumen											
601	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	920.000.000,00	1.920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	1.920.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
602	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen											
603	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
604	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
605	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.058.860,00	330.376.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.058.860,00	330.376.720,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen											
606	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	733.239.280,00	733.239.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.239.280,00	733.239.280,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
607	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	47.864.400,00	47.864.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.864.400,00	47.864.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
608	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	942.053.500,00	904.371.360,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.053.500,00	1.104.371.360,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,86 Rasio											
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan	2 Laporan											
609	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	341.431.440,00	341.431.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.431.440,00	341.431.440,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
610	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	109.140.400,00	109.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.140.400,00	109.140.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	13 Laporan											
611	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8 Laporan	26.957.700,00	26.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957.700,00	26.957.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
612	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin													
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	8 Laporan	26.651.400,00	26.651.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.651.400,00	26.651.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan											
613	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	156.296.100,00	156.296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.296.100,00	156.296.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan											
614	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	384.236.120,00	346.553.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.236.120,00	346.553.980,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	75 Persen											
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen											
615	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	271.047.840,00	271.047.840,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.047.840,00	871.047.840,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	25 Persen											
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen											
616	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	272.437.140,00	272.437.140,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.437.140,00	472.437.140,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket											
617	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.850.812,00	3.850.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.812,00	3.850.812,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
618	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.546.700,00	7.546.700,00	76.088.300,00	76.088.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.635.000,00	83.635.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
619	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	719.600,00	719.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.600,00	719.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
620	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.136.000,00	34.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.136.000,00	34.136.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan											
621	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
622	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
623	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.034.940,00	41.034.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.034.940,00	41.034.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit											
624	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	195.780.740,00	195.780.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.780.740,00	195.780.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
625	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65 Persen											
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit											
626	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	566.282.000,00	566.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.282.000,00	566.282.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
627	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi													
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1.436.172.340,00	1.381.149.130,00	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.172.340,00	1.505.149.130,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun											
628	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	964.400,00	964.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.400,00	964.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
629	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.026.300,00	8.026.300,00	50.696.900,00	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.723.200,00	20.786.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
631	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
632	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
633	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.022.000,00	45.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022.000,00	45.022.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	10 Unit											
634	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan											
635	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
636	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
637	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.122.540,00	39.122.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122.540,00	39.122.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	24 Unit											
638	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	347.131.840,00	319.620.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.131.840,00	319.620.235,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
639	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5 Persen											
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	7332 RIT											
640	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	7.346.483.472,00	11.018.971.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.483.472,00	11.018.971.867,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Perlengkapan Jalan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen											
641	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.839.600,00	3.839.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.600,00	3.839.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
642	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 Unit											
643	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0,00	0,00	66.969.700,00	54.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.969.700,00	54.122.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit											
644	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	141.042.440,00	141.042.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.042.440,00	141.042.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
645	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	38,58 Persen											
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	387 Unit 760 Unit											
646	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	387 Unit	1.115.295.070,00	1.087.783.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.295.070,00	1.087.783.465,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
647	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	760 Unit	575.208.721,00	575.208.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.208.721,00	575.208.721,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen											
648	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.928.400,00	8.212.300,00	63.833.900,00	59.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.762.300,00	67.762.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
649	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
650	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
651	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	406.226.400,00	351.203.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.226.400,00	351.203.190,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	13 Unit											
652	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	22.875.800,00	22.875.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875.800,00	22.875.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	150 Lembar											
653	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	10 Unit											
654	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
655	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen											
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan											
656	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional													
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	139.567.000,00	139.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.567.000,00	139.567.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)	82.75 Nilai											
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
657	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	18.018.000,00	18.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018.000,00	18.018.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
658	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.139.800,00	5.139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.800,00	5.139.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
659	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.518.500,00	6.518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.500,00	6.518.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen											
660	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	12.985.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985.533.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
661	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/ Bulan	0,00	14.413.900.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413.900.414,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
662	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	702.713.000,00	1.328.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.713.000,00	1.328.673.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan											
663	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.488.840,00	4.488.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.840,00	4.488.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.007.200,00	40.007.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.007.200,00	40.007.200,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
665	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
666	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.660.900,00	13.660.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660.900,00	13.660.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
667	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	31.522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
668	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8052 Dokumen	0,00	31.522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
670	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	121.329.000,00	121.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.329.000,00	121.329.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket											
671	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
672	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan											
673	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
674	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
675	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
676	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit											
677	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	1.386.501.960,00	1.386.501.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.501.960,00	1.386.501.960,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
678	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
679	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	99.570.000,00	99.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.570.000,00	99.570.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
680	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.393.874.900,00	1.271.601.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.874.900,00	1.271.601.100,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
681	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.480.000,00	84.480.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	93.40 persen											
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks											
682	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 Dokumen	956.857.440,00	923.932.960,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.857.440,00	993.932.960,00	Lain-lain PAD Yang Sah
683	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	5.359.038.200,00	5.424.683.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359.038.200,00	5.424.683.440,00	Lain-lain PAD Yang Sah
684	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	1.385.259.640,00	1.385.259.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.259.640,00	1.385.259.640,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
685	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik													
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	2.537.087.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.087.840,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
686	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik													
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	0,00	2.537.087.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.087.840,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
687	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	1.787.360.740,00	1.766.299.580,00	50.442.100,00	47.048.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.802.840,00	1.813.347.980,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
688	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	335.375.300,00	671.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.375.300,00	671.169.300,00	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00 Persen											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen											
689	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen	1.306.175.700,00	1.305.715.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.175.700,00	1.305.715.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
690	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	922.086.720,00	1.342.980.460,00	113.984.461.170,00	117.896.987.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.906.547.890,00	119.239.967.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
691	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.728.356.240,00	11.643.929.040,00	609.000.000,00	609.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337.356.240,00	12.252.929.040,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.00 nilai											
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor											
692	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	150.743.840,00	150.743.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.743.840,00	150.743.540,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
693	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	164.656.480,00	164.656.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.656.480,00	164.656.480,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
694	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah													
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	125.896.880,00	101.441.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.896.880,00	101.441.520,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	75.00 nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD											
695	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	20.399.300,00	17.567.300,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899.300,00	34.067.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
696	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	168.137.340,00	163.637.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.137.340,00	163.637.340,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
697	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	81.166.900,00	33.541.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.166.900,00	33.541.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
698	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	70.758.000,00	78.564.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.758.000,00	106.564.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD											
699	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	129.095.840,00	128.621.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.095.840,00	128.621.840,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-											
700	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	28 Unit	6.668.918.940,00	6.936.378.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668.918.940,00	6.936.378.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-											
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-											
701	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.817.693.424,00	2.109.403.424,00	0,00	708.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.693.424,00	2.817.674.924,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai											
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen											
702	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	122.914.420,00	122.914.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.914.420,00	122.914.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
703	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.999.600,00	5.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.600,00	5.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
704	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	12.616.431.000,00	12.285.642.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616.431.000,00	12.285.642.851,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen											
705	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen											
706	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.613.000,00	10.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613.000,00	10.613.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.403.000,00	45.418.600,00	0,00	39.161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.403.000,00	84.580.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
708	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.576.900,00	11.576.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576.900,00	11.576.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.893.000,00	55.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.893.000,00	55.893.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen											
712	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	133.808.900,00	721.538.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.808.900,00	721.538.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
713	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
714	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00	259.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
715	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	904.371.360,00	879.916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.371.360,00	879.916.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
716	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	776.574.980,00	776.574.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.574.980,00	776.574.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	161.951.560,00	412.951.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.951.560,00	412.951.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.00 Persen											
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10 Unit Usaha											
719	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha	218.410.700,00	218.410.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.410.700,00	218.410.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 Unit Usaha											
720	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen											
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47 Unit Usaha											
721	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	49.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45 Unit Usaha											
722	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	125.363.880,00	100.909.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.363.880,00	100.909.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3.20 Persen											
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 Unit Usaha											
723	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 Unit Usaha	148.408.980,00	148.408.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.408.980,00	148.408.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
724	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	70 Unit Usaha	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	49.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	6.00 Persen											
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 Unit Usaha											
725	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	225 Unit Usaha	939.685.230,00	939.685.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.685.230,00	939.685.130,00	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
726	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	49.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	3.00 Persen											
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 Unit Usaha											
727	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	219.328.560,00	219.328.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.328.560,00	219.328.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
728	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	225 Orang	263.603.800,00	263.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.603.800,00	263.603.800,00	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai											
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen											
729	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	665.800,00	665.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.800,00	665.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
730	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.725.900,00	2.725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.900,00	2.725.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
731	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
732	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
733	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
735	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
736	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
737	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	158.190.060,00	158.190.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.190.060,00	158.190.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen											
738	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	94.007.140,00	94.007.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007.140,00	94.007.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
739	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
740	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	79.571.080,00	79.571.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.571.080,00	79.571.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00 Persen											
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	400 Orang											
741	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2033 Orang	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78.5 Nilai											
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	5 Dokumen											
742	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	44 Dokumen											
743	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	12.359.361.000,00	12.432.519.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359.361.000,00	12.432.519.443,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat	40 Orang											
744	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
745	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.599.100,00	12.599.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599.100,00	12.599.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
746	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.132.600,00	54.132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.132.600,00	54.132.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
747	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.014.600,00	15.014.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014.600,00	15.014.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
749	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	214.048.000,00	214.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.048.000,00	214.048.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Unit											
750	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen											
751	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	2.472.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
752	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
753	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.239.007.080,00	1.319.007.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.007.080,00	1.319.007.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit											
754	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	549.440.700,00	549.440.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.440.700,00	549.440.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
755	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	39.140.000,00	39.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140.000,00	39.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	12350 Proyek											
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen											
756	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	2 Dokumen											
757	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	480.968.560,00	480.968.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.968.560,00	480.968.560,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	33 Persen											
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen											
758	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	285.448.560,00	260.993.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.448.560,00	260.993.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen											
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	458.901.400,00	458.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.901.400,00	458.901.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai Kewenangan Provinsi	100 Persen											
761	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	155.186.420,00	155.186.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.186.420,00	155.186.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	11,5 Triliun											
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	91 Persen											
762	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	297.725.000,00	297.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.725.000,00	297.725.000,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
763	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 Kegiatan usaha	0,00	299.590.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.590.560,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
764	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	321 Kegiatan usaha	299.590.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.590.560,00	0,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	325 Pelaku Usaha	545.834.000,00	545.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.834.000,00	545.834.000,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen											
766	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	106.084.280,00	106.084.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.084.280,00	106.084.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen/Laporan											
767	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	139.447.020,00	224.611.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.447.020,00	224.611.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
768	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.938.000,00	4.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938.000,00	4.938.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen											
769	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	21.025.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.025.047.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
770	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/ Bulan	0,00	21.132.451.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132.451.930,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
771	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	579.667.900,00	579.667.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.667.900,00	579.667.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dokumen	2.651.000,00	2.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.000,00	2.651.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen											
773	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30.323.200,00	30.323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.323.200,00	30.323.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
775	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
776	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
777	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.550.000,00	111.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.550.000,00	111.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen											
779	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496.000,00	5.496.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
780	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
781	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	101.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
782	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.475.328,00	705.465.328,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.475.328,00	710.465.328,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
783	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	906.589.700,00	906.589.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.589.700,00	906.589.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.215.000,00	24.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215.000,00	24.215.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
785	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.455.828.480,00	1.406.918.960,00	0,00	58.552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.828.480,00	1.465.471.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen											
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2040 Objek											
786	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20 Objek	550.815.020,00	550.815.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815.020,00	550.815.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
787	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	27.798.202.320,00	28.473.747.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798.202.320,00	28.473.747.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan	311 Objek/ Sertifikat											
788	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	300 Objek	8.692.175.380,00	8.692.175.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.175.380,00	8.692.175.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	17 Sertifikat	0,00	1.228.665.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.665.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
790	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	11 Sertifikat	1.028.819.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.819.040,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota	226 Unit											
791	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	226 Unit	0,00	22.679.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679.810.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	184 Unit	17.594.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594.810.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen											
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota	250 Orang/ Sertifikat											
793	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	135 Orang	1.115.790.920,00	1.115.790.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.790.920,00	1.115.790.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	252.121.840,00	252.121.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.121.840,00	252.121.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen											
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2 Dokumen											
795	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	47.497.400,00	47.497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.497.400,00	47.497.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	0,2 Persen											
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi	5 Objek											
796	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	281.357.100,00	256.902.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.357.100,00	256.902.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	211 Objek											
797	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	152.581.820,00	152.581.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.581.820,00	152.581.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
798	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	30 Objek	48.347.000,00	48.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.347.000,00	48.347.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
799	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	25.837.000,00	25.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837.000,00	25.837.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya													
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	180 Orang	37.433.400,00	37.433.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.433.400,00	37.433.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Budaya													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen											
801	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	56.320.700,00	56.320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320.700,00	56.320.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
803	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
804	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
805	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	40.998.000,00	40.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.998.000,00	40.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
806	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	43.144.000,00	43.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.144.000,00	43.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
807	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	896.000.000,00	896.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000.000,00	896.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
808	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	90.088.000,00	90.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.088.000,00	90.088.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.035.773.440,00	1.035.773.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.773.440,00	1.035.773.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100 Persen											
810	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600.000,00	76.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
811	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990.000,00	19.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
812	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.225.828.480,00	1.415.828.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.828.480,00	1.415.828.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen											
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang											
813	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	0,00	1.430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
814	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	1.430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
815	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	0,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
816	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
		UPTD Museum Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen											
817	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	70.292.200,00	70.292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.292.200,00	70.292.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
818	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050.000,00	81.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
819	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	44.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.039.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
820	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.768.500,00	5.768.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.500,00	5.768.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
822	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.714.000,00	30.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714.000,00	30.348.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
823	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
824	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0,00	12.402.500,00	0,00	233.652.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.055.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
825	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
826	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	206.850.000,00	206.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.850.000,00	206.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
827	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	47.528.500,00	66.852.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528.500,00	66.852.024,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.720.684.000,00	1.419.226.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.684.000,00	1.419.226.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
829	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	74.990.000,00	91.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990.000,00	91.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950.000,00	39.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
831	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0,00	20.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
832	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali	75 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	25000 Orang											
833	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	700 Unit	712.879.800,00	712.879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.879.800,00	712.879.800,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
834	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum													
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.137.220.200,00	1.137.220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.220.200,00	1.137.220.200,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
835	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	4 Unit	149.900.000,00	149.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00	149.900.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen											
836	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.999.500,00	34.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.500,00	34.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
837	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	42.483.140,00	42.483.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.483.140,00	42.483.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
838	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	43.475.000,00	43.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475.000,00	43.475.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.004.000,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	5.004.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
841	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	14.672.000,00	14.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672.000,00	14.672.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"	100 Persen											
842	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
843	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
844	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
845	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	49.970.000,00	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.970.000,00	49.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
846	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.774.859.668,00	2.774.859.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.859.668,00	2.774.859.668,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen											
847	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	148.930.000,00	148.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.930.000,00	148.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
848	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
849	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum	75 Persen											
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah kunjungan masyarakat pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	2500 Orang											
850	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	33 Unit	600.061.300,00	600.061.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.061.300,00	600.061.300,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
851	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum													
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.125.106.100,00	1.125.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.106.100,00	1.125.106.100,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
852	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	8 Unit	274.832.600,00	274.832.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.832.600,00	274.832.600,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)	80.80 Nilai											
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen											
853	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.660.200,00	19.660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660.200,00	19.660.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
854	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.564.600,00	6.564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.600,00	6.564.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52 Dokumen											
855	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	8.853.583.000,00	9.019.788.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.583.000,00	9.019.788.917,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen											
856	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.007.200,00	9.007.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.200,00	9.007.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
857	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.345.800,00	34.345.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.345.800,00	34.345.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	29.110.000,00	29.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110.000,00	29.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
859	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	422.872.000,00	545.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.872.000,00	545.872.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit											
860	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan											
861	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	305.940.500,00	305.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.940.500,00	305.940.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	35 Laporan											
862	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	756.597.240,00	401.337.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.597.240,00	401.337.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.528.436.760,00	1.528.436.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.436.760,00	1.528.436.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0.7090 Nilai											
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat											
864	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	600 Desa	465.367.664.716,00	614.192.755.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.367.664.716,00	614.192.755.196,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat													
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	431.226.420,00	455.226.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.226.420,00	455.226.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	245 Dokumen											
866	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	200 Desa	198.152.000,00	222.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.152.000,00	222.152.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
867	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat													
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	50 Desa	462.349.340,00	486.349.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.349.340,00	486.349.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	4 Dokumen											
868	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4 Laporan	379.746.420,00	471.366.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.746.420,00	471.366.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kelautan dan Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
869	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
870	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
871	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
872	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
873	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
874	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen											
875	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	20.110.224.000,00	20.987.785.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110.224.000,00	20.987.785.114,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
876	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.542.400,00	10.542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542.400,00	10.542.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
877	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	636.724.000,00	652.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.724.000,00	652.648.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	169.767.300,00	169.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.767.300,00	169.767.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
879	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.477.400,00	18.477.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477.400,00	18.477.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
880	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.120.000,00	142.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.120.000,00	142.972.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
881	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	155.284.600,00	155.284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.284.600,00	158.284.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
882	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
883	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.536.000,00	141.162.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.536.000,00	141.162.905,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
884	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	789.220.480,00	851.363.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.220.480,00	851.363.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	665.579.652,00	619.175.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.579.652,00	619.175.562,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
886	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	528.730.000,00	528.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.730.000,00	528.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 Persen											
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha											
887	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	96.902.200,00	4.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.902.200,00	4.402.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat													
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	57862.83 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
889	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	15 Pelaku Usaha											
890	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi													
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok											
891	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	563.141.320,00	514.231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.141.320,00	514.231.800,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
893	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
894	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103696.10 Ton											
895	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
896	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit	416.115.200,00	544.310.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.115.200,00	544.310.920,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8000 Ton											
897	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT													
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	150 Sertifikat											
898	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton											
899	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240.000,00	45.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	6 Dokumen	0,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
901	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	6 Dokumen	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 Persen											
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha											
902	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	67.442.140,00	218.576.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.442.140,00	218.576.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
903	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
904	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
905	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)													
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	40 Kelompok	494.702.800,00	494.702.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.702.800,00	494.702.800,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan	20 Unit Usaha											
906	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan	2 Persen 48.68 Kg/Kapita/Tahun											
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	50 Unit Usaha											
907	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
908	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha											
909	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	390.987.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.987.280,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50 Unit Usaha	0,00	525.050.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.050.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
911	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.274.000,00	5.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.000,00	5.274.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
912	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.000,00	5.293.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
913	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
914	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
915	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	30.795.800,00	30.795.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795.800,00	30.795.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
916	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
918	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	114.897.140,00	114.897.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.897.140,00	114.897.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
919	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	263.101.260,00	243.217.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.101.260,00	243.217.946,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
920	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor											
921	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.423.299.450,00	1.423.299.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.299.450,00	1.423.299.391,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17 Unit	0,00	784.670.619,00	0,00	99.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.059.619,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
923	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	784.670.619,00	0,00	44.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.559.619,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
924	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.633.200,00	20.633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633.200,00	20.633.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
926	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
928	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	49.316.100,00	49.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.316.100,00	49.316.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
929	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
930	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600.000,00	108.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
931	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	117.668.640,00	117.668.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.668.640,00	117.668.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	50.260.500,00	17.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260.500,00	17.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
933	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.633.480,00	494.178.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.633.480,00	494.178.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen											
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Rekomendasi											
935	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	222.799.371,00	405.765.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.799.371,00	405.765.821,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
936	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing													
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 Unit Usaha	29.994.000,00	39.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994.000,00	39.594.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
937	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.188.600,00	5.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188.600,00	5.188.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
938	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.967.100,00	4.967.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.100,00	4.967.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
939	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.170.000,00	38.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170.000,00	38.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
940	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.998.100,00	1.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
941	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	107.115.400,00	107.115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.115.400,00	107.115.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
942	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											
944	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	151.029.000,00	180.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.029.000,00	180.968.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	944.371.360,00	933.416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.371.360,00	933.416.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 Persen											
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan											
947	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat													
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44712.5 Ha	101.190.000,00	116.190.000,00	615.500.000,00	615.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.690.000,00	731.690.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
948	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		UPTD Pelabuhan Perikanan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
949	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
950	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	19.801.600,00	19.801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801.600,00	19.801.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
951	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
953	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	93.865.900,00	88.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.865.900,00	88.131.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen											
954	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
955	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
956	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	107.552.000,00	107.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.552.000,00	107.552.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.682.140,00	97.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.682.140,00	97.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton											
959	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
960	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan													
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	55.899.200,00	55.899.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.899.200,00	55.899.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
961	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	138.001.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.001.420,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
962	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0,00	138.001.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.001.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
963	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
964	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	80 Dokumen											
965	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	10.708.603.257,00	11.359.957.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708.603.257,00	11.359.957.024,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis											
966	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	10.484.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
967	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.484.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.529.600,00	0,00	347.957.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.487.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	36.649.600,00	0,00	565.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.501.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
971	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
972	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	9.942.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.942.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
975	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
976	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	175.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.295.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	0,00	217.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
978	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
979	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
980	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	134.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.462.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
981	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	93.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.462.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
982	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.241.603.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.603.560,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	0,00	1.311.916.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.916.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis											
984	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	0,00	588.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	512.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.492.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
986	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
987	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
988	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	0,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
989	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-											
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-											
990	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi													
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi													
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
992	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	42.885.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.885.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
993	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	0,00	42.885.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.885.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	[deleted] Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa Wisata Award	- Laporan											
994	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi													
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	0,00	31.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.802.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
995	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi													
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	31.802.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.802.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-											
996	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	380.592.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.592.580,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
997	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	0,00	356.137.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.137.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	25 Usaha											
998	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)													
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	15.346.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346.700,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)													
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	0,00	15.346.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1000	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	98.427.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.427.180,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1001	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	0,00	98.427.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.427.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12,50 Persen											
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2800000 Orang											
1002	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	162.264.020,00	162.264.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.264.020,00	162.264.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1003	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	140.866.120,00	140.866.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.866.120,00	140.866.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	157.567.720,00	223.040.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.567.720,00	223.040.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-											
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-											
1005	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	45 Laporan	113.164.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.164.780,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1006	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	45 Laporan	0,00	113.164.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.164.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-											
1007	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	82.131.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.131.540,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1008	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0,00	82.131.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.131.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	46 Persen											
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	230 Orang											
1009	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	35 Orang	86.982.140,00	86.982.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982.140,00	86.982.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	153.675.620,00	153.675.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.675.620,00	153.675.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1011	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	192.678.160,00	168.223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.678.160,00	168.223.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	89 Persen											
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	16 Kelompok											
1012	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	547.694.020,00	498.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.694.020,00	498.784.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.675 kkal/kapita/hari											
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kerawanan pangan	1 Dokumen											
1013	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	162.888.060,00	162.888.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.888.060,00	162.888.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1014	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	6.410.759.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410.759.820,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	6.410.759.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410.759.820,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8 Persen											
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji	1 Dokumen											
1016	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
			Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	97.783.980,00	97.783.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.783.980,00	97.783.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai											
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen											
1017	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	326.317.920,00	326.317.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.317.920,00	326.317.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	332.292.320,00	307.837.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.292.320,00	307.837.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
1019	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/ Bulan	42.879.400.000,00	42.190.448.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879.400.000,00	42.190.448.420,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1020	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	399.217.300,00	350.307.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.217.300,00	350.307.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1021	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575.000,00	13.575.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1022	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.848.000,00	23.848.000,00	28.437.300,00	28.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285.300,00	52.285.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.884.000,00	34.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884.000,00	34.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan											
1026	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.000.000,00	468.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000.000,00	468.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1027	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.655.720,00	318.655.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.655.720,00	318.655.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1028	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58 Unit	1.609.754.960,00	1.609.754.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.754.960,00	1.609.754.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1029	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	771.642.800,00	771.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.642.800,00	771.642.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1030	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	380 Unit	204.822.200,00	204.822.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.822.200,00	204.822.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen											
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Laporan											
1031	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2.829.064.060,00	2.690.154.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.064.060,00	2.690.154.540,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3 Laporan											
1032	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan													
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan	2.203.326.020,00	2.092.279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.326.020,00	2.092.279.600,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah	60000 Ekor											
1033	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	2.967.980.400,00	4.218.525.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.980.400,00	4.218.525.640,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen											
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	2 Jenis											
1034	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian													
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.098.079.220,00	1.073.624.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.079.220,00	1.073.624.460,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1035	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	248.158.900,00	223.704.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.158.900,00	223.704.140,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	119380 Ekor											
1036	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	1.459.968.560,00	1.422.286.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.968.560,00	1.422.286.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8 RPH											
1037	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya													
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3 Kasus	47.882.140,00	47.882.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.882.140,00	47.882.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	40 Persen											
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102 Kelompok Tani / Unit											
1038	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani													
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102 Kelompok	166.928.560,00	129.246.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.928.560,00	129.246.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai											
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1039	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.180.500,00	4.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.500,00	4.180.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1040	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.967.200,00	14.967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967.200,00	14.967.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.884.800,00	32.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.884.800,00	32.884.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1042	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.230.000,00	139.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230.000,00	139.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1043	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.988.120,00	117.988.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.988.120,00	117.988.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1044	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	178.117.290,00	178.117.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.117.290,00	178.117.290,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.364.280,00	80.364.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.364.280,00	80.364.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	39.340.000,00	39.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340.000,00	39.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	0,87 Persen 95.8 Persen											
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	20 Produk											
1047	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan													
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8 Sertifikat	460.769.620,00	385.405.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.769.620,00	385.405.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen	187.761.860,00	150.079.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.761.860,00	150.079.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen											
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	1000 Unit 75 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1049	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit													
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000 Unit	292.988.820,00	268.534.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.988.820,00	268.534.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75 Dokumen	337.285.350,00	275.148.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.285.350,00	275.148.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1051	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1052	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1053	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.548.200,00	6.548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548.200,00	6.548.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1055	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.360.000,00	239.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.360.000,00	239.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.776.000,00	191.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.776.000,00	191.776.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1057	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 Unit	195.541.420,00	195.541.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.541.420,00	195.541.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	683.278.520,00	607.914.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.278.520,00	607.914.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148 Unit	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	82.91 Persen											
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kabupaten/Kota											
1060	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	541.631.980,00	492.722.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.631.980,00	492.722.460,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1061	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	668.575.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.575.880,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1062	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	0,00	568.756.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.756.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1063	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	403.331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.331.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1064	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	0,00	378.877.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.877.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1065	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.587.400,00	12.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587.400,00	12.587.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1066	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.055.736,00	16.055.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055.736,00	16.055.736,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1068	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.200.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00	64.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1069	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	274.125.480,00	274.125.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.125.480,00	274.125.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1070	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	208.647.620,00	208.647.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.647.620,00	208.647.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	306.457.120,00	306.457.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.457.120,00	306.457.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1072	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,81 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100000 Dosis											
1073	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi													
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.240.390.545,00	2.365.748.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.390.545,00	2.365.748.205,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1074	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.406.400,00	1.406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.400,00	1.406.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1075	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.348.200,00	3.348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.200,00	3.348.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1076	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1077	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.609.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.609.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1078	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.056.180,00	76.056.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.056.180,00	76.056.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1079	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	107.717.140,00	107.717.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.717.140,00	107.717.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1080	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.182.140,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.182.140,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,60 Persen											
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 Jenis											
1082	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih													
			Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	368.616.260,00	368.616.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.616.260,00	368.616.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1083	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan													
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	97 laporan	374.666.620,00	374.666.620,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.666.620,00	384.666.620,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,50 Nilai											
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun											
1084	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.575.900,00	1.575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.900,00	1.575.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1085	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674.000,00	4.674.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.998.000,00	29.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998.000,00	29.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1087	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.389.028,00	133.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.389.028,00	133.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	113.868.820,00	113.868.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.868.820,00	113.868.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun											
1089	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	127.384.280,00	127.384.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.384.280,00	127.384.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	165.522.140,00	165.522.140,00	2.527.233.000,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.755.140,00	2.692.755.140,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1091	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,60 Persen											
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Batang Jumlah Penyediaan Benih / Bibit Hortikultura Bermutu Berbentuk Umbi Jumlah Penyediaan Benih Perkebunan Bermutu Berbentuk Biji Jumlah Penyediaan Benih Tanaman Pangan Bermutu Berbentuk Biji/Benih	5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan											
1092	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang													
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	44.000 Batang	685.701.640,00	685.701.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.701.640,00	685.701.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1093	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji													
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	900.000 Gram	709.591.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.591.320,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1094	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji													
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	900.000 Gram	0,00	709.591.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.591.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1095	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih													
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	430.102.060,00	430.102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.102.060,00	430.102.060,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi													
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,75 Ton	275.398.140,00	275.398.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.398.140,00	275.398.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Laporan											
1097	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme													
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100 Persen											
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
1098	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi													
			Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	114.224.800,00	114.224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.224.800,00	114.224.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen											
1099	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	206.546.380,00	206.546.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.546.380,00	206.546.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air laut Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas udara Indeks kualitas air	69.90 Nilai 12.37 Persen 88.59 Nilai 63.05 Nilai											
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen											
1100	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	32.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1101	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	0,00	32.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1102	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	288.950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.950.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	0,00	288.950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.950.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 Persen											
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun	100 Persen											
1104	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	99.556.000,00	99.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.556.000,00	99.556.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	68 Persen											
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 Persen											
1105	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	14.114.700,00	14.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114.700,00	14.114.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	100 Persen											
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksaankan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1106	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH													
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	19.267.800,00	19.267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267.800,00	19.267.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	71 Persen 28 Persen											
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3	9 Kab/Kota											
1107	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	275.346.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.346.020,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1108	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup													
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0,00	275.346.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.346.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 Persen											
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100 Persen											
1109	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	34.710.800,00	34.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710.800,00	34.710.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100 Persen											
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100 Persen											
1110	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi													
			Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	1 Dokumen	22.404.300,00	22.404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404.300,00	22.404.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	A Nilai											
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen											
1111	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.899.600,00	35.899.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899.600,00	35.899.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen											
1112	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	35.243.812.000,00	36.743.021.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.243.812.000,00	36.743.021.345,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1113	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen											
1114	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.294.100,00	16.294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294.100,00	16.294.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.940.900,00	45.940.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.940.900,00	45.940.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1116	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.680.900,00	14.680.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680.900,00	14.680.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1118	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1119	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	178.336.000,00	178.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.336.000,00	178.336.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen											
1120	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	35.043.300,00	35.043.300,00	264.978.300,00	264.978.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.021.600,00	300.021.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen											
1121	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172.500.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	207.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1122	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	375.908.080,00	375.908.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.908.080,00	375.908.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen											
1123	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	1.048.063.600,00	1.048.063.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.063.600,00	1.048.063.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1124	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	362.925.000,00	362.925.000,00	1.118.405.000,00	1.118.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.330.000,00	1.481.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	567.317.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.317.820,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1126	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	567.317.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.317.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3.06 Persen											
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1127	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan													
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	184.334.720,00	184.334.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.334.720,00	184.334.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	2.82 Persen											
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 Persen											
1128	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan													
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	52.362.000,00	52.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.362.000,00	52.362.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan	6.61 Persen 41.66 Nilai											
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen											
1129	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	70.961.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961.240,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1130	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	0,00	70.961.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
1131	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.058.300,00	3.058.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.300,00	3.058.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.685.900,00	6.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.900,00	6.627.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1133	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.960.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	9.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
1135	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	34.189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	34.189.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1136	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.610.340,00	38.434.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610.340,00	38.434.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen											
1137	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	149.569.640,00	149.569.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.569.640,00	149.569.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1139	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	0,00	685.788.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.788.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1140	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	685.788.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.788.520,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	A Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1141	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.975.600,00	2.975.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.600,00	2.975.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.832.700,00	12.832.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832.700,00	12.832.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250.000,00	35.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.580.200,00	3.580.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.200,00	3.580.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1145	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	36.318.500,00	36.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318.500,00	36.318.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1146	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	17.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1147	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.143.340,00	40.143.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.143.340,00	40.143.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen											
1148	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	485.247.120,00	485.247.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.247.120,00	485.247.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1149	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	120.900.000,00	0,00	569.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	120.900.000,00	0,00	569.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1151	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00	9.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											
1152	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.748.500,00	12.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748.500,00	12.748.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.728.100,00	2.728.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.100,00	2.728.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1156	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1157	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1158	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1159	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	118.398.720,00	118.398.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.398.720,00	118.398.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen											
1160	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	256.369.940,00	256.369.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.369.940,00	256.369.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	176.827.910,00	176.827.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.827.910,00	176.827.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1163	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.989.200,00	2.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.200,00	2.989.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1164	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.299.400,00	10.299.400,00	0,00	65.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299.400,00	75.767.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1165	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1166	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.383.600,00	2.383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.600,00	2.383.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1167	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1168	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	30.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1169	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.085.940,00	40.085.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085.940,00	40.085.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen											
1170	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	175.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.895.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	0,00	175.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.895.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	58.053.050,00	85.053.050,00	427.489.350,00	427.489.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.542.400,00	512.542.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1173	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	84.534.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.534.280,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	0,00	84.534.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.534.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	A Nilai											
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1175	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.410.400,00	2.410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.400,00	2.410.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.202.600,00	11.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202.600,00	11.202.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1178	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.474.600,00	2.474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.600,00	2.474.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1179	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	226.736.440,00	595.249.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.736.440,00	595.249.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen											
1180	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	126.878.000,00	126.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.878.000,00	126.878.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1181	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	0,00	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1182	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	15.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	A Nilai											
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1183	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.995.500,00	7.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995.500,00	7.995.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1184	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1185	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.644.500,00	20.644.500,00	79.295.850,00	79.295.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.940.350,00	99.940.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen											
1186	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	215.699.466,00	215.699.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.699.466,00	215.699.466,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94.46 Persen											
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	26 Persen											
1187	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi													
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	59.962.307,00	59.962.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.962.307,00	59.962.307,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Sampah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	A Nilai											
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen											
1188	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.721.000,00	7.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.000,00	7.721.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1189	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.435.800,00	14.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435.800,00	14.435.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1191	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.013.100,00	4.013.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.100,00	4.013.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1192	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen											
1193	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	71.487.100,00	70.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.487.100,00	70.373.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen											
1194	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	323.737.840,00	323.737.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.737.840,00	323.737.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1195	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	119.080.000,00	119.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.080.000,00	119.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100 Persen											
1196	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional													
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	4.132.670.988,00	10.534.668.488,00	93.000.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.670.988,00	10.614.968.488,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,40											
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen											
1197	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.854.000,00	64.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.854.000,00	64.854.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan											
1198	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	14.592.978.000,00	14.709.918.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592.978.000,00	14.709.918.886,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan											
1199	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.912.300,00	14.912.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912.300,00	14.912.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1200	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	71.993.800,00	0,00	44.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	0,00	60.284.300,00	0,00	160.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.137.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1202	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1203	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.438.900,00	14.438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438.900,00	14.438.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1205	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	302.233.000,00	302.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.233.000,00	302.233.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan											
1206	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	355.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	606.469.960,00	606.469.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.469.960,00	606.469.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.194.900,00	227.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.194.900,00	227.194.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan											
1209	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	822.120.700,00	822.120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.120.700,00	822.120.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	146.785.280,00	326.785.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.785.280,00	326.785.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks											
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina	75 Pelaku Usaha											
1211	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA													
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	322.387.120,00	322.387.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.387.120,00	322.387.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar											
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	2 Pasar											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1212	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2 Laporan	111.426.100,00	111.426.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.426.100,00	111.426.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen											
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	12 Kali											
1213	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	49.213.800,00	49.213.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213.800,00	49.213.800,00	Insentif Fiskal
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen											
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	8 Pelaku Usaha											
1214	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1215	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25 Pelaku Usaha	0,00	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1216	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25 Pelaku Usaha	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks											
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %											
1217	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen													
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	456.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1218	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	42.711.340,00	42.711.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711.340,00	42.711.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	50 % 50 %											
1219	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	45 Laporan	111.874.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.874.080,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1220	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	65 Laporan	0,00	146.873.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.873.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen											
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali	100 Toko											
1221	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi													
			Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	272.598.080,00	272.598.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.598.080,00	272.598.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %											
1222	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	97.681.540,00	298.226.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.681.540,00	298.226.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1.489.867.820,00	1.489.867.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.867.820,00	1.489.867.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %											
1224	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		UPTD Rumah Kreatif													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,40											
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan											
1225	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.764.600,00	22.764.600,00	10.673.100,00	10.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.437.700,00	33.437.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1226	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1228	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan											
1229	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	49.372.140,00	49.372.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.372.140,00	49.372.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1230	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	101.667.140,00	101.667.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.667.140,00	101.667.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %											
1231	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	827.213.900,00	827.213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.213.900,00	827.213.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82,40											
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan											
1232	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.492.800,00	1.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.800,00	1.492.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1233	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	19.986.600,00	19.986.600,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986.600,00	26.986.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1234	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1235	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1236	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.729.000,00	5.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1237	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1238	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	159.378.560,00	159.378.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.378.560,00	159.378.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan											
1239	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	102.262.140,00	102.262.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.262.140,00	102.262.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks											
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	60 Sertifikat											
1240	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60 Dokumen	0,00	275.847.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.847.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	45 Dokumen	232.997.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.997.020,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Umum dan Protokol													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1242	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	580.056.020,00	579.910.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.056.020,00	579.910.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1243	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	700.300.120,00	672.788.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.300.120,00	672.788.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1244	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	393.118.900,00	365.607.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.118.900,00	365.607.295,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1245	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	689.399.360,00	689.399.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.399.360,00	689.399.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1246	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.406.794.620,00	1.413.994.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.794.620,00	1.413.994.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1247	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.544.170.576,00	5.829.170.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.170.576,00	5.829.170.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1248	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.576.965.520,00	8.791.666.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.965.520,00	8.791.666.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	540.664.380,00	540.664.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.664.380,00	540.664.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
1250	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	2.311.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.354.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1251	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.011.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.354.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1252	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.567.861.984,00	16.097.861.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567.861.984,00	16.097.861.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.966.123.000,00	5.220.510.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.123.000,00	5.220.510.390,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1254	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	5.696.544.050,00	6.749.032.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.544.050,00	6.749.032.445,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1255	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	3.990.221.926,00	6.569.456.177,00	647.253.436,00	1.404.453.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.475.362,00	7.973.909.613,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen											
1256	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	6.111.674.012,00	6.885.050.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111.674.012,00	6.885.050.834,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen											
1257	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	11.852.441.820,00	17.466.496.420,00	106.000.000,00	799.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.441.820,00	18.266.426.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1258	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	789.556.220,00	795.556.220,00	0,00	2.089.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.556.220,00	2.885.056.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1259	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500.000,00	159.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen											
1260	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	421.114.100,00	656.794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.114.100,00	656.794.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen											
1261	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	1.853.663.540,00	2.019.518.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.663.540,00	2.019.518.190,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Hukum													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket											
1262	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.774.200,00	15.774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774.200,00	15.774.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1263	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.035.300,00	106.035.300,00	836.307.200,00	836.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.342.500,00	942.151.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.999.500,00	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	14.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1265	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.463.000,00	99.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.463.000,00	99.463.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit											
1266	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	403.261.420,00	403.261.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.261.420,00	403.261.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1267	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	844.478.520,00	844.478.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.478.520,00	844.478.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1268	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1269	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	49.990.000,00	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	49.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum	100 Persen											
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen											
1270	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan													
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.296.793.360,00	1.296.789.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.793.360,00	1.296.789.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1271	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan													
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	162.015.760,00	162.015.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.015.760,00	162.015.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya													
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	255.212.640,00	255.212.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.212.640,00	255.212.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota													
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	451.802.760,00	417.177.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.802.760,00	417.177.465,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus											
1274	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum													
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.821.410.700,00	2.860.012.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.410.700,00	2.860.012.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM													
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	240.918.860,00	240.918.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.918.860,00	240.918.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan	100 Persen 63 Nilai											
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100 Persen											
1276	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis													
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	338.192.440,00	338.192.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.192.440,00	338.192.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21 Persen											
1277	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	400 Pengguna	40.757.500,00	40.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.757.500,00	40.757.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1278	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	264.957.100,00	282.957.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.957.100,00	282.957.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1279	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	59.053.914.000,00	60.941.697.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.053.914.000,00	60.941.697.205,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1280	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	247.336.742,00	470.651.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.336.742,00	470.651.442,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1281	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	426.015.500,00	370.992.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.015.500,00	370.992.290,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %											
1282	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.740.500,00	13.740.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740.500,00	13.740.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1283	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.302.200,00	16.302.200,00	388.707.100,00	382.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.009.300,00	398.940.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.223.000,00	23.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223.000,00	23.223.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1285	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	330.018.000,00	330.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.018.000,00	330.018.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1286	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	915.172.140,00	915.172.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.172.140,00	915.172.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1287	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	86.560.000,00	71.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.560.000,00	71.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1288	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	70 %											
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %											
1289	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11 Dokumen	403.600.120,00	403.600.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.600.120,00	403.600.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1290	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	186.760.200,00	186.760.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.760.200,00	186.760.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %											
1291	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	413.874.600,00	413.874.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.874.600,00	413.874.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1292	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	53.979.900,00	53.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.979.900,00	53.979.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-											
1293	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah													
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	255.941.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.941.660,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1294	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah													
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	0,00	255.833.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.833.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1295	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	370.596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.596.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1296	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	0,00	370.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.469.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100 %											
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %											
1297	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	5.573.030.940,00	6.545.519.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.030.940,00	6.545.519.335,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1298	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual													
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	632.636.780,00	632.636.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.636.780,00	632.636.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %											
1299	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	30.018.134.520,00	40.790.622.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.018.134.520,00	40.790.622.915,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Organisasi													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	60 %											
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %											
1300	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	67.682.140,00	67.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.682.140,00	67.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1301	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	37.682.140,00	37.682.140,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.682.140,00	137.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1302	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	64.682.040,00	64.682.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.682.040,00	64.682.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1303	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	67.682.140,00	67.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.682.140,00	67.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37 %											
1304	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	62.682.140,00	62.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.682.140,00	62.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1305	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.364.280,00	125.364.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.364.280,00	125.364.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %											
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar											
1306	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam													
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	50.330.940,00	50.330.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.330.940,00	50.330.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10 Naskah											
1307	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	51.367.540,00	51.367.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.367.540,00	51.367.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	85 Nilai											
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen											
1308	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.355.700,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	4.355.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %											
1309	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	17.059.760,00	17.059.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059.760,00	17.059.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1310	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123.746.650,00	123.746.650,00	781.868.600,00	749.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.615.250,00	873.690.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1311	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.988.000,00	294.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.988.000,00	294.158.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan											
1312	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	769.583.340,00	769.583.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.583.340,00	769.583.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1313	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	90.060.000,00	90.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060.000,00	90.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	87 %											
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %											
1314	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1315	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1316	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	187.682.140,00	187.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.682.140,00	187.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %											
1317	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	105.543.340,00	104.903.340,00	15.189.700,00	15.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.733.040,00	120.630.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1318	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	152.491.240,00	151.786.940,00	15.189.700,00	15.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.680.940,00	167.514.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1319	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	19.885.100,00	19.885.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.885.100,00	19.885.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1320	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	94.672.140,00	94.132.140,00	15.189.700,00	15.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861.840,00	109.859.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1321	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	126.868.540,00	125.788.540,00	30.379.400,00	31.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.247.940,00	157.243.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-											
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-											
1322	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1323	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.751.072.160,00	1.628.798.360,00	803.187.200,00	803.187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.259.360,00	2.431.985.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1324	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.957.000,00	56.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.957.000,00	56.957.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1325	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	217.196.000,00	217.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.196.000,00	217.116.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1326	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	473.250.000,00	473.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.250.000,00	473.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1327	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	291 Unit	129.870.000,00	114.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.870.000,00	114.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 % 5.5 % 83 %											
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan											
1328	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	0,00	574.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.695.000,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1329	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	574.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.787.000,00	0,00	Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100 %											
1330	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	0,00	431.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	431.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.002.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100 %											
1332	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	106.790.000,00	206.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.790.000,00	206.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	90 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %											
1333	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	64.976.000,00	64.976.000,00	0,00	6.809.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.976.000,00	6.874.646.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1335	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %											
1336	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	50.027.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.027.000,00	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	49.536.000,00	49.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536.000,00	49.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level											
1338	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	103.502.000,00	103.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.502.000,00	103.502.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	29.094.000,00	29.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094.000,00	29.094.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87 %											
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %											
1341	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	39.964.000,00	39.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.964.000,00	39.964.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %											
1342	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	42.161.000,00	42.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161.000,00	42.161.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)	85 Persen											
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen											
1343	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	482.401.640,00	552.215.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.401.640,00	552.215.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1344	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	144.668.140,00	154.268.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.668.140,00	154.268.140,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen											
1345	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	10.013.782.000,00	10.608.584.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013.782.000,00	10.608.584.427,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1346	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	136.744.940,00	136.744.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.744.940,00	136.744.940,00	Pajak Daerah
1347	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	135.951.640,00	135.951.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.951.640,00	135.951.640,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1348	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.600.400,00	169.600.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600.400,00	169.600.400,00	Pajak Daerah
1349	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	903.215.800,00	1.022.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.215.800,00	1.022.689.800,00	Pajak Daerah
1350	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.358.543.300,00	1.425.027.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.543.300,00	1.425.027.400,00	Pajak Daerah
1351	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	135.240.000,00	135.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240.000,00	135.240.000,00	Pajak Daerah
1352	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.062.108.000,00	1.062.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.108.000,00	1.062.108.000,00	Pajak Daerah
1353	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.734.350.920,00	4.734.325.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734.350.920,00	4.734.325.920,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen											
1354	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	109.000.000,00	5.780.798.200,00	1.651.022.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.798.200,00	1.760.022.200,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen											
1355	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	9.996.000,00	Pajak Daerah
1356	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Pajak Daerah
1357	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.613.306.360,00	1.625.506.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.306.360,00	1.625.506.728,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1358	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	3.610.132.060,00	3.512.313.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.132.060,00	3.512.313.020,00	Pajak Daerah
1359	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	892.532.650,00	1.163.232.650,00	85.000.000,00	454.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.532.650,00	1.617.232.650,00	Pajak Daerah
1360	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	621.080.000,00	717.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.080.000,00	717.080.000,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1361	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	58.289.304.663,00	60.196.714.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.289.304.663,00	60.196.714.663,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1362	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	385 Paket	2.537.787.500,00	2.627.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.787.500,00	2.627.235.000,00	Pajak Daerah
1363	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	287.761.040,00	287.761.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.761.040,00	287.761.040,00	Pajak Daerah
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1364	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	177.530.360,00	177.530.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.530.360,00	177.530.360,00	Pajak Daerah
1365	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	2.836.260.040,00	1.438.201.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.260.040,00	1.438.201.120,00	Pajak Daerah
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	100 Persen											
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen											
1366	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.819.843.680,00	1.340.716.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.843.680,00	1.340.716.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1367	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen	14.805.504.220,00	12.755.792.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805.504.220,00	12.755.792.320,00	Pajak Daerah
1368	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1369	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	763.983.680,00	218.158.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.983.680,00	218.158.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen											
1370	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.649.331.340,00	592.907.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.331.340,00	592.907.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.662.496.040,00	105.311.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.496.040,00	105.311.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.655.956.040,00	1.940.284.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.956.040,00	1.940.284.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1373	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.654.204.040,00	1.639.835.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.204.040,00	1.639.835.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1374	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.655.971.740,00	1.643.944.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.971.740,00	1.643.944.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1375	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	8.316.366.560,00	8.707.818.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316.366.560,00	8.707.818.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1376	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	7.365.501.500,00	7.832.458.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365.501.500,00	7.832.458.700,00	Pajak Daerah
1377	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat													
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	7.674.489.920,00	7.845.451.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.489.920,00	7.845.451.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1378	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	8.011.939.280,00	8.377.029.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011.939.280,00	8.377.029.280,00	Pajak Daerah
1379	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.617.936.000,00	1.269.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.936.000,00	1.269.858.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1380	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.394.876.900,00	1.043.604.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.876.900,00	1.043.604.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1381	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.282.039.520,00	4.282.039.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.039.520,00	4.282.039.520,00	Pajak Daerah
1382	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	3.288.832.448,00	3.251.570.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.832.448,00	3.251.570.600,00	Pajak Daerah
1383	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	920.451.180,00	906.119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.451.180,00	906.119.700,00	Pajak Daerah
1384	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD													
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.204.342.880,00	2.202.327.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.342.880,00	2.202.327.880,00	Pajak Daerah
1385	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	3.636.986.680,00	3.536.666.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.986.680,00	3.536.666.680,00	Pajak Daerah
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1386	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	3.565.732.420,00	3.565.708.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.732.420,00	3.565.708.420,00	Pajak Daerah
1387	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD													
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1.790.335.400,00	1.241.038.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.335.400,00	1.241.038.300,00	Pajak Daerah
1388	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	23.550.940.730,00	23.523.429.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550.940.730,00	23.523.429.125,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1389	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	817.141.080,00	817.141.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.141.080,00	817.141.080,00	Pajak Daerah
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen											
1390	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	9.661.184.220,00	10.581.777.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661.184.220,00	10.581.777.220,00	Pajak Daerah
1391	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD													
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180 Laporan	450.495.880,00	445.563.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.495.880,00	445.563.880,00	Pajak Daerah
1392	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	3.387.681.800,00	2.630.054.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.681.800,00	2.630.054.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,13 Nilai											
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen											
1393	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	205.957.800,00	205.957.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.957.800,00	205.957.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.060.100,00	7.059.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.100,00	7.059.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.171.800,00	6.171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.800,00	6.171.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.823.500,00	7.823.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823.500,00	7.823.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1397	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.500,00	1.819.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1398	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.044.000,00	2.043.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	2.043.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.151.600,00	4.151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.600,00	4.151.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis											
1400	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	0,00	12.762.247.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762.247.117,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1401	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	12.340.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340.448.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1402	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	198.206.700,00	198.206.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.206.700,00	198.206.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1403	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	129.454.120,00	129.454.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.454.120,00	129.454.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54 Jenis											
1404	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.301.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301.940,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1405	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	59.301.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1406	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	87.156.840,00	0,00	980.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.057.840,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1407	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	87.156.840,00	0,00	1.060.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.266.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1408	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	123.323.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1409	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.323.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323.140,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1410	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	67.273.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.273.940,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1411	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	67.273.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.273.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1412	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	65.006.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.006.140,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1413	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	65.006.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.006.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1414	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	103.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.682.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1415	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.682.140,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	559.000.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000.140,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1417	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	681.550.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.550.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	4 Jenis											
1418	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	0,00	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600.000,00	183.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1419	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.812.940,00	46.812.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.812.940,00	46.812.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan											
1420	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.670.140,00	13.158.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.670.140,00	13.158.535,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1421	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	337.282.140,00	337.282.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.282.140,00	337.282.140,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	558.540.160,00	558.540.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.540.160,00	558.540.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	238 Unit											
1423	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	874.255.504,00	874.255.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.255.504,00	874.255.504,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1424	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 Unit	173.132.140,00	173.132.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.132.140,00	173.132.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	123.682.140,00	73.682.140,00	1.695.006.498,00	1.390.006.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.688.638,00	1.463.688.638,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen											
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen											
1426	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	84.999.900,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999.900,00	9.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1428	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	194.008.300,00	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.008.300,00	69.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1429	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.682.484.940,00	1.648.318.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.484.940,00	1.648.318.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen											
1430	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	430.380.760,00	516.569.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.380.760,00	516.569.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1431	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	21.972.800,00	21.972.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972.800,00	21.972.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	40 Dokumen											
1432	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	274.355.700,00	185.962.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.355.700,00	185.962.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1433	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	521.143.400,00	524.407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.143.400,00	524.407.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	205.034.100,00	142.122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.034.100,00	142.122.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen											
1435	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	67.339.240,00	67.611.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339.240,00	67.611.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen											
1437	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	157.025.880,00	157.977.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.025.880,00	157.977.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1438	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	99.603.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.603.540,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1439	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	100.283.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.283.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1440	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	268.626.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.626.460,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1441	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	269.850.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.850.460,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	235.149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.149.160,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1443	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,00	230.947.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.947.555,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1444	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	255.987.560,00	257.211.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.987.560,00	257.211.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1445	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	255.433.420,00	255.433.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.433.420,00	255.433.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1446	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	95.432.240,00	96.112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432.240,00	96.112.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	198.393.680,00	199.753.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393.680,00	199.753.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen											
1448	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	297.906.540,00	297.898.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.906.540,00	297.898.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	71.334.800,00	71.334.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.334.800,00	71.334.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	259.548.800,00	259.548.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.548.800,00	259.548.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1451	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	73.359.600,00	73.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.359.600,00	73.359.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87 Nilai											
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	9 dokumen											
1452	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	0,00	37.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1453	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	37.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen											
1454	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	19.447.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447.248.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	0,00	18.529.654.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.529.654.581,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	0,00	423.884.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.884.680,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1457	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	423.884.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.884.680,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun											
1458	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	17.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1459	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358.800,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1460	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	982.069.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.069.900,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1461	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	1.122.069.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.069.900,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1462	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	569.761.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.761.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1463	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	569.761.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.761.700,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1464	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486.500,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1465	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	11.486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1466	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1467	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1468	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	86.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1469	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	86.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1470	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	346.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.292.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1471	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.138.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun											
1472	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1473	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1474	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	285.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1475	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	285.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.300.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun											
1476	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0,00	738.703.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.703.480,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1477	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	738.703.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.703.480,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1478	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1479	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1480	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	130.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.516.500,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1481	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	130.516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.516.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1482	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	823.013.560,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.013.560,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1483	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	943.013.560,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.013.560,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100 Persen											
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen											
1484	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1485	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1486	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	22.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336.000,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1487	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0,00	28.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1488	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	0,00	241.803.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.803.700,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1489	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	347.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.253.700,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1490	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	0,00	120.752.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.752.400,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1491	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	80.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.487.400,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1492	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	678.738.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.738.160,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1493	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	0,00	749.547.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.547.160,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1494	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	446.071.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.071.200,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1495	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0,00	418.318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.318.200,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK											
1496	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	202.814.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.814.400,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1497	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	0,00	202.814.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.814.400,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1498	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	176.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.576.600,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1499	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	0,00	176.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.576.600,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1500	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	0,00	205.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.387.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1501	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	205.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.387.300,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1502	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	2 Dokumen	0,00	193.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.928.700,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1503	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	2 Dokumen	193.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.928.700,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	6 dokumen											
1504	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	601.462.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.462.296,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1505	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	0,00	601.259.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.259.296,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen											
1506	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	365.550.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.550.340,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1507	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	0,00	424.829.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.829.340,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1508	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	98.481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.481.200,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1509	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	0,00	98.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.399.200,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1510	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0,00	2.506.377.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.377.057,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1511	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.506.377.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.377.057,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1512	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.931.922.273,00	0,00	366.931.922.273,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1513	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.230.322.273,00	0,00	356.230.322.273,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1514	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.205.727.068,00	0,00	0,00	0,00	52.205.727.068,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1515	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	62.772.177.068,00	0,00	0,00	0,00	62.772.177.068,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1516	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.886.080.384,00	0,00	1.821.886.080.384,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1517	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.176.638.488,00	0,00	1.279.176.638.488,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD	12 dokumen											
1518	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	146.801.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.801.200,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1519	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	0,00	149.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.555.200,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-											
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen											
1520	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	113.211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.211.800,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1521	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	0,00	113.211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.211.800,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1522	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0,00	43.876.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1523	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	43.876.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876.100,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	349.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.400,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1525	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	0,00	349.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999.400,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1526	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	782.357.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.357.460,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1527	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	0,00	1.348.512.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.512.460,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87 Nilai											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun											
1528	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	41.665.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1529	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.665.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665.600,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1530	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999.200,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1531	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	8.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999.200,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1532	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1533	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1534	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1535	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1536	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	88.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.881.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1537	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.881.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun											
1538	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1539	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1540	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1541	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun											
1542	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	147.172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172.600,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1543	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	0,00	147.172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1544	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1545	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1546	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	305.535.980,00	0,00	554.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.977.980,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1547	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	305.535.980,00	0,00	554.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.977.980,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	43.00 Persen											
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD	43 Persen											
1548	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	0,00	2.415.996.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.996.700,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1549	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	2.415.996.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.996.700,00	0,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
		Badan Pendapatan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	88 Nilai Sakip											
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen											
1550	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.867.600,00	18.867.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867.600,00	18.867.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.045.100,00	19.045.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045.100,00	19.045.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen											
1552	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan	0,00	129.502.421.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.502.421.382,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1553	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang/ Bulan	130.819.254.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.819.254.219,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1554	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	50.000.000,00	84.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	84.324.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1555	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.727.000,00	7.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.000,00	7.727.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1556	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	147.624.100,00	147.624.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.624.100,00	147.624.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1557	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.230.570.000,00	2.580.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.570.000,00	2.580.155.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.428.800,00	2.428.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.800,00	2.428.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	471.374.000,00	892.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.374.000,00	892.274.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1562	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	431.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.848.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1564	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	0,00	775.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.050.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	0,00	0,00	0,00	783.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.526.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit	0,00	840.400,00	0,00	1.454.042.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.883.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	409 Unit	0,00	0,00	2.592.017.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.017.599,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1568	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.000,00	2.994.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	387.433.104,00	387.433.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.433.104,00	387.433.104,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1570	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448.337.373,00	448.337.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.337.373,00	448.337.373,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1571	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	115.961.640,00	129.861.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961.640,00	129.861.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	0,00	1.085.773.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.773.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1573	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	749.807.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.807.840,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	934.849.220,00	907.337.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.849.220,00	907.337.615,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1575	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	390.000.000,00	390.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00	590.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1576	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	1.199.436.661,00	1.214.436.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.436.661,00	1.214.436.661,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	0 Persen											
1577	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1578	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 Laporan	14.975.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
1579	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	305.379.600,00	231.579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.379.600,00	231.579.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1580	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	216.435.400,00	211.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.435.400,00	211.316.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	145.000.000,00	106.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	106.817.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	243.995.900,00	243.995.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.995.900,00	243.995.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1584	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.000,00	3.042.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1585	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	111.053.500,00	166.169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.053.500,00	166.169.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1586	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1587	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	11.809.000,00	11.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.000,00	11.809.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1588	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0,00	5.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1590	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.960.000,00	96.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.960.000,00	96.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1592	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1594	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1595	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.075.000,00	48.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.075.000,00	48.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	189.677.340,00	189.677.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.677.340,00	189.677.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0,00	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1599	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546.465.063,00	646.465.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.465.063,00	646.465.063,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980.000,00	22.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)	100 Persen											
1601	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.785.987.740,00	1.761.532.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.987.740,00	1.761.532.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5000 Dokumen SSPD	2.034.709.140,00	2.034.709.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.709.140,00	2.034.709.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1603	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.665.600,00	3.665.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.600,00	3.665.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.049.200,00	141.129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.049.200,00	141.129.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1605	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.158.100,00	14.158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158.100,00	14.158.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.365.000,00	39.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365.000,00	39.285.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1609	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	189.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1611	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.069.061,00	190.069.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.069.061,00	190.069.061,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1612	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.976.600,00	47.976.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.976.600,00	47.976.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	0,00	147.506.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.506.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1614	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	147.506.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.506.740,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1615	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	0,00	34.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	673.569.731,00	811.569.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.569.731,00	811.569.731,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	12.970.400,00	12.970.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970.400,00	12.970.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)	100 Persen											
1619	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	425.784.260,00	405.454.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.784.260,00	405.454.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1620	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14518 Dokumen SSPD	471.196.400,00	471.196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.196.400,00	471.196.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1621	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.491.500,00	8.491.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491.500,00	8.491.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1622	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.995.800,00	129.995.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.995.800,00	129.995.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1623	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.366.700,00	6.366.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366.700,00	6.366.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1626	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1074 Dokumen	2.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.125.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00	28.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1629	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1630	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1631	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.756.855,00	293.756.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.756.855,00	293.756.855,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1632	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.363.000,00	44.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.363.000,00	44.363.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1633	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	223.350.140,00	223.350.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.350.140,00	223.350.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880.000,00	19.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.021.200,00	398.821.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.021.200,00	398.821.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1636	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	25.378.300,00	25.378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.378.300,00	25.378.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)	100 Persen											
1637	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	498.003.540,00	498.003.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.003.540,00	498.003.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12620 Dokumen SSPD	549.785.680,00	540.560.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.785.680,00	540.560.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1639	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	0,00	237.225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.225.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1641	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	129.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.672.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1642	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1643	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.731.650,00	22.731.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731.650,00	22.731.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1644	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	5.772.500,00	5.772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.500,00	5.772.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1646	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	27.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1647	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1649	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	437.230.947,00	437.230.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.230.947,00	437.230.947,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1650	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.178.800,00	24.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178.800,00	24.178.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1651	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	179.815.340,00	185.815.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.815.340,00	185.815.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1652	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1653	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	656.857.697,00	826.857.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.857.697,00	826.857.697,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1654	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570.000,00	30.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 Persen											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (4)	100 Persen											
1655	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	2.405.274.860,00	2.356.365.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.274.860,00	2.356.365.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1656	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	288 Dokumen SSPD	749.787.820,00	749.787.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.787.820,00	749.787.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1657	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.819.400,00	5.819.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.400,00	5.819.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.206.900,00	333.538.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206.900,00	333.538.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1660	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.691.200,00	79.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.691.200,00	79.691.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1661	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	35.515.000,00	35.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.515.000,00	35.515.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1663	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0,00	23.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1665	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1666	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000.000,00	487.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1667	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	310.882.444,00	310.882.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.882.444,00	310.882.444,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1668	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.116.500,00	49.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.116.500,00	49.116.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1669	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	202.090.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.090.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1670	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	161.040.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.040.880,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1671	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1673	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	822.716.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.716.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1674	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	642.616.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.616.902,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1675	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0,00	122.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.752.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	122.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.752.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	100 Persen											
1677	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2.868.660.500,00	2.868.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.660.500,00	2.868.660.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1678	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	194053 Dokumen SSPD	526.785.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.785.680,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1679	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	154572 Dokumen SSPD	0,00	579.163.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.163.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1680	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.677.200,00	10.677.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677.200,00	10.677.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1681	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.222.500,00	119.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.222.500,00	119.222.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1683	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00	13.210.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1684	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1685	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1686	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1687	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1688	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000.000,00	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1689	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.072.963,00	295.072.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.072.963,00	295.072.963,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1690	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.970.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.970.000,00	38.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1691	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	128.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1692	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	117.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.670.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1693	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	20.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1694	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	0,00	20.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1695	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	594.625.474,00	633.540.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.625.474,00	633.540.474,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1696	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	50.486.100,00	50.486.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.486.100,00	50.486.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	100 Persen											
1697	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.140.953.500,00	1.140.953.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.953.500,00	1.140.953.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1698	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12176 Dokumen SSPD	703.836.380,00	706.236.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.836.380,00	706.236.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1699	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.601.400,00	10.601.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.400,00	10.601.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1700	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.298.200,00	106.298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.298.200,00	106.298.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1701	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1702	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.946.200,00	3.946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.200,00	3.946.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1703	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1704	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.370.000,00	32.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370.000,00	32.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1705	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1706	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	101.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1707	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	285.077.200,00	285.077.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.077.200,00	285.077.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1708	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1709	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	97.165.000,00	97.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.165.000,00	97.165.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1710	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1711	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	0,00	22.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1712	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	422.503.540,00	422.503.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.503.540,00	422.503.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1713	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	8.947.500,00	8.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947.500,00	8.947.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	100 Persen											
1714	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	535.049.960,00	535.049.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.049.960,00	535.049.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1715	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10 Dokumen SSPD	635.702.100,00	635.702.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.702.100,00	635.702.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1716	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.000,00	2.697.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1717	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.276.900,00	108.276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.276.900,00	108.276.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1718	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1719	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.999.300,00	7.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.300,00	7.999.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1720	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1721	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1722	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.620.000,00	59.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.620.000,00	59.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1723	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1724	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1725	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1726	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1727	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1728	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1729	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	136.924.000,00	136.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.924.000,00	136.924.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1730	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	15.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1731	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	697.141.131,00	697.141.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.141.131,00	697.141.131,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1732	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	18.693.600,00	18.693.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693.600,00	18.693.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	100 Persen											
1733	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	480.023.040,00	479.913.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.023.040,00	479.913.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1734	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10.963 Dokumen SSPD	491.103.540,00	490.933.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.103.540,00	490.933.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen											
1735	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	2.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1736	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1737	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	108.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.994.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1738	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	108.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.994.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1739	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1740	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.499.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1741	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	5.499.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1742	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1743	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	2.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1744	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1745	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.960.000,00	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960.000,00	41.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen											
1746	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1747	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1748	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	236.878.412,00	236.878.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.878.412,00	236.878.412,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen											
1749	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.645.800,00	52.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.645.800,00	52.645.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1750	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	114.213.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.213.740,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1751	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0,00	114.213.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.213.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1752	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	17.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1753	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	353.692.840,00	353.692.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.692.840,00	353.692.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1754	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	0,00	11.246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1755	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	11.246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.45 %											
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	100 Persen											
1756	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	510.685.680,00	510.685.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.685.680,00	510.685.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1757	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13155 Dokumen SSPD	512.773.540,00	512.773.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.773.540,00	512.773.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja (BKPSDM)	86 Nilai											
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 jenis											
1758	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1759	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1760	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1761	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1762	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1763	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1764	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1765	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1766	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1768	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	83.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.980.500,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1769	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	83.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1770	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	29.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.672.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1771	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	29.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.240.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Jenis											
1772	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	168.534.554.612,00	41.079.950.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.534.554.612,00	41.079.950.985,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Jenis											
1773	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	180.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.094.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1774	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	283.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.918.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan											
1775	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.015.000,00	15.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015.000,00	15.015.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1776	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	158.440.900,00	158.440.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.440.900,00	158.440.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1777	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.191.000,00	99.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.191.000,00	99.191.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1778	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.695.000,00	8.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695.000,00	8.695.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1779	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	756 Dokumen	3.729.600,00	3.729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.600,00	3.729.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1780	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	466.070.000,00	407.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.070.000,00	407.192.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1 Layanan											
1781	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	52.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1782	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis											
1783	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1784	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600.000,00	253.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1785	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	933.514.020,00	933.514.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.514.020,00	933.514.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis											
1786	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	759.807.600,00	812.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.807.600,00	812.207.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1787	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	34.889.200,00	64.889.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.889.200,00	64.889.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1788	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1789	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	136.700.000,00	154.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700.000,00	154.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59,00 Nilai											
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	4 Jenis											
1790	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10.386.500,00	10.386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386.500,00	10.386.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1791	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	720.617.200,00	288.721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.617.200,00	288.721.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1792	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	156.556.420,00	101.533.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.556.420,00	101.533.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1793	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	142.398.420,00	142.398.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.398.420,00	142.398.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis											
1794	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	82.396.240,00	82.396.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396.240,00	82.396.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan	125.205.140,00	125.205.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.205.140,00	125.205.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1796	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	174.113.140,00	180.913.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.113.140,00	180.913.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	3 Jenis											
1797	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.943.674.540,00	1.477.649.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.674.540,00	1.477.649.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1798	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	113.967.280,00	406.455.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.967.280,00	406.455.675,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1799	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 Dokumen	163.873.780,00	136.362.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.873.780,00	136.362.175,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis											
1800	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	134.131.180,00	129.591.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.131.180,00	129.591.180,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1801	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	800 Orang	344.360.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.360.280,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1802	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	500 Orang	0,00	339.810.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.810.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1803	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200 Orang	141.990.280,00	141.990.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.990.280,00	141.990.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1804	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	30.694.700,00	27.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694.700,00	27.674.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen											
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	4 dokumen											
1805	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3 Dokumen	364.764.280,00	338.484.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.764.280,00	338.484.675,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1806	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	100 Orang	467.042.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.042.440,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1807	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota													
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	202 Orang	0,00	599.308.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.308.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1808	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	4 Dokumen	0,00	257.799.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.799.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1809	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	257.799.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.799.840,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai											
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis											
1810	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.815.200,00	11.815.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815.200,00	11.815.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1811	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.166.000,00	40.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.166.000,00	40.166.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 Layanan											
1812	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	25.537.000,00	25.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537.000,00	25.537.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 Jenis											
1813	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	263.774.980,00	263.774.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.774.980,00	263.774.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	2 Layanan											
1814	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.218.000,00	78.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.218.000,00	78.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1815	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00	11.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59.00 Nilai											
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Jenis											
1816	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	701.912.600,00	1.196.598.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.912.600,00	1.246.598.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai											
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	100 Persen											
1817	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.359.832.000,00	25.552.305.000,00	600.000.000,00	1.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00	26.892.305.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai											
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46 Orang/ Bulan											
1818	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	0,00	9.189.133.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189.133.077,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen											
1819	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	189.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.782.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan											
1820	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit											
1821	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	826.105.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.105.916,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen											
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	14 Laporan											
1822	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	0,00	408.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.149.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1823	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	0,00	520.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.833.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen											
1824	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	0,00	595.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1825	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	0,00	967.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.165.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1826	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	0,00	84.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.522.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1827	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	74.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.273.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Laporan											
1828	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0,00	142.988.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.988.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1829	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	0,00	133.229.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.229.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1830	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	0,00	227.939.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.939.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai											
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen											
1831	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.259.000,00	35.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.259.000,00	35.259.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1832	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	11.011.900,00	11.011.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011.900,00	11.011.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46 Orang/ Bulan											
1833	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	9.056.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056.236.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1834	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1835	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1836	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen											
1837	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.951.000,00	21.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.000,00	21.951.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1838	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.912.300,00	198.912.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.912.300,00	198.912.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1839	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	107.494.000,00	107.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.494.000,00	107.494.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1840	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.180.300,00	24.180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180.300,00	24.180.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1841	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1842	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.046.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit											
1843	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1844	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	20.005.200,00	13.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005.200,00	16.915.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan											
1845	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1846	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	324.820.180,00	324.818.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.820.180,00	324.818.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit											
1847	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	775.681.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.681.916,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1848	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.247.602.060,00	1.198.692.540,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.602.060,00	1.698.692.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen											
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan											
1849	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	1.008.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.149.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1850	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1851	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1852	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	0,00	244.299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.299.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1853	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	244.299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.299.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1854	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	287.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.207.600,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1855	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	0,00	128.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.765.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1856	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	49.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.162.400,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen											
1857	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1858	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1859	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen											
1860	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1861	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	378.199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.199.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1862	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1863	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	892.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.165.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1864	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	22.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1865	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	22.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1866	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1867	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Laporan											
1868	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	99.998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1869	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	53.075.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.075.900,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1870	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	134.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.999.300,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penghubung													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen											
1871	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.857.200,00	4.857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857.200,00	4.857.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100 persen											
1872	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	2.841.784.000,00	2.822.072.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.784.000,00	2.822.072.547,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-											
1873	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.600,00	9.999.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1874	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.996.800,00	49.996.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996.800,00	49.996.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1875	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1876	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.317.600,00	7.317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317.600,00	7.317.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1877	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.580.000,00	76.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.580.000,00	76.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1878	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	96.243.000,00	504.139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.243.000,00	506.139.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1879	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1880	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1881	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	920.690.136,00	920.690.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.690.136,00	920.690.136,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-											
1882	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	879.877.176,00	1.069.874.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.877.176,00	1.069.874.376,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1883	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	128.530.000,00	128.530.000,00	221.170.000,00	221.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700.000,00	349.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	94.498.472,00	108.493.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.498.472,00	108.493.472,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung	90 indeks											
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks											
1885	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	45.569.400,00	45.569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.569.400,00	45.569.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1886	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya													
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	242.416.472,00	247.416.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.416.472,00	247.416.472,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1887	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	2.725.023.888,00	2.825.023.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.023.888,00	2.825.023.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)	87 Persen											
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen											
1888	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	68.028.400,00	67.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.028.400,00	67.962.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1889	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.267.100,00	43.267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.267.100,00	43.267.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen											
1890	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	21.385.658.000,00	22.531.187.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385.658.000,00	22.531.187.910,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1891	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.998.700,00	49.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998.700,00	49.998.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1892	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	114.418.700,00	114.418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.418.700,00	114.418.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1893	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	167.177.100,00	216.917.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.177.100,00	216.917.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1894	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.644.000,00	25.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644.000,00	25.644.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1895	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	44.114.400,00	44.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.114.400,00	44.114.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1896	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	80.000.000,00	79.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1897	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.349.948.000,00	950.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.948.000,00	950.494.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen											
1898	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72 Unit	49.766.400,00	0,00	1.421.216.188,00	1.409.792.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.982.588,00	1.409.792.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen											
1899	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1900	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1901	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	306.332.640,00	306.332.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.332.640,00	306.332.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen											
1902	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	2.139.679.260,00	1.979.659.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.679.260,00	1.979.659.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1903	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	92.244.280,00	94.464.280,00	395.420.000,00	464.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.664.280,00	558.664.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1904	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	262.408.560,00	200.271.660,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.408.560,00	200.271.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen											
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen											
1905	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	450.060.460,00	425.059.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.060.460,00	425.059.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1906	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	250.232.480,00	250.232.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.232.480,00	250.232.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1907	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	199.999.900,00	199.994.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	199.994.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1908	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	300.115.840,00	300.115.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.115.840,00	300.115.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1909	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	900.080.880,00	900.080.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.080.880,00	900.080.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1910	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	406.299.200,00	406.278.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.299.200,00	406.278.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1911	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	58 Dokumen	500.232.480,00	489.710.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.232.480,00	489.710.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen											
1912	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	150.232.480,00	145.732.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.232.480,00	145.732.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1913	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	1.264.227.820,00	1.214.054.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.227.820,00	1.214.054.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	[deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen											
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen											
1914	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	539.191.320,00	545.006.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.191.320,00	545.006.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1915	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1.051.842.840,00	1.597.607.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.842.840,00	1.597.607.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen											
1916	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	550.348.120,00	550.275.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.348.120,00	550.275.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1917	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	299.999.500,00	299.961.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999.500,00	299.961.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1918	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	700.000.000,00	699.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	699.999.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1919	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	149.983.200,00	139.725.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.983.200,00	139.725.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai											
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen											
1920	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34.212.800,00	34.212.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.212.800,00	34.212.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1921	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.995.000,00	14.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995.000,00	14.995.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1922	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	8.821.852.164,00	8.348.401.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.852.164,00	8.348.401.423,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1923	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.989.100,00	14.989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989.100,00	14.989.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1924	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	19.178.600,00	0,00	89.406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.585.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1925	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.178.600,00	0,00	59.406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.585.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1926	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.623.800,00	34.623.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.623.800,00	34.623.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1928	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.996.100,00	4.996.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.100,00	4.996.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1929	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.330.000,00	217.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.330.000,00	217.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan selesai	100 %											
1930	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	125.643.800,00	125.643.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.643.800,00	125.643.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100 %											
1931	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1932	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	128.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1933	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	861.343.584,00	907.343.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.343.584,00	907.343.584,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %											
1934	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	828.165.000,00	836.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.165.000,00	836.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1935	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1936	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	25.640.000,00	25.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640.000,00	25.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1937	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1938	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00	14.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90 %											
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %											
1939	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	741.921.620,00	741.921.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.921.620,00	741.921.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1940	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka													
			Jumlah Paskibraka	36 Orang	3.578.883.500,00	3.578.883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.883.500,00	3.578.883.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80 %											
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %											
1941	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	180.149.915.352,00	180.789.855.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.149.915.352,00	180.789.855.052,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	80 %											
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1942	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	118.457.000,00	218.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.457.000,00	218.457.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80 %											
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %											
1943	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	553.056.560,00	553.056.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.056.560,00	553.056.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90 %											
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %											
1944	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang	1.364.464.520,00	1.364.464.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.464.520,00	1.364.464.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1945	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	987.354.000,00	987.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.354.000,00	987.354.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	1.064.864.042.630,00	1.161.672.925.416,00	5.340.376.258,00	6.164.852.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.204.418.888,00	1.167.837.777.684,00
1	01	1	02	Kesehatan	569.808.642.424,00	603.777.215.876,00	18.556.965.444,00	26.263.439.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.365.607.868,00	630.040.655.520,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.417.114.516,00	33.686.783.693,00	213.705.900,00	209.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.630.820.416,00	33.896.220.193,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	46.702.465.287,00	47.312.141.180,00	2.507.660.100,00	2.753.842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.210.125.387,00	50.065.983.780,00
1	01	1	06	Sosial	23.350.364.920,00	22.865.592.554,00	6.606.269.600,00	6.598.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956.634.520,00	29.464.530.854,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	32.796.407.372,00	33.281.864.819,00	105.108.500,00	89.609.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901.515.872,00	33.371.474.619,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	569.557.660,00	570.607.660,00	19.052.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.609.660,00	588.607.660,00
1	01	2	09	Pangan	607.072.190,00	607.072.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.072.190,00	607.072.190,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	766.577.106,00	766.577.106,00	150.782.950,00	149.668.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.360.056,00	916.245.956,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	911.061.940,00	911.061.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.061.940,00	911.061.940,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.325.277.820,00	20.923.230.824,00	814.874.400,00	804.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140.152.220,00	21.727.505.424,00
1	01	2	15	Perhubungan	23.047.746.502,00	24.492.027.374,00	851.721.300,00	784.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899.467.802,00	25.277.010.974,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	17.520.257.300,00	19.452.310.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520.257.300,00	19.452.310.914,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.521.370.800,00	15.421.143.491,00	133.808.900,00	760.700.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655.179.700,00	16.181.843.841,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	14.707.715.080,00	14.861.949.523,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708.791.080,00	14.861.949.523,00
1	01	2	20	Statistik	441.297.200,00	416.841.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00	416.841.540,00
1	01	2	22	Kebudayaan	47.100.471.556,00	47.134.102.087,00	55.000.000,00	2.347.205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155.471.556,00	49.481.307.187,00
1	01	2	24	Kearsipan	643.907.040,00	661.907.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.907.040,00	661.907.040,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	25.336.880.352,00	26.220.335.147,00	1.073.101.800,00	1.083.291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.409.982.152,00	27.303.626.747,00
1	01	3	26	Pariwisata	13.009.313.737,00	13.893.355.384,00	347.957.700,00	565.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357.271.437,00	14.459.207.584,00
1	01	3	27	Pertanian	50.346.775.944,00	49.798.241.636,00	2.555.670.300,00	2.555.670.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.902.446.244,00	52.353.911.936,00
1	01	3	28	Kehutanan	41.283.605.730,00	43.224.323.075,00	2.973.119.060,00	3.038.587.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.256.724.790,00	46.262.910.135,00
1	01	3	30	Perdagangan	17.630.269.940,00	17.930.501.326,00	44.223.000,00	167.853.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674.492.940,00	18.098.354.726,00
1	01	3	31	Perindustrian	184.223.880,00	184.223.880,00	10.673.100,00	10.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.896.980,00	194.896.980,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	166.825.303.200,00	204.602.617.683,00	4.039.272.036,00	14.304.076.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.864.575.236,00	218.906.694.119,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	208.656.862.631,00	205.197.934.473,00	5.865.798.200,00	2.105.022.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.522.660.831,00	207.302.956.673,00
1	01	5	01	Perencanaan	21.871.777.384,00	22.045.367.591,00	2.859.507.498,00	2.633.716.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731.284.882,00	24.679.084.089,00
1	01	5	02	Keuangan	202.521.728.920,00	204.147.029.539,00	5.125.579.499,00	4.567.928.500,00	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	1.635.406.960.761,00	2.188.818.002.657,00	1.905.826.446.248,00	2.449.738.687.764,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	5	03	Kepegawaian	183.559.991.712,00	75.086.663.765,00	760.737.000,00	1.468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.320.728.712,00	76.555.050.765,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.089.606.560,00	1.195.592.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00	1.195.592.955,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	15.300.450.456,00	15.828.505.913,00	520.005.200,00	513.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820.455.656,00	16.342.420.913,00
1	01	5	07	Penghubung	8.401.140.744,00	8.693.421.491,00	317.413.000,00	725.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718.553.744,00	9.418.731.291,00
1	01	6	01	Inspektorat	34.171.632.060,00	35.148.657.290,00	1.851.636.188,00	1.873.992.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023.268.248,00	37.022.649.590,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	198.510.828.700,00	198.929.132.659,00	328.050.200,00	358.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.838.878.900,00	199.287.182.859,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	31.090.231.979,00	31.381.291.904,00	1.482.786.000,00	1.603.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.573.017.979,00	32.984.527.904,00
2	03	1	06	Sosial	264.416.700,00	264.416.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.416.700,00	264.416.700,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	4.228.154.080,00	5.232.126.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.154.080,00	5.232.126.870,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	183.281.432.502,00	208.878.105.342,00	93.368.859.937,00	104.207.472.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.650.292.439,00	313.085.578.279,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	807.400.000,00	807.400.000,00	568.320.000,00	1.176.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.720.000,00	1.984.164.000,00
3	04	2	09	Pangan	7.867.657.360,00	7.705.701.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867.657.360,00	7.705.701.420,00
3	04	2	15	Perhubungan	12.767.206.743,00	16.319.478.183,00	924.000.000,00	924.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691.206.743,00	17.243.478.183,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	35.804.210.184,00	36.046.839.524,00	114.713.903.270,00	119.331.307.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.518.113.454,00	155.378.146.594,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.093.840.330,00	10.069.385.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093.840.330,00	10.069.385.470,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	2.629.738.780,00	2.605.284.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.738.780,00	2.605.284.020,00
3	04	2	21	Persandian	469.557.380,00	421.931.780,00	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.057.380,00	466.431.780,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	4.710.743.580,00	5.190.293.171,00	660.389.000,00	714.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371.132.580,00	5.905.182.171,00
3	04	3	27	Pertanian	18.407.668.275,00	19.149.566.455,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417.668.275,00	19.159.566.455,00
3	04	3	28	Kehutanan	236.696.720,00	236.696.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.696.720,00	236.696.720,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	190.499.500,00	190.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.499.500,00	190.499.500,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.649.199.140,00	2.027.049.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.199.140,00	2.027.049.540,00
3	04	3	31	Perindustrian	2.414.763.260,00	2.615.308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.763.260,00	2.615.308.500,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.243.844.980,00	15.666.439.124,00	1.500.000.000,00	1.927.816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743.844.980,00	17.594.255.224,00
4	05	2	10	Pertanahan	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	5.300.754.395,00	11.702.751.895,00	93.000.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.754.395,00	11.783.051.895,00
4	05	3	28	Kehutanan	70.961.240,00	70.961.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961.240,00	70.961.240,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.194.051.416,00	33.175.228.369,00	16.626.100.000,00	24.307.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820.151.416,00	57.482.828.369,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.925.823.704,00	7.763.596.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.823.704,00	7.763.596.324,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	37.867.392.436,00	37.924.109.436,00	35.679.311.100,00	35.715.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.546.703.536,00	73.639.171.936,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	332.121.540,00	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00	332.121.540,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	1.758.384.560,00	1.774.948.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.384.560,00	1.774.948.280,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	341.154.540.730,00	357.420.421.732,00	423.387.506.928,00	425.833.997.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.542.047.658,00	783.254.419.669,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	61.736.664.400,00	66.536.664.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736.664.400,00	66.536.664.400,00
8	10	2	22	Kebudayaan	530.464.927.136,00	685.389.574.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.464.927.136,00	685.389.574.096,00
8	10	2	23	Perpustakaan	527.473.360,00	527.473.360,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.473.360,00	627.473.360,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	5.175.571.000,00	5.223.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.571.000,00	5.223.571.000,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.353.081.200,00	1.353.080.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.081.200,00	1.353.080.600,00
9	11	3	32	Transmigrasi	24.884.800,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00
				TOTAL	**4.465.641.178.703,00**	**4.755.763.778.329,00**	**753.187.821.368,00**	**798.894.222.750,00**	**62.772.177.068,00**	**52.205.727.068,00**	**1.635.406.960.761,00**	**2.188.818.002.657,00**	**6.917.008.137.900,00**	**7.795.681.730.804,00**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Menengah	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	39.999.200,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	34.981.800,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	124.999.800,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.059.000,00	44.063.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.631.562.525,00	11.536.562.525,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	150.628.635.719,00	139.128.635.719,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.498.679.200,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	101.430.000,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	393.150.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	70.550.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	57.075.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	6.144.320.400,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	43.660.703.700,00	40.393.577.660,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	62.919.500,00	59.769.500,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00	124.998.600,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	43.059.000,00	42.099.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.640.518.078,00	8.207.219.062,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.653.500.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	402.278.200,00	498.278.200,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	929.832.100,00	1.201.841.100,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	83.370.000,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	70.550.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.139.000,00	47.804.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.696.200,00	6.572.695.600,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	35.848.917.220,00	32.226.076.940,00
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	31.250.000,00	72.290.000,00
		Total	358.740.432.766,00	343.229.774.830,00
2.	Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	336.645.300,00	534.645.300,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	12.935.739.900,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	628.648.100,00	608.648.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.619.417.920,00	5.081.413.200,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.559.300,00
		Total	19.537.010.520,00	19.177.005.800,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	378.277.443.286,00	362.406.780.630,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.042.400,00	567.961.100,00
		Total	517.042.400,00	567.961.100,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	2.405.881.900,00
		Total	2.405.881.900,00	2.405.881.900,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	2.922.924.300,00	2.973.843.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.055.977.464,00	40.793.745.021,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.050.009.100,00	15.081.217.100,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.465.483.580,00	1.359.184.976,00
		Total	45.571.470.144,00	57.234.147.097,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.065.383.160,00	14.932.448.684,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	1.028.074.300,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	262.831.900,00
		Total	12.356.289.360,00	16.223.354.884,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	57.927.759.504,00	73.457.501.981,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00	20.822.600,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	272.217.800,00
		Total	293.040.400,00	293.040.400,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	499.622.640,00	487.395.260,00
		Total	499.622.640,00	487.395.260,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	792.663.040,00	780.435.660,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	242.712.420,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	29.899.600,00
		Total	18.887.486.279,00	18.887.486.279,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.887.486.279,00	18.887.486.279,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	289.939.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.624.600,00
		Total	2.318.564.200,00	2.318.564.200,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	120.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	74.406.700,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	236.941.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	50.318.000,00
		Pengasuhan	71.891.500,00	71.891.500,00
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	749.452.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	10.000.000,00
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00
		Total	1.402.760.000,00	1.402.760.000,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	149.580.300,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	24.500.800,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	52.170.600,00
		Pemulasaraan	158.890.100,00	158.890.100,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	618.890.000,00
		Total	1.024.031.800,00	1.024.031.800,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	74.200.000,00	122.200.000,00
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.999.400,00
		Total	84.199.400,00	132.199.400,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	257.936.700,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	3.240.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	3.240.000,00
		Total	264.416.700,00	264.416.700,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	5.093.972.100,00	5.141.972.100,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

PROVINSI BALI

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	4.421.481.540,00	4.331.259.160,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.655.179.700,00	16.181.843.841,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	1.376.733.520,00	1.250.324.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	14.114.700,00	14.114.700,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	963.091.000,00	962.815.700,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	36.223.802.240,00	47.968.779.030,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	320.543.320,00	320.543.320,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	264.416.700,00	264.416.700,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	272.598.080,00	272.598.080,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	3.291.364.980,00	3.832.575.880,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	195.296.320,00	195.296.320,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	4.228.154.080,00	5.232.126.870,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	483.824.320,00	483.824.320,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	169.431.000,00	169.431.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	5.036.277.700,00	4.837.685.880,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	7.137.196.940,00	7.257.646.940,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	3.192.255.800,00	3.528.165.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	480.968.560,00	480.968.560,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	765.655.000,00	7.575.257.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	12.356.289.360,00	16.223.354.884,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	47.497.400,00	47.497.400,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	175.363.380,00	150.908.620,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	16.949.810.640,00	16.900.901.120,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.763.120.700,00	4.613.120.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	381.347.600,00	381.347.600,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	72.734.054.136,00	72.814.232.536,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	163.246.037.360,00	189.902.756.620,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	101.698.480,00	101.698.480,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	49.213.800,00	49.213.800,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	2.306.859.069,00	2.361.359.010,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	843.582.440,00	921.432.840,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	4.225.670.988,00	10.614.968.488,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	553.056.560,00	553.056.560,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.346.238.120,00	1.297.328.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	588.609.660,00	588.607.660,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	441.297.200,00	416.841.540,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	194.896.980,00	194.896.980,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	3.705.441.460,00	4.271.596.460,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	248.681.272,00	248.681.272,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	752.595.600,00	752.595.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	4.320.805.120,00	4.320.805.120,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	180.149.915.352,00	180.789.855.052,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	3.013.009.760,00	3.118.009.760,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.089.606.560,00	1.195.592.955,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	481.614.400,00	609.810.120,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	1.613.539.660,00	1.440.356.340,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	179.545.911.246,00	180.176.286.486,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.628.199.856,00	12.814.255.613,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	83.149.900,00	83.149.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	26.409.982.152,00	27.303.626.747,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	60.113.282.800,00	64.913.282.800,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	27.003.500,00	26.777.500,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	1.177.100,00	1.177.100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	562.144.940,00	713.278.940,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	643.780.651,00	970.410.101,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	22.404.300,00	22.404.300,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	19.267.800,00	19.267.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	52.902.446.244,00	52.353.911.936,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	0,00	466.839.138.896,00	615.827.849.376,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	33.630.820.416,00	33.896.220.193,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	76.049.700,00	76.049.700,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	82.125.000,00	82.125.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	25.825.700,00	25.825.700,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	106.084.280,00	106.084.280,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	1.684.752.680,00	1.684.516.980,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.267.801.680,00	2.269.710.975,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	547.694.020,00	498.784.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	101.569.200,00	101.569.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.271.343.020,00	1.271.343.020,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	482.932.360,00	482.932.360,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	174.499.500,00	174.499.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	792.663.040,00	780.435.660,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	2.351.818.520,00	2.351.818.520,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	33.141.400,00	33.141.400,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	117.604.565.178,00	112.296.607.585,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	1.367.912.760,00	1.367.912.760,00
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	47.155.471.556,00	49.481.307.187,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	59.010.600,00	59.010.600,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	28.310.421.728,00	28.858.814.550,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	332.121.540,00	332.121.540,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	588.365.607.868,00	630.040.655.520,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	52.362.000,00	52.362.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	74.981.000,00	74.981.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	111.426.100,00	111.426.100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	57.664.821.760,00	63.625.213.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	1.010.614.840,00	1.010.614.840,00
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0,00	472.437.140,00	472.437.140,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	12.208.154.763,00	15.760.426.203,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	99.556.000,00	99.556.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	322.387.120,00	322.387.120,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.481.719.140,00	3.186.563.940,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	4.829.555.400,00	4.877.555.400,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	554.703.400,00	361.703.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	381.912.607,00	381.912.607,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	268.540.500,00	268.540.500,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	989.684.730,00	989.684.630,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	607.072.190,00	607.072.190,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	12.481.421.260,00	12.825.481.160,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	11.344.826.348,00	11.053.190.607,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	791.800.000,00	1.400.244.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	460.697.860,00	526.171.100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	525.774.880,00	525.774.880,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	198.408.880,00	198.408.880,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.387.555.620,00	1.370.900.340,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	34.710.800,00	34.710.800,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	514.057.380,00	466.431.780,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	29.956.634.520,00	29.464.530.854,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	643.907.040,00	661.907.040,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	14.256.010.580,00	14.252.268.064,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	118.457.000,00	218.457.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	320.771.180,00	320.771.180,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	433.335.920,00	408.881.160,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	23.899.467.802,00	25.277.010.974,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	149.730.000,00	149.730.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	18.569.500,00	18.569.500,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	764.289.447.758,00	783.001.819.769,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	275.346.020,00	275.346.020,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	25.435.821.039,00	25.726.880.964,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	427.237.620,00	427.237.620,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	238.410.700,00	238.410.700,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	70.961.240,00	70.961.240,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	108.216.000,00	313.506.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00	24.884.800,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	17.520.257.300,00	19.452.310.914,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	44.256.724.790,00	46.262.910.135,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	5.705.543.984,00	6.300.721.531,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	9.996.400,00	9.996.400,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	18.981.764.062,00	19.222.809.174,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	130.032.570.316,00	159.420.715.409,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	13.152.837.065,00	14.278.784.025,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	9.203.500,00	9.203.500,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	1.143.149.560,00	1.143.149.560,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	138.036.692.194,00	142.552.665.434,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	6.573.647.880,00	6.573.647.880,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	472.310.100,00	472.310.100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	179.284.451.012,00	71.717.364.885,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	184.334.720,00	184.334.720,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	2.138.124.870,00	2.013.851.070,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	13.357.271.437,00	14.459.207.584,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	285.448.560,00	260.993.800,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	18.282.214.260,00	18.116.690.540,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	267.258.400,00	267.258.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	17.674.492.940,00	18.098.354.726,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	49.210.125.387,00	50.065.983.780,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	45.571.470.144,00	57.234.147.097,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	1.123.381.600,00	1.123.381.600,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	545.556.320,00	521.101.560,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	669.054.460,00	644.599.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	14.708.791.080,00	14.861.949.523,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	166.928.560,00	129.246.420,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	94.503.874.939,00	104.343.578.419,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	96.918.095.653,00	95.006.349.088,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	1.950.569.500,00	1.938.342.120,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	746.315.460,00	633.269.040,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	1.070.204.418.888,00	1.167.837.777.684,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	2.414.763.260,00	2.615.308.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	1.112.579.000,00	1.212.485.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	1.704.292.879.282,00	2.247.174.114.278,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	2.370.039.964,00	2.370.039.964,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	917.360.056,00	916.245.956,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	32.901.515.872,00	33.371.474.619,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	614.087.820,00	614.087.820,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	49.991.600,00	349.991.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	5.292.255.300,00	5.883.351.020,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERUBAHAN APBD SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.013.231.524.893,00	2.013.231.524.893,00	2.014.566.986.893,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.947.294.860.493,00	1.947.294.860.493,00	1.948.030.322.493,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.947.294.860.493,00	1.947.294.860.493,00	1.948.030.322.493,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	780.949.476.769,00	780.949.476.769,00	781.738.876.769,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	413.811.788.823,00	413.811.788.823,00	414.601.188.823,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	139.128.635.719,00	139.128.635.719,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.202.629.000,00	1.202.629.000,00	1.202.629.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.568.662.000,00	3.568.662.000,00	3.568.662.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00	4.843.633.553,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	584.026.000,00	584.026.000,00	584.026.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	346.566.000,00	346.566.000,00	346.566.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	8.660.000.000,00	8.660.000.000,00	8.660.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	393.150.000,00	393.150.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	6.144.320.400,00	6.144.320.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.276.579.700,00	1.276.579.700,00	2.065.979.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	40.393.577.660,00	40.393.577.660,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	70.550.000,00	70.550.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.498.679.200,00	4.498.679.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.038.979.266,00	178.038.979.266,00	178.038.979.266,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.999.400,00	29.999.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	59.769.500,00	59.769.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	1.693.944.000,00	1.693.944.000,00	1.693.944.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	11.536.562.525,00	11.536.562.525,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	124.999.800,00	124.999.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.416.525.100,00	9.416.525.100,00	9.416.525.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	327.025.599.334,00	327.025.599.334,00	327.025.599.334,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00	60.067.623.277,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.653.500.000,00	10.653.500.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	595.525.552,00	595.525.552,00	595.525.552,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.965.009.411,00	1.965.009.411,00	1.965.009.411,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	205.252.000,00	205.252.000,00	205.252.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	6.572.695.600,00	6.572.695.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.201.841.100,00	1.201.841.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	32.226.076.940,00	32.226.076.940,00	32.226.076.940,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	70.550.000,00	70.550.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	498.278.200,00	498.278.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	174.098.930.598,00	174.098.930.598,00	174.098.930.598,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	55.835.000,00	55.835.000,00	55.835.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	72.290.000,00	72.290.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	8.207.219.062,00	8.207.219.062,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00	4.690.001.694,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	9.332.988.300,00	9.332.988.300,00	9.332.988.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00	124.998.600,00	124.998.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	276.984.000,00	276.984.000,00	276.984.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	40.112.088.612,00	40.112.088.612,00	40.112.088.612,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	12.935.739.900,00	12.935.739.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.048.265.309,00	1.048.265.309,00	1.048.265.309,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	738.005.200,00	738.005.200,00	738.005.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	3.396.219.400,00	3.396.219.400,00	3.396.219.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	244.599.600,00	244.599.600,00	244.599.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.050.980.300,00	1.050.980.300,00	1.050.980.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.081.413.200,00	5.081.413.200,00	5.081.413.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	608.648.100,00	608.648.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.259.085.203,00	11.259.085.203,00	11.259.085.203,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.547.600,00	15.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.559.300,00	16.559.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.317.967.700,00	1.317.967.700,00	1.317.967.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	534.645.300,00	534.645.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.544.412.500,00	1.544.412.500,00	1.544.412.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	74.981.000,00	74.981.000,00	74.981.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	74.981.000,00	74.981.000,00	74.981.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	34.981.800,00	34.981.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	39.999.200,00	39.999.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.166.270.402.724,00	1.166.270.402.724,00	1.166.216.464.724,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.572.400,00	264.572.400,00	250.034.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.992.400,00	101.992.400,00	101.992.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162.580.000,00	162.580.000,00	148.042.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.146.546.774.166,00	1.146.546.774.166,00	1.146.546.774.166,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.289.783.066,00	1.146.289.783.066,00	1.146.289.783.066,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.942.500,00	102.942.500,00	102.942.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	154.048.600,00	154.048.600,00	154.048.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.145.000,00	88.145.000,00	88.145.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	88.145.000,00	88.145.000,00	88.145.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.155.000,00	68.155.000,00	68.155.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	68.155.000,00	68.155.000,00	68.155.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.650.080.050,00	1.650.080.050,00	1.610.680.050,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.619.800,00	982.619.800,00	943.219.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	31.526.250,00	31.526.250,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.094.000,00	625.094.000,00	625.094.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00	4.260.790.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.780.070.790,00	9.780.070.790,00	9.780.070.790,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.228.907.150,00	1.228.907.150,00	1.228.907.150,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.551.163.640,00	8.551.163.640,00	8.551.163.640,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.611.815.318,00	3.611.815.318,00	3.611.815.318,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	786.585.000,00	786.585.000,00	786.585.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.426.940.818,00	2.426.940.818,00	2.426.940.818,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.289.500,00	398.289.500,00	398.289.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	65.936.664.400,00	65.936.664.400,00	66.536.664.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	65.936.664.400,00	65.936.664.400,00	66.536.664.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.123.381.600,00	1.123.381.600,00	1.123.381.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.123.381.600,00	1.123.381.600,00	1.123.381.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	91.521.100,00	91.521.100,00	91.521.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	163.558.400,00	163.558.400,00	163.558.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	587.641.900,00	587.641.900,00	587.641.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	280.660.200,00	280.660.200,00	280.660.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	64.313.282.800,00	64.313.282.800,00	64.913.282.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	11.293.401.800,00	11.293.401.800,00	11.293.401.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	5.813.286.000,00	5.813.286.000,00	5.813.286.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.480.115.800,00	5.480.115.800,00	5.480.115.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	169.881.000,00	169.881.000,00	169.881.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	169.881.000,00	169.881.000,00	169.881.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	52.850.000.000,00	52.850.000.000,00	53.450.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	52.850.000.000,00	52.850.000.000,00	53.450.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001						UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00	2.223.399.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.262.943.000,00	1.262.943.000,00	1.262.943.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	738.288.000,00	738.288.000,00	738.288.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	101.430.000,00	101.430.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	57.075.000,00	57.075.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	44.063.000,00	44.063.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	535.720.000,00	535.720.000,00	535.720.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	524.655.000,00	524.655.000,00	524.655.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	83.370.000,00	83.370.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	47.804.000,00	47.804.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	42.099.000,00	42.099.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	351.382.000,00	351.382.000,00	351.382.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	960.456.600,00	960.456.600,00	960.456.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.353.800,00	90.353.800,00	90.353.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.216.000,00	40.216.000,00	40.216.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.500,00	2.999.500,00	2.999.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.138.300,00	47.138.300,00	47.138.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.642.800,00	753.642.800,00	753.642.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.642.800,00	753.642.800,00	753.642.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.460.000,00	116.460.000,00	116.460.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.340.000,00	103.340.000,00	103.340.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002						UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	838.475.260,00	838.475.260,00	838.475.260,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	101.569.200,00	101.569.200,00	101.569.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	69.519.900,00	69.519.900,00	69.519.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	69.519.900,00	69.519.900,00	69.519.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	32.049.300,00	32.049.300,00	32.049.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	32.049.300,00	32.049.300,00	32.049.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	76.049.700,00	76.049.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	76.049.700,00	76.049.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	76.049.700,00	76.049.700,00	76.049.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	660.856.360,00	660.856.360,00	660.856.360,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.496.400,00	42.496.400,00	42.496.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.618.800,00	8.618.800,00	8.618.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.547.600,00	6.547.600,00	6.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.330.000,00	27.330.000,00	27.330.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.549.960,00	527.549.960,00	527.549.960,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.549.960,00	527.549.960,00	527.549.960,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	293.570.048.556,00	293.570.048.556,00	293.621.772.256,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	293.570.048.556,00	293.570.048.556,00	293.621.772.256,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.263.655.736,00	32.263.655.736,00	32.364.574.436,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32.167.044.636,00	32.167.044.636,00	32.267.963.336,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	517.042.400,00	517.042.400,00	567.961.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	2.405.881.900,00	2.405.881.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	294.669.000,00	294.669.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	158.740.000,00	158.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	56.459.900,00	56.459.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16.720.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.003.674.836,00	2.003.674.836,00	2.053.674.836,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.494.321.600,00	26.494.321.600,00	26.494.321.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	143.790.000,00	143.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	37.045.000,00	37.045.000,00	37.045.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	21.299.400,00	21.299.400,00	21.299.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	21.299.400,00	21.299.400,00	21.299.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	75.311.700,00	75.311.700,00	75.311.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.901.900,00	14.901.900,00	14.901.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	60.409.800,00	60.409.800,00	60.409.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	521.103.400,00	521.103.400,00	328.103.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.460.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	508.643.400,00	508.643.400,00	315.643.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	496.043.400,00	496.043.400,00	303.043.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	149.730.000,00	149.730.000,00	149.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	73.518.000,00	73.518.000,00	73.518.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	73.518.000,00	73.518.000,00	73.518.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	76.212.000,00	76.212.000,00	76.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	76.212.000,00	76.212.000,00	76.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	168.216.000,00	168.216.000,00	313.506.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	168.216.000,00	168.216.000,00	313.506.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	168.216.000,00	168.216.000,00	313.506.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.467.343.420,00	260.467.343.420,00	260.465.858.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.142.700,00	219.142.700,00	213.992.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.188.000,00	200.188.000,00	195.038.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.954.700,00	18.954.700,00	18.954.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	244.520.555.795,00	244.520.555.795,00	244.520.555.795,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	244.507.072.995,00	244.507.072.995,00	244.507.072.995,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.482.800,00	13.482.800,00	13.482.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.138.500,00	648.138.500,00	652.806.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.982.400,00	91.982.400,00	91.982.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	556.156.100,00	556.156.100,00	560.823.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.523.106.225,00	14.523.106.225,00	14.523.106.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.043.106.225,00	14.043.106.225,00	14.043.106.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.400.200,00	556.400.200,00	555.397.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	430.800.000,00	430.800.000,00	430.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.600.200,00	105.600.200,00	92.697.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	31.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.906.560.040,00	6.906.560.040,00	6.906.560.040,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.872.960.040,00	6.872.960.040,00	6.872.960.040,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	207.238.700,00	207.238.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.618.200,00	36.618.200,00	36.618.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.620.500,00	170.620.500,00	170.620.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.534.046.340,00	1.534.046.340,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.170.146.340,00	1.170.146.340,00	1.170.146.340,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	131.675.000,00	131.675.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	9.106.070.670,00	9.106.070.670,00	9.106.070.670,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.340.800,00	408.340.800,00	408.340.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	408.340.800,00	408.340.800,00	408.340.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.124.158.120,00	2.124.158.120,00	2.124.158.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	589.000.000,00	589.000.000,00	589.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.535.158.120,00	1.535.158.120,00	1.535.158.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.920.000,00	337.920.000,00	337.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.820.000,00	151.820.000,00	151.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.549.913.640,00	2.549.913.640,00	2.549.913.640,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	217.784.400,00	217.784.400,00	217.784.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	217.784.400,00	217.784.400,00	217.784.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.199.000,00	15.199.000,00	15.199.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	26.299.500,00	26.299.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	176.285.900,00	176.285.900,00	176.285.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.332.129.240,00	2.332.129.240,00	2.332.129.240,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.698.800,00	156.698.800,00	156.698.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.555.900,00	19.555.900,00	19.555.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.142.900,00	137.142.900,00	137.142.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.914.245.640,00	1.914.245.640,00	1.914.245.640,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.914.245.640,00	1.914.245.640,00	1.914.245.640,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.184.800,00	261.184.800,00	261.184.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.468.900,00	57.468.900,00	57.468.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.315.900,00	164.315.900,00	164.315.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						RSUD Bali Mandara	241.205.254.112,00	241.205.254.112,00	241.205.254.112,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.732.070.000,00	29.732.070.000,00	29.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.732.070.000,00	29.732.070.000,00	29.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.732.070.000,00	8.732.070.000,00	8.732.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211.473.184.112,00	211.473.184.112,00	211.473.184.112,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.473.184.112,00	38.473.184.112,00	38.473.184.112,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.318.800.000,00	5.318.800.000,00	5.318.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.154.384.112,00	33.154.384.112,00	33.154.384.112,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	173.000.000.000,00	173.000.000.000,00	173.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	173.000.000.000,00	173.000.000.000,00	173.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Rumah Sakit Jiwa	41.545.085.618,00	41.545.085.618,00	41.545.085.618,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.120.085.618,00	40.120.085.618,00	40.120.085.618,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.620.085.618,00	12.620.085.618,00	12.620.085.618,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.505.975.216,00	11.505.975.216,00	11.505.975.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Rumah Sakit Mata Bali Mandara	99.425.000.000,00	99.425.000.000,00	99.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	9.724.171.120,00	9.724.171.120,00	9.320.171.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.649.803.700,00	4.649.803.700,00	4.649.803.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.089.461.300,00	4.089.461.300,00	4.089.461.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	215.311.500,00	215.311.500,00	215.311.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	3.874.149.800,00	3.874.149.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	560.342.400,00	560.342.400,00	560.342.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	560.342.400,00	560.342.400,00	560.342.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.074.367.420,00	5.074.367.420,00	4.670.367.420,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	818.544.200,00	818.544.200,00	818.544.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.648.900,00	498.648.900,00	498.648.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319.895.300,00	319.895.300,00	319.895.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.000.000,00	482.000.000,00	78.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	434.000.000,00	434.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.408.200.820,00	2.408.200.820,00	2.408.200.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.408.200.820,00	2.408.200.820,00	2.408.200.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.365.622.400,00	1.365.622.400,00	1.365.622.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.811.800,00	82.811.800,00	82.811.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.242.010.600,00	1.242.010.600,00	1.242.010.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0001						UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.752.166.365,00	1.752.166.365,00	1.750.294.265,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.752.166.365,00	1.752.166.365,00	1.750.294.265,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	885.317.240,00	885.317.240,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	885.317.240,00	885.317.240,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	885.317.240,00	885.317.240,00	885.317.240,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	866.849.125,00	866.849.125,00	864.977.025,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.494.500,00	84.494.500,00	84.494.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.200,00	11.971.200,00	11.971.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.526.500,00	10.526.500,00	10.526.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.236.800,00	5.236.800,00	5.236.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.170.300,00	33.170.300,00	31.298.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	18.320.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.300,00	14.850.300,00	12.978.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.300.000,00	134.300.000,00	134.300.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.884.325,00	614.884.325,00	614.884.325,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.799.680,00	285.799.680,00	285.799.680,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	311.074.645,00	311.074.645,00	311.074.645,00
1.03.1.04.0.00.01.0002						UPTD Pengelolaan Air Minum	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00	40.793.745.021,00
1.03.1.04.0.00.01.0003						UPTD Pengelolaan Air Limbah	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00	14.932.448.684,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.534.359.619,00	368.534.359.619,00	383.141.308.419,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.900.901.120,00	16.900.901.120,00	16.900.901.120,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.223.782.700,00	1.223.782.700,00	1.223.782.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	547.820.000,00	547.820.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	22.901.700,00	22.901.700,00	22.901.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	289.177.300,00	289.177.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	13.994.300,00	13.994.300,00	13.994.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	349.889.400,00	349.889.400,00	349.889.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.677.118.420,00	15.677.118.420,00	15.677.118.420,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	11.228.549.280,00	11.228.549.280,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.222.893.880,00	3.222.893.880,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.225.675.260,00	1.225.675.260,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.409.194.076,00	16.409.194.076,00	16.440.402.076,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	16.409.194.076,00	16.409.194.076,00	16.440.402.076,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.359.184.976,00	1.359.184.976,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.050.009.100,00	15.050.009.100,00	15.081.217.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.290.906.200,00	1.290.906.200,00	1.290.906.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.290.906.200,00	1.290.906.200,00	1.290.906.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	1.028.074.300,00	1.028.074.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	262.831.900,00	262.831.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	248.681.272,00	248.681.272,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	248.681.272,00	248.681.272,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	248.681.272,00	248.681.272,00	248.681.272,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	173.858.577.620,00	173.858.577.620,00	189.902.756.620,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.858.577.620,00	173.858.577.620,00	189.902.756.620,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	172.483.872.720,00	172.483.872.720,00	188.528.051.720,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	683.651.700,00	683.651.700,00	683.651.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	691.053.200,00	691.053.200,00	691.053.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.654.965.419,00	104.654.965.419,00	104.343.578.419,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	104.654.965.419,00	104.654.965.419,00	104.343.578.419,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.889.312.600,00	1.889.312.600,00	1.889.312.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	14.504.895.236,00	14.504.895.236,00	13.528.868.236,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	12.548.490.680,00	12.548.490.680,00	12.567.690.680,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.312.339.540,00	24.312.339.540,00	24.236.563.540,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	34.792.762.547,00	34.792.762.547,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	11.877.780.534,00	11.877.780.534,00	11.877.780.534,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.297.559.982,00	3.297.559.982,00	4.018.775.982,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.331.824.300,00	1.331.824.300,00	1.331.824.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.053.024.880,00	1.053.024.880,00	1.053.024.880,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	562.184.660,00	562.184.660,00	562.184.660,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	562.184.660,00	562.184.660,00	562.184.660,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	490.840.220,00	490.840.220,00	490.840.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	238.979.920,00	238.979.920,00	238.979.920,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	251.860.300,00	251.860.300,00	251.860.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.375.328.240,00	1.375.328.240,00	1.370.900.340,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	26.655.200,00	26.655.200,00	26.655.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	26.655.200,00	26.655.200,00	26.655.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	419.673.480,00	419.673.480,00	419.429.480,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	419.673.480,00	419.673.480,00	419.429.480,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	354.395.000,00	354.395.000,00	354.395.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	248.860.000,00	248.860.000,00	248.860.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	105.535.000,00	105.535.000,00	105.535.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	574.604.560,00	574.604.560,00	570.420.660,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	176.381.980,00	176.381.980,00	176.381.980,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	398.222.580,00	398.222.580,00	394.038.680,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.033.640.468,00	33.033.640.468,00	33.031.243.168,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.286.140,00	720.286.140,00	720.286.140,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	414.345.320,00	414.345.320,00	414.345.320,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.940.820,00	305.940.820,00	305.940.820,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.223.753.992,00	27.223.753.992,00	27.223.753.992,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.223.753.992,00	27.223.753.992,00	27.223.753.992,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.752.700,00	765.752.700,00	765.752.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.171.400,00	24.171.400,00	24.171.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.491.700,00	65.491.700,00	65.491.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.009.600,00	85.009.600,00	85.009.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.260.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.820.000,00	464.820.000,00	464.820.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.535.600,00	180.535.600,00	178.138.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.535.600,00	180.535.600,00	178.138.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	983.942.692,00	983.942.692,00	983.942.692,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	562.000.000,00	562.000.000,00	562.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.342.692,00	318.342.692,00	318.342.692,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.159.369.344,00	3.159.369.344,00	3.159.369.344,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.554.187.220,00	1.554.187.220,00	1.554.187.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.846.420,00	205.846.420,00	205.846.420,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.399.335.704,00	1.399.335.704,00	1.399.335.704,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.913.596.324,00	8.913.596.324,00	7.763.596.324,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	780.435.660,00	780.435.660,00	780.435.660,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	293.040.400,00	293.040.400,00	293.040.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	272.217.800,00	272.217.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00	20.822.600,00	20.822.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	487.395.260,00	487.395.260,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	487.395.260,00	487.395.260,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.763.120.700,00	5.763.120.700,00	4.613.120.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.763.120.700,00	5.763.120.700,00	4.613.120.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.823.028.400,00	4.823.028.400,00	3.673.028.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	940.092.300,00	940.092.300,00	940.092.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.370.039.964,00	2.370.039.964,00	2.370.039.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.370.039.964,00	2.370.039.964,00	2.370.039.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	129.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.198.824.964,00	2.198.824.964,00	2.198.824.964,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	42.215.000,00	42.215.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.795.544.000,00	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.795.544.000,00	10.795.544.000,00	10.795.318.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	27.003.500,00	27.003.500,00	26.777.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.003.500,00	27.003.500,00	26.777.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.003.500,00	27.003.500,00	26.777.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	268.540.500,00	268.540.500,00	268.540.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	268.540.500,00	268.540.500,00	268.540.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	268.540.500,00	268.540.500,00	268.540.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	49.358.871.998,00	49.358.871.998,00	50.058.855.998,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.358.871.998,00	49.358.871.998,00	50.058.855.998,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	49.358.871.998,00	49.358.871.998,00	50.058.855.998,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.327.304.964,00	25.327.304.964,00	25.726.880.964,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	23.404.606.509,00	23.404.606.509,00	23.804.182.509,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	77.833.240,00	77.833.240,00	77.833.240,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00	18.614.874.259,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.722.900,00	149.722.900,00	149.722.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	29.899.600,00	29.899.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.115.740,00	100.115.740,00	100.115.740,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4.189.448.350,00	4.189.448.350,00	4.589.024.350,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	242.712.420,00	242.712.420,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.785.638.255,00	1.785.638.255,00	1.785.638.255,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	24.761.500,00	24.761.500,00	24.761.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.508.912.475,00	1.508.912.475,00	1.508.912.475,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	251.964.280,00	251.964.280,00	251.964.280,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	137.060.200,00	137.060.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	137.060.200,00	137.060.200,00	137.060.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.031.567.034,00	24.031.567.034,00	24.331.975.034,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.093.512.590,00	20.093.512.590,00	20.093.512.590,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.093.512.590,00	20.093.512.590,00	20.093.512.590,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.272.600,00	244.272.600,00	244.272.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	244.272.600,00	244.272.600,00	244.272.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.507.500,00	549.507.500,00	549.507.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.650.500,00	44.650.500,00	44.650.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.016.800,00	365.016.800,00	365.016.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.847.200,00	24.847.200,00	24.847.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.993.000,00	54.993.000,00	54.993.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.258.000,00	89.258.000,00	89.258.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	39.258.000,00	39.258.000,00	39.258.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.147.622.100,00	1.147.622.100,00	1.147.622.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.390.000,00	59.390.000,00	59.390.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	935.232.100,00	935.232.100,00	935.232.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.394.244,00	1.888.394.244,00	2.188.802.244,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.888.394.244,00	1.888.394.244,00	2.188.802.244,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.993.598.172,00	26.993.598.172,00	26.993.598.172,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.322.561.900,00	4.322.561.900,00	4.322.561.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	201.943.300,00	201.943.300,00	201.943.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	201.943.300,00	201.943.300,00	201.943.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.932.107.600,00	1.932.107.600,00	1.932.107.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	487.362.100,00	487.362.100,00	487.362.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	164.287.200,00	164.287.200,00	164.287.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	292.918.800,00	292.918.800,00	292.918.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	138.148.400,00	138.148.400,00	138.148.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90.597.400,00	90.597.400,00	90.597.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	758.793.700,00	758.793.700,00	758.793.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.322.954.500,00	1.322.954.500,00	1.322.954.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	616.175.500,00	616.175.500,00	616.175.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.000,00	706.779.000,00	706.779.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	865.556.500,00	865.556.500,00	865.556.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	377.641.100,00	377.641.100,00	377.641.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	53.059.000,00	53.059.000,00	53.059.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	258.770.200,00	258.770.200,00	258.770.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	60.312.200,00	60.312.200,00	60.312.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	115.774.000,00	115.774.000,00	115.774.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.671.036.272,00	22.671.036.272,00	22.671.036.272,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.818.900,00	155.818.900,00	155.818.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.090.700,00	57.090.700,00	57.090.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.728.200,00	98.728.200,00	98.728.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.215.871.363,00	13.215.871.363,00	13.215.871.363,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.215.871.363,00	13.215.871.363,00	13.215.871.363,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	566.630.100,00	566.630.100,00	566.630.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.677.300,00	125.677.300,00	125.677.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.220.700,00	11.220.700,00	11.220.700,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.500.000,00	319.500.000,00	319.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.736.100,00	4.736.100,00	4.736.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	897.688.000,00	897.688.000,00	897.688.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	897.688.000,00	897.688.000,00	897.688.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.011.980,00	1.460.011.980,00	1.460.011.980,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.275.591.980,00	1.275.591.980,00	1.275.591.980,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.303.615.929,00	6.303.615.929,00	6.303.615.929,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.425.616.772,00	4.425.616.772,00	4.425.616.772,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.871.785,00	9.871.785,00	9.871.785,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.910.000,00	67.910.000,00	67.910.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001						UPTD Pengendalian Bencana Daerah	5.998.057.514,00	5.998.057.514,00	5.998.057.514,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.935.085.040,00	2.935.085.040,00	2.935.085.040,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00	1.034.199.140,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	243.665.900,00	243.665.900,00	243.665.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	243.665.900,00	243.665.900,00	243.665.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.657.220.000,00	1.657.220.000,00	1.657.220.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.657.220.000,00	1.657.220.000,00	1.657.220.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.062.972.474,00	3.062.972.474,00	3.062.972.474,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.734.800,00	96.734.800,00	96.734.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.740.400,00	16.740.400,00	16.740.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.998.800,00	14.998.800,00	14.998.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.245.600,00	22.245.600,00	22.245.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553.655.600,00	553.655.600,00	553.655.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	553.655.600,00	553.655.600,00	553.655.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.439.420,00	1.487.439.420,00	1.487.439.420,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.247.439.420,00	1.247.439.420,00	1.247.439.420,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.142.654,00	925.142.654,00	925.142.654,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.476.654,00	680.476.654,00	680.476.654,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.666.000,00	199.666.000,00	199.666.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	28.997.747.094,00	28.997.747.094,00	28.997.747.094,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.070.516.394,00	28.070.516.394,00	28.070.516.394,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	59.010.600,00	59.010.600,00	59.010.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.486.800,00	3.486.800,00	3.486.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.486.800,00	3.486.800,00	3.486.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	55.523.800,00	55.523.800,00	55.523.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	55.523.800,00	55.523.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.177.100,00	1.177.100,00	1.177.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.177.100,00	1.177.100,00	1.177.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.177.100,00	1.177.100,00	1.177.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.321.256.900,00	3.321.256.900,00	3.321.256.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	2.318.564.200,00	2.318.564.200,00	2.318.564.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.624.600,00	28.624.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	289.939.600,00	289.939.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	624.241.800,00	624.241.800,00	624.241.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	349.452.600,00	349.452.600,00	349.452.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	236.941.200,00	236.941.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	37.848.000,00	37.848.000,00	37.848.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	246.251.500,00	246.251.500,00	246.251.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	53.890.000,00	53.890.000,00	53.890.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	24.500.800,00	24.500.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	44.970.600,00	44.970.600,00	44.970.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	122.890.100,00	122.890.100,00	122.890.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	132.199.400,00	132.199.400,00	132.199.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.999.400,00	9.999.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	122.200.000,00	122.200.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18.569.500,00	18.569.500,00	18.569.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	7.536.600,00	7.536.600,00	7.536.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	7.536.600,00	7.536.600,00	7.536.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	11.032.900,00	11.032.900,00	11.032.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.391.800,00	5.391.800,00	5.391.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.641.100,00	5.641.100,00	5.641.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	264.416.700,00	264.416.700,00	264.416.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	264.416.700,00	264.416.700,00	264.416.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	257.936.700,00	257.936.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	267.258.400,00	267.258.400,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	267.258.400,00	267.258.400,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	267.258.400,00	267.258.400,00	267.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.138.827.194,00	24.138.827.194,00	24.138.827.194,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.329.700,00	30.329.700,00	30.329.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.832.200,00	11.832.200,00	11.832.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.602.500,00	3.602.500,00	3.602.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.895.000,00	14.895.000,00	14.895.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.283.627.794,00	17.283.627.794,00	17.283.627.794,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.283.627.794,00	17.283.627.794,00	17.283.627.794,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	31.952.000,00	31.952.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.551.300,00	299.551.300,00	299.551.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.528.200,00	7.528.200,00	7.528.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.744.300,00	49.744.300,00	49.744.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.049.200,00	96.049.200,00	96.049.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.600,00	5.648.600,00	5.648.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.921.000,00	136.921.000,00	136.921.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.099.620,00	659.099.620,00	659.099.620,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.327.600,00	187.327.600,00	187.327.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.772.020,00	471.772.020,00	471.772.020,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.834.266.780,00	5.834.266.780,00	5.834.266.780,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.133.511.380,00	1.133.511.380,00	1.133.511.380,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.479.744.000,00	3.479.744.000,00	3.479.744.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.221.011.400,00	1.221.011.400,00	1.221.011.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	927.230.700,00	927.230.700,00	927.230.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	927.230.700,00	927.230.700,00	927.230.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.825.700,00	25.825.700,00	25.825.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	10.834.200,00	10.834.200,00	10.834.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	10.834.200,00	10.834.200,00	10.834.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	14.991.500,00	14.991.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	14.991.500,00	14.991.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	119.980.100,00	119.980.100,00	119.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.980.100,00	19.980.100,00	19.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	19.980.100,00	19.980.100,00	19.980.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	9.203.500,00	9.203.500,00	9.203.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	9.203.500,00	9.203.500,00	9.203.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	9.203.500,00	9.203.500,00	9.203.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	752.595.000,00	752.595.000,00	752.595.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10.830.000,00	10.830.000,00	10.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10.830.000,00	10.830.000,00	10.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	741.765.000,00	741.765.000,00	741.765.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.619.600,00	650.619.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	91.145.400,00	91.145.400,00	91.145.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	9.630.000,00	9.630.000,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.630.000,00	9.630.000,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	9.630.000,00	9.630.000,00	9.630.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001						UPTD Pelayanan Sosial	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00	6.882.002.160,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.556.298.500,00	1.556.298.500,00	1.556.298.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	778.518.200,00	778.518.200,00	778.518.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	71.891.500,00	71.891.500,00	71.891.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00	89.750.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	74.406.700,00	74.406.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.470.000,00	12.470.000,00	12.470.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	777.780.300,00	777.780.300,00	777.780.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	149.580.300,00	149.580.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.325.703.660,00	5.325.703.660,00	5.325.703.660,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.219.900,00	187.219.900,00	187.219.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.837.600,00	9.837.600,00	9.837.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.954.300,00	159.954.300,00	159.954.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.428.000,00	17.428.000,00	17.428.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.654.520,00	521.654.520,00	521.654.520,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000,00	201.100.000,00	201.100.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320.554.520,00	320.554.520,00	320.554.520,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.616.829.240,00	4.616.829.240,00	4.616.829.240,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.110.120,00	249.110.120,00	249.110.120,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.095.318.300,00	3.095.318.300,00	3.095.318.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.272.400.820,00	1.272.400.820,00	1.272.400.820,00
1.06.2.08.0.00.06.0002						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00	1.014.457.560,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	352.330.000,00	352.330.000,00	352.330.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.830.000,00	250.830.000,00	250.830.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.150.000,00	243.150.000,00	243.150.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	73.519.900,00	73.519.900,00	73.519.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	73.519.900,00	73.519.900,00	73.519.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4.499.900,00	4.499.900,00	4.499.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.607.660,00	588.607.660,00	588.607.660,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.706.000,00	34.706.000,00	34.706.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.176.000,00	15.176.000,00	15.176.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.901.660,00	548.901.660,00	548.901.660,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.294.880,00	161.294.880,00	161.294.880,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.962.940,00	38.962.940,00	38.962.940,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.643.840,00	348.643.840,00	348.643.840,00
2.07.3.29.0.00.01.0001						UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1.031.968.165,00	1.031.968.165,00	1.031.968.165,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.031.968.165,00	1.031.968.165,00	1.031.968.165,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	336.350.000,00	336.350.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	336.350.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	336.350.000,00	336.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	695.618.165,00	695.618.165,00	695.618.165,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.612.400,00	35.612.400,00	35.612.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.276.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.110.400,00	6.110.400,00	6.110.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.026.000,00	12.026.000,00	12.026.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.837.000,00	18.837.000,00	18.837.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.837.000,00	18.837.000,00	18.837.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.753.369,00	240.753.369,00	240.753.369,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.753.369,00	216.753.369,00	216.753.369,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.415.396,00	400.415.396,00	400.415.396,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.795.128,00	80.795.128,00	80.795.128,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.015.288,00	36.015.288,00	36.015.288,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	283.604.980,00	283.604.980,00	283.604.980,00
2.07.3.29.0.00.01.0002						UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	1.938.421.776,00	1.938.421.776,00	1.938.421.776,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00	1.379.944.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.477.776,00	558.477.776,00	558.477.776,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.702.700,00	30.702.700,00	30.702.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.400,00	5.000.400,00	5.000.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.898.800,00	7.898.800,00	7.898.800,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.803.500,00	2.803.500,00	2.803.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.799.896,00	115.799.896,00	115.799.896,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.839.896,00	102.839.896,00	102.839.896,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.975.180,00	411.975.180,00	411.975.180,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.182.140,00	127.182.140,00	127.182.140,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.793.040,00	269.793.040,00	269.793.040,00
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	32.600.632.978,00	32.600.632.978,00	32.600.632.978,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600,00	44.997.600,00	44.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	169.431.000,00	169.431.000,00	169.431.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	133.117.200,00	133.117.200,00	133.117.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	133.117.200,00	133.117.200,00	133.117.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	36.313.800,00	36.313.800,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.313.800,00	36.313.800,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	33.141.400,00	33.141.400,00	33.141.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.400,00	5.566.400,00	5.566.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.400,00	5.566.400,00	5.566.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	27.575.000,00	27.575.000,00	27.575.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.117.378.678,00	32.117.378.678,00	32.117.378.678,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.818.180.267,00	28.818.180.267,00	28.818.180.267,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.818.180.267,00	28.818.180.267,00	28.818.180.267,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.202.900,00	320.202.900,00	320.202.900,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.200,00	14.994.200,00	14.994.200,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.731.000,00	40.731.000,00	40.731.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.795.100,00	27.795.100,00	27.795.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.637.600,00	8.637.600,00	8.637.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.220.000,00	158.220.000,00	158.220.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.010.000,00	65.010.000,00	65.010.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.010.000,00	65.010.000,00	65.010.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.451.323,00	1.025.451.323,00	1.025.451.323,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.571.323,00	626.571.323,00	626.571.323,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.534.188,00	1.888.534.188,00	1.888.534.188,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	658.915.228,00	658.915.228,00	658.915.228,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.728.560,00	170.728.560,00	170.728.560,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.058.890.400,00	1.058.890.400,00	1.058.890.400,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	215.384.300,00	215.384.300,00	215.384.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	190.499.500,00	190.499.500,00	190.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	174.499.500,00	174.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500,00	174.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	174.499.500,00	174.499.500,00	174.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.726.008.904,00	22.726.008.904,00	22.970.688.904,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.726.008.904,00	22.726.008.904,00	22.970.688.904,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	911.061.940,00	911.061.940,00	911.061.940,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.824.320,00	483.824.320,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	483.824.320,00	483.824.320,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	483.824.320,00	483.824.320,00	483.824.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	427.237.620,00	427.237.620,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	427.237.620,00	427.237.620,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	427.237.620,00	427.237.620,00	427.237.620,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.482.825.424,00	21.482.825.424,00	21.727.505.424,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	320.543.320,00	320.543.320,00	320.543.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	320.543.320,00	320.543.320,00	320.543.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	320.543.320,00	320.543.320,00	320.543.320,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.271.343.020,00	1.271.343.020,00	1.271.343.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.271.343.020,00	1.271.343.020,00	1.271.343.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	569.753.420,00	569.753.420,00	569.753.420,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	574.032.600,00	574.032.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	127.557.000,00	127.557.000,00	127.557.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.628.351.020,00	5.628.351.020,00	5.883.351.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.628.351.020,00	5.628.351.020,00	5.883.351.020,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	696.626.900,00	696.626.900,00	696.626.900,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	489.871.360,00	489.871.360,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	617.664.460,00	617.664.460,00	617.664.460,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.824.188.300,00	3.824.188.300,00	4.079.188.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.262.588.064,00	14.262.588.064,00	14.252.268.064,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.474.260,00	287.474.260,00	287.474.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.974.260,00	267.974.260,00	267.974.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.356.535.864,00	10.356.535.864,00	10.356.535.864,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.225.809.044,00	10.225.809.044,00	10.225.809.044,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.726.820,00	130.726.820,00	130.726.820,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.091.011.400,00	1.091.011.400,00	1.080.691.400,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.763.400,00	7.763.400,00	7.763.400,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.265.000,00	614.265.000,00	603.945.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.767.000,00	7.767.000,00	7.767.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.816.000,00	363.816.000,00	363.816.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.426.000,00	407.426.000,00	407.426.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	407.426.000,00	407.426.000,00	407.426.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.091.280,00	692.091.280,00	692.091.280,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.400.000,00	182.400.000,00	182.400.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.691.280,00	509.691.280,00	509.691.280,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.428.049.260,00	1.428.049.260,00	1.428.049.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.323.389.260,00	1.323.389.260,00	1.323.389.260,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.660.000,00	104.660.000,00	104.660.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	332.121.540,00	332.121.540,00	332.121.540,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	332.121.540,00	332.121.540,00	332.121.540,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540,00	332.121.540,00	332.121.540,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	332.121.540,00	332.121.540,00	332.121.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	24.967.120.577,00	24.967.120.577,00	25.967.120.577,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.967.120.577,00	24.967.120.577,00	25.967.120.577,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.007.031.020,00	1.007.031.020,00	1.007.031.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	450.571.840,00	450.571.840,00	450.571.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	341.431.440,00	341.431.440,00	341.431.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	109.140.400,00	109.140.400,00	109.140.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	53.609.100,00	53.609.100,00	53.609.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	26.957.700,00	26.957.700,00	26.957.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	26.651.400,00	26.651.400,00	26.651.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	156.296.100,00	156.296.100,00	156.296.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	156.296.100,00	156.296.100,00	156.296.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	346.553.980,00	346.553.980,00	346.553.980,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	346.553.980,00	346.553.980,00	346.553.980,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	871.047.840,00	871.047.840,00	871.047.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	871.047.840,00	871.047.840,00	871.047.840,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	871.047.840,00	871.047.840,00	871.047.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	472.437.140,00	472.437.140,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	472.437.140,00	472.437.140,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	472.437.140,00	472.437.140,00	472.437.140,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.616.604.577,00	22.616.604.577,00	23.616.604.577,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.659.900,00	37.659.900,00	37.659.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.423.600,00	21.423.600,00	21.423.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.236.300,00	16.236.300,00	16.236.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.413.061.567,00	18.413.061.567,00	18.413.061.567,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.393.542.067,00	18.393.542.067,00	18.393.542.067,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.519.500,00	19.519.500,00	19.519.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.531.350,00	783.531.350,00	783.531.350,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.489.000,00	6.489.000,00	6.489.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.694.800,00	373.694.800,00	373.694.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.303.300,00	7.303.300,00	7.303.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.822.250,00	10.822.250,00	10.822.250,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.222.000,00	305.222.000,00	305.222.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	920.000.000,00	920.000.000,00	1.920.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	920.000.000,00	920.000.000,00	1.920.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.876.720,00	576.876.720,00	576.876.720,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.376.720,00	330.376.720,00	330.376.720,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.885.475.040,00	1.885.475.040,00	1.885.475.040,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	733.239.280,00	733.239.280,00	733.239.280,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.864.400,00	47.864.400,00	47.864.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.104.371.360,00	1.104.371.360,00	1.104.371.360,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.450.394.222,00	2.450.394.222,00	2.450.394.222,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.071.431.130,00	2.071.431.130,00	2.071.431.130,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	566.282.000,00	566.282.000,00	566.282.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	566.282.000,00	566.282.000,00	566.282.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.505.149.130,00	1.505.149.130,00	1.505.149.130,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.505.149.130,00	1.505.149.130,00	1.505.149.130,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	378.963.092,00	378.963.092,00	378.963.092,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.341.412,00	122.341.412,00	122.341.412,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.812,00	3.850.812,00	3.850.812,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.635.000,00	83.635.000,00	83.635.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	719.600,00	719.600,00	719.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.136.000,00	34.136.000,00	34.136.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.360.940,00	42.360.940,00	42.360.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	666.000,00	666.000,00	666.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.000,00	660.000,00	660.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.034.940,00	41.034.940,00	41.034.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.260.740,00	214.260.740,00	214.260.740,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.780.740,00	195.780.740,00	195.780.740,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	11.574.938.242,00	11.574.938.242,00	11.527.841.342,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00	11.018.971.867,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	555.966.375,00	555.966.375,00	508.869.475,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.547.600,00	142.547.600,00	104.610.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	964.400,00	964.400,00	964.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.723.200,00	58.723.200,00	20.786.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.988.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.022.000,00	45.022.000,00	45.022.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.218.540,00	72.218.540,00	72.218.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	396.000,00	396.000,00	396.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.122.540,00	39.122.540,00	39.122.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.040.235,00	332.040.235,00	332.040.235,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.620.235,00	319.620.235,00	319.620.235,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003						UPTD Perlengkapan Jalan	1.886.976.726,00	1.886.976.726,00	1.886.976.726,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.662.992.186,00	1.662.992.186,00	1.662.992.186,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.662.992.186,00	1.662.992.186,00	1.662.992.186,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.087.783.465,00	1.087.783.465,00	1.087.783.465,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	575.208.721,00	575.208.721,00	575.208.721,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	223.984.540,00	223.984.540,00	223.984.540,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.499.600,00	20.499.600,00	20.499.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.839.600,00	3.839.600,00	3.839.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.122.500,00	54.122.500,00	54.122.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.122.500,00	54.122.500,00	54.122.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.362.440,00	149.362.440,00	149.362.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.042.440,00	141.042.440,00	141.042.440,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	688.156.290,00	688.156.290,00	688.156.290,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	139.567.000,00	139.567.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	139.567.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	139.567.000,00	139.567.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	548.589.290,00	548.589.290,00	548.589.290,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.213.490,00	421.213.490,00	421.213.490,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.762.300,00	67.762.300,00	67.762.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.203.190,00	351.203.190,00	351.203.190,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.875.800,00	22.875.800,00	22.875.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	22.875.800,00	22.875.800,00	22.875.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.900.000,00	103.900.000,00	103.900.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	160.414.677.764,00	160.414.677.764,00	165.959.677.764,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	159.531.404.144,00	159.531.404.144,00	165.076.404.444,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.359.127.160,00	12.359.127.160,00	12.825.481.160,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	12.359.127.160,00	12.359.127.160,00	12.825.481.160,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	953.492.960,00	953.492.960,00	993.932.960,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.334.563.440,00	5.334.563.440,00	5.424.683.440,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	1.385.259.640,00	1.385.259.640,00	1.385.259.640,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.537.087.840,00	2.537.087.840,00	2.537.087.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.813.347.980,00	1.813.347.980,00	1.813.347.980,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	335.375.300,00	335.375.300,00	671.169.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	128.345.946.370,00	128.345.946.370,00	132.798.612.370,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	128.345.946.370,00	128.345.946.370,00	132.798.612.370,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.306.175.700,00	1.306.175.700,00	1.305.715.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	114.786.841.630,00	114.786.841.630,00	119.239.967.630,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12.252.929.040,00	12.252.929.040,00	12.252.929.040,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.826.330.614,00	18.826.330.614,00	19.452.310.914,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.676.300,00	29.676.300,00	29.676.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.018.000,00	18.018.000,00	18.018.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.139.800,00	5.139.800,00	5.139.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.518.500,00	6.518.500,00	6.518.500,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.116.593.114,00	15.116.593.114,00	15.742.573.414,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.413.880.114,00	14.413.880.114,00	14.413.900.414,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	702.713.000,00	702.713.000,00	1.328.673.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.508.140,00	298.508.140,00	298.508.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.488.840,00	4.488.840,00	4.488.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.007.200,00	40.007.200,00	40.007.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.660.900,00	13.660.900,00	13.660.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.522.200,00	31.522.200,00	31.522.200,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.329.000,00	121.329.000,00	121.329.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.000.000,00	533.000.000,00	533.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.848.553.060,00	2.848.553.060,00	2.848.553.060,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.386.501.960,00	1.386.501.960,00	1.386.501.960,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.570.000,00	99.570.000,00	99.570.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.271.601.100,00	1.271.601.100,00	1.271.601.100,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.480.000,00	84.480.000,00	84.480.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	416.841.840,00	416.841.840,00	416.841.540,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	416.841.840,00	416.841.840,00	416.841.540,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	416.841.840,00	416.841.840,00	416.841.540,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150.743.840,00	150.743.840,00	150.743.540,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	164.656.480,00	164.656.480,00	164.656.480,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	101.441.520,00	101.441.520,00	101.441.520,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	466.431.780,00	466.431.780,00	466.431.780,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	466.431.780,00	466.431.780,00	466.431.780,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	337.335.940,00	337.335.940,00	337.809.940,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	36.899.300,00	36.899.300,00	34.067.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	168.137.340,00	168.137.340,00	163.637.340,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.541.300,00	33.541.300,00	33.541.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	98.758.000,00	98.758.000,00	106.564.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	129.095.840,00	129.095.840,00	128.621.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	129.095.840,00	129.095.840,00	128.621.840,00
2.16.2.20.2.21.02.0001						UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	6.136.378.140,00	6.136.378.140,00	6.936.378.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.136.378.140,00	6.136.378.140,00	6.936.378.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.136.378.140,00	6.136.378.140,00	6.936.378.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.136.378.140,00	6.136.378.140,00	6.936.378.140,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	6.136.378.140,00	6.136.378.140,00	6.936.378.140,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.02.0002						UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	2.817.674.924,00	2.817.674.924,00	2.817.674.924,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.817.674.924,00	2.817.674.924,00	2.817.674.924,00
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.106.728.410,00	17.106.728.410,00	17.819.039.051,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.106.728.410,00	17.106.728.410,00	17.819.039.051,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	238.410.700,00	238.410.700,00	238.410.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.410.700,00	218.410.700,00	218.410.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.410.700,00	218.410.700,00	218.410.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.908.620,00	150.908.620,00	150.908.620,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.500,00	49.999.500,00	49.999.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	49.999.500,00	49.999.500,00	49.999.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.909.120,00	100.909.120,00	100.909.120,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.909.120,00	100.909.120,00	100.909.120,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	198.408.880,00	198.408.880,00	198.408.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	198.408.880,00	198.408.880,00	198.408.880,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	148.408.980,00	148.408.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	989.684.730,00	989.684.730,00	989.684.630,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	989.684.730,00	989.684.730,00	989.684.630,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.230,00	939.685.230,00	939.685.130,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.999.500,00	49.999.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	482.932.360,00	482.932.360,00	482.932.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	482.932.360,00	482.932.360,00	482.932.360,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	219.328.560,00	219.328.560,00	219.328.560,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	263.603.800,00	263.603.800,00	263.603.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.046.383.120,00	15.046.383.120,00	15.758.693.861,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.914.020,00	128.914.020,00	128.914.020,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.914.420,00	122.914.420,00	122.914.420,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.600,00	5.999.600,00	5.999.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.204.239.160,00	12.204.239.160,00	12.285.642.851,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.204.239.160,00	12.204.239.160,00	12.285.642.851,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.985.900,00	178.985.900,00	222.163.400,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.613.000,00	10.613.000,00	10.613.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.403.000,00	41.403.000,00	84.580.500,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.576.900,00	11.576.900,00	11.576.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.893.000,00	55.893.000,00	55.893.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.808.900,00	133.808.900,00	721.538.450,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.808.900,00	133.808.900,00	721.538.450,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.908.600,00	1.140.908.600,00	1.140.908.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000,00	259.000.000,00	259.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	879.916.600,00	879.916.600,00	879.916.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.526.540,00	1.239.526.540,00	1.239.526.540,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	776.574.980,00	776.574.980,00	776.574.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	412.951.560,00	412.951.560,00	412.951.560,00
2.17.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.432.190.260,00	8.432.190.260,00	8.432.190.260,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	423.149.980,00	423.149.980,00	423.149.980,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.891.700,00	39.891.700,00	39.891.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	665.800,00	665.800,00	665.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900,00	2.725.900,00	2.725.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.690.060,00	207.690.060,00	207.690.060,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.190.060,00	158.190.060,00	158.190.060,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.568.220,00	175.568.220,00	175.568.220,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.007.140,00	94.007.140,00	94.007.140,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.571.080,00	79.571.080,00	79.571.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.467.233.543,00	17.467.233.543,00	17.467.233.543,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.467.233.543,00	17.467.233.543,00	17.467.233.543,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	480.968.560,00	480.968.560,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	480.968.560,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	480.968.560,00	480.968.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	285.448.560,00	285.448.560,00	260.993.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	285.448.560,00	285.448.560,00	260.993.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	285.448.560,00	285.448.560,00	260.993.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	614.087.820,00	614.087.820,00	614.087.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	458.901.400,00	458.901.400,00	458.901.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	458.901.400,00	458.901.400,00	458.901.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	155.186.420,00	155.186.420,00	155.186.420,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	155.186.420,00	155.186.420,00	155.186.420,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.143.149.560,00	1.143.149.560,00	1.143.149.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	1.143.149.560,00	1.143.149.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	297.725.000,00	297.725.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	299.590.560,00	299.590.560,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	545.834.000,00	545.834.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	106.084.280,00	106.084.280,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	106.084.280,00	106.084.280,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	106.084.280,00	106.084.280,00	106.084.280,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.837.494.763,00	14.837.494.763,00	14.861.949.523,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.408.064.683,00	12.408.064.683,00	12.432.519.443,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.408.064.683,00	12.408.064.683,00	12.432.519.443,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.294.300,00	368.294.300,00	368.294.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.599.100,00	12.599.100,00	12.599.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.132.600,00	54.132.600,00	54.132.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.014.600,00	15.014.600,00	15.014.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.048.000,00	214.048.000,00	214.048.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.479.080,00	1.471.479.080,00	1.471.479.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.472.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.319.007.080,00	1.319.007.080,00	1.319.007.080,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.580.700,00	588.580.700,00	588.580.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	549.440.700,00	549.440.700,00	549.440.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	83.716.754.958,00	83.716.754.958,00	89.501.754.958,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	83.716.754.958,00	83.716.754.958,00	89.501.754.958,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	55.840.213.000,00	55.840.213.000,00	61.625.213.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.324.562.580,00	28.324.562.580,00	29.024.562.580,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	550.815.020,00	550.815.020,00	550.815.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.773.747.560,00	27.773.747.560,00	28.473.747.560,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	9.920.840.420,00	9.920.840.420,00	9.920.840.420,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	8.692.175.380,00	8.692.175.380,00	8.692.175.380,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.228.665.040,00	1.228.665.040,00	1.228.665.040,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.594.810.000,00	17.594.810.000,00	22.679.810.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	17.594.810.000,00	17.594.810.000,00	22.679.810.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.367.912.760,00	1.367.912.760,00	1.367.912.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.367.912.760,00	1.367.912.760,00	1.367.912.760,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.115.790.920,00	1.115.790.920,00	1.115.790.920,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	252.121.840,00	252.121.840,00	252.121.840,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	47.497.400,00	47.497.400,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	47.497.400,00	47.497.400,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	47.497.400,00	47.497.400,00	47.497.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	521.101.560,00	521.101.560,00	521.101.560,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	256.902.340,00	256.902.340,00	256.902.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	256.902.340,00	256.902.340,00	256.902.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	264.199.220,00	264.199.220,00	264.199.220,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	152.581.820,00	152.581.820,00	152.581.820,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	48.347.000,00	48.347.000,00	48.347.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	25.837.000,00	25.837.000,00	25.837.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	37.433.400,00	37.433.400,00	37.433.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.940.030.238,00	25.940.030.238,00	25.940.030.238,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.549.020,00	229.549.020,00	229.549.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224.611.020,00	224.611.020,00	224.611.020,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.714.770.830,00	21.714.770.830,00	21.714.770.830,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.132.451.930,00	21.132.451.930,00	21.132.451.930,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	579.667.900,00	579.667.900,00	579.667.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.651.000,00	2.651.000,00	2.651.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.473.200,00	283.473.200,00	283.473.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.323.200,00	30.323.200,00	30.323.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.550.000,00	111.550.000,00	111.550.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.315.961.328,00	1.315.961.328,00	1.315.961.328,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.465.328,00	710.465.328,00	710.465.328,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.396.275.860,00	2.396.275.860,00	2.396.275.860,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	906.589.700,00	906.589.700,00	906.589.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.215.000,00	24.215.000,00	24.215.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.465.471.160,00	1.465.471.160,00	1.465.471.160,00
2.22.0.00.0.00.01.0001						UPTD Taman Budaya	5.758.542.620,00	5.758.542.620,00	5.758.542.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	570.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.758.542.620,00	3.758.542.620,00	3.758.542.620,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.118.700,00	181.118.700,00	181.118.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.320.700,00	56.320.700,00	56.320.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.998.000,00	40.998.000,00	40.998.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.144.000,00	43.144.000,00	43.144.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.144.000,00	43.144.000,00	43.144.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.021.861.440,00	2.021.861.440,00	2.021.861.440,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.000.000,00	896.000.000,00	896.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.088.000,00	90.088.000,00	90.088.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.035.773.440,00	1.035.773.440,00	1.035.773.440,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.512.418.480,00	1.512.418.480,00	1.512.418.480,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.415.828.480,00	1.415.828.480,00	1.415.828.480,00
2.22.0.00.0.00.01.0002						UPTD Museum Bali	6.324.817.804,00	6.324.817.804,00	6.324.817.804,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	712.879.800,00	712.879.800,00	712.879.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.137.220.200,00	1.137.220.200,00	1.137.220.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	149.900.000,00	149.900.000,00	149.900.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.324.817.804,00	4.324.817.804,00	4.324.817.804,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.498.500,00	231.498.500,00	231.498.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.292.200,00	70.292.200,00	70.292.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.050.000,00	81.050.000,00	81.050.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.039.800,00	44.039.800,00	44.039.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.768.500,00	5.768.500,00	5.768.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.348.000,00	30.348.000,00	30.348.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.055.400,00	246.055.400,00	246.055.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.055.400,00	246.055.400,00	246.055.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.695.328.904,00	1.695.328.904,00	1.695.328.904,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.850.000,00	206.850.000,00	206.850.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.852.024,00	66.852.024,00	66.852.024,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.419.226.880,00	1.419.226.880,00	1.419.226.880,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.151.935.000,00	2.151.935.000,00	2.151.935.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.985.000,00	91.985.000,00	91.985.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.950.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003						UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5.557.853.308,00	5.557.853.308,00	5.557.853.308,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	600.061.300,00	600.061.300,00	600.061.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.125.106.100,00	1.125.106.100,00	1.125.106.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	274.832.600,00	274.832.600,00	274.832.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.557.853.308,00	3.557.853.308,00	3.557.853.308,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.133.640,00	143.133.640,00	143.133.640,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.999.500,00	34.999.500,00	34.999.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.483.140,00	42.483.140,00	42.483.140,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.475.000,00	43.475.000,00	43.475.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.004.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.672.000,00	14.672.000,00	14.672.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.176.029.668,00	3.176.029.668,00	3.176.029.668,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.970.000,00	49.970.000,00	49.970.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.774.859.668,00	2.774.859.668,00	2.774.859.668,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.690.000,00	188.690.000,00	188.690.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.930.000,00	148.930.000,00	148.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	627.422.552.593,00	627.422.552.593,00	627.727.912.593,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	615.448.089.376,00	615.448.089.376,00	615.827.849.376,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	614.297.981.616,00	614.297.981.616,00	614.647.981.616,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	613.842.755.196,00	613.842.755.196,00	614.192.755.196,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	455.226.420,00	455.226.420,00	455.226.420,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	708.501.340,00	708.501.340,00	708.501.340,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	222.152.000,00	222.152.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	486.349.340,00	486.349.340,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	441.606.420,00	441.606.420,00	471.366.420,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	441.606.420,00	441.606.420,00	471.366.420,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.974.463.217,00	11.974.463.217,00	11.900.063.217,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.224.800,00	26.224.800,00	26.224.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.660.200,00	19.660.200,00	19.660.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.564.600,00	6.564.600,00	6.564.600,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.019.788.917,00	9.019.788.917,00	9.019.788.917,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.019.788.917,00	9.019.788.917,00	9.019.788.917,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.735.000,00	692.735.000,00	618.335.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.007.200,00	9.007.200,00	9.007.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.345.800,00	34.345.800,00	34.345.800,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.110.000,00	29.110.000,00	29.110.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.272.000,00	620.272.000,00	545.872.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.940.500,00	305.940.500,00	305.940.500,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.940.500,00	305.940.500,00	305.940.500,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.929.774.000,00	1.929.774.000,00	1.929.774.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	401.337.240,00	401.337.240,00	401.337.240,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.528.436.760,00	1.528.436.760,00	1.528.436.760,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	26.557.408.386,00	26.557.408.386,00	26.645.783.401,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.557.408.386,00	26.557.408.386,00	26.645.783.401,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.557.408.386,00	26.557.408.386,00	26.645.783.401,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	611.134.000,00	611.134.000,00	518.634.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	96.902.200,00	96.902.200,00	4.402.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	96.902.200,00	96.902.200,00	4.402.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	514.231.800,00	514.231.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	514.231.800,00	514.231.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	425.715.200,00	425.715.200,00	553.910.920,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	416.115.200,00	416.115.200,00	544.310.920,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	416.115.200,00	416.115.200,00	544.310.920,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	45.240.000,00	45.240.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	871.903.240,00	871.903.240,00	713.278.940,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	871.903.240,00	871.903.240,00	713.278.940,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	377.200.440,00	377.200.440,00	218.576.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	494.702.800,00	494.702.800,00	494.702.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	451.467.280,00	451.467.280,00	525.050.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	451.467.280,00	451.467.280,00	525.050.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	451.467.280,00	451.467.280,00	525.050.280,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.143.188.666,00	24.143.188.666,00	24.280.909.261,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.987.785.114,00	20.987.785.114,00	20.987.785.114,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.987.785.114,00	20.987.785.114,00	20.987.785.114,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	960.417.100,00	960.417.100,00	994.407.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.542.400,00	10.542.400,00	10.542.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	634.510.000,00	634.510.000,00	652.648.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.767.300,00	169.767.300,00	169.767.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.477.400,00	18.477.400,00	18.477.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.120.000,00	127.120.000,00	142.972.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.284.600,00	158.284.600,00	158.284.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.284.600,00	158.284.600,00	158.284.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.536.000,00	126.536.000,00	141.162.905,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.536.000,00	126.536.000,00	141.162.905,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.910.165.852,00	1.910.165.852,00	1.999.269.242,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	789.220.480,00	789.220.480,00	851.363.680,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.215.372,00	592.215.372,00	619.175.562,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	528.730.000,00	528.730.000,00	528.730.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001						UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	2.823.589.095,00	2.823.589.095,00	2.840.406.896,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.252.859.069,00	2.252.859.069,00	2.307.359.010,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.252.859.069,00	2.252.859.069,00	2.307.359.010,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.450,00	1.423.299.450,00	1.423.299.391,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	829.559.619,00	829.559.619,00	884.059.619,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	570.730.026,00	570.730.026,00	533.047.886,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.067.000,00	43.067.000,00	43.067.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.293.000,00	5.293.000,00	5.293.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.795.800,00	30.795.800,00	30.795.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.795.800,00	30.795.800,00	30.795.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.867.226,00	400.867.226,00	363.185.086,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.897.140,00	114.897.140,00	114.897.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.900.086,00	280.900.086,00	243.217.946,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.275.950.531,00	1.275.950.531,00	1.285.546.481,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	402.793.371,00	402.793.371,00	445.359.821,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	402.793.371,00	402.793.371,00	445.359.821,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	372.799.371,00	372.799.371,00	405.765.821,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	29.994.000,00	29.994.000,00	39.594.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	873.157.160,00	873.157.160,00	840.186.660,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.133.200,00	53.133.200,00	53.133.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.633.200,00	20.633.200,00	20.633.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.316.100,00	49.316.100,00	49.316.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.316.100,00	49.316.100,00	49.316.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.600.000,00	108.600.000,00	108.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000,00	108.600.000,00	108.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.107.860,00	662.107.860,00	629.137.360,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.668.640,00	117.668.640,00	117.668.640,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.260.500,00	50.260.500,00	17.290.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	494.178.720,00	494.178.720,00	494.178.720,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	2.012.004.300,00	2.012.004.300,00	2.025.505.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	761.627.500,00	761.627.500,00	731.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	761.627.500,00	761.627.500,00	731.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	761.627.500,00	761.627.500,00	731.690.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.250.376.800,00	1.250.376.800,00	1.293.815.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.323.800,00	50.323.800,00	50.323.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.188.600,00	5.188.600,00	5.188.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.967.100,00	4.967.100,00	4.967.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.170.000,00	38.170.000,00	38.170.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.998.100,00	1.998.100,00	1.998.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.115.400,00	107.115.400,00	107.115.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.115.400,00	107.115.400,00	107.115.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.992.000,00	21.992.000,00	21.992.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.070.945.600,00	1.070.945.600,00	1.114.384.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.029.000,00	151.029.000,00	180.968.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	919.916.600,00	919.916.600,00	933.416.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pelabuhan Perikanan	417.300.840,00	417.300.840,00	411.566.340,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55.899.200,00	55.899.200,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	55.899.200,00	55.899.200,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	55.899.200,00	55.899.200,00	55.899.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.401.640,00	361.401.640,00	355.667.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.301.600,00	52.301.600,00	52.301.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.801.600,00	19.801.600,00	19.801.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.865.900,00	93.865.900,00	88.131.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.865.900,00	93.865.900,00	88.131.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.234.140,00	205.234.140,00	205.234.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.552.000,00	107.552.000,00	107.552.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.682.140,00	97.682.140,00	97.682.140,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	16.234.232.864,00	16.234.232.864,00	16.234.155.864,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.234.232.864,00	16.234.232.864,00	16.234.155.864,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	644.599.700,00	644.599.700,00	644.599.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	142.885.100,00	142.885.100,00	142.885.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	42.885.100,00	42.885.100,00	42.885.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.802.900,00	31.802.900,00	31.802.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.802.900,00	31.802.900,00	31.802.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	356.137.820,00	356.137.820,00	356.137.820,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	356.137.820,00	356.137.820,00	356.137.820,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	113.773.880,00	113.773.880,00	113.773.880,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	15.346.700,00	15.346.700,00	15.346.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	98.427.180,00	98.427.180,00	98.427.180,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	526.243.100,00	526.243.100,00	526.171.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	526.243.100,00	526.243.100,00	526.171.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	162.264.020,00	162.264.020,00	162.264.020,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	140.866.120,00	140.866.120,00	140.866.120,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	223.112.960,00	223.112.960,00	223.040.960,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.296.320,00	195.296.320,00	195.296.320,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	113.164.780,00	113.164.780,00	113.164.780,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	113.164.780,00	113.164.780,00	113.164.780,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	82.131.540,00	82.131.540,00	82.131.540,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	82.131.540,00	82.131.540,00	82.131.540,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	408.881.160,00	408.881.160,00	408.881.160,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	408.881.160,00	408.881.160,00	408.881.160,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	86.982.140,00	86.982.140,00	86.982.140,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	153.675.620,00	153.675.620,00	153.675.620,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	168.223.400,00	168.223.400,00	168.223.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.459.212.584,00	14.459.212.584,00	14.459.207.584,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.001.420,00	138.001.420,00	138.001.420,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.001.420,00	138.001.420,00	138.001.420,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.359.957.024,00	11.359.957.024,00	11.359.957.024,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.359.957.024,00	11.359.957.024,00	11.359.957.024,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	925.483.700,00	925.483.700,00	907.478.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.484.700,00	10.484.700,00	10.484.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.501.800,00	602.501.800,00	602.501.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.500.000,00	85.500.000,00	67.500.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.942.200,00	9.942.200,00	9.942.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.055.000,00	217.055.000,00	217.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.428.378.440,00	1.428.378.440,00	1.446.378.440,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.462.000,00	134.462.000,00	134.462.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.916.440,00	1.293.916.440,00	1.311.916.440,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.392.000,00	607.392.000,00	607.392.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.992.000,00	588.992.000,00	588.992.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.594.677.380,00	64.594.677.380,00	65.779.677.380,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.170.216.360,00	7.170.216.360,00	7.170.216.360,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.170.216.360,00	7.170.216.360,00	7.170.216.360,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	498.784.500,00	498.784.500,00	498.784.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	498.784.500,00	498.784.500,00	498.784.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	498.784.500,00	498.784.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	6.573.647.880,00	6.573.647.880,00	6.573.647.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	162.888.060,00	162.888.060,00	162.888.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162.888.060,00	162.888.060,00	162.888.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	6.410.759.820,00	6.410.759.820,00	6.410.759.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	6.410.759.820,00	6.410.759.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.783.980,00	97.783.980,00	97.783.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	97.783.980,00	97.783.980,00	97.783.980,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	97.783.980,00	97.783.980,00	97.783.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	57.424.461.020,00	57.424.461.020,00	58.609.461.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	57.424.461.020,00	57.424.461.020,00	58.609.461.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.815.959.780,00	7.815.959.780,00	9.000.959.780,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.780.154.540,00	2.780.154.540,00	2.690.154.540,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.780.154.540,00	2.780.154.540,00	2.690.154.540,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.092.279.600,00	2.092.279.600,00	2.092.279.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.092.279.600,00	2.092.279.600,00	2.092.279.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.943.525.640,00	2.943.525.640,00	4.218.525.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.943.525.640,00	2.943.525.640,00	4.218.525.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.297.328.600,00	1.297.328.600,00	1.297.328.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.297.328.600,00	1.297.328.600,00	1.297.328.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.073.624.460,00	1.073.624.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	223.704.140,00	223.704.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.470.168.560,00	1.470.168.560,00	1.470.168.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.422.286.420,00	1.422.286.420,00	1.422.286.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.422.286.420,00	1.422.286.420,00	1.422.286.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	47.882.140,00	47.882.140,00	47.882.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	47.882.140,00	47.882.140,00	47.882.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	129.246.420,00	129.246.420,00	129.246.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	129.246.420,00	129.246.420,00	129.246.420,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.246.420,00	129.246.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.711.757.660,00	46.711.757.660,00	46.711.757.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	634.155.480,00	634.155.480,00	634.155.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	326.317.920,00	326.317.920,00	326.317.920,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.837.560,00	307.837.560,00	307.837.560,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.540.756.200,00	42.540.756.200,00	42.540.756.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.190.448.420,00	42.190.448.420,00	42.190.448.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.307.780,00	350.307.780,00	350.307.780,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.970.300,00	163.970.300,00	163.970.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.575.000,00	13.575.000,00	13.575.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.285.300,00	52.285.300,00	52.285.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.710.000,00	34.710.000,00	34.710.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.655.720,00	786.655.720,00	786.655.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.000.000,00	468.000.000,00	468.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.655.720,00	318.655.720,00	318.655.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.586.219.960,00	2.586.219.960,00	2.586.219.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.609.754.960,00	1.609.754.960,00	1.609.754.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	771.642.800,00	771.642.800,00	771.642.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.822.200,00	204.822.200,00	204.822.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0009						UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.686.239.760,00	1.686.239.760,00	1.686.239.760,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.142.557.250,00	1.142.557.250,00	1.142.557.250,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.142.557.250,00	1.142.557.250,00	1.142.557.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	535.485.060,00	535.485.060,00	535.485.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	535.485.060,00	535.485.060,00	535.485.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	385.405.340,00	385.405.340,00	385.405.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.079.720,00	150.079.720,00	150.079.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	607.072.190,00	607.072.190,00	607.072.190,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.032.500,00	52.032.500,00	52.032.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.180.500,00	4.180.500,00	4.180.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.967.200,00	14.967.200,00	14.967.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.884.800,00	32.884.800,00	32.884.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.218.120,00	257.218.120,00	257.218.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.230.000,00	139.230.000,00	139.230.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.988.120,00	117.988.120,00	117.988.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.821.570,00	297.821.570,00	297.821.570,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.117.290,00	178.117.290,00	178.117.290,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.364.280,00	80.364.280,00	80.364.280,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.340.000,00	39.340.000,00	39.340.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	543.682.510,00	543.682.510,00	543.682.510,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	543.682.510,00	543.682.510,00	543.682.510,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	543.682.510,00	543.682.510,00	543.682.510,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	543.682.510,00	543.682.510,00	543.682.510,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	268.534.060,00	268.534.060,00	268.534.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	275.148.450,00	275.148.450,00	275.148.450,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0012						UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.735.633.200,00	2.735.633.200,00	2.735.633.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.440.356.340,00	1.440.356.340,00	1.440.356.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.440.356.340,00	1.440.356.340,00	1.440.356.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	492.722.460,00	492.722.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568.756.840,00	568.756.840,00	568.756.840,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	378.877.040,00	378.877.040,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.295.276.860,00	1.295.276.860,00	1.295.276.860,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.775.200,00	57.775.200,00	57.775.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.548.200,00	6.548.200,00	6.548.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.136.000,00	431.136.000,00	431.136.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.360.000,00	239.360.000,00	239.360.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.776.000,00	191.776.000,00	191.776.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.365.660,00	806.365.660,00	806.365.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.541.420,00	195.541.420,00	195.541.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	607.914.240,00	607.914.240,00	607.914.240,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013						UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.287.941.561,00	3.287.941.561,00	3.287.941.561,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00	2.365.748.205,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	922.193.356,00	922.193.356,00	922.193.356,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.143.136,00	61.143.136,00	61.143.136,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.587.400,00	12.587.400,00	12.587.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.055.736,00	16.055.736,00	16.055.736,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.925.480,00	338.925.480,00	338.925.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000,00	64.800.000,00	64.800.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.125.480,00	274.125.480,00	274.125.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.124.740,00	522.124.740,00	522.124.740,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.647.620,00	208.647.620,00	208.647.620,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.457.120,00	306.457.120,00	306.457.120,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014						UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.071.810.800,00	1.071.810.800,00	1.071.810.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	753.282.880,00	753.282.880,00	753.282.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	753.282.880,00	753.282.880,00	753.282.880,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	368.616.260,00	368.616.260,00	368.616.260,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	384.666.620,00	384.666.620,00	384.666.620,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	318.527.920,00	318.527.920,00	318.527.920,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.754.600,00	29.754.600,00	29.754.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.406.400,00	1.406.400,00	1.406.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.348.200,00	3.348.200,00	3.348.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.056.180,00	176.056.180,00	176.056.180,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.056.180,00	76.056.180,00	76.056.180,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.717.140,00	112.717.140,00	112.717.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.717.140,00	107.717.140,00	107.717.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.264.949.300,00	5.264.949.300,00	5.264.949.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.158.793.160,00	2.158.793.160,00	2.158.793.160,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.100.793.160,00	2.100.793.160,00	2.100.793.160,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	685.701.640,00	685.701.640,00	685.701.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	709.591.320,00	709.591.320,00	709.591.320,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	430.102.060,00	430.102.060,00	430.102.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	275.398.140,00	275.398.140,00	275.398.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.106.156.140,00	3.106.156.140,00	3.106.156.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.247.900,00	36.247.900,00	36.247.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.575.900,00	1.575.900,00	1.575.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.674.000,00	4.674.000,00	4.674.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.998.000,00	29.998.000,00	29.998.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.268.820,00	247.268.820,00	247.268.820,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.400.000,00	133.400.000,00	133.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.868.820,00	113.868.820,00	113.868.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.822.639.420,00	2.822.639.420,00	2.822.639.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.384.280,00	127.384.280,00	127.384.280,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.692.755.140,00	2.692.755.140,00	2.692.755.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.626.543.005,00	42.626.543.005,00	42.626.543.005,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00	1.108.121.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	320.771.180,00	320.771.180,00	320.771.180,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	114.224.800,00	114.224.800,00	114.224.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	114.224.800,00	114.224.800,00	114.224.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	206.546.380,00	206.546.380,00	206.546.380,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	206.546.380,00	206.546.380,00	206.546.380,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	321.950.300,00	321.950.300,00	321.950.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	321.950.300,00	321.950.300,00	321.950.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	32.999.400,00	32.999.400,00	32.999.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	288.950.900,00	288.950.900,00	288.950.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	99.556.000,00	99.556.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	99.556.000,00	99.556.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	99.556.000,00	99.556.000,00	99.556.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14.114.700,00	14.114.700,00	14.114.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	14.114.700,00	14.114.700,00	14.114.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	14.114.700,00	14.114.700,00	14.114.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	19.267.800,00	19.267.800,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	19.267.800,00	19.267.800,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	19.267.800,00	19.267.800,00	19.267.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	275.346.020,00	275.346.020,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	275.346.020,00	275.346.020,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	275.346.020,00	275.346.020,00	275.346.020,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.710.800,00	34.710.800,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	34.710.800,00	34.710.800,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34.710.800,00	34.710.800,00	34.710.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.404.300,00	22.404.300,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	22.404.300,00	22.404.300,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	22.404.300,00	22.404.300,00	22.404.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.518.421.905,00	41.518.421.905,00	41.518.421.905,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	41.518.421.905,00	41.518.421.905,00	41.518.421.905,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	184.334.720,00	184.334.720,00	184.334.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	184.334.720,00	184.334.720,00	184.334.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	184.334.720,00	184.334.720,00	184.334.720,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	52.362.000,00	52.362.000,00	52.362.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	52.362.000,00	52.362.000,00	52.362.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	52.362.000,00	52.362.000,00	52.362.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	70.961.240,00	70.961.240,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70.961.240,00	70.961.240,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	70.961.240,00	70.961.240,00	70.961.240,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.210.763.945,00	41.210.763.945,00	41.210.763.945,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.899.600,00	35.899.600,00	35.899.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.899.600,00	35.899.600,00	35.899.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.784.621.345,00	36.784.621.345,00	36.784.621.345,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.743.021.345,00	36.743.021.345,00	36.743.021.345,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.701.900,00	409.701.900,00	409.701.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.294.100,00	16.294.100,00	16.294.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.940.900,00	45.940.900,00	45.940.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.680.900,00	14.680.900,00	14.680.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.336.000,00	178.336.000,00	178.336.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.021.600,00	300.021.600,00	300.021.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.021.600,00	300.021.600,00	300.021.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.808.080,00	583.808.080,00	583.808.080,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.900.000,00	207.900.000,00	207.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.908.080,00	375.908.080,00	375.908.080,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.096.711.420,00	3.096.711.420,00	3.096.711.420,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.048.063.600,00	1.048.063.600,00	1.048.063.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.481.330.000,00	1.481.330.000,00	1.481.330.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	567.317.820,00	567.317.820,00	567.317.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	1.340.267.700,00	1.340.267.700,00	1.340.267.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.285.400,00	52.285.400,00	52.285.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.058.300,00	3.058.300,00	3.058.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.627.100,00	6.627.100,00	6.627.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.624.140,00	72.624.140,00	72.624.140,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.189.800,00	34.189.800,00	34.189.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.434.340,00	38.434.340,00	38.434.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.358.160,00	1.215.358.160,00	1.215.358.160,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.569.640,00	149.569.640,00	149.569.640,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	685.788.520,00	685.788.520,00	685.788.520,00
3.28.2.11.0.00.01.0002						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	1.330.927.460,00	1.330.927.460,00	1.333.927.460,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.638.500,00	54.638.500,00	54.638.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.975.600,00	2.975.600,00	2.975.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.832.700,00	12.832.700,00	12.832.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.580.200,00	3.580.200,00	3.580.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.318.500,00	36.318.500,00	36.318.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.318.500,00	36.318.500,00	36.318.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.743.340,00	54.743.340,00	57.743.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000,00	14.600.000,00	17.600.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.143.340,00	40.143.340,00	40.143.340,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.227.120,00	1.185.227.120,00	1.185.227.120,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.247.120,00	485.247.120,00	485.247.120,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	690.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	644.458.170,00	644.458.170,00	644.458.170,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.871.600,00	74.871.600,00	74.871.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.748.500,00	12.748.500,00	12.748.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.728.100,00	2.728.100,00	2.728.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.398.720,00	126.398.720,00	126.398.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.398.720,00	118.398.720,00	118.398.720,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.187.850,00	443.187.850,00	443.187.850,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.369.940,00	256.369.940,00	256.369.940,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.827.910,00	176.827.910,00	176.827.910,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	864.229.820,00	864.229.820,00	964.697.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.372.200,00	55.372.200,00	120.840.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.989.200,00	2.989.200,00	2.989.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.400,00	10.299.400,00	75.767.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.383.600,00	2.383.600,00	2.383.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.885.940,00	62.885.940,00	70.885.940,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000,00	22.800.000,00	30.800.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.085.940,00	40.085.940,00	40.085.940,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.971.680,00	745.971.680,00	772.971.680,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.895.000,00	175.895.000,00	175.895.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.542.400,00	485.542.400,00	512.542.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.534.280,00	84.534.280,00	84.534.280,00
3.28.2.11.0.00.01.0005						UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	400.282.040,00	400.282.040,00	768.795.040,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.087.600,00	31.087.600,00	31.087.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.410.400,00	2.410.400,00	2.410.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.202.600,00	11.202.600,00	11.202.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.474.600,00	2.474.600,00	2.474.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.736.440,00	226.736.440,00	595.249.440,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.736.440,00	226.736.440,00	595.249.440,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.458.000,00	142.458.000,00	142.458.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.878.000,00	126.878.000,00	126.878.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.580.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006						UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	385.597.523,00	385.597.523,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	385.597.523,00	385.597.523,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	385.597.523,00	385.597.523,00	385.597.523,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	59.962.307,00	59.962.307,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	59.962.307,00	59.962.307,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	59.962.307,00	59.962.307,00	59.962.307,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	325.635.216,00	325.635.216,00	325.635.216,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.995.400,00	9.995.400,00	9.995.400,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.995.500,00	7.995.500,00	7.995.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.940.350,00	99.940.350,00	99.940.350,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.940.350,00	99.940.350,00	99.940.350,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.699.466,00	215.699.466,00	215.699.466,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.699.466,00	215.699.466,00	215.699.466,00
3.28.2.11.0.00.01.0007						UPTD Pengelolaan Sampah	11.219.395.228,00	11.219.395.228,00	11.205.579.228,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.627.670.388,00	10.627.670.388,00	10.614.968.488,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10.627.670.388,00	10.627.670.388,00	10.614.968.488,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.627.670.388,00	10.627.670.388,00	10.614.968.488,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	591.724.840,00	591.724.840,00	590.610.740,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.419.900,00	77.419.900,00	77.419.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.721.000,00	7.721.000,00	7.721.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.435.800,00	14.435.800,00	14.435.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.013.100,00	4.013.100,00	4.013.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.487.100,00	71.487.100,00	70.373.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.487.100,00	71.487.100,00	70.373.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.817.840,00	442.817.840,00	442.817.840,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.737.840,00	323.737.840,00	323.737.840,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.080.000,00	119.080.000,00	119.080.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.137.781.246,00	21.137.781.246,00	21.312.702.146,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.137.781.246,00	21.137.781.246,00	21.312.702.146,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.524.686.646,00	19.524.686.646,00	19.524.607.546,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	322.387.120,00	322.387.120,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	322.387.120,00	322.387.120,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	322.387.120,00	322.387.120,00	322.387.120,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.426.100,00	111.426.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.426.100,00	111.426.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.426.100,00	111.426.100,00	111.426.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	49.213.800,00	49.213.800,00	49.213.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	49.213.800,00	49.213.800,00	49.213.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	49.213.800,00	49.213.800,00	49.213.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	349.991.600,00	349.991.600,00	349.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	349.991.600,00	349.991.600,00	349.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	49.991.600,00	49.991.600,00	49.991.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	645.585.220,00	645.585.220,00	645.585.220,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	498.711.340,00	498.711.340,00	498.711.340,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	42.711.340,00	42.711.340,00	42.711.340,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	146.873.880,00	146.873.880,00	146.873.880,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	146.873.880,00	146.873.880,00	146.873.880,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	272.598.080,00	272.598.080,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	272.598.080,00	272.598.080,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	272.598.080,00	272.598.080,00	272.598.080,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.773.484.726,00	17.773.484.726,00	17.773.405.626,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.854.000,00	64.854.000,00	64.854.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.854.000,00	64.854.000,00	64.854.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.709.918.886,00	14.709.918.886,00	14.709.918.886,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.709.918.886,00	14.709.918.886,00	14.709.918.886,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.141.000,00	661.141.000,00	661.061.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.912.300,00	14.912.300,00	14.912.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.216.800,00	221.216.800,00	221.137.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.438.900,00	14.438.900,00	14.438.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.233.000,00	302.233.000,00	302.233.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.664.860,00	1.188.664.860,00	1.188.664.860,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	606.469.960,00	606.469.960,00	606.469.960,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.194.900,00	227.194.900,00	227.194.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.905.980,00	1.148.905.980,00	1.148.905.980,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	822.120.700,00	822.120.700,00	822.120.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.785.280,00	326.785.280,00	326.785.280,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.613.094.600,00	1.613.094.600,00	1.788.094.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.613.094.600,00	1.613.094.600,00	1.788.094.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.613.094.600,00	1.613.094.600,00	1.788.094.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	123.226.780,00	123.226.780,00	298.226.780,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.489.867.820,00	1.489.867.820,00	1.489.867.820,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0001						UPTD Rumah Kreatif	1.022.110.880,00	1.022.110.880,00	1.022.110.880,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	827.213.900,00	827.213.900,00	827.213.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	827.213.900,00	827.213.900,00	827.213.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	827.213.900,00	827.213.900,00	827.213.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	194.896.980,00	194.896.980,00	194.896.980,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.857.700,00	43.857.700,00	43.857.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.437.700,00	33.437.700,00	33.437.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.372.140,00	49.372.140,00	49.372.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.372.140,00	49.372.140,00	49.372.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.667.140,00	101.667.140,00	101.667.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.667.140,00	101.667.140,00	101.667.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0002						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	600.934.720,00	600.934.720,00	600.796.720,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	600.934.720,00	600.934.720,00	600.796.720,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.985.620,00	275.985.620,00	275.847.620,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	275.985.620,00	275.985.620,00	275.847.620,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	275.985.620,00	275.985.620,00	275.847.620,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	324.949.100,00	324.949.100,00	324.949.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.308.400,00	51.308.400,00	51.308.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.492.800,00	1.492.800,00	1.492.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.986.600,00	26.986.600,00	26.986.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.729.000,00	5.729.000,00	5.729.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.378.560,00	171.378.560,00	171.378.560,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.378.560,00	159.378.560,00	159.378.560,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.262.140,00	102.262.140,00	102.262.140,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.262.140,00	102.262.140,00	102.262.140,00
4.01.0.00.0.00.01.0003						Biro Umum dan Protokol	85.302.655.891,00	85.302.655.891,00	88.108.216.382,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	85.302.655.891,00	85.302.655.891,00	88.108.216.382,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	85.302.655.891,00	85.302.655.891,00	88.108.216.382,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.302.655.891,00	85.302.655.891,00	88.108.216.382,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579.910.920,00	579.910.920,00	579.910.920,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	579.910.920,00	579.910.920,00	579.910.920,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	672.788.515,00	672.788.515,00	672.788.515,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	672.788.515,00	672.788.515,00	672.788.515,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	365.607.295,00	365.607.295,00	365.607.295,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	365.607.295,00	365.607.295,00	365.607.295,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.504.895.456,00	16.504.895.456,00	17.264.895.456,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	689.399.360,00	689.399.360,00	689.399.360,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.413.994.620,00	1.413.994.620,00	1.413.994.620,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.069.170.576,00	5.069.170.576,00	5.829.170.576,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.791.666.520,00	8.791.666.520,00	8.791.666.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	540.664.380,00	540.664.380,00	540.664.380,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.929.726.474,00	22.929.726.474,00	23.629.726.374,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.311.354.000,00	2.311.354.000,00	2.311.354.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.447.861.984,00	15.447.861.984,00	16.097.861.984,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.170.510.490,00	5.170.510.490,00	5.220.510.390,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.291.444.058,00	14.291.444.058,00	14.722.942.058,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.449.032.445,00	6.449.032.445,00	6.749.032.445,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.842.411.613,00	7.842.411.613,00	7.973.909.613,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.850.668.243,00	6.850.668.243,00	6.885.050.834,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.850.668.243,00	6.850.668.243,00	6.885.050.834,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	20.552.982.640,00	20.552.982.640,00	21.310.982.640,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	17.931.926.420,00	17.931.926.420,00	18.266.426.420,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.461.556.220,00	2.461.556.220,00	2.885.056.220,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	159.500.000,00	159.500.000,00	159.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	627.514.100,00	627.514.100,00	656.794.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	627.514.100,00	627.514.100,00	656.794.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.927.118.190,00	1.927.118.190,00	2.019.518.190,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.927.118.190,00	1.927.118.190,00	2.019.518.190,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Biro Hukum	7.077.049.110,00	7.077.049.110,00	7.607.045.110,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.702.130.870,00	4.702.130.870,00	5.232.126.870,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.131.199.225,00	2.131.199.225,00	2.131.195.225,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.296.793.360,00	1.296.793.360,00	1.296.789.360,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	162.015.760,00	162.015.760,00	162.015.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	255.212.640,00	255.212.640,00	255.212.640,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	417.177.465,00	417.177.465,00	417.177.465,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.570.931.645,00	2.570.931.645,00	3.100.931.645,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.330.012.785,00	2.330.012.785,00	2.860.012.785,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	240.918.860,00	240.918.860,00	240.918.860,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.374.918.240,00	2.374.918.240,00	2.374.918.240,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.072.388.300,00	1.072.388.300,00	1.072.388.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.774.200,00	15.774.200,00	15.774.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	942.151.600,00	942.151.600,00	942.151.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500,00	14.999.500,00	14.999.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.463.000,00	99.463.000,00	99.463.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.529.940,00	1.302.529.940,00	1.302.529.940,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403.261.420,00	403.261.420,00	403.261.420,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844.478.520,00	844.478.520,00	844.478.520,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.990.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	90.256.344.990,00	90.256.344.990,00	62.074.255.687,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	643.907.040,00	643.907.040,00	661.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	643.907.040,00	643.907.040,00	661.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	643.907.040,00	643.907.040,00	661.907.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	338.192.440,00	338.192.440,00	338.192.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	338.192.440,00	338.192.440,00	338.192.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	305.714.600,00	305.714.600,00	323.714.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.757.500,00	40.757.500,00	40.757.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	264.957.100,00	264.957.100,00	282.957.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	89.612.437.950,00	89.612.437.950,00	61.412.348.647,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	89.612.437.950,00	89.612.437.950,00	61.412.348.647,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.612.437.950,00	89.612.437.950,00	61.412.348.647,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.141.786.508,00	89.141.786.508,00	60.941.697.205,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.141.786.508,00	89.141.786.508,00	60.941.697.205,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	470.651.442,00	470.651.442,00	470.651.442,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	470.651.442,00	470.651.442,00	470.651.442,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40.036.942.140,00	40.036.942.140,00	51.821.942.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.684.516.980,00	1.684.516.980,00	1.684.516.980,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	590.360.320,00	590.360.320,00	590.360.320,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	403.600.120,00	403.600.120,00	403.600.120,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	186.760.200,00	186.760.200,00	186.760.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	467.854.500,00	467.854.500,00	467.854.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	413.874.600,00	413.874.600,00	413.874.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	53.979.900,00	53.979.900,00	53.979.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	626.302.160,00	626.302.160,00	626.302.160,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	255.833.160,00	255.833.160,00	255.833.160,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	370.469.000,00	370.469.000,00	370.469.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.168.779.030,00	36.168.779.030,00	47.968.779.030,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.178.156.115,00	6.178.156.115,00	7.178.156.115,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.545.519.335,00	5.545.519.335,00	6.545.519.335,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	632.636.780,00	632.636.780,00	632.636.780,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	29.990.622.915,00	29.990.622.915,00	40.790.622.915,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	29.990.622.915,00	29.990.622.915,00	40.790.622.915,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.183.646.130,00	2.183.646.130,00	2.168.646.130,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.992.290,00	370.992.290,00	370.992.290,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	370.992.290,00	370.992.290,00	370.992.290,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.921.700,00	765.921.700,00	765.921.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.740.500,00	13.740.500,00	13.740.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	398.940.200,00	398.940.200,00	398.940.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.223.000,00	23.223.000,00	23.223.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.018.000,00	330.018.000,00	330.018.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.732.140,00	1.046.732.140,00	1.031.732.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	915.172.140,00	915.172.140,00	915.172.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.560.000,00	86.560.000,00	71.560.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005						Biro Organisasi	3.642.196.510,00	3.642.196.510,00	3.639.196.510,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	627.473.360,00	627.473.360,00	627.473.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	627.473.360,00	627.473.360,00	627.473.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	525.774.880,00	525.774.880,00	525.774.880,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	337.728.460,00	337.728.460,00	337.728.460,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	67.682.140,00	67.682.140,00	67.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	137.682.140,00	137.682.140,00	137.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64.682.040,00	64.682.040,00	64.682.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	67.682.140,00	67.682.140,00	67.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	188.046.420,00	188.046.420,00	188.046.420,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62.682.140,00	62.682.140,00	62.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	125.364.280,00	125.364.280,00	125.364.280,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.698.480,00	101.698.480,00	101.698.480,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.330.940,00	50.330.940,00	50.330.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.330.940,00	50.330.940,00	50.330.940,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	51.367.540,00	51.367.540,00	51.367.540,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.03	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	51.367.540,00	51.367.540,00	51.367.540,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.014.723.150,00	3.014.723.150,00	3.011.723.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	3.014.723.150,00	3.014.723.150,00	3.011.723.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	962.815.700,00	962.815.700,00	962.815.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	387.682.140,00	387.682.140,00	387.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	187.682.140,00	187.682.140,00	187.682.140,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	575.133.560,00	575.133.560,00	575.133.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	120.630.840,00	120.630.840,00	120.630.840,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167.514.440,00	167.514.440,00	167.514.440,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	19.885.100,00	19.885.100,00	19.885.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	109.859.640,00	109.859.640,00	109.859.640,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	157.243.540,00	157.243.540,00	157.243.540,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.051.907.450,00	2.051.907.450,00	2.048.907.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.355.700,00	4.355.700,00	4.355.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.355.700,00	4.355.700,00	4.355.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.908.410,00	1.187.908.410,00	1.184.908.410,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.059.760,00	17.059.760,00	17.059.760,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876.690.650,00	876.690.650,00	873.690.650,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.158.000,00	294.158.000,00	294.158.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.643.340,00	859.643.340,00	859.643.340,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769.583.340,00	769.583.340,00	769.583.340,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.060.000,00	90.060.000,00	90.060.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007						Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	10.180.013.960,00	10.180.013.960,00	12.177.545.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.212.579.000,00	1.212.579.000,00	1.212.485.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	574.787.000,00	574.787.000,00	574.695.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.787.000,00	574.787.000,00	574.695.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.002.000,00	431.002.000,00	431.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	431.002.000,00	431.002.000,00	431.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	206.790.000,00	206.790.000,00	206.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	206.790.000,00	206.790.000,00	206.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.440.277.600,00	5.440.277.600,00	7.575.257.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.790.598.600,00	4.790.598.600,00	6.925.646.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.739.598.600,00	4.739.598.600,00	6.874.646.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	499.563.000,00	499.563.000,00	499.495.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	450.027.000,00	450.027.000,00	450.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.536.000,00	49.536.000,00	49.495.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.116.000,00	150.116.000,00	150.116.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	103.502.000,00	103.502.000,00	103.502.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	29.094.000,00	29.094.000,00	29.094.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	82.125.000,00	82.125.000,00	82.125.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	39.964.000,00	39.964.000,00	39.964.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	39.964.000,00	39.964.000,00	39.964.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.161.000,00	42.161.000,00	42.161.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.161.000,00	42.161.000,00	42.161.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.445.032.360,00	3.445.032.360,00	3.307.678.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.828.412.360,00	2.828.412.360,00	2.706.058.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.554.259.360,00	2.554.259.360,00	2.431.985.560,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.957.000,00	56.957.000,00	56.957.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.196.000,00	217.196.000,00	217.116.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.120.000,00	603.120.000,00	588.120.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	473.250.000,00	473.250.000,00	473.250.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.870.000,00	129.870.000,00	114.870.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	214.522.660.831,00	214.522.660.831,00	207.302.956.673,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	214.522.660.831,00	214.522.660.831,00	207.302.956.673,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	117.604.565.178,00	117.604.565.178,00	112.296.607.585,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	17.389.331.580,00	17.389.331.580,00	14.314.667.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.819.843.680,00	1.819.843.680,00	1.340.716.680,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	14.805.504.220,00	14.805.504.220,00	12.755.792.320,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	763.983.680,00	763.983.680,00	218.158.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.277.959.200,00	8.277.959.200,00	5.922.282.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.331.340,00	1.649.331.340,00	592.907.340,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.662.496.040,00	1.662.496.040,00	105.311.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	1.655.956.040,00	1.655.956.040,00	1.940.284.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.654.204.040,00	1.654.204.040,00	1.639.835.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.971.740,00	1.655.971.740,00	1.643.944.740,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	32.986.233.260,00	32.986.233.260,00	34.032.615.760,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.316.366.560,00	8.316.366.560,00	8.707.818.560,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.365.501.500,00	7.365.501.500,00	7.832.458.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.674.489.920,00	7.674.489.920,00	7.845.451.220,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.011.939.280,00	8.011.939.280,00	8.377.029.280,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.617.936.000,00	1.617.936.000,00	1.269.858.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	15.727.529.608,00	15.727.529.608,00	15.222.329.280,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	1.394.876.900,00	1.394.876.900,00	1.043.604.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.282.039.520,00	4.282.039.520,00	4.282.039.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.288.832.448,00	3.288.832.448,00	3.251.570.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	920.451.180,00	920.451.180,00	906.119.700,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.204.342.880,00	2.204.342.880,00	2.202.327.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.636.986.680,00	3.636.986.680,00	3.536.666.680,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28.907.008.550,00	28.907.008.550,00	28.330.175.845,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.565.732.420,00	3.565.732.420,00	3.565.708.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.790.335.400,00	1.790.335.400,00	1.241.038.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	23.550.940.730,00	23.550.940.730,00	23.523.429.125,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.141.080,00	817.141.080,00	817.141.080,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.141.080,00	817.141.080,00	817.141.080,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	13.499.361.900,00	13.499.361.900,00	13.657.395.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.661.184.220,00	9.661.184.220,00	10.581.777.220,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	450.495.880,00	450.495.880,00	445.563.880,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.387.681.800,00	3.387.681.800,00	2.630.054.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.918.095.653,00	96.918.095.653,00	95.006.349.088,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	627.069.780,00	627.069.780,00	706.483.780,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	482.401.640,00	482.401.640,00	552.215.640,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.668.140,00	144.668.140,00	154.268.140,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.286.478.580,00	10.286.478.580,00	10.881.281.007,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.013.782.000,00	10.013.782.000,00	10.608.584.427,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.744.940,00	136.744.940,00	136.744.940,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	135.951.640,00	135.951.640,00	135.951.640,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.363.058.420,00	8.363.058.420,00	8.548.991.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	169.600.400,00	169.600.400,00	169.600.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	903.215.800,00	903.215.800,00	1.022.689.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.358.543.300,00	1.358.543.300,00	1.425.027.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.240.000,00	135.240.000,00	135.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.062.108.000,00	1.062.108.000,00	1.062.108.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.734.350.920,00	4.734.350.920,00	4.734.325.920,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.780.798.200,00	5.780.798.200,00	1.760.022.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.780.798.200,00	5.780.798.200,00	1.760.022.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.523.302.360,00	2.523.302.360,00	2.535.502.728,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.613.306.360,00	1.613.306.360,00	1.625.506.728,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.208.744.710,00	5.208.744.710,00	5.846.625.670,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.132.060,00	3.610.132.060,00	3.512.313.020,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	977.532.650,00	977.532.650,00	1.617.232.650,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	621.080.000,00	621.080.000,00	717.080.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	61.114.853.203,00	61.114.853.203,00	63.111.710.703,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.304.663,00	58.289.304.663,00	60.196.714.663,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.537.787.500,00	2.537.787.500,00	2.627.235.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	287.761.040,00	287.761.040,00	287.761.040,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	3.013.790.400,00	3.013.790.400,00	1.615.731.480,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	177.530.360,00	177.530.360,00	177.530.360,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.836.260.040,00	2.836.260.040,00	1.438.201.120,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.679.085.689,00	24.679.085.689,00	24.679.084.089,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.679.085.689,00	24.679.085.689,00	24.679.084.089,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	24.679.085.689,00	24.679.085.689,00	24.679.084.089,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.186.565.540,00	3.186.565.540,00	3.186.563.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.727.918.940,00	1.727.918.940,00	1.727.918.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	69.800.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.648.318.940,00	1.648.318.940,00	1.648.318.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	538.543.360,00	538.543.360,00	538.542.560,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.570.560,00	516.570.560,00	516.569.760,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	21.972.800,00	21.972.800,00	21.972.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	852.492.000,00	852.492.000,00	852.492.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	185.962.200,00	185.962.200,00	185.962.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	524.407.400,00	524.407.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	142.122.400,00	142.122.400,00	142.122.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	67.611.240,00	67.611.240,00	67.611.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	67.611.240,00	67.611.240,00	67.611.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.269.710.975,00	2.269.710.975,00	2.269.710.975,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	759.059.435,00	759.059.435,00	759.059.435,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	157.977.880,00	157.977.880,00	157.977.880,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.283.540,00	100.283.540,00	100.283.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	269.850.460,00	269.850.460,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	230.947.555,00	230.947.555,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	808.510.900,00	808.510.900,00	808.510.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	257.211.560,00	257.211.560,00	257.211.560,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	255.433.420,00	255.433.420,00	255.433.420,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.112.240,00	96.112.240,00	96.112.240,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	199.753.680,00	199.753.680,00	199.753.680,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	702.140.640,00	702.140.640,00	702.140.640,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	297.898.540,00	297.898.540,00	297.898.540,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	71.334.800,00	71.334.800,00	71.334.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	259.548.300,00	259.548.300,00	259.548.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	73.359.000,00	73.359.000,00	73.359.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.222.809.174,00	19.222.809.174,00	19.222.809.174,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.026.900,00	235.026.900,00	235.026.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.957.600,00	205.957.600,00	205.957.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.059.800,00	7.059.800,00	7.059.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.171.800,00	6.171.800,00	6.171.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.823.500,00	7.823.500,00	7.823.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.819.500,00	1.819.500,00	1.819.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.043.600,00	2.043.600,00	2.043.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.151.100,00	4.151.100,00	4.151.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.089.907.937,00	13.089.907.937,00	13.089.907.937,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.762.247.117,00	12.762.247.117,00	12.762.247.117,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.206.700,00	198.206.700,00	198.206.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	129.454.120,00	129.454.120,00	129.454.120,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.247.404.280,00	2.247.404.280,00	2.247.404.280,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.301.940,00	59.301.940,00	59.301.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.147.266.840,00	1.147.266.840,00	1.147.266.840,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.323.140,00	123.323.140,00	123.323.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.273.940,00	67.273.940,00	67.273.940,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	65.006.140,00	65.006.140,00	65.006.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.682.140,00	103.682.140,00	103.682.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681.550.140,00	681.550.140,00	681.550.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.412.940,00	230.412.940,00	230.412.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	183.600.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.812.940,00	46.812.940,00	46.812.940,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	908.980.835,00	908.980.835,00	908.980.835,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.158.535,00	13.158.535,00	13.158.535,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.282.140,00	337.282.140,00	337.282.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558.540.160,00	558.540.160,00	558.540.160,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.511.076.282,00	2.511.076.282,00	2.511.076.282,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	874.255.504,00	874.255.504,00	874.255.504,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.132.140,00	173.132.140,00	173.132.140,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.463.688.638,00	1.463.688.638,00	1.463.688.638,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.272.268.072.739,00	2.272.268.072.739,00	2.272.194.050.739,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	2.272.268.072.739,00	2.272.268.072.739,00	2.272.194.050.739,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.247.248.136.278,00	2.247.248.136.278,00	2.247.174.114.278,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.667.886.460,00	1.667.886.460,00	1.591.257.460,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00	26.500.000,00	32.500.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	22.336.000,00	28.336.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	344.853.700,00	344.853.700,00	241.803.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	149.387.400,00	149.387.400,00	120.752.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	678.738.160,00	749.547.160,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	446.071.200,00	418.318.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	778.707.000,00	778.707.000,00	778.707.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	202.814.400,00	202.814.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00	176.576.600,00	176.576.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00	205.387.300,00	205.387.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	193.928.700,00	193.928.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	601.259.296,00	601.259.296,00	601.259.296,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	601.259.296,00	601.259.296,00	601.259.296,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	523.375.540,00	523.375.540,00	523.228.540,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	424.894.340,00	424.894.340,00	424.829.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00	98.481.200,00	98.399.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.243.530.106.782,00	2.243.530.106.782,00	2.243.530.106.782,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	366.931.922.273,00	366.931.922.273,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	52.205.727.068,00	52.205.727.068,00	52.205.727.068,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.821.886.080.384,00	1.821.886.080.384,00	1.821.886.080.384,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	146.801.200,00	146.801.200,00	149.555.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00	146.801.200,00	149.555.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.855.599.760,00	1.855.599.760,00	1.855.599.760,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.855.599.760,00	1.855.599.760,00	1.855.599.760,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00	113.211.800,00	113.211.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00	43.876.100,00	43.876.100,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00	349.999.400,00	349.999.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.348.512.460,00	1.348.512.460,00	1.348.512.460,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.164.336.701,00	23.164.336.701,00	23.164.336.701,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.005.000,00	37.005.000,00	37.005.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	37.005.000,00	37.005.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.953.539.261,00	18.953.539.261,00	18.953.539.261,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.529.654.581,00	18.529.654.581,00	18.529.654.581,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00	423.884.680,00	423.884.680,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.166.218.900,00	2.166.218.900,00	2.166.218.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	17.358.800,00	17.358.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.122.069.900,00	1.122.069.900,00	1.122.069.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	569.761.700,00	569.761.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00	11.486.500,00	11.486.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.292.000,00	346.292.000,00	346.292.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.340.000,00	287.340.000,00	287.340.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.720.233.540,00	1.720.233.540,00	1.720.233.540,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00	738.703.480,00	738.703.480,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	130.516.500,00	130.516.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	845.013.560,00	845.013.560,00	845.013.560,00
5.02.0.00.0.00.02.0001						UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.650.343.080,00	3.650.343.080,00	3.650.343.080,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.234.346.380,00	1.234.346.380,00	1.234.346.380,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.735.800,00	153.735.800,00	153.735.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00	41.665.600,00	41.665.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00	8.999.200,00	8.999.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00	88.881.000,00	88.881.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.022.410.580,00	1.022.410.580,00	1.022.410.580,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00	147.172.600,00	147.172.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00	859.977.980,00	859.977.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	141.435.464.715,00	141.435.464.715,00	141.623.307.315,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	877.191.600,00	877.191.600,00	839.008.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	877.191.600,00	877.191.600,00	839.008.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	231.579.600,00	231.579.600,00	231.579.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	211.316.100,00	211.316.100,00	211.316.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	145.000.000,00	145.000.000,00	106.817.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	243.995.900,00	243.995.900,00	243.995.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	140.558.273.115,00	140.558.273.115,00	140.784.298.715,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.912.700,00	37.912.700,00	37.912.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.600,00	18.867.600,00	18.867.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.100,00	19.045.100,00	19.045.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.502.421.382,00	129.502.421.382,00	129.502.421.382,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129.502.421.382,00	129.502.421.382,00	129.502.421.382,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.999.000,00	99.999.000,00	84.324.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.999.000,00	99.999.000,00	84.324.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.540.403.900,00	3.540.403.900,00	3.723.209.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.727.000,00	7.727.000,00	7.727.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.624.100,00	147.624.100,00	147.624.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.578.070.000,00	2.578.070.000,00	2.580.155.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.554.000,00	711.554.000,00	892.274.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.660.127.900,00	2.660.127.900,00	2.670.257.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.114.000,00	486.114.000,00	431.848.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	783.526.000,00	783.526.000,00	783.526.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.390.487.900,00	1.390.487.900,00	1.454.883.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	838.764.477,00	838.764.477,00	838.764.477,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.337.373,00	448.337.373,00	448.337.373,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.878.643.756,00	3.878.643.756,00	3.927.409.756,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.861.640,00	129.861.640,00	129.861.640,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.032.007.840,00	1.032.007.840,00	1.085.773.840,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	907.337.615,00	907.337.615,00	907.337.615,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	610.000.000,00	610.000.000,00	590.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.199.436.661,00	1.199.436.661,00	1.214.436.661,00
5.02.0.00.0.00.03.0001						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.618.630.723,00	5.618.630.723,00	5.518.630.723,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.796.242.120,00	3.796.242.120,00	3.796.242.120,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.796.242.120,00	3.796.242.120,00	3.796.242.120,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.761.532.980,00	1.761.532.980,00	1.761.532.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	2.034.709.140,00	2.034.709.140,00	2.034.709.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.822.388.603,00	1.822.388.603,00	1.722.388.603,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.349.200,00	317.349.200,00	317.349.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.042.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.169.400,00	166.169.400,00	166.169.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.809.000,00	11.809.000,00	11.809.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.068.800,00	5.068.800,00	5.068.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.960.000,00	96.960.000,00	96.960.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.992.000,00	465.992.000,00	465.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.047.403,00	1.039.047.403,00	939.047.403,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.075.000,00	48.075.000,00	48.075.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.677.340,00	189.677.340,00	189.677.340,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	746.465.063,00	746.465.063,00	646.465.063,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.980.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.408.823.092,00	2.408.823.092,00	2.537.823.092,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	876.650.660,00	876.650.660,00	876.650.660,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	876.650.660,00	876.650.660,00	876.650.660,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	405.454.260,00	405.454.260,00	405.454.260,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	471.196.400,00	471.196.400,00	471.196.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.532.172.432,00	1.532.172.432,00	1.661.172.432,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.637.900,00	225.637.900,00	225.637.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.665.600,00	3.665.600,00	3.665.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.129.200,00	141.129.200,00	141.129.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.158.100,00	14.158.100,00	14.158.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.285.000,00	39.285.000,00	39.285.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.061.061,00	381.061.061,00	381.061.061,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.069.061,00	190.069.061,00	190.069.061,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.473.471,00	925.473.471,00	1.054.473.471,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.976.600,00	47.976.600,00	47.976.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.506.740,00	147.506.740,00	147.506.740,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.450.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	682.569.731,00	682.569.731,00	811.569.731,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.970.400,00	12.970.400,00	12.970.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0003						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.626.809.915,00	2.626.809.915,00	2.451.809.915,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.047.789.220,00	1.047.789.220,00	1.038.564.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.047.789.220,00	1.047.789.220,00	1.038.564.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	498.003.540,00	498.003.540,00	498.003.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	549.785.680,00	549.785.680,00	540.560.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.579.020.695,00	1.579.020.695,00	1.413.245.695,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.479.000,00	193.479.000,00	202.704.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.491.500,00	8.491.500,00	8.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.995.800,00	129.995.800,00	129.995.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.366.700,00	6.366.700,00	6.366.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.125.000,00	19.125.000,00	28.350.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.748.855,00	498.748.855,00	498.748.855,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.756.855,00	293.756.855,00	293.756.855,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	886.792.840,00	886.792.840,00	711.792.840,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.363.000,00	44.363.000,00	44.363.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.350.140,00	223.350.140,00	223.350.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.880.000,00	19.880.000,00	19.880.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	573.821.400,00	573.821.400,00	398.821.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.378.300,00	25.378.300,00	25.378.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0004						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	5.368.249.994,00	5.368.249.994,00	5.344.249.994,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.106.153.160,00	3.106.153.160,00	3.106.153.160,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.106.153.160,00	3.106.153.160,00	3.106.153.160,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.356.365.340,00	2.356.365.340,00	2.356.365.340,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	749.787.820,00	749.787.820,00	749.787.820,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.262.096.834,00	2.262.096.834,00	2.238.096.834,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.532.050,00	333.532.050,00	333.532.050,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.225.900,00	237.225.900,00	237.225.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.731.650,00	22.731.650,00	22.731.650,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.772.500,00	5.772.500,00	5.772.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.222.947,00	817.222.947,00	817.222.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.230.947,00	437.230.947,00	437.230.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.341.837,00	1.111.341.837,00	1.087.341.837,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.178.800,00	24.178.800,00	24.178.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.815.340,00	209.815.340,00	185.815.340,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	826.857.697,00	826.857.697,00	826.857.697,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.570.000,00	30.570.000,00	30.570.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.981.055.766,00	5.981.055.766,00	5.961.155.766,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.447.824.040,00	3.447.824.040,00	3.447.824.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.447.824.040,00	3.447.824.040,00	3.447.824.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.868.660.500,00	2.868.660.500,00	2.868.660.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	579.163.540,00	579.163.540,00	579.163.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.533.231.726,00	2.533.231.726,00	2.513.331.726,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.830.900,00	505.830.900,00	505.830.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.819.400,00	5.819.400,00	5.819.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.538.300,00	333.538.300,00	333.538.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.691.200,00	79.691.200,00	79.691.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.515.000,00	35.515.000,00	35.515.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.055.000,00	23.055.000,00	23.055.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.874.444,00	799.874.444,00	799.874.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.000.000,00	487.000.000,00	487.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.882.444,00	310.882.444,00	310.882.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.526.382,00	1.227.526.382,00	1.207.626.382,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.116.500,00	49.116.500,00	49.116.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.090.480,00	202.090.480,00	202.090.480,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	842.616.902,00	842.616.902,00	822.716.902,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.752.500,00	122.752.500,00	122.752.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.463.141.117,00	3.463.141.117,00	3.465.541.117,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.844.789.880,00	1.844.789.880,00	1.847.189.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.844.789.880,00	1.844.789.880,00	1.847.189.880,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.140.953.500,00	1.140.953.500,00	1.140.953.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	703.836.380,00	703.836.380,00	706.236.380,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.618.351.237,00	1.618.351.237,00	1.618.351.237,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.689.700,00	198.689.700,00	198.689.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.677.200,00	10.677.200,00	10.677.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.222.500,00	119.222.500,00	119.222.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.210.000,00	13.210.000,00	13.210.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.064.963,00	547.064.963,00	547.064.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.072.963,00	295.072.963,00	295.072.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.596.574,00	872.596.574,00	872.596.574,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.970.000,00	38.970.000,00	38.970.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.870.000,00	128.870.000,00	128.870.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.730.000,00	20.730.000,00	20.730.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.540.474,00	633.540.474,00	633.540.474,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.486.100,00	50.486.100,00	50.486.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.358.173.100,00	2.358.173.100,00	2.358.173.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.170.752.060,00	1.170.752.060,00	1.170.752.060,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.170.752.060,00	1.170.752.060,00	1.170.752.060,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	535.049.960,00	535.049.960,00	535.049.960,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	635.702.100,00	635.702.100,00	635.702.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.421.040,00	1.187.421.040,00	1.187.421.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.815.800,00	182.815.800,00	182.815.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.601.400,00	10.601.400,00	10.601.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.298.200,00	106.298.200,00	106.298.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.946.200,00	3.946.200,00	3.946.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.370.000,00	32.370.000,00	32.370.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.069.200,00	407.069.200,00	407.069.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.077.200,00	285.077.200,00	285.077.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.536.040,00	597.536.040,00	597.536.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.165.000,00	97.165.000,00	97.165.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.120.000,00	22.120.000,00	22.120.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.503.540,00	422.503.540,00	422.503.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.947.500,00	8.947.500,00	8.947.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0008						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.469.330.011,00	2.469.330.011,00	2.468.970.011,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	971.126.580,00	971.126.580,00	970.846.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	971.126.580,00	971.126.580,00	970.846.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	480.023.040,00	480.023.040,00	479.913.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	491.103.540,00	491.103.540,00	490.933.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.498.203.431,00	1.498.203.431,00	1.498.123.431,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.792.700,00	208.792.700,00	208.712.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.276.900,00	108.276.900,00	108.276.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.999.300,00	7.999.300,00	7.999.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.620.000,00	59.620.000,00	59.540.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.992.000,00	381.992.000,00	381.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.418.731,00	907.418.731,00	907.418.731,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.924.000,00	136.924.000,00	136.924.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	697.141.131,00	697.141.131,00	697.141.131,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.693.600,00	18.693.600,00	18.693.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0009						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	2.164.632.912,00	2.164.632.912,00	2.164.632.912,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.023.459.220,00	1.023.459.220,00	1.023.459.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.023.459.220,00	1.023.459.220,00	1.023.459.220,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	510.685.680,00	510.685.680,00	510.685.680,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	512.773.540,00	512.773.540,00	512.773.540,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.141.173.692,00	1.141.173.692,00	1.141.173.692,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.464.100,00	188.464.100,00	188.464.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.062.800,00	2.062.800,00	2.062.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.994.500,00	108.994.500,00	108.994.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.499.300,00	5.499.300,00	5.499.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.647.500,00	2.647.500,00	2.647.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.760.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.870.412,00	403.870.412,00	403.870.412,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.878.412,00	236.878.412,00	236.878.412,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.839.180,00	548.839.180,00	548.839.180,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.645.800,00	52.645.800,00	52.645.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.213.740,00	114.213.740,00	114.213.740,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	353.692.840,00	353.692.840,00	353.692.840,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.246.800,00	11.246.800,00	11.246.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.675.017.540,00	49.675.017.540,00	49.180.339.340,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	48.612.922.585,00	48.612.922.585,00	47.984.746.385,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.174.318.680,00	4.174.318.680,00	3.591.087.680,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	974.935.330,00	974.935.330,00	543.039.330,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.386.500,00	10.386.500,00	10.386.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	720.617.200,00	720.617.200,00	288.721.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	101.533.210,00	101.533.210,00	101.533.210,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	142.398.420,00	142.398.420,00	142.398.420,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	381.714.520,00	381.714.520,00	388.514.520,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	82.396.240,00	82.396.240,00	82.396.240,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.205.140,00	125.205.140,00	125.205.140,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	174.113.140,00	174.113.140,00	180.913.140,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2.166.492.390,00	2.166.492.390,00	2.020.467.390,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.943.674.540,00	1.943.674.540,00	1.477.649.540,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	86.455.675,00	86.455.675,00	406.455.675,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	136.362.175,00	136.362.175,00	136.362.175,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	651.176.440,00	651.176.440,00	639.066.440,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	134.131.180,00	134.131.180,00	129.591.180,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	344.360.280,00	344.360.280,00	339.810.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	141.990.280,00	141.990.280,00	141.990.280,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.694.700,00	30.694.700,00	27.674.700,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.438.603.905,00	44.438.603.905,00	44.393.658.705,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.710.600,00	131.710.600,00	119.159.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.200,00	231.200,00	231.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.200,00	231.200,00	231.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.326.200,00	84.326.200,00	83.775.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.672.000,00	41.672.000,00	29.672.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.079.950.985,00	41.079.950.985,00	41.079.950.985,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.079.950.985,00	41.079.950.985,00	41.079.950.985,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.678.000,00	195.678.000,00	180.094.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.678.000,00	195.678.000,00	180.094.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	755.473.500,00	755.473.500,00	692.263.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.440.900,00	158.440.900,00	158.440.900,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.191.000,00	99.191.000,00	99.191.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.695.000,00	8.695.000,00	8.695.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.729.600,00	3.729.600,00	3.729.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.402.000,00	470.402.000,00	407.192.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.850.000,00	52.850.000,00	52.850.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.850.000,00	52.850.000,00	52.850.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.074.020,00	1.188.074.020,00	1.188.074.020,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	960.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.514.020,00	933.514.020,00	933.514.020,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.034.866.800,00	1.034.866.800,00	1.081.266.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	795.807.600,00	795.807.600,00	812.207.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.889.200,00	34.889.200,00	64.889.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.170.000,00	154.170.000,00	154.170.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.062.094.955,00	1.062.094.955,00	1.195.592.955,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.062.094.955,00	1.062.094.955,00	1.195.592.955,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.062.094.955,00	1.062.094.955,00	1.195.592.955,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	337.252.675,00	337.252.675,00	338.484.675,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	467.042.440,00	467.042.440,00	599.308.440,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	257.799.840,00	257.799.840,00	257.799.840,00
5.03.5.04.0.00.02.0001						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.183.313.780,00	1.183.313.780,00	1.677.999.380,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03				KEPEGAWAIAN	1.183.313.780,00	1.183.313.780,00	1.677.999.380,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	751.912.600,00	751.912.600,00	1.246.598.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	751.912.600,00	751.912.600,00	1.246.598.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	751.912.600,00	751.912.600,00	1.246.598.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	431.401.180,00	431.401.180,00	431.401.180,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.981.200,00	51.981.200,00	51.981.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.815.200,00	11.815.200,00	11.815.200,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.166.000,00	40.166.000,00	40.166.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.537.000,00	25.537.000,00	25.537.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.537.000,00	25.537.000,00	25.537.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.774.980,00	263.774.980,00	263.774.980,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.774.980,00	263.774.980,00	263.774.980,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.108.000,00	90.108.000,00	90.108.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.218.000,00	78.218.000,00	78.218.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.890.000,00	11.890.000,00	11.890.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002						UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	21.949.700.000,00	21.949.700.000,00	26.892.305.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	21.949.700.000,00	21.949.700.000,00	26.892.305.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.949.700.000,00	21.949.700.000,00	26.892.305.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.592.609.493,00	13.592.609.493,00	13.512.120.993,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.592.609.493,00	13.592.609.493,00	13.512.120.993,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.235.588.500,00	3.235.588.500,00	3.155.100.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	978.982.600,00	978.982.600,00	928.982.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	458.149.000,00	458.149.000,00	408.149.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	520.833.600,00	520.833.600,00	520.833.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.795.821.800,00	1.795.821.800,00	1.721.959.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	669.861.800,00	669.861.800,00	595.999.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	967.165.000,00	967.165.000,00	967.165.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	84.522.000,00	84.522.000,00	84.522.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	74.273.000,00	74.273.000,00	74.273.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	460.784.100,00	460.784.100,00	504.157.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	142.988.900,00	142.988.900,00	142.988.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	89.855.900,00	89.855.900,00	133.229.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	227.939.300,00	227.939.300,00	227.939.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.357.020.993,00	10.357.020.993,00	10.357.020.993,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.189.133.077,00	9.189.133.077,00	9.189.133.077,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.189.133.077,00	9.189.133.077,00	9.189.133.077,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.782.000,00	189.782.000,00	189.782.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.782.000,00	189.782.000,00	189.782.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	826.105.916,00	826.105.916,00	826.105.916,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	826.105.916,00	826.105.916,00	826.105.916,00
5.05.0.00.0.00.02.00						Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.756.788.720,00	2.756.788.720,00	2.830.299.920,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	293.462.300,00	293.462.300,00	373.065.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	293.462.300,00	293.462.300,00	373.065.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	244.299.900,00	244.299.900,00	244.299.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	49.162.400,00	49.162.400,00	128.765.400,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.463.326.420,00	2.463.326.420,00	2.457.234.620,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.270.900,00	46.270.900,00	46.270.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.259.000,00	35.259.000,00	35.259.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.011.900,00	11.011.900,00	11.011.900,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.537.600,00	367.537.600,00	367.537.600,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.951.000,00	21.951.000,00	21.951.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.912.300,00	198.912.300,00	198.912.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.494.000,00	107.494.000,00	107.494.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.180.300,00	24.180.300,00	24.180.300,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.005.200,00	23.005.200,00	16.915.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.005.200,00	23.005.200,00	16.915.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.820.180,00	327.820.180,00	327.818.580,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.820.180,00	324.820.180,00	324.818.580,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.698.692.540,00	1.698.692.540,00	1.698.692.540,00
5.05.0.00.0.00.02.00	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.698.692.540,00	1.698.692.540,00	1.698.692.540,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	9.221.070.291,00	9.221.070.291,00	9.418.731.291,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.221.070.291,00	9.221.070.291,00	9.418.731.291,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.118.009.760,00	3.118.009.760,00	3.118.009.760,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.118.009.760,00	3.118.009.760,00	3.118.009.760,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.400,00	45.569.400,00	45.569.400,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	247.416.472,00	247.416.472,00	247.416.472,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.825.023.888,00	2.825.023.888,00	2.825.023.888,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.103.060.531,00	6.103.060.531,00	6.300.721.531,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.857.200,00	4.857.200,00	4.857.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.857.200,00	4.857.200,00	4.857.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.822.072.547,00	2.822.072.547,00	2.822.072.547,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.072.547,00	2.822.072.547,00	2.822.072.547,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.894.000,00	228.894.000,00	228.894.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600,00	9.999.600,00	9.999.600,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.800,00	49.996.800,00	49.996.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.317.600,00	7.317.600,00	7.317.600,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.580.000,00	76.580.000,00	76.580.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.478.800,00	308.478.800,00	506.139.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308.478.800,00	308.478.800,00	506.139.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.690.136,00	1.210.690.136,00	1.210.690.136,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.690.136,00	920.690.136,00	920.690.136,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.067.848,00	1.528.067.848,00	1.528.067.848,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.069.874.376,00	1.069.874.376,00	1.069.874.376,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.700.000,00	349.700.000,00	349.700.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.493.472,00	108.493.472,00	108.493.472,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	37.143.020.890,00	37.143.020.890,00	37.022.649.590,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	37.143.020.890,00	37.143.020.890,00	37.022.649.590,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	37.143.020.890,00	37.143.020.890,00	37.022.649.590,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.331.266.160,00	4.331.266.160,00	4.331.259.160,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.971.471.860,00	2.971.471.860,00	2.971.471.860,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	425.059.880,00	425.059.880,00	425.059.880,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.232.480,00	250.232.480,00	250.232.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	199.994.100,00	199.994.100,00	199.994.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	300.115.840,00	300.115.840,00	300.115.840,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	900.080.880,00	900.080.880,00	900.080.880,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	406.278.200,00	406.278.200,00	406.278.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	489.710.480,00	489.710.480,00	489.710.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.794.300,00	1.359.794.300,00	1.359.787.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	145.732.480,00	145.732.480,00	145.732.480,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.214.061.820,00	1.214.061.820,00	1.214.054.820,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.832.583.080,00	3.832.583.080,00	3.832.575.880,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.142.614.260,00	2.142.614.260,00	2.142.614.260,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	545.006.420,00	545.006.420,00	545.006.420,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.597.607.840,00	1.597.607.840,00	1.597.607.840,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.689.968.820,00	1.689.968.820,00	1.689.961.620,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	550.282.120,00	550.282.120,00	550.275.120,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	299.961.500,00	299.961.500,00	299.961.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	700.000.000,00	700.000.000,00	699.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	139.725.200,00	139.725.200,00	139.725.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.979.171.650,00	28.979.171.650,00	28.858.814.550,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	111.229.500,00	111.229.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.962.400,00	67.962.400,00	67.962.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.267.100,00	43.267.100,00	43.267.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.531.187.910,00	22.531.187.910,00	22.531.187.910,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.531.187.910,00	22.531.187.910,00	22.531.187.910,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.782.000,00	1.481.782.000,00	1.481.577.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.700,00	49.998.700,00	49.998.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.418.700,00	114.418.700,00	114.418.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.917.200,00	216.917.200,00	216.917.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.644.000,00	25.644.000,00	25.644.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.114.400,00	44.114.400,00	44.114.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.980.000,00	79.980.000,00	79.990.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.709.000,00	950.709.000,00	950.494.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.529.944.400,00	1.529.944.400,00	1.409.792.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.529.944.400,00	1.529.944.400,00	1.409.792.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	586.432.640,00	586.432.640,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.332.640,00	306.332.640,00	306.332.640,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.738.595.200,00	2.738.595.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.979.659.260,00	1.979.659.260,00	1.979.659.260,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	558.664.280,00	558.664.280,00	558.664.280,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.271.660,00	200.271.660,00	200.271.660,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.287.183.359,00	199.287.183.359,00	199.287.182.859,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	199.287.183.359,00	199.287.183.359,00	199.287.182.859,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	199.287.183.359,00	199.287.183.359,00	199.287.182.859,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.320.805.120,00	4.320.805.120,00	4.320.805.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.320.805.120,00	4.320.805.120,00	4.320.805.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	741.921.620,00	741.921.620,00	741.921.620,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	3.578.883.500,00	3.578.883.500,00	3.578.883.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	180.789.855.552,00	180.789.855.552,00	180.789.855.052,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	180.789.855.552,00	180.789.855.552,00	180.789.855.052,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180.789.855.552,00	180.789.855.552,00	180.789.855.052,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	218.457.000,00	218.457.000,00	218.457.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	218.457.000,00	218.457.000,00	218.457.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	218.457.000,00	218.457.000,00	218.457.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	553.056.560,00	553.056.560,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	553.056.560,00	553.056.560,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	553.056.560,00	553.056.560,00	553.056.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.351.818.520,00	2.351.818.520,00	2.351.818.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.351.818.520,00	2.351.818.520,00	2.351.818.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.364.464.520,00	1.364.464.520,00	1.364.464.520,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	987.354.000,00	987.354.000,00	987.354.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.053.190.607,00	11.053.190.607,00	11.053.190.607,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.207.800,00	49.207.800,00	49.207.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.212.800,00	34.212.800,00	34.212.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.995.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.348.401.423,00	8.348.401.423,00	8.348.401.423,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.348.401.423,00	8.348.401.423,00	8.348.401.423,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.724.000,00	455.724.000,00	455.724.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.100,00	14.989.100,00	14.989.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.585.000,00	108.585.000,00	108.585.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.623.800,00	34.623.800,00	34.623.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.996.100,00	4.996.100,00	4.996.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.530.000,00	217.530.000,00	217.530.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.643.800,00	125.643.800,00	125.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.643.800,00	125.643.800,00	125.643.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.803.584,00	1.042.803.584,00	1.042.803.584,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.500.000,00	128.500.000,00	128.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	907.343.584,00	907.343.584,00	907.343.584,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.031.410.000,00	1.031.410.000,00	1.031.410.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	836.280.000,00	836.280.000,00	836.280.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.640.000,00	25.640.000,00	25.640.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00
						TOTAL	**7.776.455.626.067,00**	**7.776.455.626.067,00**	**7.795.681.730.804,00**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.589.325.900,00	0,00	612.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.111.900,00	0,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.149.306.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.306.912,00	0,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114.700,00	0,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404.300,00	0,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267.800,00	0,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	99.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.556.000,00	0,00
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	32.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999.400,00	0,00
8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710.800,00	0,00
9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	275.346.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.346.020,00	0,00
10	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.481.641.480,00	0,00	1.383.383.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.024.780,00	0,00
11	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	320.771.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.771.180,00	0,00
12	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	436.740.470,00	0,00	427.489.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.229.820,00	0,00
13	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	467.630.260,00	0,00	176.827.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.458.170,00	0,00
14	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	725.508.960,00	0,00	605.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.927.460,00	0,00
15	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	274.884.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.884.180,00	0,00
16	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	246.339.366,00	0,00	79.295.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.635.216,00	0,00
17	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	UPTD Pengelolaan Sampah	4.132.670.988,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.670.988,00	0,00
18	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah	520.237.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.237.740,00	0,00
19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	1.030.885.900,00	0,00	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.885.900,00	0,00
20	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	952.215.854,00	0,00	553.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.871.454,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
21	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	400.282.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.282.040,00	0,00
22	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
23	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
24	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.650.442.960,00	0,00	114.593.461.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.243.904.130,00	0,00
25	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.404.121.720,00	0,00	50.442.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454.563.820,00	0,00
26	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.429.339.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.339.360,00	0,00
27	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	469.557.380,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.057.380,00	0,00
28	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	441.297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.297.200,00	0,00
29	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.906.200,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.906.200,00	0,00
33	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.515.492.680,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515.492.680,00	0,00
34	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.898.856.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.856.580,00	0,00
35	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	503.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.067.600,00	0,00
36	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	248.681.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.681.272,00	0,00
37	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	520.445.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.445.240,00	0,00
38	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.370.039.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.039.964,00	0,00
39	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.539.986.476,00	0,00	180.535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.522.076,00	0,00
40	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	104.890.000,00	0,00	4.500.005.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.895.236,00	0,00
41	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.387.555.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.555.620,00	0,00
42	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	0,00
43	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003.500,00	0,00
44	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	271.047.840,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.047.840,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
45	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan	272.437.140,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.437.140,00	0,00
46	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	2.797.416.190,00	0,00	562.096.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.512.890,00	0,00
47	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	888.417.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.417.060,00	0,00
48	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	885.317.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.317.240,00	0,00
49	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	844.550.240,00	0,00	33.170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.720.540,00	0,00
50	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	UPTD Pengelolaan Air Minum	27.429.877.464,00	0,00	1.626.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055.977.464,00	0,00
52	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	139.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.567.000,00	0,00
53	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	516.902.800,00	0,00	86.709.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.612.500,00	0,00
54	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlengkapan Jalan	149.362.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.362.440,00	0,00
55	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Perlengkapan Jalan	1.115.295.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.295.070,00	0,00
56	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	302.874.792,00	0,00	76.088.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.963.092,00	0,00
57	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.002.454.340,00	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.454.340,00	0,00
58	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	490.921.080,00	0,00	59.856.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.777.980,00	0,00
59	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	7.346.483.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.483.472,00	0,00
60	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pendapatan Daerah	37.912.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912.700,00	0,00
61	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	219.328.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.328.560,00	0,00
62	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.271.343.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.343.020,00	0,00
68	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.853.072.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.072.240,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
69	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.543.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.543.320,00	0,00
70	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.039.023.180,00	0,00	614.788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.811.580,00	0,00
71	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00	0,00
73	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	272.598.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.598.080,00	0,00
74	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.607.890.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607.890.300,00	0,00
75	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	322.387.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.387.120,00	0,00
76	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	0,00
77	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.573.647.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.647.880,00	0,00
78	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.783.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.783.980,00	0,00
79	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.507.850.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.850.700,00	0,00
80	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	547.694.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.694.020,00	0,00
81	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.996.192.920,00	0,00	28.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.630.220,00	0,00
82	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.346.238.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.238.120,00	0,00
83	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.000.370.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.370.480,00	0,00
84	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	550.912.168,00	0,00	2.527.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.145.168,00	0,00
85	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.158.793.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.793.160,00	0,00
86	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	906.593.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.593.356,00	0,00
87	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.240.390.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.390.545,00	0,00
88	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	333.819.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.819.060,00	0,00
89	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	743.282.880,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.282.880,00	0,00
90	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
91	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.219.955.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.955.940,00	0,00
92	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	630.274.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.274.170,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
93	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	607.072.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.072.190,00	0,00
94	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	UPTD Rumah Kreatif	827.213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.213.900,00	0,00
95	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.284.365.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.365.100,00	0,00
96	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.089.606.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.606.560,00	0,00
97	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.058.029.832,00	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.143.229.832,00	0,00
98	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.601.386.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.386.460,00	0,00
100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
102	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.267.801.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.801.680,00	0,00
103	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.223.268.404,00	0,00	2.859.507.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.775.902,00	0,00
104	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.481.719.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.719.140,00	0,00
105	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	293.462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.462.300,00	0,00
106	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.051.958.656,00	0,00	520.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.963.856,00	0,00
107	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Biro Organisasi	37.682.140,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.682.140,00	0,00
108	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	387.682.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.682.140,00	0,00
109	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.856.031.340,00	0,00	388.707.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.738.440,00	0,00
111	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Umum dan Protokol	30.223.352.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.223.352.802,00	0,00
112	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	427.237.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.237.620,00	0,00
113	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	483.824.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.824.320,00	0,00
114	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.186.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.186.420,00	0,00
115	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.084.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.084.280,00	0,00
116	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
117	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.134.306.080,00	0,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.382.080,00	0,00
118	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.448.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.448.560,00	0,00
119	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sekretariat Daerah	305.714.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.714.600,00	0,00
120	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat Daerah	247.336.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.336.742,00	0,00
121	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	115.814.229.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.814.229.778,00	0,00
122	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat DPRD	18.836.489.000,00	0,00	5.780.798.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.617.287.200,00	0,00
123	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.359.832.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.832.000,00	0,00
126	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	701.912.600,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.912.600,00	0,00
127	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	405.864.180,00	0,00	25.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.401.180,00	0,00
128	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	108.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.216.000,00	0,00
129	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	32.263.655.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263.655.736,00	0,00
130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	521.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.103.400,00	0,00
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	247.810.728.040,00	0,00	18.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.829.565.040,00	0,00
132	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	149.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.730.000,00	0,00
133	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	33.141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.141.400,00	0,00
134	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	44.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997.600,00	0,00
135	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	0,00
136	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	169.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.431.000,00	0,00
137	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00
138	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.339.891.423,00	0,00	89.050.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.942.223,00	0,00
139	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
140	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.121.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.121.540,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
141	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	74.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.981.000,00	0,00
142	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	105.685.860.330,00	0,00	152.238.607.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.924.467.759,00	0,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.463.282.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.282.800,00	0,00
144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.123.381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.381.600,00	0,00
145	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
146	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.851.317.670,00	0,00	1.079.586.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930.903.928,00	0,00
147	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	166.928.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.928.560,00	0,00
148	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	55.523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.523.800,00	0,00
149	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830.000,00	0,00
150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	264.416.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.416.700,00	0,00
151	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25.825.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825.700,00	0,00
152	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	0,00
153	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	267.258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.258.400,00	0,00
154	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203.500,00	0,00
155	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.288.053.800,00	0,00	3.536.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.873.400,00	0,00
156	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	18.569.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569.500,00	0,00
157	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.000,00	0,00
158	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	119.980.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.980.100,00	0,00
159	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.649.015.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.015.100,00	0,00
160	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Bali Mandara	0,00	0,00	29.732.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732.070.000,00	0,00
161	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Bali Mandara	194.352.159.596,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.352.159.596,00	0,00
162	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Jiwa	0,00	0,00	1.425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00	0,00
163	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Jiwa	24.618.056.902,00	0,00	996.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614.110.402,00	0,00
164	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	0,00	4.425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
165	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	71.874.000.000,00	0,00	8.126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000.000,00	0,00
166	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	203.180.000,00	0,00	568.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.500.000,00	0,00
167	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	558.477.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.477.776,00	0,00
168	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	5.803.377.106,00	0,00	1.178.535.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.912.550,00	0,00
169	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	2.545.651.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.651.820,00	0,00
170	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	336.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.350.000,00	0,00
171	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	679.701.765,00	0,00	16.057.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.759.465,00	0,00
172	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00
173	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	3.622.477.920,00	0,00	231.475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.953.720,00	0,00
174	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	76.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049.700,00	0,00
175	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	101.569.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.569.200,00	0,00
176	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	660.856.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.856.360,00	0,00
177	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.261.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.234.000,00	0,00
178	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	858.838.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.838.600,00	0,00
179	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	189.196.900,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.196.900,00	0,00
180	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.435.865.260,00	0,00	11.974.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.840.160,00	0,00
181	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	512.421.700,00	0,00	88.241.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.662.800,00	0,00
182	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	0,00
183	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelayanan Sosial	2.280.708.420,00	0,00	3.069.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.158.420,00	0,00
184	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	UPTD Pelayanan Sosial	1.556.298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.298.500,00	0,00
185	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	215.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.311.500,00	0,00
186	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	426.814.200,00	0,00	878.088.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.903.000,00	0,00
187	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	3.983.031.540,00	0,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.031.540,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
189	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	569.557.660,00	0,00	19.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.609.660,00	0,00
190	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	73.519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.519.900,00	0,00
191	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	0,00
192	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	545.556.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.556.320,00	0,00
193	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	47.497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.497.400,00	0,00
194	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	55.664.821.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.664.821.760,00	0,00
195	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	252.121.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.121.840,00	0,00
196	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kebudayaan	25.028.353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.028.353.300,00	0,00
197	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	466.839.138.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.839.138.896,00	0,00
198	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	3.112.534.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.534.300,00	0,00
199	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
200	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	643.263.640,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.263.640,00	0,00
201	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Museum Bali	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
202	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Museum Bali	2.305.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.129.700,00	0,00
203	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	UPTD Taman Budaya	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
204	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Budaya	3.568.542.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.542.620,00	0,00
			TOTAL	**1.846.087.258.493,00**	**0,00**	**372.233.332.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218.320.591.038,00**	**0,00**

P.J. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e	1					4			**5**
Golongan IV/d		8				19			**27**
Golongan IV/c		19	1			170			**190**
Golongan IV/b		8	116			1.311	3		**1.438**
Golongan IV/a			74	71		1.324	37		**1.506**
JUMLAH GOLONGAN IV	**1**	**35**	**191**	**71**	**0**	**2.828**	**40**	**0**	**3.166**
Golongan III/e									**0**
Golongan III/d			11	129		1.201	394		**1.735**
Golongan III/c				27		714	328		**1.069**
Golongan III/b						584	659		**1.243**
Golongan III/a						492	818		**1.310**
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**11**	**156**	**0**	**2.991**	**2.199**	**0**	**5.357**
Golongan II/e									**0**
Golongan II/d						153	451		**604**
Golongan II/c						57	385		**442**
Golongan II/b							185		**185**
Golongan II/a							12		**12**
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**	**1.033**	**0**	**1.243**
Golongan I/e									**0**
Golongan I/d							26		**26**
Golongan I/c							2		**2**

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan I/b							7		**7**
Golongan I/a									**0**
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**35**
Golongan IX								920	**920**
JUMLAH GOLONGAN IX	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920**	**920**
Golongan VIII								1	1
JUMLAH GOLONGAN VIII	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL	**1**	**35**	**202**	**227**	**0**	**6.029**	**3.307**	**921**	**10.722**

Pj. GUBERNUR BALI

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021	Perkiraan Penambahan Tahun 2022	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2022	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		**27.168.286.627,00**	**29.508.677.523,00**	**26.562.107.027,00**	**30.114.857.123,00**
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		302.995.700,00	-	79.311.600,00	223.684.100,00
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		439.530.500,00	-	57.035.000,00	382.495.500,00
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		26.173.418.555,00	29.246.503.267,00	26.173.418.555,00	29.246.503.267,00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan		252.341.872,00	262.174.256,00	252.341.872,00	262.174.256,00
	e. Piutang Pajak Rokok		-	-		-
2	Piutang Retribusi		153.220.000,00	150.840.000,00	68.012.000,00	236.048.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		951.680.759,70	-	-	951.680.759,70
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		65.293.716.530,16	53.840.040.614,00	31.683.528.023,00	87.450.229.121,16
5	Piutang Lainnya		5.131.107.671,82	88.746.671.213,00	1.305.503.035,82	92.572.275.849,00
Jumlah			**98.698.011.588,68**	**172.246.229.350,00**	**59.619.150.085,82**	**211.325.090.852,86**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2004	PT. BPD Bali	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp644.912.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp0,00	Rp644.912.000.000,00	Rp0,00	Rp195.334.517.043,00		
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp142.000.000.000,00	Rp135.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp142.000.000.000,00	Rp0,00	Rp1.417.175.401,00		
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	• Peraturan Dasrah Propinsi, Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp5.282.769.658,00	Rp5.282.769.658,00	Rp0,00	Rp5.282.769.658,00	Rp0,00	Rp0,00		

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
4	2003	PT. Puri Raharja	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp618.255.179,00		
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp232.975.188,00		
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00		
Jumlah					**Rp902.080.769.658,00**	**Rp895.080.769.658,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp902.080.769.658,00**	**Rp0,00**	**Rp197.602.922.811,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

PJ. GUBERNUR BALI,

S.M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2021	Perkiraan Penambahan Tahun 2022	Perkiraan Pengurangan Tahun 2022	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	45.844.960.627,45	6.941.324.798,04	2.762.464.812,00	50.023.820.613,49
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	207.928.119.999,00	-	-	207.928.119.999,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	7.036.713.791,61	-	-	7.036.713.791,61
Jumlah			**260.809.794.418,06**	**6.941.324.798,04**	**2.762.464.812,00**	**264.988.654.404,10**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIV

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN YANG DIRENCANAKAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendanai kegiatan Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Perda Nomor…Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024	250.000.000.000,00	-	250.000.000.000,00	-	250.000.000.000,00	0,00
Jumlah			**250.000.000.000,00**	**-**	**250.000.000.000,00**	**-**	**250.000.000.000,00**	**0,00**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. SMI	PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020	2021	1.450.000.000.000	10	0%	Pembangunan Pusat Kesenian Bali	248.917.013.352	0%	1.055.294.920.719	0%
2	PT. Bank BPD Bali	PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah	2024	842.859.224.444	5	0%	Mendanai program kegiatan prioritas	0	0%	842.859.224.444	0%
Jumlah				**2.292.859.224.444**				**248.917.013.352**		**1.898.154.145.163**	

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA